

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI 2021 – 2026



HERMUS INDOU, S.IP.,MH
BUPATI MANOKWARI



Drs. EDI BUDOYO
WAKIL BUPATI MANOKWARI



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI nomor 1114 Tahun 2019);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Manokwari Tahun 2006-2025;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari 2013 – 2033;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI
dan
BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan

mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2005-2025.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Manokwari untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Capaian kinerja tahunan adalah capaian target kinerja yang terealisasi setiap tahunnya.

19. Capaian kinerja akhir RPJMD adalah akumulasi capaian target kinerja tahunan yang terealisasi sampai dengan masa akhir RPJMD.
20. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembanguana Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pasal 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. BAB IX : Penutup.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026; dan
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian kinerja tahunan tetapi tidak merubah target kinerja akhir RPJMD maka perubahan target dimaksud ditetapkan dalam RKPD.
- (4) Untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan konsistensi pelaksanaan perencanaan serta pencapaian target akhir RPJMD, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus mengenai pagu indikatif RPJMD, memperhatikan ambang batas penyesuaian tidak melebihi atau kurang dari 15% (lima belas persen) dari besaran pagu masing-masing organisasi perangkat daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal RPJMD Tahun 2026-2030 belum tersusun, maka penyusunan RKPD pada tahun 2027 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Papua Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 Desember
2021

BUPATI MANOKWARI,

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

HENRI SEMBIRING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA
BARAT NOMOR : (10/69/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Dengan sedemikian besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah dan konsekuensi penerapan desentralisasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan. Dengan demikian, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang sinergik. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tanggal 19 Desember 2020. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah.

Dalam penyusunan RPJMD ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang RPJPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (4)

Ambang batas penyesuaian pagu indikatif adalah batas maksimal dan batas minimal pagu indikatif masing-masing perangkat daerah.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas



KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Substansi Rancangan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 ini adalah penjabaran Visi, Misi, Janji-janji Kampanye, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Manokwari selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan kondisi daerah, keuangan daerah, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pembangunan kewilayahan.

Tim penyusun menyadari bahwa Rancangan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 ini masih memiliki kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi terwujudnya RPJMD yang lebih baik.

Akhir kata terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Rancangan RPJMD ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan semoga mendatangkan manfaat.

Manokwari, Desember 2021

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	7
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	10
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Manokwari dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Papua Barat serta RPJMD Tahap IV pada RPJPD Tahun 2006-2025.....	11
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Manokwari dengan RTRW Kabupaten Manokwari.....	14
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Manokwari dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Manokwari.....	14
1.4 Maksud dan Tujuan.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	18
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	18
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	18
2.1.2 Kondisi Demografi.....	33
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	36
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	36
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	42
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	45
2.3.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	45
2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	48
2.3.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	59
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	62
2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	62
2.4.2 Tingkat Kesempatan Kerja.....	63
2.4.3 Rasio Ketergantungan.....	63
2.4.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	64
2.4.5 Indeks Reformasi Birokrasi.....	65
2.4.6 Indeks Rasio Bencana Daerah.....	65
2.5 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).....	66
2.6 Kerja Sama Daerah.....	121
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	122
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	122
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	123
3.1.2 Neraca Daerah.....	140
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	144



3.2.1 Kebijakan Pendapatan	144
3.2.2 Kebijakan Belanja.....	145
3.2.3 Kebijakan Transfer	146
3.2.4 Kebijakan Pembiayaan.....	146
3.2.5 Proporsi Penggunaan Anggaran	146
3.2.6 Analisis Pembiayaan Daerah	152
3.3 Kerangka Pendanaan	154
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	154
3.3.2 Perhitungan kerangka Pendanaan.....	159
3.3.3 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya	165
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	168
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	168
4.1.1 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari Yang Religius.....	170
4.1.2 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari yang Maju dan Cerdas	171
4.1.3 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari yang Mandiri.....	171
4.1.4 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari yang Adil	172
4.1.5 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari yang Sejahtera	173
4.2 Isu Strategis	174
4.2.1 Isu Internasional.....	174
4.2.2 Isu atau Kebijakan Nasional.....	179
4.2.3 Isu atau Kebijakan Regional.....	180
4.2.4 Isu-Isu Strategis Kabupaten Manokwari	203
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	214
5.1 Visi	214
5.2 Misi	216
5.3 Tujuan dan Sasaran	218
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	224
6.1 Strategi.....	224
6.2 Arah Kebijakan	244
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	306
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	339
BAB IX P E N U T U P	346
9.1 Pedoman Transisi.....	346
9.2 Kaidah Pelaksanaan.....	347



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Kabupaten Manokwari.....	18
Tabel 2. 2	Topografi Wilayah Kabupaten Manokwari	19
Tabel 2. 3	Potensi Bahan Galian dan Wilayah Sebarannya.....	21
Tabel 2. 4	Ketersediaan Sumberdaya Air di Manokwari	23
Tabel 2. 5	Penggunaan Lahan Kabupaten Manokwari	24
Tabel 2. 6	Risiko Bencana Kabupaten Manokwari	26
Tabel 2. 7	Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kabupaten Manokwari	30
Tabel 2. 8	Demografi Kabupaten Manokwari Tahun 2015 - 2020	33
Tabel 2. 9	Sebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Manokwari Menurut Jenis Kelamin, Kepadatan, Seks Rasio dan Rumah Tangga Tahun 2020.....	34
Tabel 2. 10	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Manokwari Tahun 2020	35
Tabel 2. 11	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016- 2020 (juta rupiah).....	37
Tabel 2. 12	Laju Pertumbuhan PDRB (persen) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016- 2020	38
Tabel 2. 13	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020	45
Tabel 2. 14	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	46
Tabel 2. 15	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	47
Tabel 2. 16	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	47
Tabel 2. 17	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48
Tabel 2. 18	Capaian Kinerja Urusan Sosial.....	48
Tabel 2. 19	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan	49
Tabel 2. 20	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49
Tabel 2. 21	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan	49
Tabel 2. 22	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	50
Tabel 2. 23	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.....	50
Tabel 2. 24	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	51
Tabel 2. 25	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	51
Tabel 2. 26	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	52
Tabel 2. 27	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	52
Tabel 2. 28	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	52
Tabel 2. 29	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	53
Tabel 2. 30	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal.....	53
Tabel 2. 31	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	54
Tabel 2. 32	Capaian Kinerja Urusan Statistik.....	54
Tabel 2. 33	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	54
Tabel 2. 34	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.....	55
Tabel 2. 35	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan.....	55
Tabel 2. 36	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	56
Tabel 2. 37	Capaian Kinerja Urusan Pertanian.....	56



Tabel 2. 38	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral.....	56
Tabel 2. 39	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan.....	57
Tabel 2. 40	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	58
Tabel 2. 41	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi	58
Tabel 2. 42	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan.....	58
Tabel 2. 43	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan	59
Tabel 2. 44	Capaian Kinerja Urusan Keuangan	60
Tabel 2. 45	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian	60
Tabel 2. 46	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan	61
Tabel 2. 47	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	61
Tabel 2. 48	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.....	65
Tabel 2. 49	Analisis Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari.....	68
Tabel 3. 1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016 – 2020	125
Tabel 3. 2	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020	128
Tabel 3. 3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016 – 2020.....	135
Tabel 3. 4	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016 – 2020.....	139
Tabel 3. 5	Neraca Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020.....	141
Tabel 3. 6	Analisa Rasio Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020	142
Tabel 3. 7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Manokwari	148
Tabel 3. 8	Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020	149
Tabel 3. 9	Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020	150
Tabel 3. 10	Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020	151
Tabel 3. 11	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020.....	152
Tabel 3. 12	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020	153
Tabel 3. 13	Proporsi Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020	153
Tabel 3. 14	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026	157
Tabel 3. 15	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026	159
Tabel 3. 16	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Riil Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026	159
Tabel 3. 17	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026	160
Tabel 3. 18	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020.....	162



Tabel 3. 19	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020.....	164
Tabel 4. 1	Keterkaitan masalah toleransi umat beragama dan kondutivitas wilayah dengan permasalahan daerah dan permasalahan Renstra OPD	171
Tabel 4. 2	Keterkaitan masalah utama mencerdaskan masyarakat dengan permasalahan daerah dan permasalahan Renstra OPD.....	171
Tabel 4. 3	Pemetaan masalah utama pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dengan permasalahan daerah dan permasalahan Renstra OPD	172
Tabel 4. 4	Pemetaan masalah utama pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dengan permasalahan daerah dan permasalahan Renstra OPD	172
Tabel 4. 5	Pemetaan masalah utama pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan permasalahan daerah dan permasalahan Renstra OPD	173
Tabel 4. 6	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2025.....	191
Tabel 4. 7	Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Manokwari, Isu Internasional, Isu Nasional dan KLHS RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2025.....	211
Tabel 5. 1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026.....	220
Tabel 5. 2	Rumusan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2025.....	221
Tabel 6. 1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021 – 2026.	245
Tabel 6. 2	Keterkaitan Misi dengan Strategi dan Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021 - 2026	255
Tabel 6. 3	Keterkaitan Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Tahunan RPJMD berdasarkan OPD Pelaksana Tahun 2021 - 2026	259
Tabel 6. 4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Tahunan RPJMD berdasarkan OPD Pelaksana Tahun 2021 – 2026 (dalam juta rupiah)	264
Tabel 7. 1	Kerangka Pendanaan OPD pada RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 (Dalam juta rupiah)	308



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Sumber Air Bersih yang Digunakan Masyarakat Kabupaten Manokwari	29
Grafik 2. 2	Potensi Timbulan Sampah Tahun 2018 di Kabupaten Manokwari	32
Grafik 2. 3	Komposisi Sampah Domestik Tahun 2018 di Kabupaten Manokwari (%)	32
Grafik 2. 4	Penanganan Sampah di Kabupaten Manokwari (Ton/Hari)	33
Grafik 2. 5	Perkembangan PDRB Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020	36
Grafik 2. 6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020	38
Grafik 2. 7	PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020	39
Grafik 2. 8	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manokwari Tahun 2015 – 2020	40
Grafik 2. 9	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Manokwari Tahun 2015 – 2020	41
Grafik 2. 10	Perkembangan Indeks Gini Tahun 2016 – 2020	41
Grafik 2. 11	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manokwari Tahun 2015 - 2020	42
Grafik 2. 12	Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Manokwari Tahun 2015 - 2020	43
Grafik 2. 13	Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020	44
Grafik 2. 14	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020	44
Grafik 2. 15	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Manokwari (juta).	62
Grafik 2. 16	Tingkat kesempatan Kerja Kabupaten Manokwari	63
Grafik 2. 17	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Manokwari	64
Grafik 2. 18	Rasio Risiko Bencana Daerah Kabupaten Manokwari	66
Grafik 2. 19	Persentase Capaian Keseluruhan Indikator TPB Kabupaten Manokwari Terhadap Target Nasional	105
Grafik 3. 1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016-2020	124
Grafik 3. 2	Proporsi Komposisi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari TA. 2016-2020	127
Grafik 3. 3	Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari TA. 2016- 2020	128
Grafik 3. 4	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020	129
Grafik 3. 5	Target dan Realisasi kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari TA. 2016-2020	130
Grafik 3. 6	Realisasi Komponen Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari TA. 2016-2020	130
Grafik 3. 7	Target dan Realisasi kinerja Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Manokwari TA. 2016-2020	131
Grafik 3. 8	Realisasi Komponen Sumber Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Manokwari TA. 2016-2020	132
Grafik 3. 9	Target dan Realisasi kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Manokwari TA. 2016-2020	133
Grafik 3. 10	Realisasi Komponen Sumber Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA. 2016-2020	133



Grafik 3. 11	Persentase Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020.....	134
Grafik 3. 12	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2016-2020.....	136
Grafik 3. 13	Target dan Realisasi Transfer Daerah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2016-2020.....	137
Grafik 3. 14	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016-2020	140
Grafik 3. 15	proporsi belanja daerah kabupaten Manokwari tahun 2016-2020	147
Grafik 3. 16	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020 Kabupaten Manokwari.....	148
Grafik 3. 17	Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 Kabupaten Manokwari.....	149
Grafik 3. 18	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari 2016-2020	151



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Tahun 2021 – 2026	6
Gambar 1. 2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	11
Gambar 1. 3	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	13
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Manokwari.....	19
Gambar 2. 2	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Manokwari.....	20
Gambar 2. 3	Peta Potensi Bahan Galian di Kabupaten Manokwari.....	21
Gambar 2. 4	Peta Curah Hujan di Kabupaten Manokwari	22
Gambar 2. 5	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Manokwari.....	23
Gambar 2. 6	Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Manokwari.....	25
Gambar 2. 7	Peta Ancaman Gempa Bumi di Kabupaten Manokwari	26
Gambar 2. 8	Peta Ancaman Bencana Tsunami di Kabupaten Manokwari	27
Gambar 2. 9	Peta Ancaman Bencana Banjir di Kabupaten Manokwari.....	27
Gambar 2. 10	Peta Ancaman Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Manokwari	28
Gambar 2. 11	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Manokwari Tahun 2020	34
Gambar 2. 12	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	35
Gambar 4. 1	Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah	169
Gambar 4. 2	Keterkaitan RPJPD dan Masalah Utama.....	170
Gambar 5. 1	Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan RPJMD Kabupaten Manokwari 2021-2026....	219
Gambar 6. 1	Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026.....	225
Gambar 6. 2	Sinkronisasi Kebijakan RPJMD Kabupaten Manokwari dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Papua Barat	227
Gambar 6. 4	Tema Pembangunan dalam Periodisasi RPJMD Kabupaten Manokwari	254



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah perlu melakukan perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun guna memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat mewujudkan tujuan bernegara.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa "**Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia**". Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan



perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 9 Desember 2020 Kabupaten Manokwari melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2024. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan **Hermus Indou, S.IP., MH** dan **Drs. Edi Budoyo** sebagai **Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Periode 2021-2024** yang dilantik pada tanggal 25 Februari 2021. Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, sebagaimana tertuang pada poin 3 (tiga) mengamanatkan daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 memiliki perodesasi RPJMD tahun 2021 hingga 2026.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 dan harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.



Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Manokwari dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin kolaborasi yang intensif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Manokwari menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

RPJMD Kabupaten Manokwari juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi, yaitu:

- a. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial
 - 1) Pendekatan Holistik-Tematik; dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
 - 2) Pendekatan Integratif; dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;



- 3) Pendekatan Spasial/Ruang; dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
- b. Menerapkan kebijakan anggaran belanja *Money Follow Programme*
- c. Menerapkan cara baru penyusunan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026, yaitu:
 - 1) Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix (merangkul Pemerintah, Akademisi, Swasta dan Filantropi, Kelompok Masyarakat, dan Media didalamnya sebagai satu kesatuan);
 - 2) Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, pinjaman daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan obligasi daerah, serta hibah;
 - 3) Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Manokwari merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Manokwari serta hasil konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Rancangan Awal yang telah disempurnakan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Musrenbang RPJMD dilakukan guna menyempurnakan rancangan akhir RPJMD yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah. Tahapan selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD selanjutnya dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang akan



ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

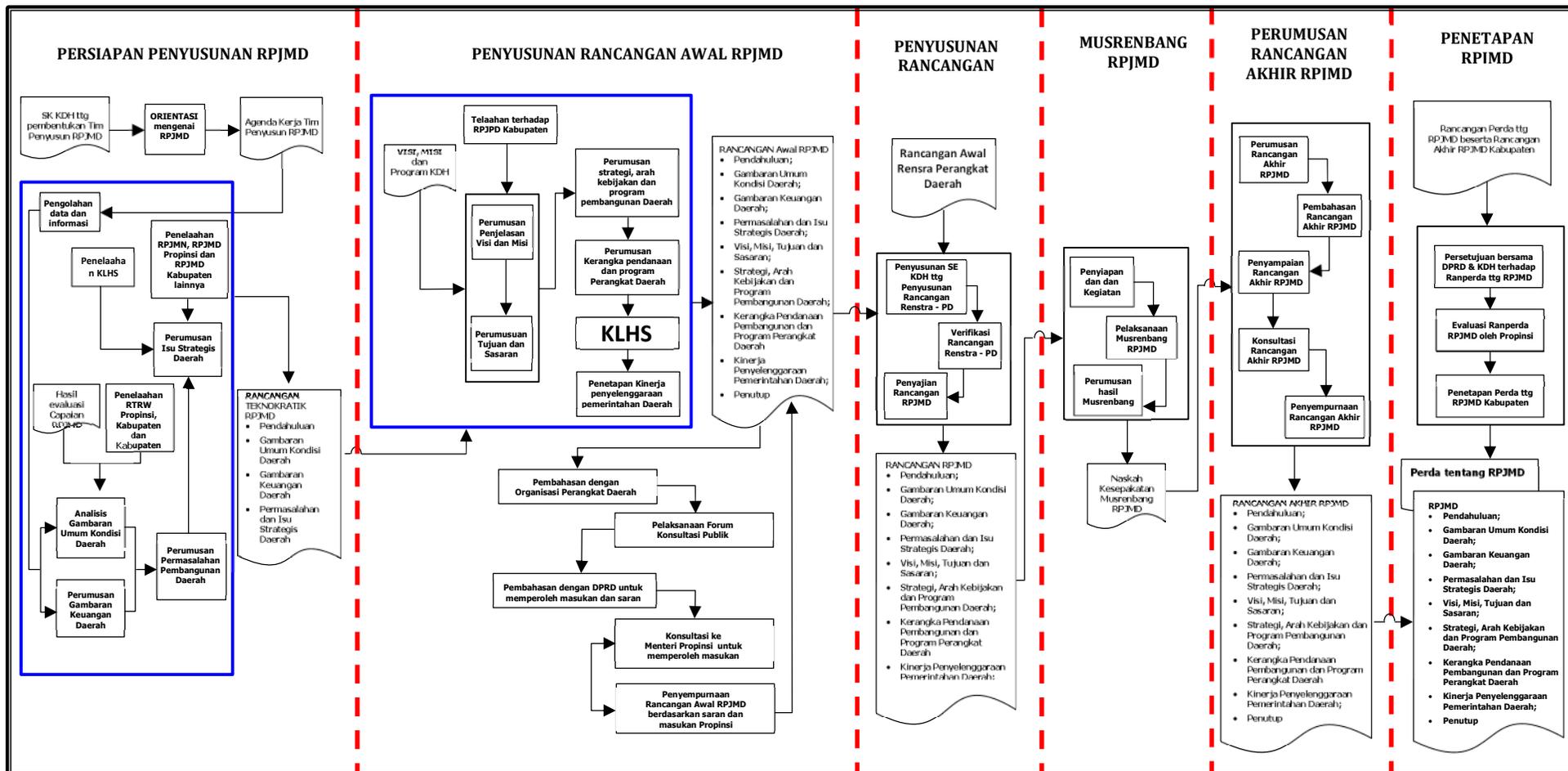
1. Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Manokwari Tahun 2005–2025 periode/tahap keempat;
3. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manokwari Tahun 2013–2033;
4. Pedoman akhir dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025;
5. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
6. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 6 (enam) tahun; dan
7. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda.

Dengan demikian, tercipta keselarasan perencanaan strategik antara perencanaan strategik kabupaten dengan perencanaan operasional Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Manokwari.

Secara rinci tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Tahun 2021 – 2026 disajikan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Tahun 2021 – 2026





1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,



- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI nomor 1114 Tahun 2019);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;



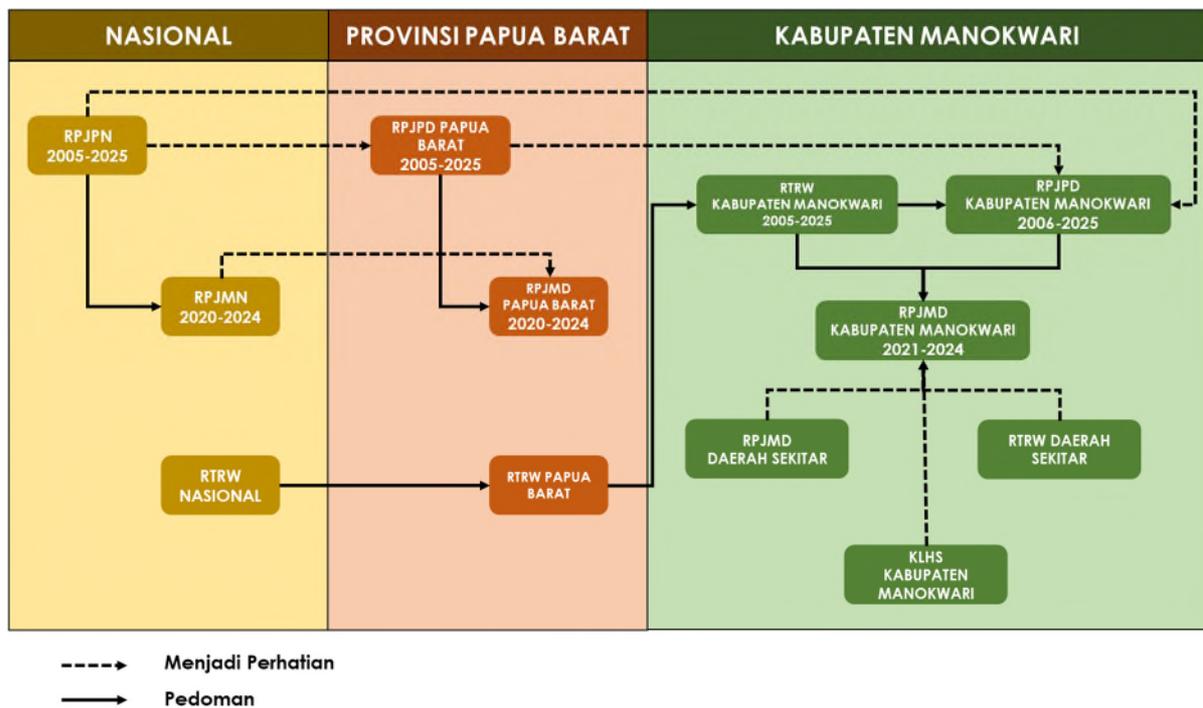
27. Peraturan Daerah Provinsi Bapua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 36 Tahun 2012 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Manokwari Tahun 2006-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari 2013 – 2033.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Merujuk terhadap sinkronisasi perencanaan, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang daerah, RPJMD Provinsi, dan rencana pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergis antar level pemerintahan, antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kabupaten Manokwari. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut.

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Manokwari dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Papua Barat serta RPJMD Tahap IV pada RPJPD Tahun 2006-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026 juga memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Manokwari dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

RPJMD Kabupaten Manokwari selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional, yang mempedomani arah pembangunan nasional 2020-2026. Pada prinsipnya, arah pembangunan nasional tahun 2020-2024 dijabarkan dan ditelaah melalui RPJPN 2005-2025 periode ke IV.



RPJMD Kabupaten Manokwari 2021-2026 disusun dengan memperhatikan dan selaras terhadap RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2023. Acuan terhadap RPJMD Provinsi Papua Barat dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan antar wilayah baik Kota maupun Kabupaten lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat.

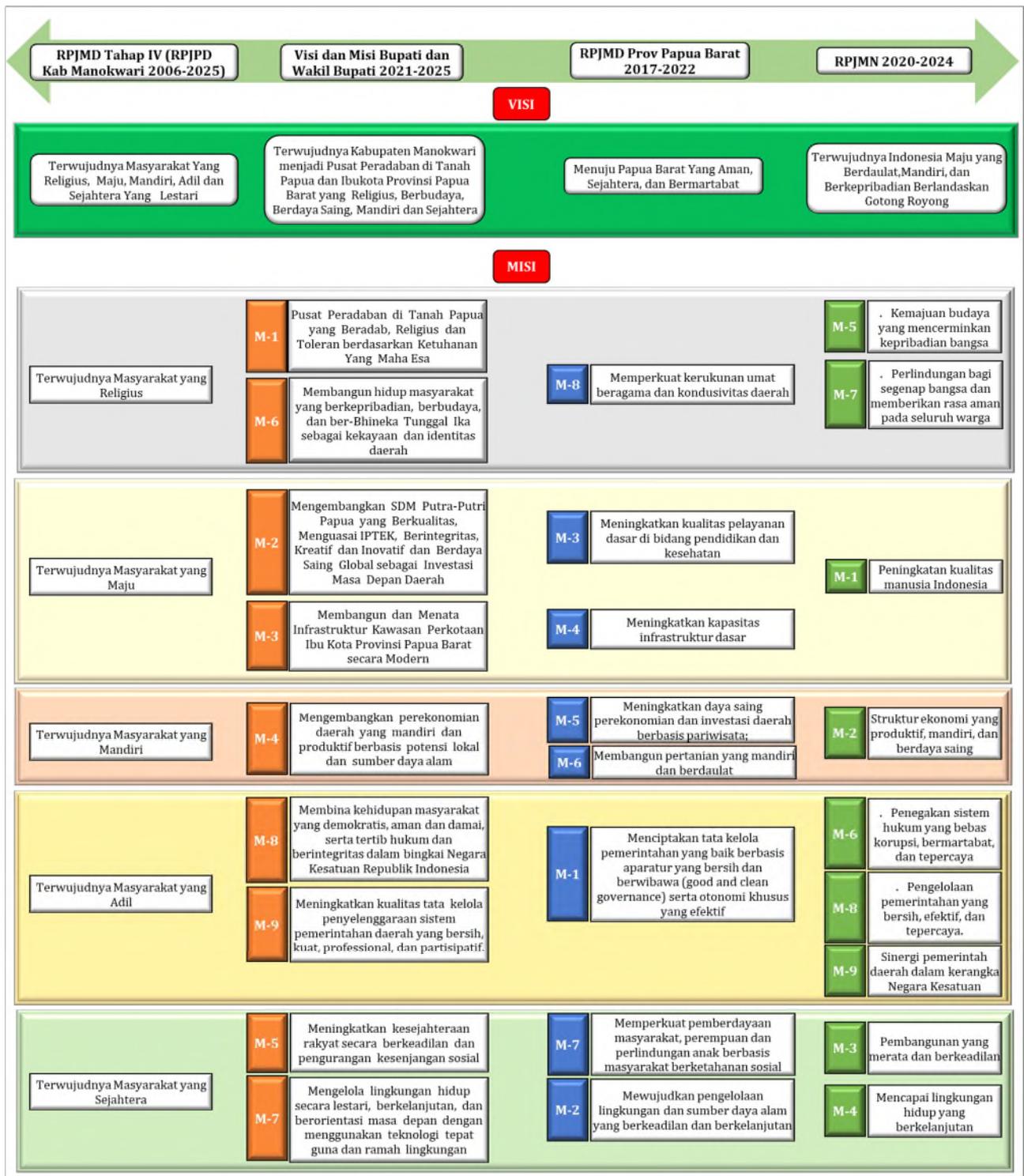
RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 merupakan Tahap IV penjabaran RPJPD Kabupaten Manokwari Tahun 2005-2025. Dengan demikian, dalam penyusunannya juga memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Manokwari Tahun 2005-2025. Hubungan tersebut terlihat pada gambar 1.3 pada halaman 13.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.



Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan





1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Manokwari dengan RTRW Kabupaten Manokwari

Penyusunan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 memperhatikan RTRW Kabupaten Manokwari Tahun 2013-2033 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Tahun 2013-2033. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Manokwari dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Manokwari dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Manokwari

Penyusunan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Secara khusus maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Manokwari adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun ke



depan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial. Dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten yang berbatasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sesuai ketentuan mengenai tahap-tahap perumusan rancangan dokumen perencanaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Manokwari tersaji sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan yang merupakan paparan isi dan alur dari RPJMD yang disusun.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi umum daerah sebagai pijakan awal perumusan kebijakan dalam penyusunan RPJMD yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil RPJMD periode lalu dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Bab III. Gambaran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka keuangan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selain gambaran pengelolaan keuangan daerah, Bab ini juga membahas neraca keuangan daerah Kabupaten Manokwari.



Bab IV. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi lainnya untuk memahami permasalahan pembangunan daerah, serta penjabaran isu-isu strategis terkini beserta analisis terhadap kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.

Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar sebagai pijakan dalam merumuskan Isu Strategis pembangunan Kabupaten Manokwari. Selain pembahasan mengenai isu-isu strategis, pembahasan juga terfokus terhadap telaah-telaah dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RTRW, dan RPJMD daerah sekitar.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Menjelaskan dan menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dan spesifik untuk jangka waktu 6 (enam) tahun mendatang.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Menjelaskan dan menjabarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 6 (enam) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif setiap tahunnya pada periode 2021-2026.

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Bab ini Berisikan indikator kinerja *impact* dan *outcome* terpenting sebagai hasil kinerja dari kebijakan pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum, dan daya saing daerah. Indikator Kinerja tersebut disajikan beserta target setiap tahun, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.



Bab IX. Penutup

Merupakan simpulan dan harapan agar segenap pihak dapat berkontribusi terhadap pencapaian RPJMD Kabupaten Manokwari, disertai dengan penjelasan terkait kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi saat masa jabatan Kepala Daerah atau perodesasi.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Manokwari terletak pada 0°14'S dan 130°31'E dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Samudera Pasifik
- Sebelah Timur : Samudera Pasifik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan
- Sebelah Barat : Kabupaten Tambrauw

Kabupaten Manokwari memiliki luas wilayah 3.168,28 km² dengan garis pantai sepanjang 500 km. Secara administratif, Kabupaten Manokwari terdiri dari 9 (sembilan) Distrik, 9 (sembilan) Kelurahan dan 164 Kampung.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Manokwari

Distrik	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kampung
1. Warmare	674,84	-	31
2. Prafi	311,13	-	16
3. Manokwari Barat	93,46	6	4
4. Manokwari Timur	32	1	6
5. Manokwari Utara	450,53	-	23
6. Manokwari Selatan	311,13	2	16
7. Tanah Rubuh	271,52	-	24
8. Masni	596,90	-	32
9. Sidey	426,77	-	12
Jumlah	3.168,28	9	164

Sumber : BPS Kabupaten Manokwari, 2020

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Manokwari



2.1.1.2 Kondisi Geografis

Berdasarkan topografi wilayah, Kabupaten Manokwari terbagi kedalam 2 (dua) tipologi yaitu pesisir dan pegunungan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

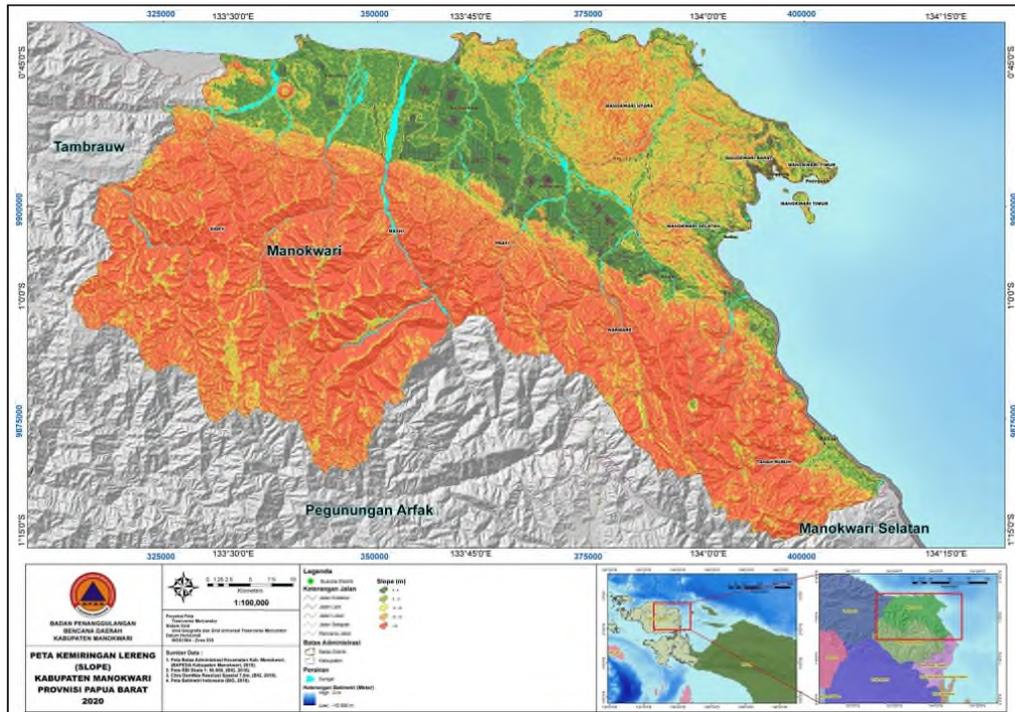
Tabel 2.2 Topografi Wilayah Kabupaten Manokwari

Distrik	Tinggi Wilayah (meter dpl)
1. Warmare	37
2. Prafi	99
3. Manokwari Barat	25
4. Manokwari Timur	5
5. Manokwari Utara	100
6. Manokwari Selatan	5
7. Tanah Rubuh	99
8. Masni	40
9. Sidey	15
Kabupaten Manokwari	25

Sumber : BPS Kabupaten Manokwari, 2021

Kemiringan lahan di Kabupaten Manokwari bervariasi mulai dari datar (0-2%), landai (2-40%), dan terjal (lebih dari 40%). Luas lahan datar sebesar 40%, lahan dengan kategori landai seluas 50%, dan sisanya adalah lahan terjal seperti tercantum pada Gambar berikut.

Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Manokwari



2.1.1.3 Kondisi Geologi

Kabupaten Manokwari terbentuk dari Formasi Batuan Sedimen Pratersier berupa Batuan Sedimen Klastik, Karbonat, Plutonik (Granit), Batuan Vulkanik berupa Lava, Aglomerat, Breksi, Tufa dan Lahar serta Batuan Metamorfik; Batuan Sedimen Tersier berupa Batuan Sedimen Klastik, Vulkanik, dan Karbonat; Batuan Kuarter berupa Endapan Pantai, Endapan Sungai, Endapan Limpas Banjir; Endapan Sedimen dengan umur Kuarter hanya muncul di beberapa tempat, sedangkan Endapan Sedimen Resen (Qa) hanya mengisi lembah-lembah muda pada Daerah Aliran Sungai dan Sub Daerah Aliran Sungai.

Kabupaten Manokwari terbentuk dari tanah Alluvial (18,70%), Mediterania (2,44%), Podsolid merah kuning (10,41%), Pospolid coklat keabuan (7,57%), tanah utama atau *Complex of soil* (49,21%), Latosol (4,49%), dan Organosol (7,17%). Kedalaman efektif tanah di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari rata-rata di atas 25 cm, kecuali wilayah-wilayah pegunungan kapur. Kondisi geologi tersebut memiliki nilai ekonomi sebagai potensi bahan galian tambang meliputi bahan galian mineral logam, mineral industri, dan bahan galian konstruksi sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Potensi Bahan Galian dan Wilayah Sebarannya

No	Jenis Komoditas	Jumlah Potensi	Wilayah Sebaran Komoditas
1	Batu Gamping	13,92 Milyar Ton	Maruni (Distrik Manokwari Selatan)
		2,5 milyar Ton	Kampung Tanah Merah (Distrik Warmare)
2	Lempung	37.500.000 M3	Maruni (Distrik Manokwari Selatan)
3	Sirtu	Tidak terukur	Distrik Manokwari Selatan, Prafi, Masni dan Manokwari Utara

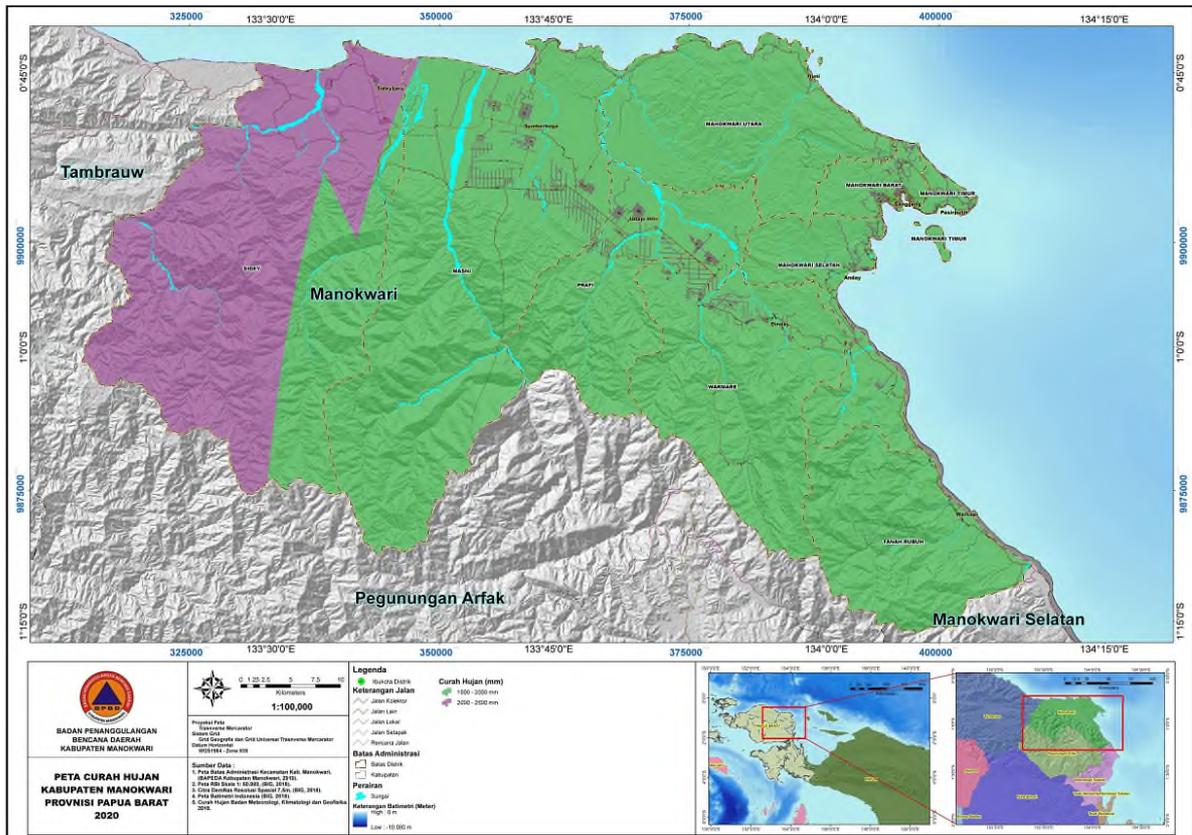
Gambar 2.3 Peta Potensi Bahan Galian di Kabupaten Manokwari



Manokwari termasuk salah satu Kabupaten di Papua Barat yang memiliki curah hujan tinggi. Rata-rata jumlah hari hujan tahun 2020 sebesar 19 hari, dengan jumlah curah hujan tertinggi di Bulan Maret sebesar 485,1 mm³. Meskipun Kabupaten Manokwari memiliki intensitas hujan yang cukup tinggi namun rata-rata suhu udara berkisar antara 24,3°C hingga bersuhu 31,8°C. Suhu udara ini dipengaruhi oleh ketinggian dataran Kabupaten Manokwari, lamanya penyinaran matahari, dan angin serta arus laut. BMKG Rendani Kabupaten Manokwari mencatat jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada Maret dan November yaitu mencapai 26 hari.



Gambar 2. 4 Peta Curah Hujan di Kabupaten Manokwari



Secara kewilayahan, potensi sumber daya air di Manokwari terdistribusi pada setiap Wilayah Sungai (WS) maupun anak sungai.

Ketersediaan sumber daya air juga sangat bergantung pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) berupa wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. DAS berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Jumlah daerah aliran sungai yang ada di manokwari sebagaimana tabel berikut.

Gambar 2.5 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Manokwari



Tabel 2.4 Ketersediaan Sumberdaya Air di Manokwari

No	Sungai	Luas (km)	Potensi SDA (Juta m ³ /Tahun)	Ketersediaan Air Permukaan (Juta m ³ /thn)
1	Andai	257,65		
2	Arui	232,35		
3	Kasi	979,74		
4	Mangoapi	373,61		
5	Nuni	230,62		
6	Pami	216,47		
7	Prafi	675,58		
8	Warjori	1.634,55		
9	Wassawui	499,50		

Klasifikasi tutupan lahan/Penggunaan lahan di Kabupaten Manokwari didominasi oleh Hutan Produksi dengan luas 221.888,31 hektar. Luas terbesar berada di Distrik Sidey dan Distrik Prafi, dengan luas masing-masing sebesar 63.071,73 hektar dan 57.837,22 hektar. Penggunaan lahan lainnya berupa Suaka Alam dan



Pelestarian Alam dengan luas sebesar 96.077,93 Hektar dan Hutan Lindung seluas 62.373,91 Hektar.

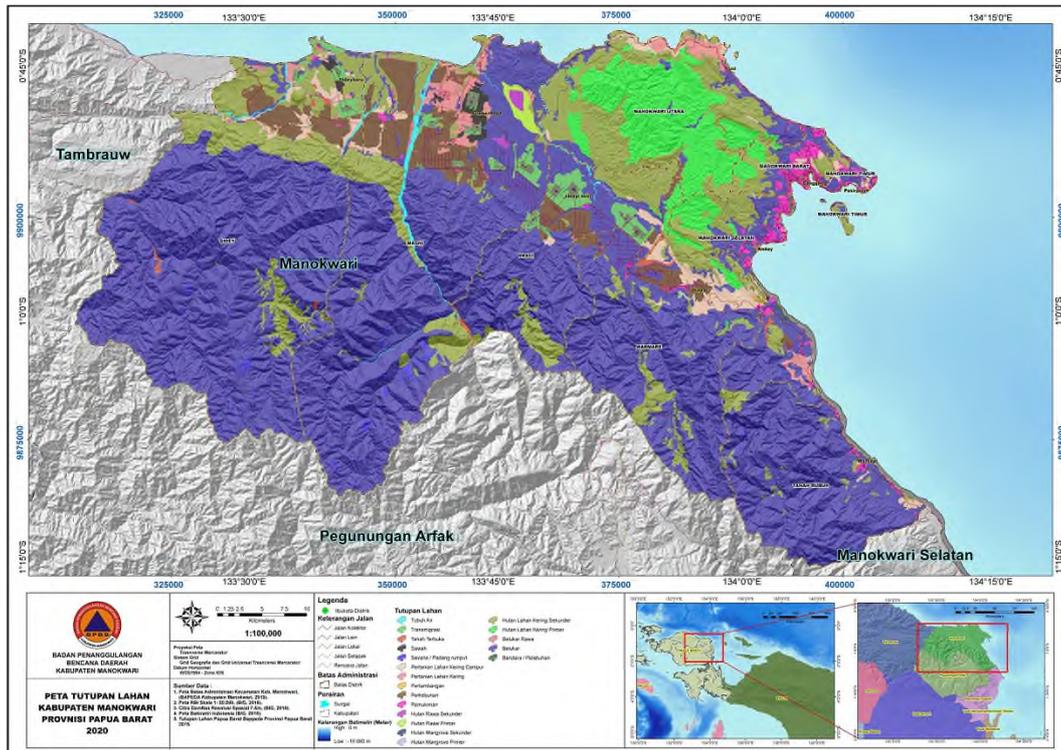
Distrik Sidey memiliki luas Suaka Alam dan pelestarian alam terbesar di Kabupaten Manokwari dengan luas 47.797,03 Hektar. Sedangkan, Hutan Lindung terluas berada di Distrik Prafi dengan luas 41.504,93 Ha. Secara keseluruhan, tutupan lahan di Kabupaten Manokwari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Kabupaten Manokwari

No	Distrik	Sawah (Ha)	Tegal/kebun (Ha)	Ladang/Huma (Ha)	Perkebunan (Ha)	Hutan Produksi (Ha)	Sementara Tidak Digunakan (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Suaka Alam (Ha)
1	Warmare	15	283	394	2.138,75	13.616,22	343	2.884,93	8.724,12
2	Prafi	811	500	877	5.705,5	57.837,22	473	41.504,93	7.337,74
3	Manokwari Barat	-	76	-	233	10.470,58	50	78.503	667,23
4	Manokwari Timur	-	57	-	504	3,94	35	-	3,94
5	Manokwari Utara	-	245	-	1.014	20.385,72	243	6.417,78	6.417,78
6	Manokwari Selatan	-	189	10	239,5	7.954,66	186	962,40	3.622,96
7	Tanah Rubuh	-	147	12	307	28.003,01	93	5.502,78	22.500,23
8	Masni	881	404	928	1.300,99	20.545,23	115	2.977,15	188,21
9	Sidey	301	568	320	3.365,9	63.071,73	252	2.045,99	47.797,03
Jumlah		2.008	2.469	2.541	14.418,39	221.888,31	1.790	62.373,91	96.077,93

Berdasarkan tabel tersebut, penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Manokwari digunakan sebagai Hutan produksi dengan luas 221.888,31 Ha, Suaka Alam dengan luas 96.077,93 Ha, dan selanjutnya digunakan sebagai Hutan Lindung dengan luas 62.373,91 Ha. Kabupaten Manokwari memiliki lahan sangat kritis dengan luas 8.417 ha, lahan kritis seluas 23.507 ha, lahan agak kritis seluas 16.566 ha, dan lahan berpotensi kritis seluas 597 ha, Sehingga luas total lahan tersebut adalah seluas 49.087 ha, sebagaimana dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 6 Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Manokwari



2.1.1.4 Kawasan Rawan Bencana

Struktur geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah Manokwari memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ancaman bencana alam. Pengkajian indeks bahaya, kerentanan dan kapasitas bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Manokwari berdasarkan kajian risiko bencana Provinsi Papua Barat dianalisis indeks bahaya dilakukan untuk setiap jenis potensi bencana di suatu daerah.

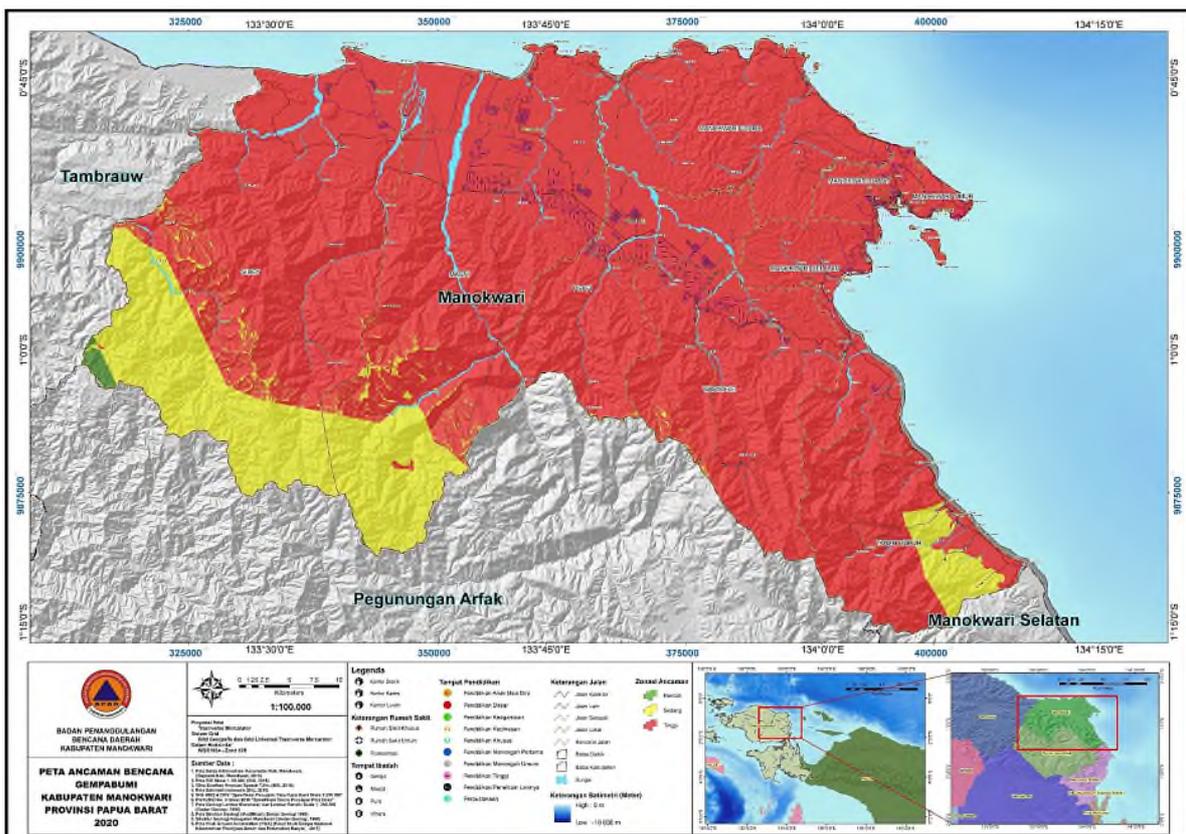
Potensi bencana diperoleh dari sejarah kejadian dan kemungkinan terjadi suatu bencana. Dari potensi bencana yang ada di suatu daerah maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi di daerah tersebut. Penentuan jenis dan tingkat bahaya merupakan langkah awal dalam melakukan kajian risiko bencana. Pengkajian bahaya menghasilkan indeks, kelas, potensi luas bahaya dan peta bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Manokwari. Hasil kajian indeks bahaya dan luas bahaya untuk bencana gempa bumi dan tsunami Kabupaten Manokwari (Kajian Risiko Bencana Provinsi Papua Barat 2016 - 2020) tersaji sebagai berikut.

Tabel 2. 6 Risiko Bencana Kabupaten Manokwari

No	Jenis Bencana	Luas (Ha)	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kerugian Materi (Milyar Rupiah)	Kelas
1	Gempa Bumi	195.563	158.151	3.771,6	Tinggi
2	Tsunami	3.025	23.119	2.254,5	Tinggi
3	Banjir				
4	Tanah Longsor				

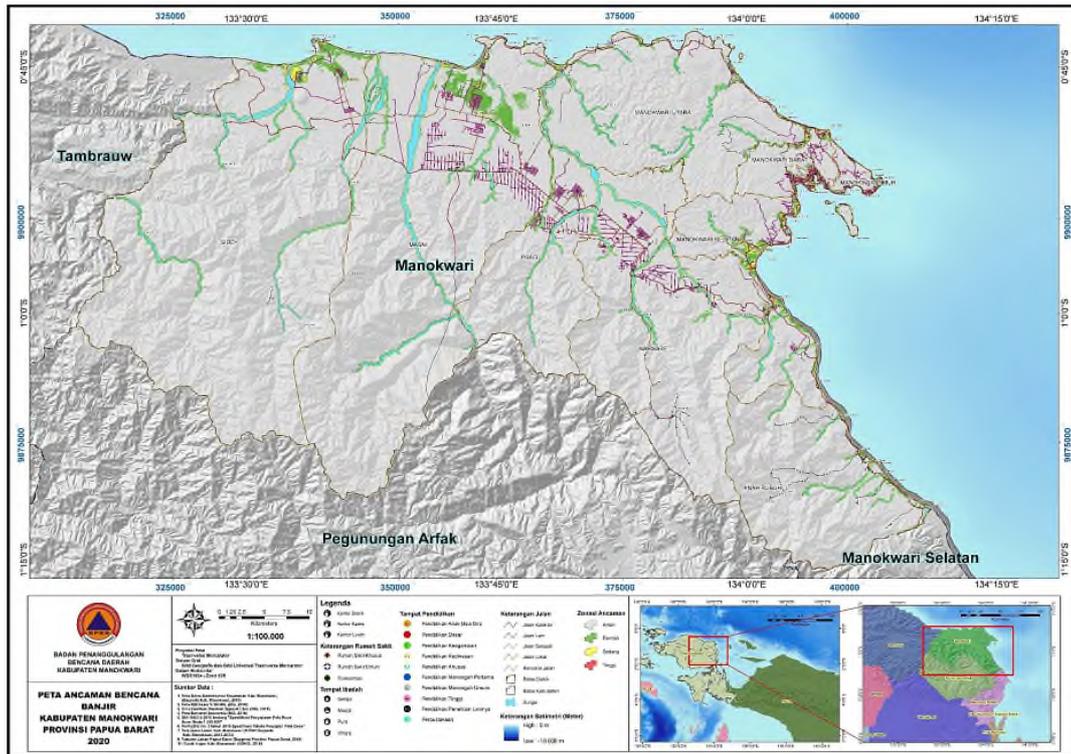
Papua Barat adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak diujung barat Pulau Papua. Risiko gempa bumi pada wilayah ini tergolong tinggi, disebabkan adanya 150 sesar dan beberapa di antaranya cukup rawan seperti sesar Sorong dan Manokwari Selatan. Bencana gempa bumi di Kabupaten Manokwari meliputi seluruh wilayah distrik, terutama di sepanjang sesar. Sedangkan untuk bencana Tsunami, wilayah terdampak meliputi wilayah sepanjang Teluk Cendrawasih memanjang di Distrik Manokwari Timur Manokwari Barat - Manokwari Selatan.

Gambar 2. 7 Peta Ancaman Gempa Bumi di Kabupaten Manokwari

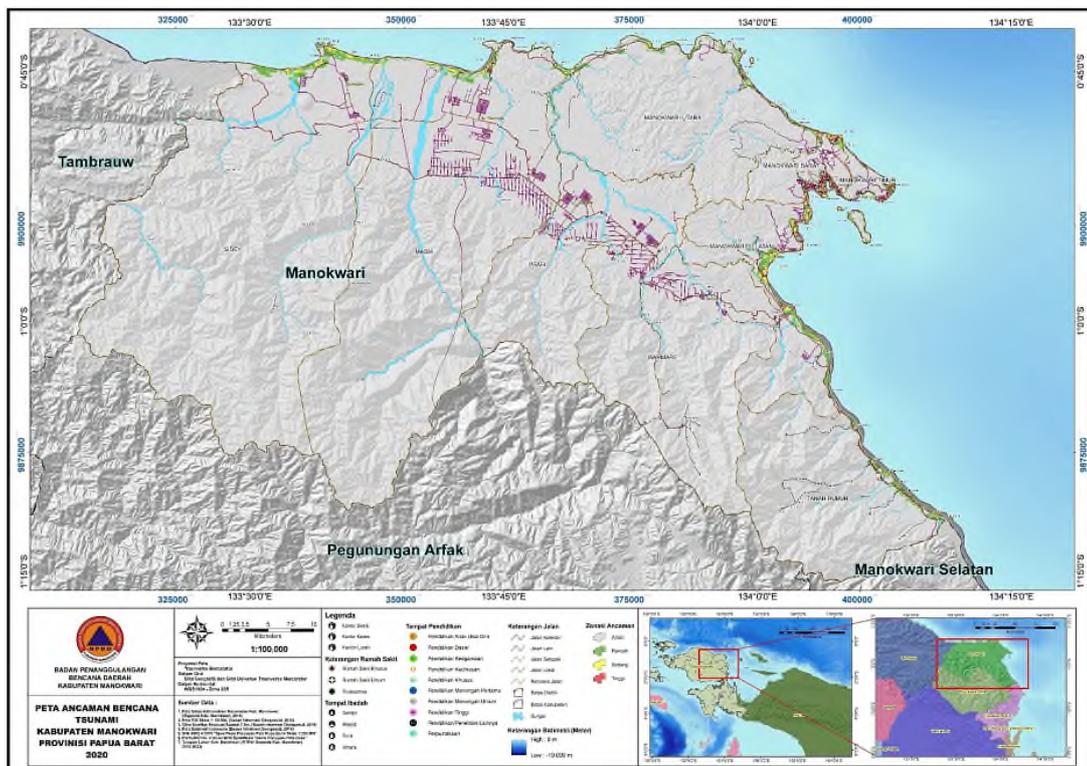




Gambar 2.8 Peta Ancaman Bencana Tsunami di Kabupaten Manokwari

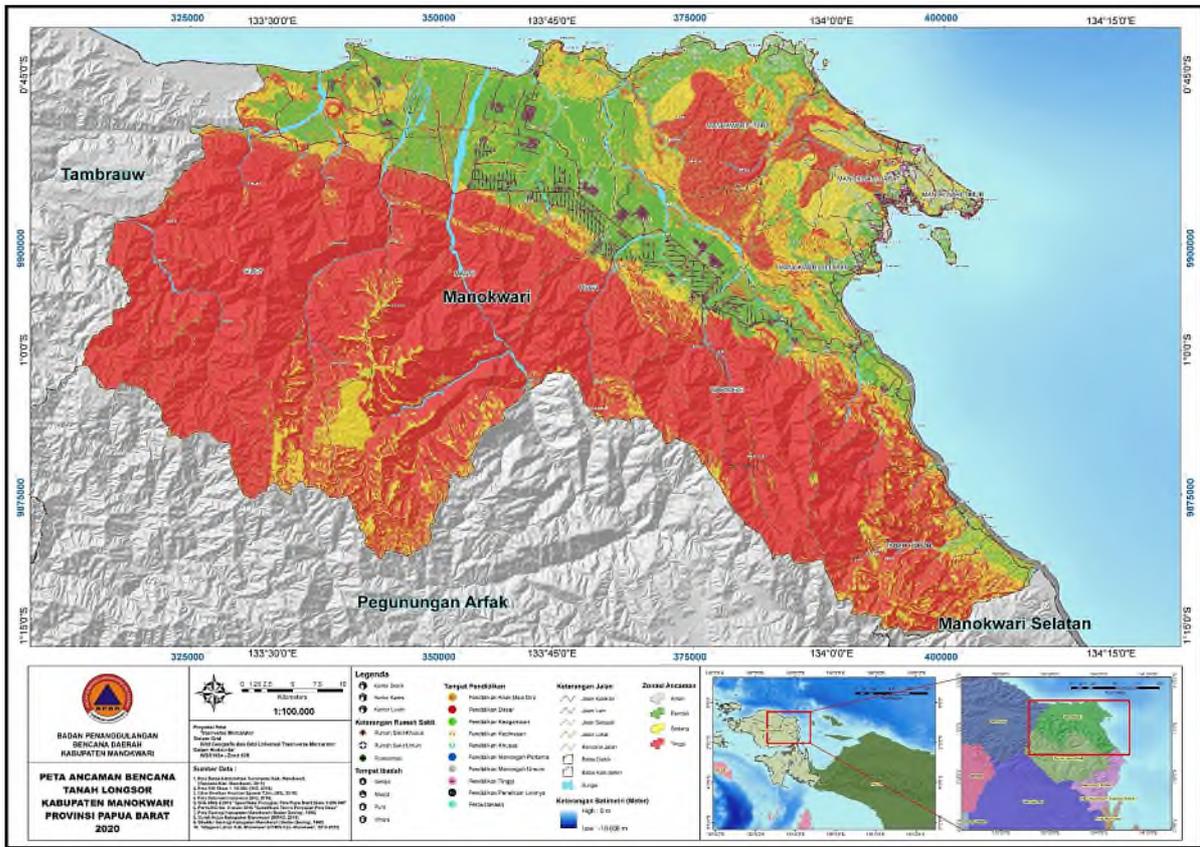


Gambar 2.9 Peta Ancaman Bencana Banjir di Kabupaten Manokwari





Gambar 2. 10 Peta Ancaman Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Manokwari



2.1.1.5 Kapasitas Daya Tampung dan Daya Dukung

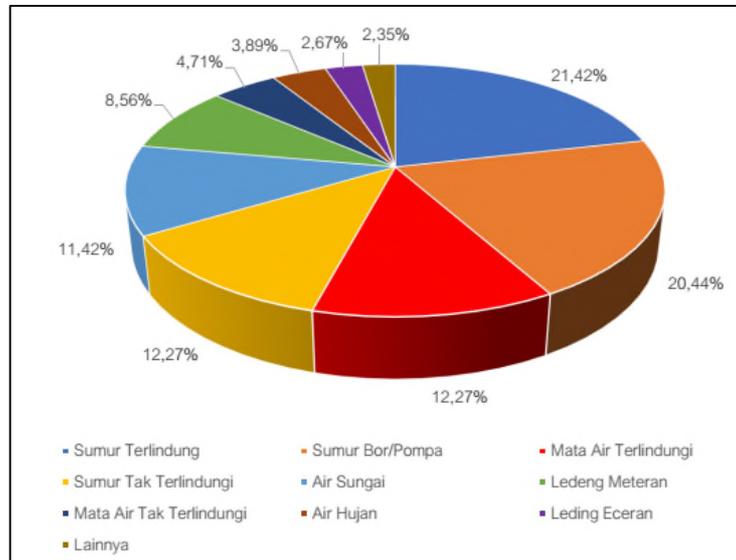
a) Daya Dukung Air

Daya dukung sumber daya air pada suatu wilayah dapat diartikan sebagai ketersediaan potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di wilayah tersebut. Potensi air pada suatu wilayah dinyatakan sebagai *supply*, sedangkan kebutuhan air di wilayah tersebut dinyatakan sebagai *demand*. Idealnya, nilai *demand* tidak melebihi kemampuan *supply*. Jika nilai *demand* lebih besar dari *supply*, maka dapat dikatakan bahwa daya dukung air di wilayah tersebut telah terlampaui, sehingga diperlukan penerapan teknologi dan pengelolaan lingkungan yang baik sebagai bentuk pengendalian.

Kabupaten Manokwari secara umum belum mampu menyediakan pelayanan air bersih yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari masyarakat Kabupaten Manokwari yang menggunakan sumur terlindung sebesar 21,42%; sumur bor/pompa 20,44%; mata air terlindung 12,27%; sumur tak terlindung 12,27%; air sungai 11,42%; ledeng meteran 8,56%;

mata air tak terlindungi 4,71%; air hujan 3,89%; leding eceran 2,67%; dan lainnya sebesar 0,41%.

Grafik 2.1 Sumber Air Bersih yang Digunakan Masyarakat Kabupaten Manokwari



Selanjutnya proporsi sumber air yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Manokwari untuk konsumsi (air minum) adalah berasal dari air isi ulang sebesar 42,17%, mata air terlindungi 14,37%, sumur terlindungi 10,98%, sumur tak terlindungi 9,89%, mata air tak terlindungi 5,85%, air sungai 4,78%, sumur bor/ pompa 4,24%, ledeng meteran 2,95%, air hujan 2,9%, leding eceran 1,26%, dan air kemasan bermerek 0,61%.

Salah satu penyedia layanan air bersih di Kabupaten Manokwari adalah PDAM Kabupaten Manokwari. Pada tahun 2018, kapasitas produksi riil PDAM Kabupaten Manokwari adalah sebesar 2.018.304 m³ dan jumlah volume air bersih yang didistribusikan kepada pelanggan sebesar 1.661.299 m³.

Berdasarkan data dari kapasitas produksi PDAM Kabupaten Manokwari dan jenis sumber air bersih yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas Kabupaten Manokwari dalam menyediakan air bersih utamanya yang berasal dari produksi PDAM masih belum mencukupi. Belum mencukupinya produksi air bersih dari PDAM tersebut disebabkan terkendalanya perluasan jaringan air bersih dan masih tingginya kebocoran dari proses produksi ke proses distribusi dan dari proses distribusi ke pelanggan. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak

masyarakat Kabupaten Manokwari menggunakan sumber air bersih lainnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut ditunjukkan oleh grafik diatas yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Manokwari mencukupi kebutuhan air bersihnya dengan menggunakan sumur, mata air, dan air hujan.

b) Daya Dukung Pangan

Untuk dapat melihat daya dukung penyedia pangan di Kabupaten Manokwari, selain melihat perbandingan antara jumlah produksi pangan dengan jumlah konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Manokwari. Selain itu, status daya dukung penyedia pangan dapat diketahui dari jasa ekosistem pangan di Kabupaten Manokwari. Jasa ekosistem penyediaan pangan adalah kontribusi ekosistem dalam penyediaan pangan tidak hanya bagi manusia namun juga bagi seluruh makhluk hidup. Jasa ekosistem penyediaan pangan ini terkait dengan kesejahteraan manusia dalam hal keamanan, akses terhadap bahan dasar untuk penghidupan yang layak dan kesehatan. Setiap tipe ekoregion yang ada di Kabupaten Manokwari tersebut mampu menyediakan pangan dalam berbagai tingkatan dan distribusi. Terdapat tipe ekoregion yang mampu menghasilkan peran penyediaan pangan yang besar namun ada juga tipe ekoregion yang hanya mampu menyediakan jasa penyediaan pangan yang sedikit.

Distribusi luas dan peran jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Manokwari secara lebih jelas disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kabupaten Manokwari

Rencana	Klasifikasi Jasa Pangan	Luas (Km ²)
Sarana transportasi	Rendah	0,47
Sarana transportasi	Sangat Rendah	0,05
Kawasan pertambangan	Tinggi	0,04
Kawasan pertambangan	Sedang	0,02
Kawasan peruntukan industri	Tinggi	0,01
Kawasan peruntukan industri	Sedang	0,11

Pada rencana pengembangan sarana transportasi sebagian besar berada pada jasa ekosistem penyediaan pangan dengan kelas rendah hingga sangat rendah yaitu masing-masing sebesar 0,47 km² dan 0,05 km². Sedangkan untuk



pertambahan sebagian besar berada di jasa ekosistem penyedia pangan dengan kelas tinggi, yaitu sebesar 0,04 Km² dan 0,02 km² untuk kelas sedang. Rencana pengembangan industri sebagian besar berada pada lahan dengan potensi jasa ekosistem penyedia pangan kelas sedang, yaitu sebesar 0,11 km²

c) Daya Tampung Sampah

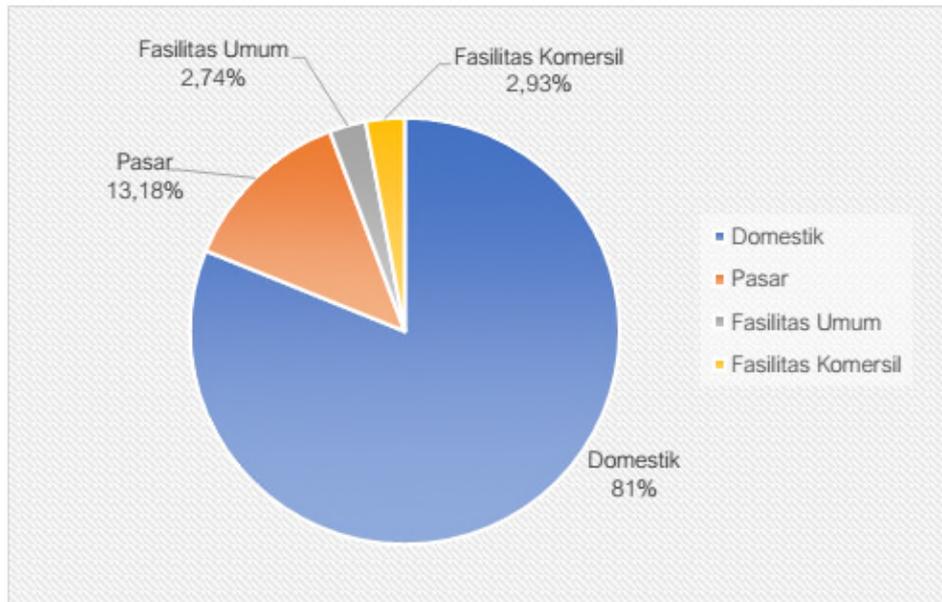
Pemukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup yang berada diluar kawasan lindung dan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat melakukan berbagai macam kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan sampah sebagai sisa dari suatu kegiatan.

Berdasarkan SNI Nomor 19-3964-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia, maka total timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Manokwari mencapai 150,22 Ton/ per hari. Hasil pencatatan volume sampah terangkut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari selama Januari hingga Juni 2018 menunjukkan bahwa rata-rata total timbulan sampah Domestik rumah tangga yang diangkut di wilayah Kabupaten Manokwari mencapai 121,90 Ton/hari, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sampah Domestik/ Rumah Tangga : 121,90 ton/ hari;
 - Distrik Manokwari Barat : 68,47 ton/ hari;
 - Distrik Manokwari Timur : 7,71 ton/ hari;
 - Distrik Manokwari Selatan : 12,65 ton/ hari;
 - Distrik Manokwari Utara : 2,69 ton/ hari;
 - Distrik Warmare : 5 ton/ hari;
 - Distrik Prafi : 10,77 ton/ hari;
 - Distrik Masni : 8,98 ton/ hari;
 - Distrik Sidey : 3,47 ton/ hari;
 - Distrik Tanah Rubuh : 2,18 ton/ hari;

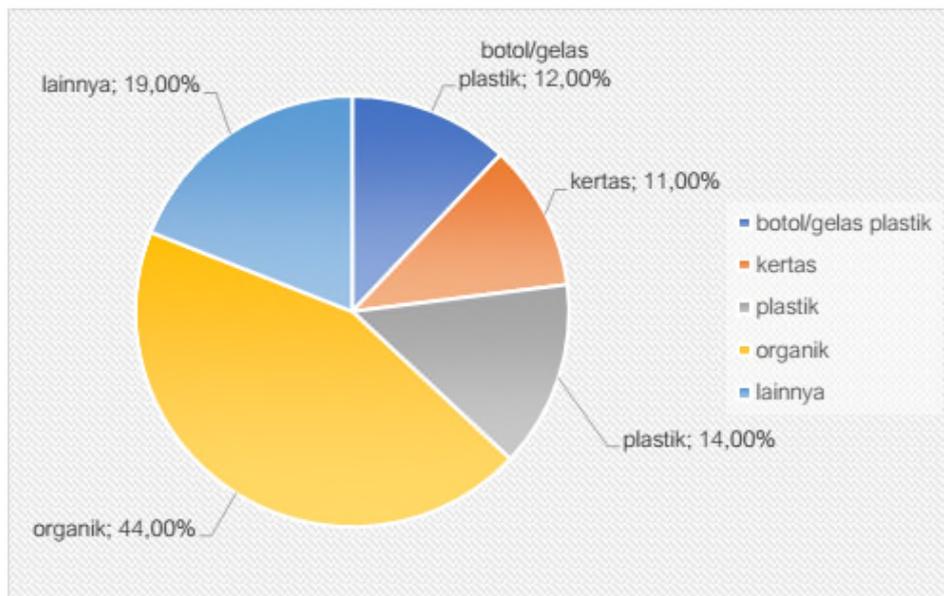
2. Sampah Pasar Sanggeng : 5,94 ton/ hari;
3. Sampah Pasar Wosi : 13,86 ton/ hari;
4. Sampah Fasilitas Umum : 4,12 ton/ hari;
5. Sampah Fasilitas Komersil : 4,40 ton/ hari.

Grafik 2. 2 Potensi Timbulan Sampah Tahun 2018 di Kabupaten Manokwari



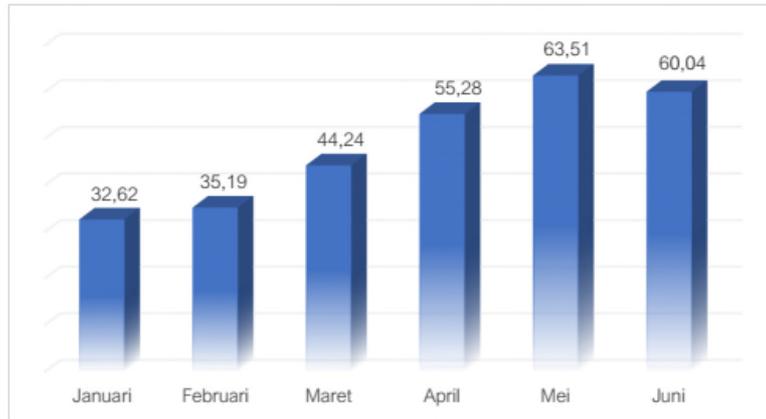
Sumber : DLH Kabupaten Manokwari

Grafik 2. 3 Komposisi Sampah Domestik Tahun 2018 di Kabupaten Manokwari (%)



Sumber : DLH Kabupaten Manokwari

Grafik 2. 4 Penanganan Sampah di Kabupaten Manokwari (Ton/Hari)



Sumber : DLH Kabupaten Manokwari

2.1.2 Kondisi Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan.

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Kabupaten Manokwari tahun 2020 mencapai 192.663 jiwa dengan laju pertumbuhan 8,64%.

Tabel 2. 8 Demografi Kabupaten Manokwari Tahun 2015 - 2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Jumlah Penduduk	Jiwa	160.285	164.586	168.852	173.020	177.346	192.663
a. Laki-laki	Jiwa	84.970	87.330	89.572	91.636	94.024	100.006
b. Perempuan	Jiwa	75.315	77.256	79.280	81.384	83.322	92.657
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,60	2,68	2,59	2,47	2,5	8,64
3. Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km	32	34	35	55	56	61

Sumber : Manokwari Dalam Angka Tahun 2016 – 2021

*) Hasil Proyeksi BPS pada Dokumen Manokwari Dalam Angka 2020

Wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Distrik Manokwari Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 95.837 jiwa (49,74% dari penduduk Kabupaten Manokwari), sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terendah adalah Distrik Tanah Rubuh dengan jumlah penduduk 3.817 jiwa (1,98% terhadap penduduk Kabupaten Manokwari).

Tabel 2.9 Sebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Manokwari Menurut Jenis Kelamin, Kepadatan, Seks Rasio dan Rumah Tangga Tahun 2020

Distrik	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa /km ²)	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan				
1	2	3	4	5	6	7
1. Warmare	4.644	4.349	8.993	674,84	13	106,78
2. Prafi	9.178	8.605	17.783	311,13	57	106,66
3. Manokwari Barat	49.617	46.220	95.837	93,46	1.025	107,35
4. Manokwari Timur	6.596	6.139	12.735	32	398	107,44
5. Manokwari Utara	2.155	2.036	4.191	450,53	9	105,84
6. Manokwari Selatan	13.432	11.807	25.239	311,13	81	113,76
7. Tanah Rubuh	1.919	1.898	3.817	271,52	14	101,11
8. Masni	9.015	8.470	17.485	596,9	29	106,43
9. Sidey	3.450	3.133	6.583	426,77	15	110,12
Jumlah	100.006	92.657	192.663	3.168,28	61	107,93

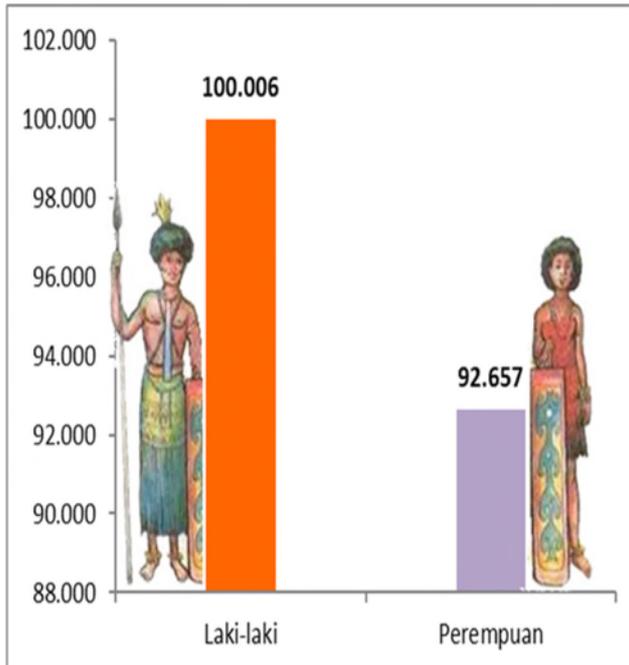
Sumber : BPS Manokwari, 2021

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk di Tahun 2020, angka tertinggi berada di Distrik Manokwari Barat yaitu mencapai 1.025 orang/km², dan terendah di Distrik Tanah Rubuh yang hanya mencapai 14 orang/km².

Gambar 2.11 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Manokwari Tahun 2020



Gambar 2. 12 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020



Ditinjau menurut jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Selisih penduduk laki-laki dengan perempuan sejumlah 7.349 jiwa. Jika dilihat dari kelompok usia, penduduk Kabupaten Manokwari tahun 2020 lebih didominasi oleh penduduk pada kelompok usia 20 - 24 tahun yaitu sejumlah 19.936 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk pada kelompok usia 25-29 tahun yaitu sejumlah 18.876 jiwa sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Manokwari Tahun 2020

Usia	Usia		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	9.490	9.176	18.666
5 - 9	8.977	8.530	17.507
10 - 14	9.238	8.368	17.606
15 - 19	9.076	8.367	17.443
20 - 24	10.330	9.606	19.936
25 - 29	9.786	9.090	18.876
30 - 34	8.795	8.130	16.925
35 - 39	7.865	7.175	15.040
40 - 44	6.934	6.414	13.348
45 - 49	5.644	5.187	10.831
50 - 54	4.441	4.115	8.556
55 - 59	3.493	3.225	6.718
60 - 64	2.577	2.353	4.930
65 - 69	1.731	1.558	3.289
70 - 74	1.010	856	1.866
75+	619	507	1.126
Jumlah	100.006	92.657	192.663

Sumber : BPS Manokwari, 2021

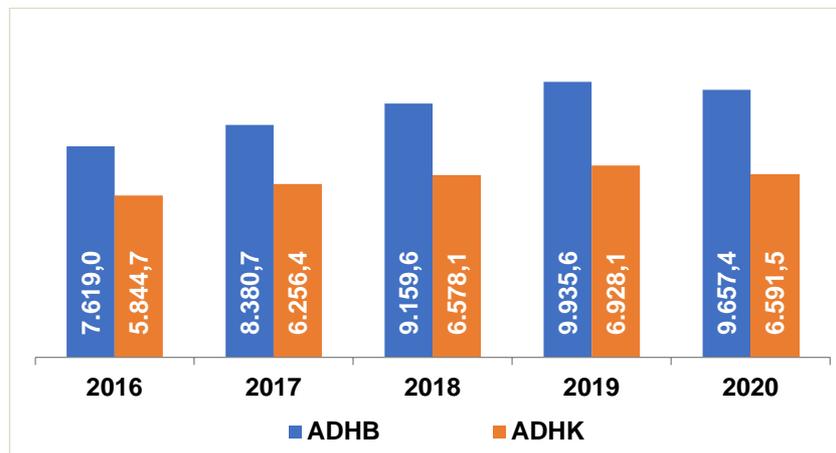
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. Jika diamati dari perkembangan PDRB, kondisi perekonomian Kabupaten Manokwari menunjukkan peningkatan sejak tahun 2016 hingga 2019, akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan baik dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

Grafik 2.5 Perkembangan PDRB Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020



Dinamika perekonomian Manokwari secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan). Berdasarkan perhitungan metode baru, sisi penawaran mencakup 17 lapangan usaha.



Tabel 2. 11 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

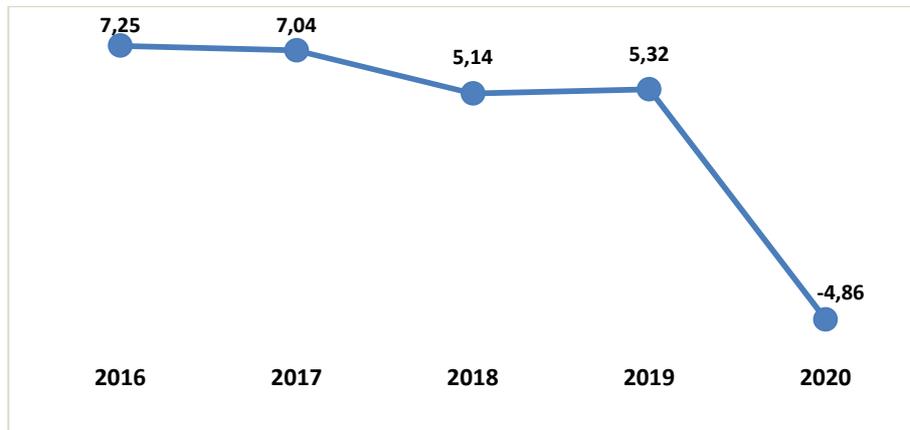
Lapangan Usaha		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	819.856,3	899.905,9	938.239,9	961.547,1	950.648,0
B	Pertambangan dan Penggalian	153.276,1	162.790,8	174.556,3	191.477,4	188.639,1
C	Industri Pengolahan	215.400,0	236.370,2	264.662,7	294.882,2	315.726,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.898,2	5.022,3	5.404,6	5.891,2	6.387,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.988,9	19.991,3	22.560,1	24.864,5	25.197,1
F	Konstruksi	1.405.396,3	1.472.579,2	1.523.536,0	1.574.072,5	1.235.501,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	694.194,5	761.436,2	832.045,2	881.636,2	925.209,1
H	Transportasi dan Pergudangan	319.370,6	343.469,2	372.311,8	390.578,3	254.934,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	83.066,9	90.312,7	98.426,4	107.994,2	102.561,9
J	Informasi dan Komunikasi	252.859,5	285.297,8	298.213,8	305.097,0	328.980,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	225.085,5	230.305,6	236.239,2	248.146,6	266.662,0
L	Real Estate	187.181,9	203.448,0	210.159,1	216.811,9	205.658,3
M,N	Jasa Perusahaan	14.301,4	15.202,1	16.165,2	17.207,2	15.374,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.026.616,5	1.075.231,6	1.097.744,2	1.194.072,3	1.275.812,7
P	Jasa Pendidikan	284.904,3	306.512,5	330.878,6	342.770,9	306.770,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	105.959,6	113.111,9	120.213,6	130.964,4	147.427,0
R,S,T,U	Jasa lainnya	33.367,0	35.375,7	36.709,4	40.058,3	40.015,8
PDRB		5.844.723,5	6.256.363,0	6.578.066,3	6.928.072,0	6.591.506,5

Sumber : BPS Manokwari, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari menurun selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Manokwari menurun jauh menjadi -4,86%. Hal ini tentunya merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sektor jasa dan perdagangan Manokwari.

Penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari tahun 2020 hampir pada semua lapangan usaha, kecuali Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,57%, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 7,83% serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,46%.

Grafik 2. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020



Tabel 2. 12 Laju Pertumbuhan PDRB (persen) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

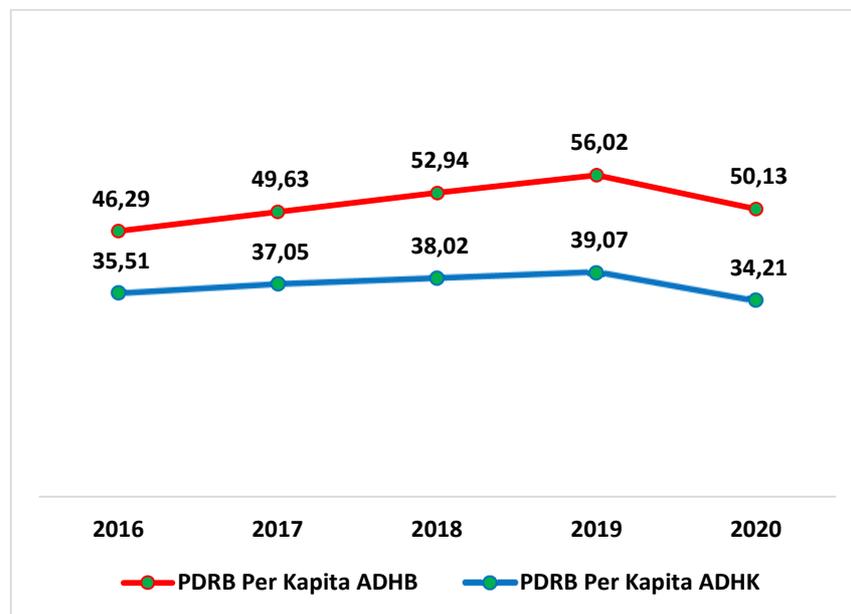
Lapangan Usaha		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
A	Pertanian	4,64	9,76	4,26	2,48	(1,13)
B	Pertambangan dan Penggalian	4,76	6,21	7,23	9,69	(1,48)
C	Industri Pengolahan	4,50	9,74	11,97	11,42	7,07
D	Listrik, Gas, dan Air Bersih	3,28	2,53	7,61	9,00	8,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,08	5,28	12,85	10,21	1,34
F	Konstruksi	9,25	4,78	3,46	3,32	(21,51)
G	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,81	9,69	9,27	5,96	4,94
H	Transportasi dan Pergudangan	8,13	7,55	8,40	4,91	(34,73)
I	Penyedia Akomodasi dan Makanan	6,09	8,72	8,98	9,72	(5,03)
J	Informasi dan Komunikasi	7,11	12,83	4,53	2,31	7,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,37	2,32	2,58	5,04	7,46
L	Real Estate	9,50	8,69	3,30	3,17	(5,14)
M,N	Jasa Perusahaan	4,90	6,30	6,34	6,45	(10,65)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,23	4,74	2,09	8,78	6,85
P	Jasa Pendidikan	7,03	7,58	7,95	3,59	(10,50)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,96	6,75	6,28	8,94	12,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,60	6,02	3,77	9,12	(0,11)
PDRB		7,25	7,04	5,14	5,32	(4,86)

Sumber : BPS Manokwari, 2021

2.2.1.2 PDRB Per Kapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Manokwari atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,51 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 39,07 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar 34,21 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 2. 7 PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Manokwari, 2021

2.2.1.3 Inflasi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Manokwari, pada bulan Agustus 2020, Kabupaten Manokwari mengalami inflasi sebesar 0,49% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,74. Dari 90 kota IHK, tercatat 37 kota mengalami inflasi dan 53 kota mengalami deflasi. Kabupaten Manokwari menempati peringkat inflasi ke-6 di Indonesia.

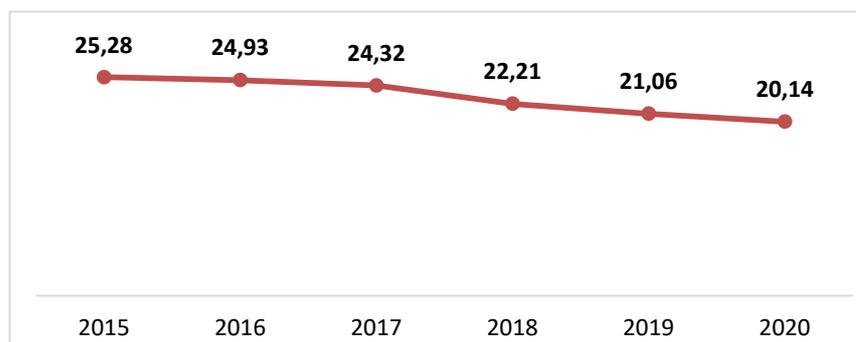
Inflasi di Kabupaten Manokwari terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada semua kelompok pengeluaran yakni kelompok Pendidikan 3,54%; kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 3,16%; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0,83%; kelompok

Transportasi 0,61%; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0,40%; kelompok Kesehatan 0,16; kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 0,08%; kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran 0,08%; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar 0,04%; kelompok Pakaian dan Alas Kaki 0,03%; dan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,01%. Jika dilihat dari tahun kalender (Agustus 2020 terhadap Desember 2019) terjadi inflasi sebesar -0,83%, dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2020 terhadap Agustus 2019) sebesar 0,43%.

2.2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam pembangunan daerah. Angka kemiskinan yang tinggi dapat memberikan permasalahan serius yang berdampak pada berbagai aspek mulai ekonomi, kesehatan hingga kerawanan sosial. Pemerintah Kabupaten Manokwari sangat serius dalam menangani permasalahan kemiskinan. Hasil kerja penanggulangan kemiskinan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terbukti dengan semakin menurunnya persentase penduduk miskin sejak lima tahun terakhir.

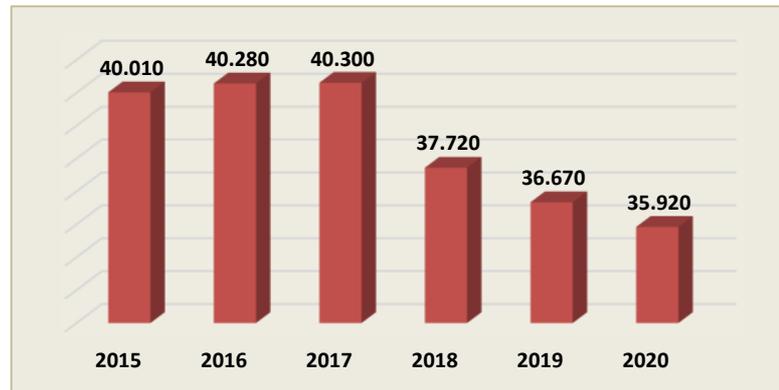
Grafik 2. 8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manokwari Tahun 2015 – 2020



Sumber : BPS Manokwari, 2021

Jumlah penduduk yang dikategorikan miskin dalam definisi Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan. Batas garis kemiskinan ditentukan melalui perhitungan kebutuhan dasar hidup yang terdiri dari konsumsi pangan dan non-pangan. Batas garis kemiskinan Kabupaten Manokwari dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manokwari tahun 2020 sebesar 39.920 jiwa, turun dari tahun sebelumnya sejumlah 750 jiwa.

Grafik 2. 9 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Manokwari Tahun 2015 – 2020



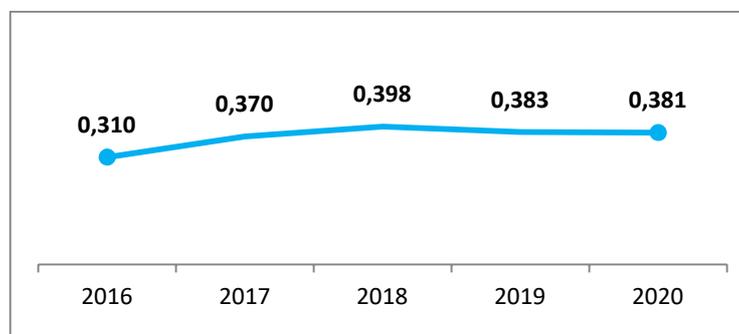
Sumber : BPS Manokwari, 2021

2.2.1.5 Gini Rasio

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*). Secara umum data indeks gini kabupaten Manokwari tahun 2016-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Walaupun demikian, capaian Indeks Gini mengalami penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir, yang berarti menunjukkan perkembangan yang positif.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Kabupaten Manokwari pada tahun 2021 bahwa indeks gini Kabupaten Manokwari pada tahun 2020 mencapai 0,381 atau berkurang sebesar 0,52 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai poin 0,383.

Grafik 2. 10 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Manokwari, 2021

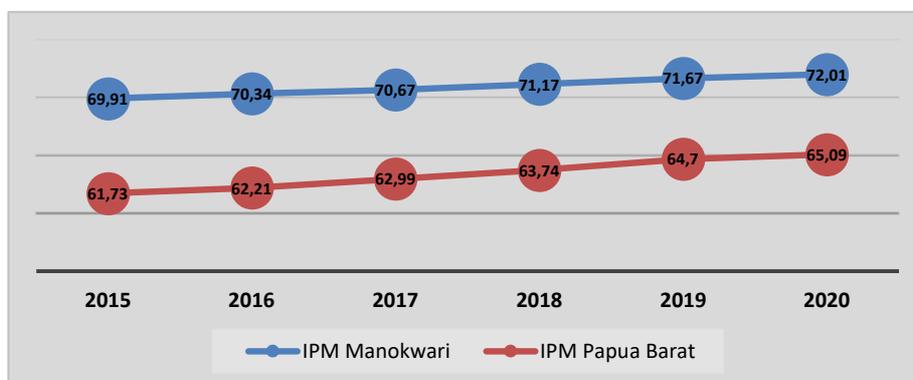
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM mendeskripsikan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan juga pendidikan.

Pencapaian IPM Kabupaten Manokwari tahun 2020 adalah 72,01. Upaya percepatan peningkatan IPM difokuskan kepada peningkatan pelayanan dasar baik pendidikan maupun kesehatan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai serta mendorong perekonomian masyarakat. IPM Kabupaten Manokwari sejak tahun 2015 hingga 2020 memperlihatkan tren yang meningkat, artinya kinerja Pemerintah Daerah semakin dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. IPM Kabupaten Manokwari lebih tinggi dibanding IPM Papua Barat, tetapi masih berada dibawah IPM Kota Sorong, dengan nilai 78,45.

Grafik 2. 11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manokwari Tahun 2015 - 2020



Sumber : BPS Manokwari, 2021

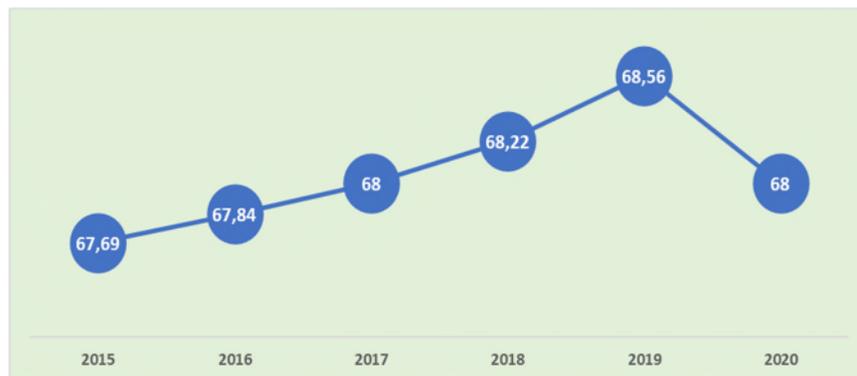
2.2.2.2 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan salah satu dimensi kesehatan yang menjadi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Manokwari telah diiringi dengan peningkatan Usia Harapan Hidup. Usia Harapan Hidup Kabupaten Manokwari dalam kurun waktu 2016 hingga 2019

semakin lama semakin meningkat hingga mencapai 68,56 tahun, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan ke angka 68.

Peningkatan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Manokwari ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin optimalnya akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Grafik 2. 12 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Manokwari Tahun 2015 – 2020

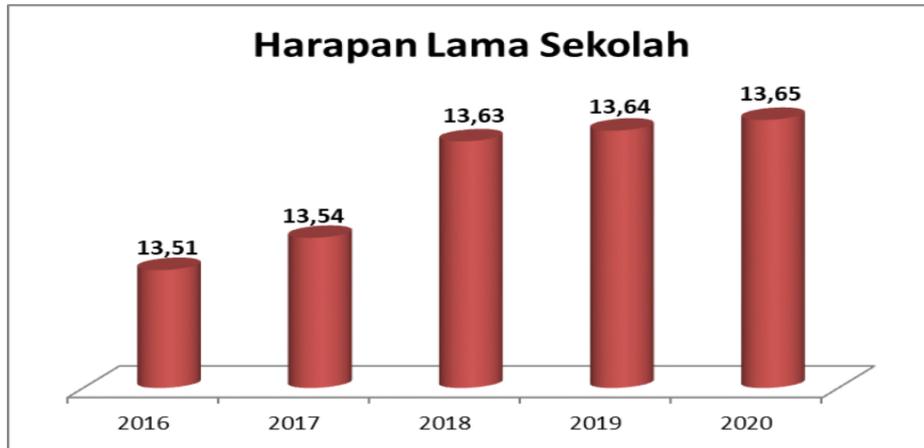


Sumber : BPS Kabupaten Manokwari, 2021

2.2.2.3 Harapan Lama Sekolah

Salah satu unsur komponen pembentuknya adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah di Kabupaten Manokwari pada tahun 2020 yaitu 13,65, artinya penduduk usia sekolah di Kabupaten Manokwari diharapkan mampu menamatkan pendidikan sampai dengan tingkat pendidikan jenjang SMA dan Perguruan Tinggi (Diploma I). Harapan lama sekolah terus meningkat setiap tahunnya walaupun tidak signifikan.

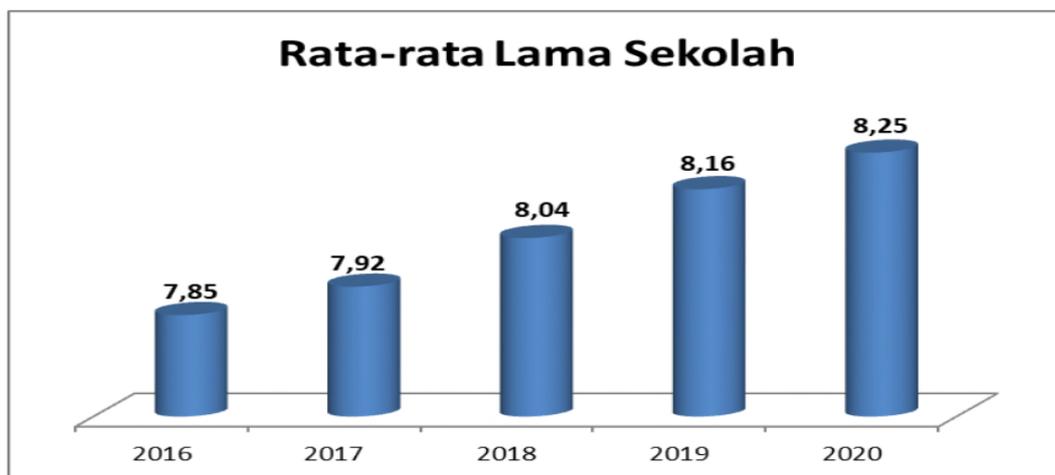
Grafik 2. 13 Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020



2.2.2.4 Rata-Rata Lama Sekolah

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Manokwari melalui berbagai program telah dilakukan, namun rata-rata pendidikan penduduk kabupaten Manokwari secara umum relatif masih rendah. Hal ini tercermin melalui nilai rata-rata lama sekolah yang dicapai. Pada Tahun 2020, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Manokwari sebesar 8,25 tahun. Angka ini belum mencapai waktu sekolah dasar sembilan tahun yang diprogramkan oleh Pemerintah sehingga perlu dorongan dari berbagai pihak untuk menuntaskan program sekolah dasar sembilan tahun di Manokwari.

Grafik 2. 14 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020



2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib kepada masyarakat merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Manokwari belum optimal. Hal ini terlihat dari masih minimnya berbagai pelayanan-pelayanan dasar kehidupan masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi dalam pembangunan kedepannya jika tidak dilakukan perbaikan tatanan pelayanan masyarakat secara berkualitas dan menyeluruh. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Manokwari hingga saat ini.

2.3.1.1 Pendidikan

Pelayanan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar khusus yang wajib untuk diberikan kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan pendidikan ini harus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas subyek pembangunan untuk mengoptimalkan setiap lini pembangunan daerah utamanya pada masa mendatang. Oleh karena itulah, pendidikan harus menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terutama dalam hal peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan dasar. Gambaran pencapaian pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Manokwari diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 13 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Cakupan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	%	85	22,72	26,73
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	83,05	83,05
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	%	100	57,8	57,8
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI <0,05	%	0,05	0	100
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs < 0,02	%	0,02	0	100
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	89,98	89,98
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	29,58	29,58
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	89,39	89,39
Persentasi Mahasiswa asal Manokwari mendapat bantuan pendidikan	%	100	100	100
Jumlah Asrama kondisi layak huni	%	28	28	100

2.3.1.2 Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan semata-mata bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dapat menggambarkan status kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Capaian indikator pada Urusan Kesehatan Kabupaten Manokwari tersaji sebagai berikut.

Tabel 2. 14 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan kunjungan bayi	%	100	50,82	100	100	80,14	n/a
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	n/a
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	75	100	79,06	79,06	62,86	n/a
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	0	45	45	72,59	n/a
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	48,68	49,21	49,21	100	n/a
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	n/a
Penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan	%	100	n.a	85,18	85,18	76,64	n/a
Rasio Tenaga Dokter per 100.000 penduduk	%	9,36	5,27	5,62	5,62	7,58	n/a
Rasio Tenaga Paramedis per 100.000 penduduk	%	139,13	78,29	107,77	107,77	65,97	n/a
Rasio Tenaga Bidan per 100.000 penduduk	%	51,78	29,14	51,96	51,96	36,93	n/a
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	33,53	39,31	27,75	27,75	29,27	n/a
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	54,70	139,22	146,06	146,06	146,06	n/a

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan prioritas utama daerah yang dilakukan dengan cara meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang layak sehingga mendukung tumbuh kembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Adapun indikator kinerja yang menunjukkan hasil capaian pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manokwari tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 15 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%		22,99	22,99	22,99	n/a	n/a
Ruang Terbuka Hijau	%		13,40	14,14	14,14	n/a	n/a
Kawasan Kumuh	%		13,45	12,02	12,02	n/a	n/a

2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada RPJMD Kabupaten Manokwari tahun 2016 – 2020 ditetapkan kebijakan berupa bantuan pembangunan rumah bagi penduduk berpenghasilan rendah dan pengembangan permukiman ditunjang fasilitas lingkungan permukiman yang memadai, dengan program strategis berupa pengembangan perumahan, penyediaan penyediaan air minum, lingkungan sehat perumahan, dan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

Tabel 2. 16 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	%		59,01	48,84	48,84	n/a	n/a
Berkurangnya luas kawasan kumuh	%		12,02	11,94	10,64	n/a	n/a
Rumah Tangga belum memiliki jamban sendiri	%		59,01	52,77	52,77	n/a	n/a
Cakupan layanan air bersih	%		56,06	50,39	50,39	n/a	n/a
Rumah Tangga pengguna listrik PLN	%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Ruang Terbuka Hijau Publik	%		13,40	14,14	14,14	n/a	n/a

2.3.1.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Pemerintah Daerah wajib menjalankan urusan tersebut sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat, memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. Kinerja Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tersaji pada tabel berikut.



Tabel 2. 17 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kegiatan mitigasi bencana	%		2	0	n/a	n/a	n/a
Jumlah kasus kerusakan akibat bencana	%		0	0	0	0	n/a
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	%		2	2	2	n/a	n/a
Konflik Sosial	%		2	4	4	n/a	n/a
Pelaksanaan kegiatan/perayaan hari besar keagamaan	%		0	0	0	0	n/a
Bantuan pembangunan prasarana peribadatan	%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

2.3.1.6 Urusan Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah wajib menjalankan Urusan Sosial dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah atau capain kinerja Kabupaten Manokwari terkait pelaksanaan pembangunan sosial dapat diukur dari kinerja sebagai berikut.

Tabel 2. 18 Capaian Kinerja Urusan Sosial

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Menurunnya angka kriminal	%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	%		66,97	90,65	90,65	n/a	n/a
Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	%		66,97	90,65	90,65	n/a	n/a
Fasilitasi penyelesaian kasus-kasus di lokasi transmigrasi	%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Penanganan KAT	%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah KH tertangani	%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah cacat yang dibina	%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah lansia PMKS tertangani	%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi daerah, karena dengan berkurangnya pengangguran maka

akan memperkecil angka kemiskinan. Capaian pada urusan ketenagakerjaan digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2. 19 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh	%		19,29	58,60	58,60	n/a	n/a
Pencari kerja yang ditempatkan	%	25	n/a	2,71	2,71	n/a	n/a
Tingkat Pengangguran Terbuka	%		n/a	6,65	6,65	6,92	7,47

2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan di Kabupaten Manokwari. Capaian terhadap sasaran penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termuat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 20 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%		n/a	6,81	6,81	n/a	n/a
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%		n/a	93,67	93,67	n/a	n/a
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	%		n/a	75,11	75,11	n/a	n/a
Proporsi penanganan penyelesaian kasus kekerasan anak dan perempuan	%		66,97	90,65	90,65	n/a	n/a
Rasio KDRT	%		0,16	0,37	0,37	n/a	n/a

2.3.2.3 Urusan Ketahanan Pangan

Capaian terhadap penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 21 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Regulasi ketahanan pangan	Ada/Tidak		n/a	n/a	n/a	Ada	n/a
Ketersediaan pangan utama	%		9,83	n/a	n/a	6,31	n/a
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha		5,35	n/a	n/a	370,70	n/a

2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Kebijakan pembangunan pada urusan pertanahan dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi, berupa pengadaan tanah maupun penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Pengadaan tanah mempunyai peran yang tak kalah penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan sarana yang memadai guna menarik investasi yang berujung pada terciptanya lapangan kerja. Capaian kinerja Urusan Pertanahan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 22 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Luas lahan bersertifikat	%		n/a	36,65	36,65	36,65	n/a
Penyelesaian kasus tanah negara	%	100	n/a	100	100	100	n/a
Penyelesaian ijin lokasi (PTSP)	%		100	n/a	n/a	n/a	n/a

2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Capaian penyelenggaraan urusan lingkungan hidup digambarkan melalui indikator berikut ini.

Tabel 2. 23 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Penanganan sampah	%		73	32,62	32,62	n/a	n/a
Kebersihan	%	100	n/a	100	100	n/a	n/a
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%		0,01	1	1	n/a	n/a
Penegakan hukum lingkungan	%		33	100	100	100	n/a

2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan pemerintah daerah pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil difokuskan guna mewujudkan sistem layanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, tertib dan terjangkau diseluruh kelurahan dan kampung. Capaian indikator kinerja daerah pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 24 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Kepemilikan KTP	%	100	38,92	50,29	50,29	65,01	n/a
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk	%	100	11,40	11,35	11,35	10,2	n/a

2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kebijakan pemerintah daerah diarahkan pada pengembangan kemampuan masyarakat yang bertujuan mewujudkan masyarakat mandiri. Capaian kinerja pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa termuat pada tabel berikut.

Tabel 2. 25 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kampung mandiri	%	18	0	0	0	0	n/a
Persentase kampung telah menyusun perencanaan dan penganggaran dengan baik	%	100	0	75,61	75,61	75,61	n/a
Persentase kampung telah menggunakan dana kampung sesuai juknis	%	100	6,10	6,10	71,34	71,34	n/a
Persentase kampung telah mengelola asset kampung dengan baik	%	100	0	12,20	12,20	12,20	n/a
Persentase kampung telah membuat SPJ dengan baik	%	100	6,10	30,49	30,49	30,49	n/a
Persentase kampung telah memiliki BUMDES	%		10,37	6,10	6,10	n/a	n/a

2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Capaian kinerja pemerintah daerah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi peserta KB aktif	%	71,08	62,52	68,32	68,32	19,22	n/a
Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan	%	45,98	16,09	13,79	13,79	48,78	n/a
Posyandu aktif	%	96,43	71,79	38,46	38,46	100	n/a

2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Capaian kinerja pada urusan perhubungan termuat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Angkutan darat	%		0,03	0,03	0,03		
Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Kasus		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengembangan Bandara Udara Rendani	Meter		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi, Pemerintah Manokwari menempatkan Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai komponen penting menuju pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government sebagai salah satu pengungkit dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan *Smart City* Kabupaten Manokwari, dengan capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 2. 28 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Website milik Pemerintah Daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase distrik terjangkau telepon	%	100	88,89	100	100	100	100

2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diarahkan pada pengembangan peran Koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha serta kelembagaan koperasi dan

UKM guna menumbuhkan wirausaha baru. Capaian kinerja pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Koperasi Aktif	%	49,13	23,44	51,43	51,43	62,43	n/a
Usaha Mikro Kecil	%	91,57	69,63	70,71	70,71	85,53	n/a

2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam mempercepat penanaman modal di daerah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Capaian kinerja pada Urusan Penanaman Modal tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 30 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	40	34	34	34	n/a	n/a
Nilai investasi PMDN/PMA	Rp.		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pameran/Expo	Kegiatan	5	1	1	1	4	n/a

2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan berdaya saing. Capaian kinerja Pemerintah Daerah pada urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah gelanggang/balai remaja	Unit		5	1	1	n/a	n/a
Jumlah lapangan olahraga	Unit		23	11	11	n/a	n/a

2.3.2.14 Urusan Statistik

Urusan statistik difokuskan pada penyusunan data statistik sektoral yaitu penyusunan PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, serta data sektoral lainnya yang terangkum dalam Dokumen Daerah Dalam Angka, yang nantinya dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Adapun, capaian kinerja daerah pada Urusan Statistik tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Urusan Statistik

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Buku Daerah Dalam Angka	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

2.3.2.15 Urusan Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan diarahkan pada peningkatan penghayatan dan pelestarian nilai budaya yang difokuskan pada pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya. Capaian daerah dalam pelaksanaan urusan kebudayaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah prestasi kelompok seni budaya tingkat provinsi			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah seni budaya unggulan daerah			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pelestarian situs budaya			14	7	7	n/a	n/a

2.3.2.16 Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kabupaten Manokwari dilakukan bersama dengan pelaksanaan urusan kearsipan yang diarahkan pada penyediaan kebutuhan informasi, peningkatan minat baca, pelestarian hasil budaya intelektual, dan pengembangan perpustakaan. Capaian daerah dalam pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Indikator	Satuan	Target	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	136,39	50	48,92	48,92	47,75	n/a
Pengunjung perpustakaan	Orang	10.000	203	2.283	2.283	1.369	n/a
Penerapan pengelolaan arsip secara baku	%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	33,33	33,33	37,50	n/a	n/a	n/a

2.3.2.17 Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan Perikanan berperan penting baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan maupun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan Perikanan di Kabupaten Manokwari dilaksanakan untuk mengembangkan budidaya perikanan secara optimal sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai tambah dan pendapatan pelaku budidaya ikan.

Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator	Satuan	Target RPJM	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Produksi perikanan	Ton/ Ha/ Thn	92,27	102,98	27,00	27,00	96,83	65,17
Tingkat Produksi perikanan Tangkap	Ton/ Ha/ Thn	94,30	103,18	109,91	109,91	97,63	63,39
Tingkat Produksi perikanan Budidaya	Ton/ Ha/ Thn	73,96	95,25	100,00	100,00	81,5	55,20
Konsumsi ikan	Kg/Kap/Thn	54,49	52,73	9,71	9,48	17,48	16,33

2.3.2.18 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang cukup penting dan mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Indikator	Satuan	Target RPJM	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
Kunjungan wisata	Orang	45.250	10.656	18.215	21.513	55.733	n.a
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		n.a	0,14	1,14	1,51	1,61	1,56

2.3.2.19 Pertanian

Pembangunan sektor pertanian mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan.

Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Indikator	Satuan	Target RPJM	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	n.a	0,13	13,53	13,36	13,16	13,48
% Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	100	0	0	29,75	44,59	62,29

2.3.2.20 Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan salah satu urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Manokwari. Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten dibatasi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang berhubungan dengan sumberdaya energi dan kebutuhan energi secara umum.

Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Indikator	Satuan	Target RPJM	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelayanan kelistrikan	%	100	77,89	76,16	76,60	76,91	77,09
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	n.a	0,24	2,37	2,35	2,46	2,50

2.3.2.21 Perdagangan

Perdagangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, utamanya dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Perdagangan dan investasi merupakan dua faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi.

Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator	Satuan	Target RPJM	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB			12,06	12,54	13,19	13,04	14,24
Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai Export-Import)			n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

2.3.2.22 Perindustrian

UU 3 tahun 2014 tentang Perindustrian memiliki dasar pertimbangan bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh, pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Tidak hanya dalam lingkup nasional pembangunan bidang perindustrian juga merupakan motor penggerak perekonomian di setiap daerah.

Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator	Satuan	Target RPJM	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB		4,80	3,22	3,30	3,50	3,77	4,23
Pertumbuhan Industri			87,91	87,91	87,91	54,42	n.a

2.3.2.23 Transmigrasi

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, hingga kini pemerintah masih berkepentingan untuk menempatkan transmigrasi sebagai satu model pembangunan. Hal ini berarti bahwa transmigrasi masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan pembangunan guna mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

Indikator	Satuan	Target RPJM	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Perkembangan Areal Transmigrasi	Unit	4 Kawasan	4	4	4	4	n.a
Jumlah Transmigrasi yang Berhasil Dimukimkan	Org	350	26	56	79	185	n.a

2.3.2.24 Kehutanan

Sumber daya hutan memiliki nilai strategis yang diperlukan bagi proses pembangunan, maka dalam pengelolaan dan pemanfaatannya supaya benar dan bijak sehingga fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia sumber daya bagi kesejahteraan masyarakat dapat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi berikutnya. Bagi masyarakat pengelola dan pemanfaat sumber daya hutan terus dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya-upaya konservasi dan pelestarian sumber daya hutan.

Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

Indikator	Satuan	Target RPJM	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
Luasan Taman Hutan Raya	Ha	400	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

2.3.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.3.1 Perencanaan

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah menjamin agar keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga tercapainya Penggunaan Sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat dijelaskan dengan melihat capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan

Indikator	Satuan	Target RPJM	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	n.a
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada (Perda nomor 3 tahun 2017)	Ada (Perda nomor 3 tahun 2017)	Ada	n.a
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	n.a
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	%	n.a	58,74	59,22	60,19	58,74	n.a
Tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	%	≥80	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Persentase realisasi pelaksanaan program/kegiatan	%	≥95	86,06	85,88	90,55	89,37	n.a

2.3.3.2 Keuangan

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah keuangan. Fungsi penunjang ini merupakan wewenang

pemerintah daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Capaian terhadap sasaran penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Keuangan digambarkan melalui indikator sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manokwari tahun 2016–2020 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 44 Capaian Kinerja Urusan Keuangan

Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJM	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	7,86	4,89	4,90	7,63	7,93	6,39
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WDP	Disclai mer	Disclai mer	WDP	WTP	-
Belanja langsung terhadap total APBD	%	≥50	50,57	51,42	57,50	61,76	45,05

2.3.3.3 Kepegawaian

Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditempuh melalui Peningkatan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pelatihan.

Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian

Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJM	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	n.a	27,43	78,77	78,77	78,77	n.a
Pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan	%	n.a	96,06	99,79	99,79	78,61	n.a
Tingkat disiplin pegawai	%	70,00	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	100,00	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Rasio pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	%	100,00	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Pembinaan kelembagaan Pemda	%	100,00	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

2.3.3.4 Pengawasan

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Manokwari merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan Kabupaten yang baik, efektif, efisien dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Capaian terhadap sasaran penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan digambarkan melalui indikator sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manokwari tahun 2016–2020 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

Indikator	Satuan	Target RPJM	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Tindak lanjut hasil Pemeriksaan/temuan	%	100	n.a	17,43	18,38	n.a	n.a
- Jumlah hasil temuan yang ditindaklanjuti	Rp.	n.a	n.a	13.973.624.895,04	13.712.382.280,43	n.a	n.a
- Jumlah hasil temuan	Rp.	n.a	n.a	80.168.088.631,10	74.606.201.798,48	n.a	n.a

2.3.3.5 Lainnya

Capaian terhadap sasaran penyelenggaraan Fungsi Penunjang Lainnya digambarkan melalui indikator sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manokwari tahun 2016–2020 disajikan sebagaimana tabel berikut

Tabel 2. 47 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJM	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pembentukan daerah Otonomi baru	Kab	1	0	0	0	0	n.a
Pembentukan Distrik Baru	Distrik	15	0	0	0	0	n.a
Pembentukan Kelurahan Baru	Kel	11	0	0	0	0	n.a
Penyelesaian tapal batas wilayah Kabupaten Manokwari		100	0	0	0	100	n.a
Pengembangan Kantor Bupati	Gedung	3	0	1	1	3	n.a
Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan dan Distrik yang memadai	Unit	12	0	0	0	12	n.a
Prosentase Prolegda yang terselesaikan		n.a	0	15,79	15,79	100	n.a
Jumlah Keputusan DPRD	Buah	14	0	7	7	18	n.a
Keputusan Pimpinan DPRD	Buah	6	0	10	10	83	n.a
Keputusan Bersama	Buah	2	0	2	2	2	n.a
Peraturan Daerah	Buah	1	0	7	7	7	n.a

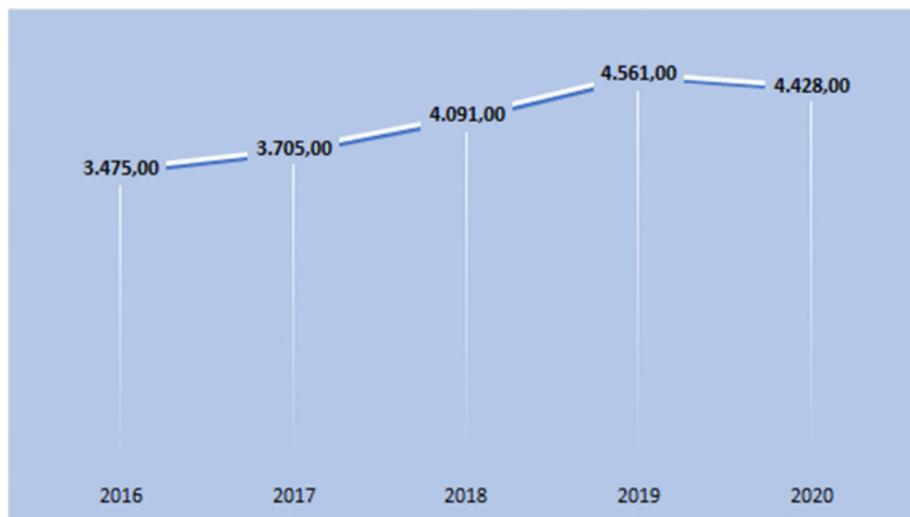
2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Berdasarkan data BPS, indikator Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Manokwari selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan. Tahun 2016 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3.475 juta rupiah meningkat sampai dengan 4.428 juta rupiah di Tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan semakin tingginya kemampuan masyarakat Kabupaten Manokwari dalam membeli suatu barang atau jasa. Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Manokwari periode 2016 sampai 2020 tersaji pada grafik 2.15 berikut.

Grafik 2. 15 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Manokwari (juta).

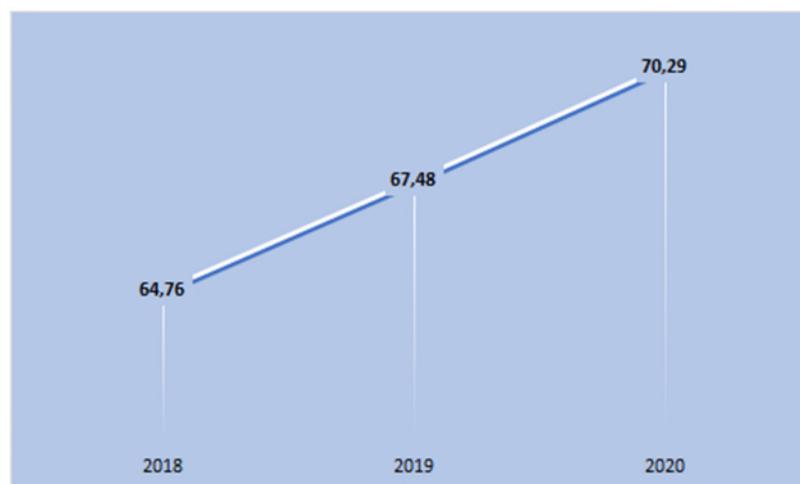


Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran
Kabupaten Manokwari, 2016-2020

2.4.2 Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang memberikan informasi besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja di suatu wilayah. Tingkat kesempatan kerja juga menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Berdasarkan data periode 2018-2020, diketahui bahwa TKK Kabupaten Manokwari cenderung meningkat. Posisi TKK tertinggi terjadi pada Tahun 2020 yaitu 70,29 persen. Kondisi ini mengindikasikan dari tahun ke tahun cenderung terjadi peningkatan angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Manokwari.

Grafik 2. 16 Tingkat kesempatan Kerja Kabupaten Manokwari

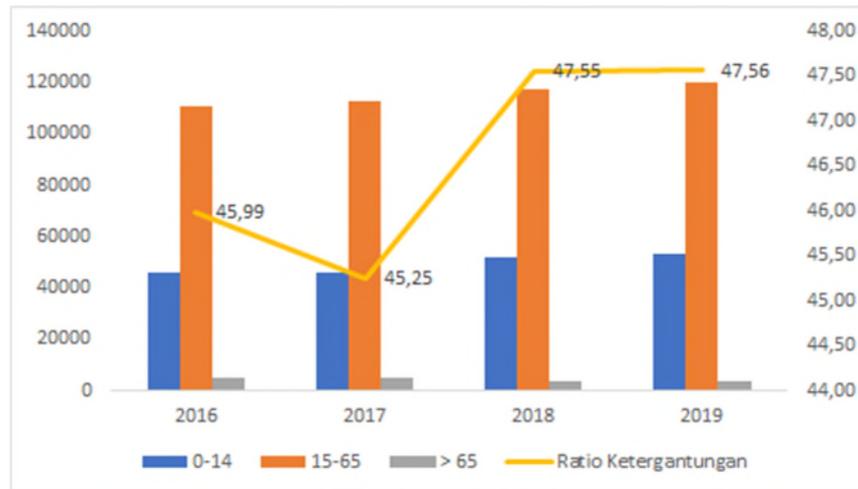


Sumber : Manokwari Dalam Angka (2018-2020)

2.4.3 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Berdasarkan data periode 2016-2020

Grafik 2. 17 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Manokwari



Sumber : Manokwari Dalam Angka (2016-2019)

Pada tahun 2019, angka *dependency ratio* untuk Kabupaten Manokwari sebesar 47,56 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 44-47 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun 2017 ke tahun 2019, angka *dependency ratio* menunjukkan peningkatan, yang berarti bahwa semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.4.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Terdapat 4 indikator utama dalam urusan lingkungan hidup yang meliputi penanganan sampah, kebersihan, tempat pembuangan sampah persatuan penduduk dan penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan hasil capaian menunjukkan terdapat penurunan jumlah sampah yang ditangani dimana mencapai 73% pada tahun 2016 justru turun pada tahun 2017 dan 2018 mencapai 32,62%. Sedangkan untuk kebersihan pada sektor pasar telah mencapai 100% dimana 2 pasar dari total 2 pasar semuanya dinyatakan bersih. Capaian baik begitu juga pada sektor penegakan hukum lingkungan yang mencapai 100%. Total Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari menindak 8 kasus lingkungan.

Berikut merupakan tabel capaian kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Manokwari.

Tabel 2. 48 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018
1	Penanganan sampah	%	52,00	73,00	32,62	32,62
	Volume sampah yang ditangani	m3	25	65	16.930	16.930
	Volume produksi sampah	m3	40	27	51.905	51.905
2	Kebersihan	%	n.a	n.a	100,00	100,00
	Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik	unit	n.a	n.a	2	2
	Jumlah seluruh pasar tradisional	unit	n.a	n.a	2	2
3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,02	0,01	1,00	1,00
	Jumlah daya tampung TPS	m3	25	25	60	60
	Jumlah penduduk	jiwa	160.285	284.854	284.854	284.854
4	Penegakan hukum lingkungan	%	33,00	33,00	100,00	100,00
	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	kasus	n.a	1	8	8
	Jumlah kasus lingkungan yang ada	kasus	n.a	3	8	8

2.4.5 Indeks Reformasi Birokrasi

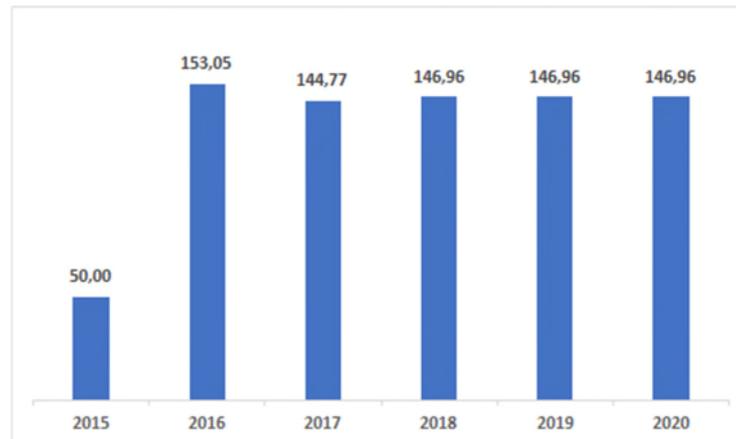
Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pengukuran penerapan reformasi birokrasi menggunakan indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Pada Tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami penurunan. Semula, indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari adalah predikat B atau 81,14% pada Tahun 2019, menurun menjadi K pada Tahun 2020 atau 51,35% .

2.4.6 Indeks Rasio Bencana Daerah

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Manokwari dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, pada tahun 2018 sampai tahun 2020 memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 146,96 (tinggi). Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah dan masyarakat Kabupaten Manokwari untuk dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Grafik 2. 18 Rasio Risiko Bencana Daerah Kabupaten Manokwari



Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia 2020

2.5 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama-sama dengan seluruh stakeholder, serta akademisi telah melaksanakan analisis terhadap pencapaian TPB/SDGs untuk periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

Data capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diperoleh dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari maupun instansi terkait lainnya melalui desk pengumpulan data, selain itu data juga diperoleh dari dokumen yang telah disusun sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui OPD terkait maupun Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manokwari. Metode yang digunakan dalam analisis tersebut adalah *gap analysis* (Analisis Kesenjangan) yang digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara capaian indikator TPB saat ini dengan kondisi yang diharapkan (target yang ditetapkan berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017). Dengan demikian berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui nilai gap (selisih) antara capaian pada tahun terakhir data yang tersedia dengan target yang telah ditetapkan, yang selanjutnya kondisi dari pelaksanaan masing-masing indikator di Kabupaten Manokwari tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu : Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional,



Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional, Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional, dan Indikator yang belum tersedia data/ Data belum tersedia.

Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional secara rinci dibedakan menjadi 4 keterangan, yaitu :

- Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional (tanpa *), yaitu indikator yang belum dilaksanakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional*, yaitu indikator yang secara perhitungan (dalam menghitung capaian indikator)/ seharusnya melekatnya capaian indikator berada pada pemerintah di atasnya (Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat);
- Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional**, yaitu indikator yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat (bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Manokwari);
- Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional***, yaitu indikator yang bersifat khusus, pemberlakuannya hanya diperuntukkan untuk daerah- daerah tertentu (tidak diberlakukan untuk semua daerah).

Selain diketahui besar gap (selisih) dan kondisi pelaksanaan dari masing-masing indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Manokwari, pada analisis tersebut juga dilakukan identifikasi terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/instansi yang memiliki kewenangan untuk mengelola/melaksanakan masing-masing indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tersebut, sehingga dengan demikian dapat diketahui OPD/ Instansi terkait yang melaksanakan/berhubungan dengan pencapaian indikator tersebut.

Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Manokwari 2021-2026, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian indikator SDGs Kabupaten Manokwari tahun 2015-2019 disajikan pada tabel dibawah ini.



Tabel 2. 49 Analisis Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari

Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
Capaian Indikator TPB Untuk Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan)										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun menjadi 7-8%	25,28%	24,93%	24,32%	22,21%	21,06%	-13,06%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Meningkat menjadi 95%	30,60%	n/a	85,20%	85,20%	n/a	-9,80%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal (Jml TK 2019 = 129.366.192, sehingga kepesertaan 50,94%)	n/a	n/a	31,33%	78,81%	75,86%	24,92%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang teenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Meningkat menjadi 17,12%	n/a	n/a	1,91%	9,57%	1,90%	-15,22%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Sosial
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	Menurun menjadi 2,8 juta (Tingkat penurunan sebesar 66,7% atau 16,7% per tahun)	6567	6597	6582	9897	7686	5,64%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Sosial



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkat menjadi 70%	65,40%	n/a	59,53%	74,97%	83%	13,00%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12- 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Meningkat menjadi 63%	21,86%	n/a	18,52%	n/a	48,22%	-14,78%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin	Meningkat menjadi 65%	67,39%	62,52%	68,32%	68,35%	n/a	3,35%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Meningkat menjadi 100%	n/a	n/a	62,93%	66,87%	74,95%	-25,05%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkat menjadi 100%	n/a	n/a	n/a	45,13%	57,82%	-42,18%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Meningkat menjadi 94,78%	97,61%	95,63%	93,98%	92,49%	92,83%	-1,95%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Meningkat menjadi 82,2%	69,34%	74,06%	73,55%	74,78%	75,77%	-6,43%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Meningkat menjadi 77,4%.	9,71%	13,98%	17%	26,84%	42,15%	-35,25%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Meningkat menjadi 100%	n/a	n/a	83,29%	95,84%	n/a	-4,16%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	0	0	0	0	0	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningkat menjadi 39 daerah	0	0	0	3	0	-39	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Meningkat menjadi 151 ribu (Rata-rata 294 per Kab./Kota)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Sosial
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Meningkat menjadi 81,5 ribu (Rata-rata 159 per Kab./Kota)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Sosial



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Sosial; Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Menurun menjadi 118,6	204,8	153,04	144,77	146,95	146,95	-28,35	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	2	0	1	0	1	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Meningkat	4,20%	4,37%	2,56%	2,15%	1,82%	-0,33%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Sosial; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial)	Meningkat	4,51%	12,58%	19,68%	25,27%	24,28%	-0,99%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum	Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Dinas



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
	sebagai persentase dari total belanja pemerintah								Mencapai Target Nasional	Pendidikan dan Kebudayaan; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian Indikator TPB Untuk Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan)										
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	Menurun menjadi 17%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Menurun	n/a	n/a	n/a	5%	10%	-5%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Menurun menjadi 8,5 %	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta	Menurun menjadi 28%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
	usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe									
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Meningkat menjadi 50%	n/a	n/a	93,38%	n/a	93,87%	43,87%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang di indikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/ kapita/ tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Capaian Indikator TPB untuk Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Menurun menjadi 306	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Meningkat menjadi 95%	n/a	n/a	93,46%	89,48%	97%	2%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkat menjadi 85%	65,40%	n/a	59,53%	74,97%	83%	-2,00%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Menurun menjadi 24	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Meningkat menjadi 95%	n/a	n/a	n/a	n/a	75,93%	-19,07%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Menurun menjadi < 0,5%	0,04%	0,04%	0,02%	0,00%	0,11%	0,39%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Menurun menjadi 245	218	166	187	187	n/a	58	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Menurun	n/a	n/a	6,9	7,3	7,5	-0,2	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Meningkat menjadi 300	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional*	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional*	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Meningkat menjadi 34 provinsi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional*	Kementerian Kesehatan
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Meningkat menjadi 35	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional*	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Menurun menjadi 5,4%	n/a	n/a	n/a	n/a	25,77%	-20,37%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Menurun menjadi 24,3%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Polres Manokwari



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Meningkat menjadi 280	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional*	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Menurun menjadi angka 0,02%	n/a	3,14%	1,64%	1,42%	0,30%	-0,28%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	BNN Provinsi Papua Barat
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun)	Meningkat menjadi 66%	67,39%	62,52%	68,32%	68,35%	n/a	2,35%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Meningkat menjadi 65%	67,39%	62,52%	68,32%	68,35%	n/a	3,35%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Meningkat menjadi 23,5%	n/a	26,19%	27,38%	n/a	n/a	3,88%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	Menurun menjadi 38	n/a	n/a	n/a	3,22%	n/a	34,78%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah	Dinas Pemberdayaan Perempuan,



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
	<i>(Age Specific Fertility Rate/ASFR)</i>								Mencapai Target Nasional	Perlindungan Anak & KB
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Menurun menjadi 2,28	n/a	n/a	n/a	1,88%	n/a	0,40%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	Menurun menjadi 9,9%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Meningkat	n/a	n/a	n/a	851/100	851/100	-1	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	0,306	n/a	0,852	0,852	n/a	-0,098	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	BPJS Kesehatan
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Meningkat	n/a	n/a	n/a	0,002283	0,002874	0,0005911	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Kesehatan



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari untuk Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas)										
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4 (b) tingkat akhir SD/kelas 6 (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (ii) matematika	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Meningkat menjadi 84,2%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Meningkat menjadi 81%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Meningkat menjadi 114,09%	119,30%	118,22%	104,76%	103,38%	110,26 %	-3,83%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Meningkat menjadi 106,94%	76,57%	91,88%	89,98%	83,90%	88,37%	-18,57%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Meningkat menjadi 8.8 tahun	7,75	7,85	7,92	8,04	8,16	-0,64	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkat menjadi 77.2%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Meningkat	41,87%	n/a	53,71%	74,60%	80,76%	6,16%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	Meningkat	(i) 97,61% ; (ii) 69,34%	(i) 95,63% ; (ii) 74,06%	(i) 93,98% ; (ii) 73,55%	(i) 92,49% ; (ii) 74,78%	(i) 92,83% ; (ii) 75,77%	(i) 0,34% ; (ii) 0,99%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Meningkat menjadi 96,1%	88,77%	21,20%	96,83%	96,83%	n/a	0,73%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat	88,77%	21,20%	96,83%	96,83%	n/a	0,73%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran (c) komputer untuk tujuan pengajaran (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas (e) air minum layak (f) fasilitas	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
	sanitasi dasar per jenis kelamin (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air sanitasi dan higienis bagi semua (WASH))									
4.c.1*	Persentase guru TK SD SMP SMA SMK dan PLB yang bersertifikat pendidik	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari untuk Tujuan 5 (Kesetaraan Gender)										
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Bertambah sebanyak 16	n/a	n/a	n/a	n/a	3	-13	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Menurun	108	117	136	137	105	32	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Menurun	0,04%	0,05%	0,06%	0,06%	n/a	-0,01%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Meningkat menjadi 70%	80,95%	79,41%	62,00%	46,74%	74,63%	4,63%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB; Dinas Kesehatan
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Meningkat menjadi 21 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB; Dinas Kesehatan
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Menurun menjadi 38	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB; Dinas Kesehatan
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat parlemen daerah dan pemerintah daerah	Meningkat	n/a	20,00%	20,00%	20,00%	28,00%	8%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Sekretariat DPRD



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Meningkat	n/a	n/a	n/a	9,38%	9,38%	-0,01%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB; Dinas Kesehatan
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Menurun menjadi 99%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB; Dinas Kesehatan
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Meningkat menjadi 85%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB; Dinas Kesehatan
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	66,25%	n/a	68,28%	73,10%	n/a	4,82%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
Capaian Indikator TPB untuk Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Meningkat menjadi 100%	n/a	n/a	62,93	66,87	74,93	-25,07	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga perkotaan dan industri serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Meningkat menjadi 1.186 m3/detik	2649024	2018304	2018304	2018304	2175984	2174798	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	PDAM Kabupaten Manokwari
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Meningkat menjadi 100%	n/a	n/a	62,93	66,87	74,93	-25,07	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kesehatan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Meningkat menjadi 100%	n/a	n/a	n/a	45,13	57,81	-42,19	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Meningkat menjadi 45000 dalam skala nasional (Jika jumlah Kabupaten/ Kota di Indonesia sebanyak 514 Kabupaten/ Kota maka angka yang harus dicapai oleh suatu daerah adalah sebanyak 88 Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STB (Diperoleh dari pembagian angka skala nasional dan jumlah keseluruhan kabupaten/ kota yang hasilnya 87,5)	n/a	n/a	n/a	3	7	-81	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Meningkat	n/a	n/a	n/a	3	7	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota kawasan dan komunal	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	3	7	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional*	Dinas Lingkungan Hidup & Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Meningkat	0	0	0	0	0	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional*	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Meningkat	n/a	n/a	92,57	94,55	52,22	-42,33	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.3.2.(a)	Kualitas air danau	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional***	Kementerian Lingkungan Hidup
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-1	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	ada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional***	Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PUPR
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	8 WS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-8	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	10 WS (skala nasional)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional**	Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PUPR
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-1	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari untuk Tujuan 7 (Energi bersih dan Terjangkau)										
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	10 - 16%	n/a	n/a	n/a	1,88%	5,25%	-4,75%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Bagian Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah
7.3.1*	Intensitas energi primer	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional) (0,9)	n/a	n/a	n/a	0,00933 11	0,00319 6	0,896804 248	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Bagian Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari untuk Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Meningkat	n/a	4,40%	4,90%	3,80%	n/a	-1,10%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	BPS Kabupaten Manokwari
8.1.1.(a)	PDB per kapita	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	33.999.560	35.511.650	37.269.270	38.690.500	n/a	-11.309.500	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	BPS Kabupaten Manokwari
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil perorang bekerja per tahun	Meningkat	n/a	n/a	n/a	7,31%	-2,85%	-10,15%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non- pertanian berdasarkan jenis kelamin	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	0,51%	n/a	n/a	40,07%	41,70%	53,42%	2,42%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Meningkat	2,60%	n/a	4,30%	0,60%	n/a	-3,70%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	25%	n/a	10,25%	36,18%	37,89%	n/a	12,89%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Meningkat	50.375	55.925	60.537,05	66.675	73.625	6.950	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun	n/a	n/a	2,68%	4,88%	4,68%	0,20%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	Menurun	16,90%	n/a	12,90%	22,90%	20,30%	2,60%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.6.1*	Persentase usia muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Meningkat menjadi 8%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional) (36.968)	353	152	200	182	n/a	-36.786	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkat	13.640	10.504	18.015	21.331	n/a	3.316	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional**	Kementerian Keuangan; Kementerian Pariwisata
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	n/a	n/a	0,0017	0,00176	0,00244	0,00075	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Menurun (mendekat)	n/a	n/a	0,0017	0,00176	0,00244	0,00075	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Meningkat	n/a	43,47%	37,01%	32,58%	28,36%	-4,22%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat
Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari untuk Tujuan 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)										
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	1000 Km (skala Nasional)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional**	Kementerian PUPR
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Bertambah 3.258 km	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional**	Kementerian Perhubungan
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional**	Kementerian Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	24 pelabuhan (skala nasional)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional**	Kementerian Perhubungan
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkat	3,35%	3,22%	3,30%	3,47%	3,71%	0,24%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	2,84%	4,50%	9,74%	11,97%	11,42%	5,29%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	Meningkat	66,25%	n/a	68,28%	73,10%	n/a	4,82%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	18,64%	n/a	35,03%	41,03%	n/a	6,00%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika
Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari untuk Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan)										
10.1.1*	Koefisien Gini	Menurun menjadi 0,36	0,47	0,31	0,37	n/a	n/a	-0,01	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	BPS Kabupaten Manokwari
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun menjadi 7-8%	25,28%	24,93%	24,32%	22,21%	21,06%	-13,06%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Sosial
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	80 Kabupaten (skala nasional)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional**	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	0	0	0	0	0	-5	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional***	-
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Menurun menjadi 14%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional***	-
10.2.1*	Proporsi Penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Sosial
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	BPS Kabupaten Manokwari
10.3.1.(d)	Jumlah Kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Tidak ada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Bagian Hukum & HAM Sekretariat Daerah
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	n/a	n/a	31,33%	78,81%	75,86%	24,00%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari untuk Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan)										
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	3,7 juta rumah tangga (53,86%)	n/a	n/a	92,57%	94,55%	52,24%	-1,62%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional***	-
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	5 metropolitan (skala nasional)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional***	-
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	Ada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Bagian Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Ada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional***	-
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	0	0	0	0	0	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Menurun menjadi 30%	204,8	153,04	144,77	146,95	146,95	-30%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Ada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Meningkat menjadi 80%	-	-	-	-	54%	-26%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Meningkat/ada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional***	-
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Meningkat/ada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional***	-



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Ada	2	0	1	0	1	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari untuk Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)										
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional) (Rata-rata per daerah : 291.828,79 atau peningkatan 12,5% per tahun)	52%	73%	32,62%	32,62%	n/a	-12,50%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 ton per hari (skala nasional) (Rata-rata per daerah : 38,91 Kg per Hari)	25	65	16930 (46,38 /hari)	16930 (46,38 /hari)	n/a	7,47	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas
Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari untuk Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim)										
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	2	0	1	0	1	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2*	Jumlah korban meninggal hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	0	0	0	0	0	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari untuk Tujuan 15 (Ekosistem Daratan)										
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	100	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	5,5 juta ha (skala nasional)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	Ada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari untuk Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh)										
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Polres Manokwari
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Polres Manokwari
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Polres Manokwari
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Polres Manokwari
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh setahun terakhir	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Menurun	0,05%	n/a	0,07%	0,05%	n/a	0,02%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	BPS Kabupaten Manokwari
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60, Kota: 65%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Badan Pendapatan
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan	Meningkat menjadi 80%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/ Kota: 45%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Meningkat	n/a	20%	20%	20%	28%	8%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Sekretariat DPRD
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Meningkat	n/a	n/a	n/a	9,38%	9,38%	-0,01%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Meningkat menjadi 77,4%	n/a	n/a	n/a	10,23%	n/a	-67,17%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Meningkat menjadi 85%	9,71%	13,98%	17%	26,84%	42,15%	-42,85%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10.2. (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Tidak ada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Bagian Hukum & HAM Sekretariat Daerah
Capaian Indikator TPB Kabupaten Manokwari untuk Tujuan 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan)										
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Meningkat	101,20%	88,15%	90,18%	137,01%	154,23 %	17,23%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Di atas 12%	0,31%	0,35%	67,38%	65,62%	7,24%	-4,76%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Badan Pendapatan Daerah



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Meningkat	0,02%	0,19%	3,96%	3,68%	0,38%	-3,30%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	18,64%	n/a	35,03%	41,03%	n/a	6,00%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	100%							Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional***	Kementerian Komunikasi dan Informatika
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-1	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah



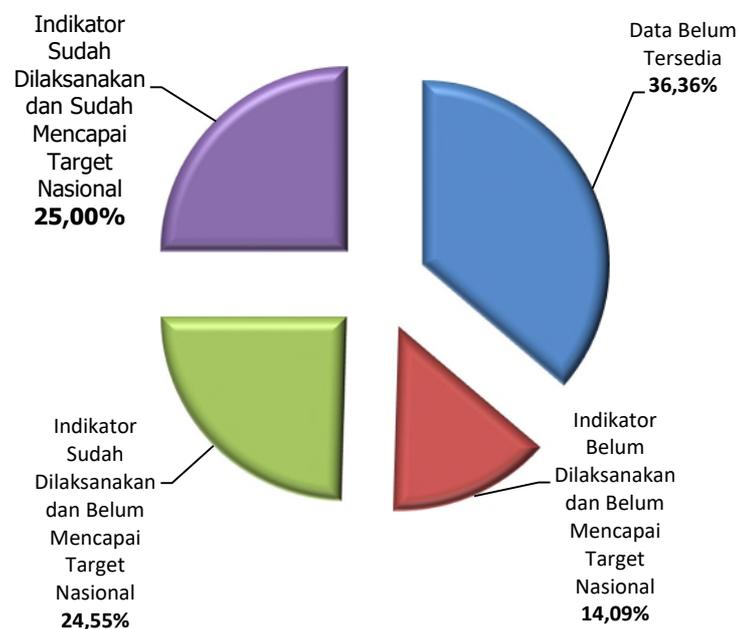
Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator	
			2015	2016	2017	2018	2019				
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-1	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas statistik	Meningkat	n/a	n/a	n/a	90	99,18	9,18	9,18	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	BPS Kabupaten Manokwari
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Meningkat	n/a	n/a	n/a	70	86,67	16,67	16,67	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	BPS Kabupaten Manokwari
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	4	0	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	BPS Kabupaten Manokwari
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDG's terpilah yang relevan dengan target	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Data Belum Tersedia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	-1	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	BPS Kabupaten Manokwari



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dengan Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019			
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Meningkat	n/a	n/a	n/a	85,32	97,86	12,54	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	BPS Kabupaten Manokwari
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	95	-	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	BPS Kabupaten Manokwari

Berdasarkan pada hasil analisis capaian Indikator TPB di atas selanjutnya dapat diketahui bahwa dari 220 indikator, terdapat 165 indikator yang belum mencapai target nasional diantaranya 80 indikator yang belum tersedia data dukung, 31 indikator yang belum dilaksanakan karena merupakan kewenangan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, dan 54 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, sedangkan dari 55 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional.

Grafik 2. 19 Persentase Capaian Keseluruhan Indikator TPB Kabupaten Manokwari Terhadap Target Nasional



Untuk mengetahui daftar permasalahan dan isu utama pada masing-masing Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Manokwari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 48 Permasalahan dan Isu Utama Indikator TPB Kabupaten Manokwari

Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan)			
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Masih terdapat 13,06% penduduk miskin yang belum terentaskan untuk mencapai target 7% - 8%	Tingkat kemiskinan masih tinggi



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Sebanyak 9,8% penduduk masih belum menjadi peserta SJSN Bid. Kesehatan	Keikutsertaan Jaminan Kesehatan belum merata
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	-	Keikutsertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sudah baik
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Sebanyak 15,22% penyandang disabilitas belum teenuhi hak dasar dan inklusivitas	Pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas belum merata
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	-	Rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan menurun
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	-	Kesadaran masyarakat dalam penggunaan faskes sudah tinggi
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Masih terdapat kekurangan sebesar 14,78% anak umur 12- 23 bulan yang belum menerima imunisasi dasar lengkap dari target sebesar 63%	Pemberian imunisasi dasar lengkap belum optimal
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	-	Penggunaan metode kontrasepsi (CPR) sudah tinggi
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Sebanyak 25,05% rumah tangga belum memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Akses terhadap layanan sumber air minum layak belum merata
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Sebanyak 42,18% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Akses terhadap layanan sanitasi layak belum merata
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/ MI/ sederajat masih kurang sebesar 1,95% dari target nasional	Partisipasi sekolah pada jenjang SD/ MI/ sederajat belum maksimal
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP/ MTs/ sederajat masih kurang sebesar 6,43% dari target nasional	Partisipasi sekolah pada jenjang SMP/ MTs/ sederajat belum maksimal
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0- 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Sebanyak 35,25% penduduk umur 0-17 tahun belum memiliki akta kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran belum merata
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Terdapat 4,16% rumah tangga miskin dan rentan yang belum memiliki sumber penerangan listrik	Akses penerangan listrik pada rumah tangga miskin dan rentan belum merata



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	-	Korban dampak bencana mengalami penurunan
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah masih mengalami kekurangan sebanyak 39 daerah dari target nasional	Pengurangan risiko (mitigasi) bencana daerah belum optimal
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	-	-
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	-	-
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	-	-
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi masih memiliki kekurangan sebesar 28,35 dari target nasional	Risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan masih tinggi
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana belum dilakukan penghitungan	Dampak ekonomi akibat bencana belum terhitung
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	-	Dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tersedia
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Alokasi dana untuk program pemberantasan kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,33% dari tahun 2018	Alokasi sumber daya untuk pengentasan kemiskinan menurun
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Persentase pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) terhadap total belanja pemerintah mengalami penurunan sebesar 0,99% dari tahun 2018	Pengeluaran untuk layanan pokok berkurang
Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan)			
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	-	-
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	-	-
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat mengalami peningkatan sebesar 5% dari tahun sebelumnya	Tingkat kerawanan pangan penduduk meningkat
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	-	-



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	-	-
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta	-	-
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	-	-
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	-	-
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	-	ASI eksklusif pada bayi terpenuhi
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	-	-
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	-	-
Tujuan 3 (Tanpa Kelaparan)			
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	-	-
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	-	Tingkat persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terlatih tinggi
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Masih terdapat kekurangan sebesar 2% perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas Kesehatan untuk mencapai target nasional sebesar 85%	Masih terdapat persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	-	-
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	-	-
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	-	-
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Masih terdapat 19,07% bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap dari target yang mencapai 80%	Imunisasi dasar lengkap pada bayi belum merata
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	-	Prevalensi HIV pada populasi dewasa telah menurun
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	-	Kejadian tuberkulosis masih rendah
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Angka kejadian malaria meningkat sebanyak 0,2 per 1000 orang dari tahun 2018	Angka Kejadian Malaria masih sangat tinggi



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	-	-
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	-	-
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	-	-
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	-	-
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	-	-
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Masih terdapat sebanyak 20,37% penduduk dengan usia di bawah 18 tahun yang merokok dari target nasional sebesar 5,4%	Penduduk dengan usia di bawah 18 tahun yang merokok masih tinggi
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	-	-
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	-	-
3.4.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri	-	-
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	-	-
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Masih terdapat kekurangan sebesar 0,28% penurunan kasus penyalahgunaan narkoba dari target nasional sebesar 0,02%	Penurunan penyalahgunaan narkoba belum optimal
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	-	-
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	-	Penggunaan alat kontrasepsi metode modern sudah tinggi
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	-	Penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara sudah tinggi
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	-	Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern sudah tinggi



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	-	Tingkat kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Angka ASFR) menurun
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	-	Tingkat kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun (Angka TFR) menurun
3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	-	-
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem Kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk masih stagnan	Cakupan asuransi kesehatan masyarakat tidak bertambah
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Sebanyak 9,8% penduduk masih belum menjadi peserta SJSN Bid. Kesehatan	Keikutsertaan Jaminan Kesehatan belum merata
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan	-	-
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	-	-
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	-	-
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	-	Distribusi tenaga kesehatan sudah merata
Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas)			
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4 (b) tingkat akhir SD/kelas 6 (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (ii) matematika	-	-
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	-	-
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	-	-
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI memiliki selisih 3,83% dari target nasional	Partisipasi sekolah (kasar) pada tingkat SD/MI belum optimal
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI memiliki selisih 18,57% dari target nasional	Partisipasi sekolah (kasar) pada tingkat SMP/ MTs belum optimal
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun pada tahun 2019 masih mencapai 8,16 tahun (masih memiliki kekurangan sebanyak 0,64 tahun dari target nasional yang ditetapkan selama 88 tahun)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 masih rendah
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	-	Remaja dan dewasa dengan keterampilan TIK sudah merata
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	-	Partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs sudah baik
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	-	Kemampuan membaca dan menulis pada penduduk umur ≥ 15 tahun sudah merata
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	-	Kemampuan membaca dan menulis penduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15-59 tahun sudah baik
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran (c) komputer untuk tujuan pengajaran (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas (e) air minum layak (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air sanitasi dan higienis bagi semua (WASH)	-	-
4.c.1*	Persentase guru TK SD SMP SMA SMK dan PLB yang bersertifikat pendidik.	-	-
Tujuan 5 (Kesetaraan Gender)			
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan memiliki kekurangan sebesar 13 dari target nasional	Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan belum optimal
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	-	Kekerasan fisik dan seksual pada perempuan dapat ditekan
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	-	-



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan masih stagnan sebesar 0,6% sehingga belum mengalami penurunan	Kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak oleh selain pasangan belum menurun
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	-	Korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif sudah terpenuhi
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20- 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	-	-
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun	-	-
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	-	-
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat parlemen daerah dan pemerintah daerah	-	Keterwakilan perempuan pada parlemen tingkat daerah (DPRD) meningkat
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Eselon II) mengalami kondisi stagnan dari tahun 2018	Perempuan yang berada di posisi managerial (Eselon II) belum mengalami peningkatan
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15- 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi	-	-
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	-	-
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	-	-
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	-	Kepemilikan masyarakat terhadap telepon genggam meningkat
Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)			
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Masih terdapat 25,07% rumah tangga yang belum memiliki akses pada air minum layak	Belum meratanya akses terhadap layanan sumber air minum layak
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga perkotaan dan industri serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	-	Air baku untuk kebutuhan pelayanan rumah tangga perkotaan dan industri sudah terpenuhi



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Sebanyak 25,07% populasi belum memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Akses terhadap layanan sumber air minum layak belum merata
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	-	-
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Sebanyak 42,19% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Akses terhadap layanan sanitasi layak belum merata
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Terdapat 81 desa/ kelurahan yang belum melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB)	Pelaksanaan STBM telah berjalan namun belum mencapai target nasional
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	-	Desa/ Kelurahan yang melaksanakan <i>Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)</i> meningkat
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota kawasan dan komunal	-	-
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Belum terdapat rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Pelayanan sistem pengelolaan air limbah terpusat belum terlaksana
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	-	-
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Terdapat penurunan rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja sebesar 42,33%	Sistem pelayanan pengelolaan lumpur tinja belum merata
6.3.2.(a)	Kualitas air danau	-	-
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	-	-
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Tidak terdapat insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri belum dilaksanakan
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	-	-
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Belum terdapat jaringan informasi sumber daya air yang terbentuk	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air belum dilaksanakan



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	-	-
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Belum terdapat penataan kelembagaan air	Penataan kelembagaan air belum dilaksanakan
Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau)			
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Energi terbarukan masih rendah (masih kurang sebanyak 4,75%)	Bauran Energi Terbarukan masih rendah
7.3.1*	Intensitas energi primer	-	Intensitas Energi Primer cukup rendah
Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)			
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Laju PDRB perkapita pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,1% dari tahun 2017	Pertumbuhan nilai tambah produksi perkapita menurun
8.1.1.(a)	PDB per kapita	PDRB Perkapita belum mencapai target nasional sebesar Rp. 50 Juta Rupiah perkapita (Masih kurang sebanyak Rp. 11.309.500,-)	Nilai tambah produksi perkapita belum maksimal
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja/ tingkat pertumbuhan PDRB riil orang bekerja pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 10,15%	Pertumbuhan nilai tambah produksi per tenaga kerja menurun
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian berdasarkan jenis kelamin	-	-
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	-	Persentase tenaga kerja formal meningkat
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Tenaga Kerja Informal sektor pertanian menurun sebesar 3,7% dari 4,3% menjadi 0,6%	Tenaga Kerja Informal sektor pertanian menurun
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	-	Persentase akses UMKM terhadap layanan keuangan sudah tinggi
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	-	Upah rata-rata per jam pekerja meningkat
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	-	Tingkat pengangguran mengalami penurunan
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	-	Angka pekerja setengah pengangguran (bekerja kurang dari jam normal) menurun
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	-	-



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	-	-
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara masih sangat sedikit (pada tahun 2018 sebanyak 182 atau mengalami penurunan sebesar 9% dari tahun 2017)	Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara masih rendah
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	-	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara meningkat
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	-	-
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	-	-
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	-	Jumlah Kantor Bank dan ATM per 100.000 penduduk meningkat
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	-	-
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit mengalami penurunan sebesar 4,22% dari tahun 2018	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit menurun
Tujuan 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)			
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	-	-
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	-	-
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	-	-
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	-	-
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	-	Nilai tambah sektor industri manufaktur semakin besar
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	-	Industri manufaktur penopang pertumbuhan ekonomi
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	-	-
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	-	-
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	-	-
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	-	-
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile <i>broadband</i>	-	-
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	-	Kepemilikan masyarakat terhadap telepon genggam meningkat



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	-	Masyarakat pengguna internet meningkat
Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan)			
10.1.1*	Koefisien Gini	Terdapat kekurangan sebesar 0,01 untuk mencapai target penurunan Gini Rasio sebesar 0,36	Tingkat ketimpangan masih tinggi
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Masih terdapat 13,06% penduduk miskin yang belum terentaskan untuk mencapai target 7%-8%	Tingkat kemiskinan masih tinggi
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	-	-
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	-	-
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Masih terdapat kekurangan sebanyak 5 desa maju untuk mencapai target minimal 5 desa/ kabupaten	Belum ada desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	-	-
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	-	-
10.1.1*	Koefisien Gini	Terdapat kekurangan sebesar 0,01 untuk mencapai target penurunan Gini Rasio sebesar 0,36	Tingkat ketimpangan masih tinggi
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Masih terdapat 13,06% penduduk miskin yang belum terentaskan untuk mencapai target 7%-8%	Tingkat kemiskinan masih tinggi
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	-	-
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	-	-
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	-	-
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	-	Keikutsertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sudah baik
Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan)			
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Masih terdapat 1,62% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dari target nasional	Akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau belum merata
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi	-	-



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
	standar pelayanan perkotaan (SPP)		
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	-	-
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	-	-
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	-	-
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	-	Korban dampak bencana mengalami penurunan
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Penurunan Indeks Resiko Bencana belum mencapai target nasional (30%)	Indeks resiko bencana belum mengalami penurunan
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	-	-
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana belum dilakukan penghitungan	Dampak ekonomi akibat bencana belum terhitung
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Masih terdapat 26% sampah perkotaan yang belum tertangani dari target nasional sebesar 80%	Penanganan sampah perkotaan belum optimal
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	-	-
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	-	-
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	-	Dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tersedia
Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab)			
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah memiliki kekurangan sebesar 12.5% dari target nasional	Limbah B3 dan proporsi limbah B3 yang terkelola belum optimal
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang di daur ulang	-	Daur ulang timbulan sampah sudah baik
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	-	-
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	-	-
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	-	-



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim)			
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	-	Dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tersedia
13.1.2*	Jumlah korban meninggal hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	-	Korban dampak bencana mengalami penurunan
Tujuan 15 (Ekosistem Daratan)			
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	-	Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan sudah baik
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	-	-
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	-	-
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	-	-
Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh)			
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	-	-
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	-	-
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	-	-
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	-	-
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	-	-
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	-	-
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	-	Tingkat kekerasan seksual perempuan dan laki-laki umur 18-24 tahun semakin sedikit
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	-	-
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	-	-



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	-	-
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	-	-
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	-	-
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	-	-
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	-	-
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	-	Keterwakilan perempuan pada parlemen tingkat daerah (DPRD) meningkat
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Proporsi perempuan sebagai pengambil keputusan (Eselon I dan II) mengalami kondisi stagnan dari tahun 2018	Perempuan yang berada di posisi pengambil keputusan (Eselon I dan II) belum mengalami peningkatan
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	-	-
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Masih terdapat kekurangan sebesar 67,17% penduduk 40% berpendapatan kebawah yang belum memiliki akta	Kepemilikan akta penduduk 40% berpendapatan ke bawah belum merata
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Sebanyak 42,85% penduduk umur 0-17 tahun belum memiliki akta kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran belum merata
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan	-	-



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	-	-
Tujuan 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan)			
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	-	Pendapatan daerah terhadap PDRB meningkat
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio pajak terhadap PDRB masih mencapai 7,24%	Penerimaan pajak masih belum optimal
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik mengalami penurunan sebesar 3,30% dari tahun 2018	Pendanaan anggaran domestik dari pajak menurun
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan	-	-
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	-	-
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	-	Masyarakat pengguna internet meningkat
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	-	-
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Tidak adanya proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU	Penawaran proyek dengan skema KPBU belum berjalan
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Tidak ada alokasi penyiapan proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU	Alokasi penyiapan proyek dengan skema KPBU belum ada
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	-	Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPS tinggi
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	-	Penggunaan data BPS sebagai rujukan utama sangat tinggi
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	-	Sudah terdapat metadata kegiatan statistik dasar sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDG's terpilah yang relevan dengan target	-	-



Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Permasalahan	Isu Utama
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	Data registrasi kelahiran dan kematian belum tersedia	Penyediaan data registrasi kelahiran dan kematian belum terlaksana
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	-	Pengunjung yang mengakses data dan informasi statistik via <i>website</i> BPS meningkat
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	-	Konsumen yang puas terhadap akses data BPS semakin baik

2.6 Kerja Sama Daerah

Secara normatif, pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor 078/270; Nomor 134.4/086/KSB/429.012/2019 tentang pengembangan e-Government. Dalam tahapan pengembangan e-Government pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Manokwari fokus pada pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Management Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yang merupakan sebuah aplikasi *e-Government* yang memuat eplanning dan e-budgeting, yang ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor 078/280 dan Nomor 134.4/089/PKS/429.012/2019.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan kerangka kebijakan menengah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah.

Guna menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, telah dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Strategi yang ditempuh dirumuskan dalam berbagai paket kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pebiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa APBD merupakan instrumen kunci dalam Sistem Pengelolaan keuangan daerah.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah, sementara pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk



memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 6 (enam) tahun kedepan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, mengamanatkan bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 maka periodisasi RPJMD adalah 2021 – 2026, yang selanjutnya digunakan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Manokwari, dijabarkan sebagai berikut :

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

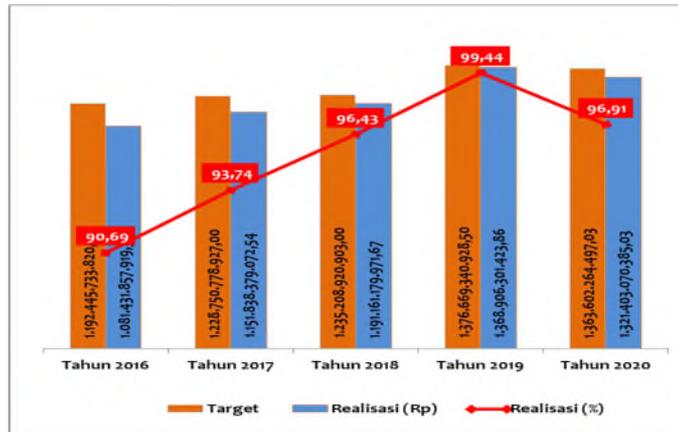
Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Manokwari sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut :

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah selama periode tahun 2016–2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019.

Grafik 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016-2020



Pendapatan daerah secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016-2020 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Rata-Rata Penyerapan	Rata-Rata Pertumbuhan
		Target	Realisasi										
1	Pendapatan Daerah	1.192.445.733.820,35	1.081.431.857.919,38	1.228.750.778.927,00	1.151.838.379.072,54	1.235.208.920.903,00	1.191.161.179.971,67	1.376.669.340.928,50	1.368.906.301.423,86	1.363.602.264.497,03	1.321.403.070.385,03	95,44	5,70
1.1	Pendapatan Asli Daerah	66.111.797.828,00	51.522.059.446,38	54.373.489.498,00	56.422.377.432,54	90.855.363.704,00	90.863.070.042,97	102.053.492.440,10	108.554.356.172,86	83.389.821.626,68	84.605.179.537,03	97,91	15,09
1.1.1	Pajak Daerah	32.447.437.000,00	20.474.054.756,00	36.397.437.000,00	42.152.483.348,63	42.995.755.048,00	43.521.842.103,64	49.588.441.671,15	50.978.235.100,10	33.791.028.249,33	41.005.553.163,27	100,86	12,59
1.1.2	Retribusi Daerah	8.815.000.000,00	3.604.832.206,00	11.711.052.498,00	9.887.401.710,00	6.501.616.371,00	6.371.741.984,00	6.936.538.950,00	4.851.004.146,00	4.324.263.900,00	2.737.466.436,00	71,31	-12,33
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.500.000.000,00	-	-	-	1.687.940.297,00	1.687.940.297,00	3.971.368.638,00	2.916.695.607,00	4.600.000.000,00	3.308.719.172,00	49,07	60,24
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	16.349.360.828,00	27.443.172.484,38	6.265.000.000,00	4.382.492.373,91	39.670.051.988,00	39.281.545.658,33	41.557.143.180,95	49.808.421.319,76	40.674.529.477,35	37.553.440.765,76	109,80	20,71
1.2	Dana Perimbangan	816.451.118.481,35	732.039.890.898,00	756.469.665.625,00	742.128.145.104,00	754.675.673.712,00	741.699.915.641,00	818.703.807.000,00	858.054.499.178,00	671.770.518.700,00	721.630.121.045,00	99,65	1,25
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	63.592.114.281,35	69.140.038.898,00	66.807.543.625,00	91.093.926.714,00	68.588.868.712,00	75.184.956.266,00	75.244.774.000,00	126.145.825.509,00	37.554.652.000,00	92.164.746.736,00	153,55	8,94
1.2.2	Dana Alokasi Umum	526.449.164.000,00	526.449.164.000,00	522.441.560.000,00	522.441.560.000,00	529.220.329.000,00	527.015.244.300,00	551.415.407.000,00	550.138.169.330,00	501.716.434.000,00	499.695.314.000,00	99,79	-0,49
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	226.409.840.200,00	136.450.688.000,00	167.220.562.000,00	128.592.658.390,00	156.866.476.000,00	139.499.715.075,00	192.043.626.000,00	181.770.504.339,00	132.499.432.700,00	129.770.060.309,00	83,74	2,78
1.2.3.1	Dana Alokasi Khusus (Regular)	143.820.687.000,00	90.494.619.000,00	112.349.000.000,00	89.935.507.000,00	55.538.000.000,00	54.168.969.644,00	61.322.641.000,00	59.180.160.937,00	41.780.740.700,00	39.427.737.383,00	86,28	-19,94
1.2.3.2	Dana Alokasi Khusus (Penugasan)	32.689.224.000,00	17.934.650.000,00	19.833.000.000,00	15.874.001.050,00	31.616.000.000,00	29.999.981.118,00	63.335.492.000,00	60.340.532.387,00	28.078.629.000,00	27.165.862.631,00	84,36	20,79
1.2.3.3	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	49.899.929.200,00	28.021.419.000,00	35.038.562.000,00	22.783.150.340,00	51.937.476.000,00	42.560.906.013,00	13.936.761.000,00	13.744.288.616,00	53.269.018.000,00	53.817.080.500,00	80,55	13,22
1.2.3.4	Dana Alokasi Khusus (Afirmasi)	-	-	-	-	17.775.000.000,00	12.769.858.300,00	53.448.732.000,00	48.505.522.399,00	9.371.045.000,00	9.359.379.795,00	52,49	47,59
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	309.882.817.511,00	297.869.907.575,00	417.907.623.804,00	353.287.856.536,00	389.677.883.487,00	358.598.194.287,70	455.912.041.488,40	402.297.446.073,00	608.441.924.170,35	515.167.769.803,00	89,12	12,55
1.3.1	Pendapatan Hibah	26.262.728.000,00	1.262.850.000,00	20.000.000.000,00	-	8.000.000.000,00	3.000.000.000,00	19.706.508.000,00	14.704.508.000,00	35.685.576.238,00	35.185.576.238,00	43,10	76,22
1.3.2	Dana Darurat	100.356.882.000,00	113.251.399.153,00	63.602.848.900,00	52.389.089.000,00	-	-	-	-	-	-	39,04	-84,19

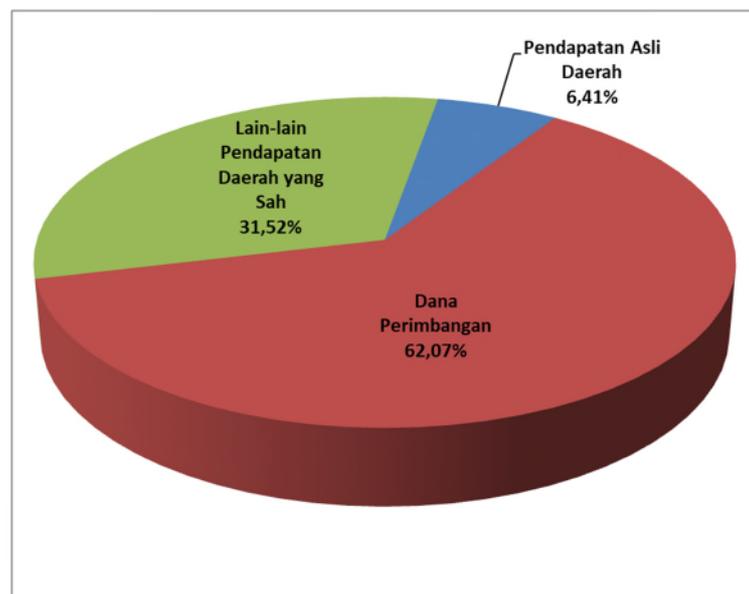


No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Rata-Rata Penyerapan	Rata-Rata Pertumbuhan
		Target	Realisasi										
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	36.793.878.287,00	23.311.575.422,00	25.982.906.476,00	24.494.631.025,00	37.269.173.331,00	22.987.192.137,00	32.741.837.786,00	38.007.699.530,00	46.524.330.509,35	24.127.418.518,00	77,45	5,70
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	146.469.329.224,00	160.044.083.000,00	180.914.380.428,00	149.187.332.007,00	191.721.860.156,00	171.334.691.000,00	231.327.441.702,40	178.986.879.000,00	156.984.540.000,00	240.002.026.490,00	102,27	10,54
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	127.407.488.000,00	127.216.804.504,00	152.686.850.000,00	161.276.311.150,70	172.136.254.000,00	170.598.359.543,00	369.247.477.423,00	215.852.748.557,00	72,61	35,19

Sumber : Dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan data tabel di atas, proporsi komponen pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa Dana Perimbangan merupakan jenis penerimaan tertinggi yang mendominasi besaran pendapatan daerah Kabupaten Manokwari yaitu mencapai 62,07, kemudian diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 31,52%, sementara Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 6,41%.

Grafik 3.2 Proporsi Komposisi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari TA. 2016-2020

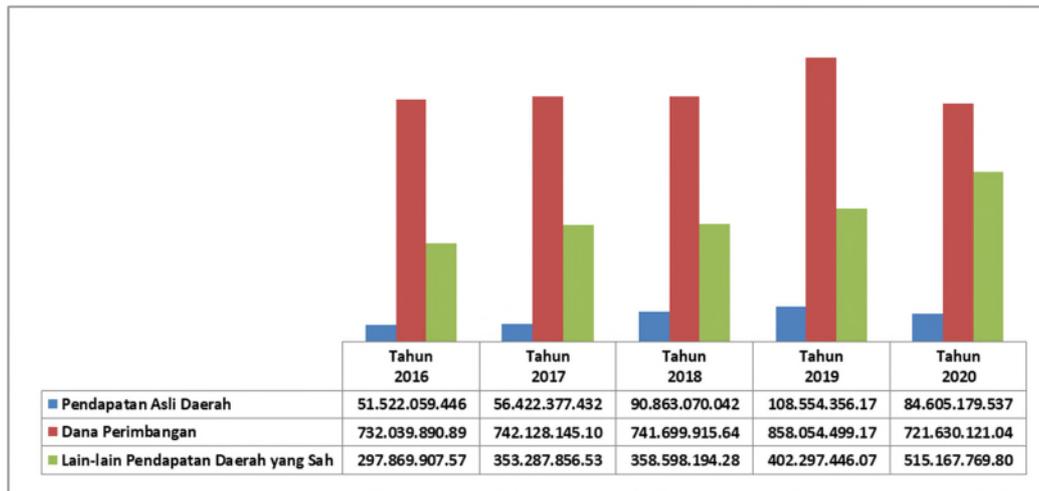


Pertumbuhan pendapatan daerah cenderung meningkat dengan rata-rata mencapai 5,70% selama 5 tahun, dengan pertumbuhan terbesar pada Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 15,09% dimana tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu mencapai 60,24%.

Sedangkan pertumbuhan Pendapatan Dana Perimbangan hanya mencapai 1,25% dimana tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak yaitu sebesar 8,94%. Sementara Dana Alokasi Umum cenderung mengalami penurunan mencapai -0,49%.

Selain dari PAD dan Pendapatan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang mengalami pertumbuhan selama 5 tahun mencapai 12,55%.

Grafik 3.3 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari TA. 2016-2020

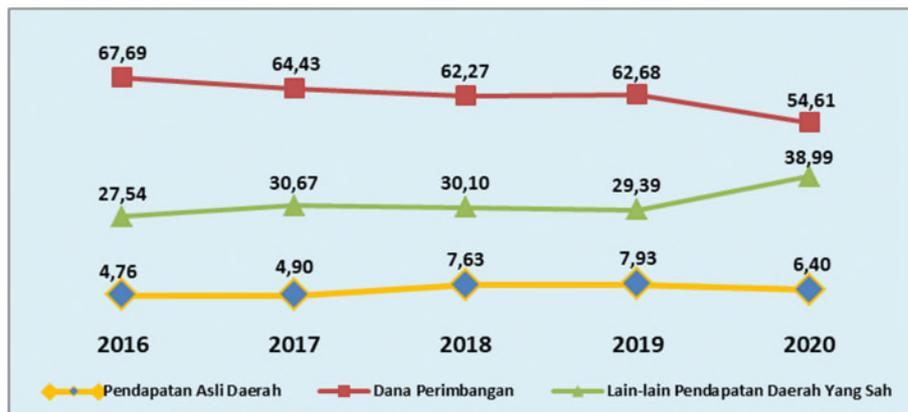


Proporsi masing-masing realisasi komponen pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah tersaji sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.2 Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	4,76	4,90	7,63	7,93	6,40
Dana Perimbangan	67,69	64,43	62,27	62,68	54,61
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27,54	30,67	30,10	29,39	38,99
Total	100	100	100	100	100

Grafik 3.4 Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020



Berdasarkan data pada grafik di atas, proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa Dana Perimbangan merupakan jenis penerimaan tertinggi yang mendominasi besaran pendapatan daerah Kabupaten Manokwari. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan jenis penerimaan daerah terkecil selama lima tahun terakhir, akan tetapi terjadi peningkatan nilai pendapatan asli daerah selama lima tahun ini. Merujuk pada Tabel 3.1 di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir telah mampu melewati target yang diberikan. Namun demikian, optimalisasi penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah masih perlu terus ditingkatkan.

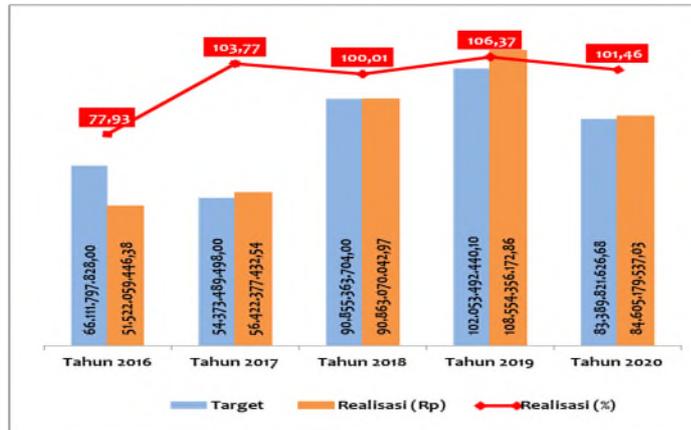
Secara terperinci, target dan realisasi pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah kabupaten Manokwari periode 2016-2020 direalisasikan mencapai Rp.391.967.042.631,78. Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2016 – 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik, walaupun capaian persentasenya bervariasi setiap tahun dimana pada tahun 2016 persentase realisasi masih dibawah target. Sementara pada 4 (empat tahun terakhir yaitu tahun 2017 – 2020 menunjukkan persentase realisasi pendapatan asli daerah berhasil melebihi target. Namun jika dilihat dari target pendapatan yang ditetapkan, terjadi penurunan target pada tahun 2017 dari tahun 2016, begitu pula yang terjadi pada tahun 2020 akibat

adanya bencana nasional Pandemi Covid-19. Realisasi kinerja pendapatan asli daerah periode 2016-2020 digambarkan pada grafik berikut.

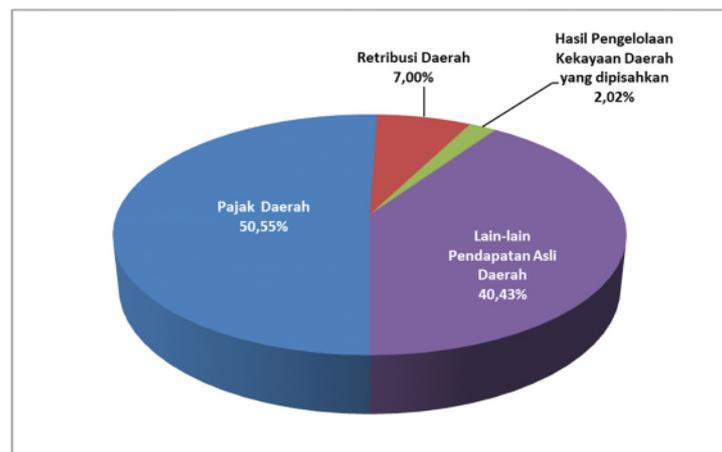
Grafik 3.5 Target dan Realisasi kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari TA. 2016-2020



Pendapatan Asli Daerah terdiri atas a) Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Adapun besarnya nilai pendapatan asli daerah kabupaten manokwari dari masing-masing komponen sumber pendapatan pada periode 2016-2020 yang tersaji pada Grafik berikut.

Grafik 3.6 Realisasi Komponen Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari TA. 2016-2020



Berdasarkan grafik diatas, terlihat rincian komponen sumber pendapatan asli daerah yang paling besar berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan pajak yaitu sebesar 50,55%, Lain lain pendapatan asli daerah penyumbang

terbesar kedua terhadap Pendapatan asli daerah yaitu sebesar 40,43% kemudian diikuti oleh penerimaan komponen pendapatan retribusi daerah sebesar 7%, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar 2,02%.

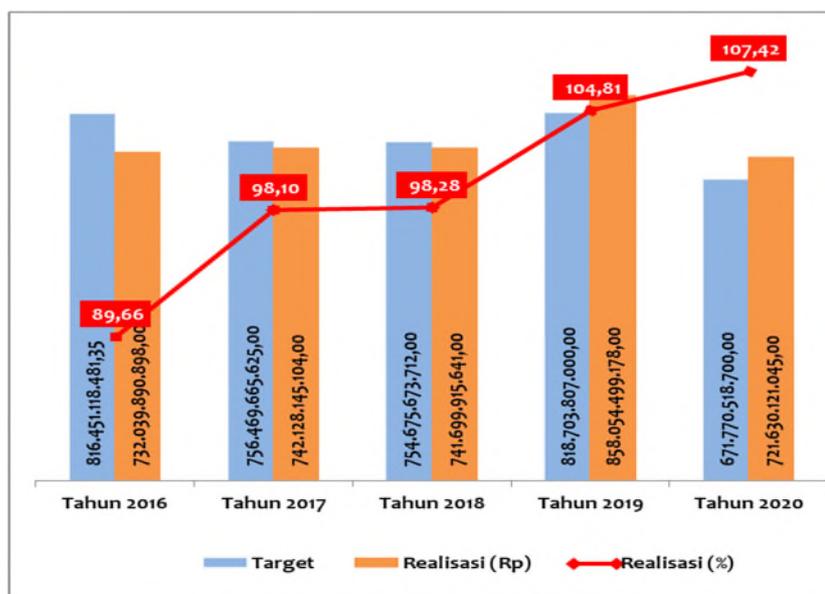
2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumberdaya alam, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan hingga saat ini merupakan sumber penerimaan terbesar di Kabupaten Manokwari. Realisasi Pendapatan dari Dana Perimbangan periode 2016-2020 mencapai Rp.3.795.552.571.866,00,-.

Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan selama tahun tahun 2016–2018 belum menunjukkan kinerja yang baik, dimana masih dibawah capaian target penerimaan. Sementara tahun 2019-2020, pemerintah daerah mampu merealisasikan penerimaan lebih dari target yang ditetapkan. Namun jika dilihat dari target pendapatan yang ditetapkan, terjadi penurunan target pada tahun 2017 dan 2018 dari tahun 2016, begitu pula yang terjadi pada tahun 2020 akibat adanya bencana nasional Pandemi Covid-19.

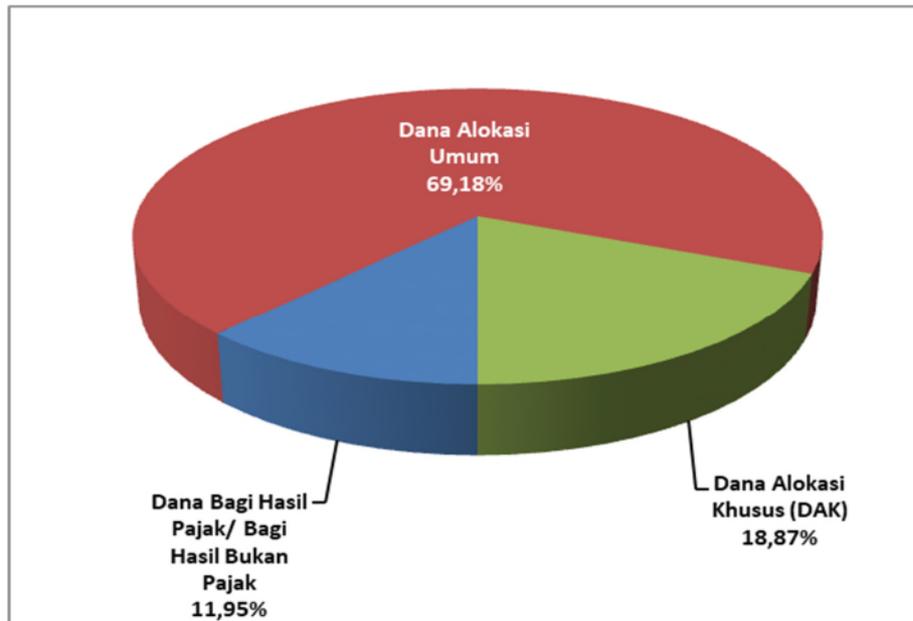
Perkembangan target dan realisasi kinerja pendapatan asli daerah periode 2016-2020 digambarkan pada grafik berikut.

Grafik 3. 7 Target dan Realisasi kinerja Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Manokwari TA. 2016-2020



Komposisi dana perimbangan selama Tahun 2016-2020 berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar 69,18% dan Dana Alokasi Khusus sebesar 18,87%, sedangkan sisanya sebesar 11,95% merupakan Dana Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Grafik 3.8 Realisasi Komponen Sumber Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Manokwari TA. 2016-2020

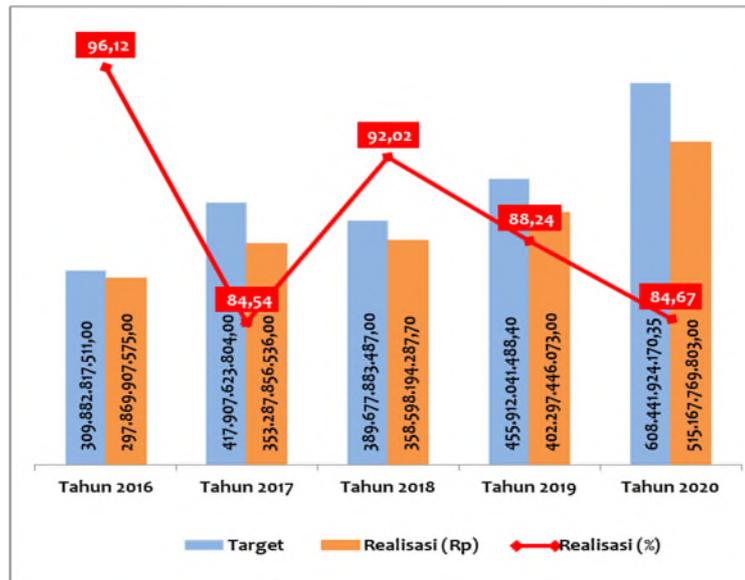


3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan 1) hibah; 2) dana darurat; 3) dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya; 4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, serta 5) bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah periode 2016-2020 mencapai Rp.1.927.221.174.274,70,-.

Perkembangan target dan realisasi kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah periode 2016-2020 digambarkan pada grafik berikut.

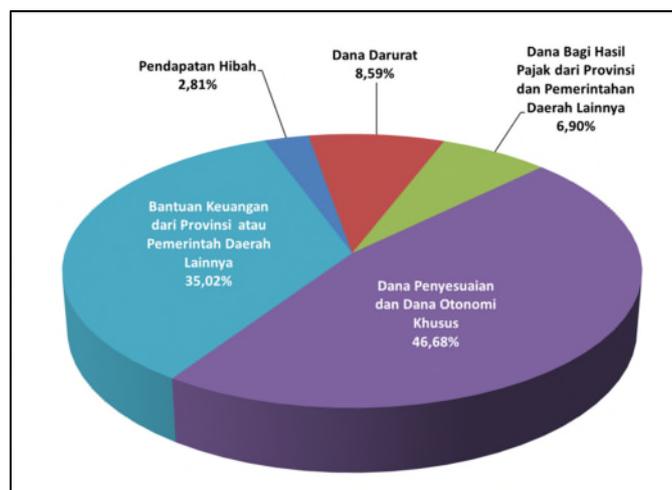
Grafik 3.9 Target dan Realisasi kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Manokwari TA. 2016-2020



Target pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejak tahun 2017 hingga 2020 setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, akan tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan.

Penyumbang terbesar dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sepanjang 5 (lima) tahun berasal dari Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus sebesar 46,68%, Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar 35,02%, sisanya sebesar 8,59% berupa Dana Darurat, 6,90% Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan 2,81% adalah Pendapatan Hibah.

Grafik 3.10 Realisasi Komponen Sumber Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA. 2016-2020



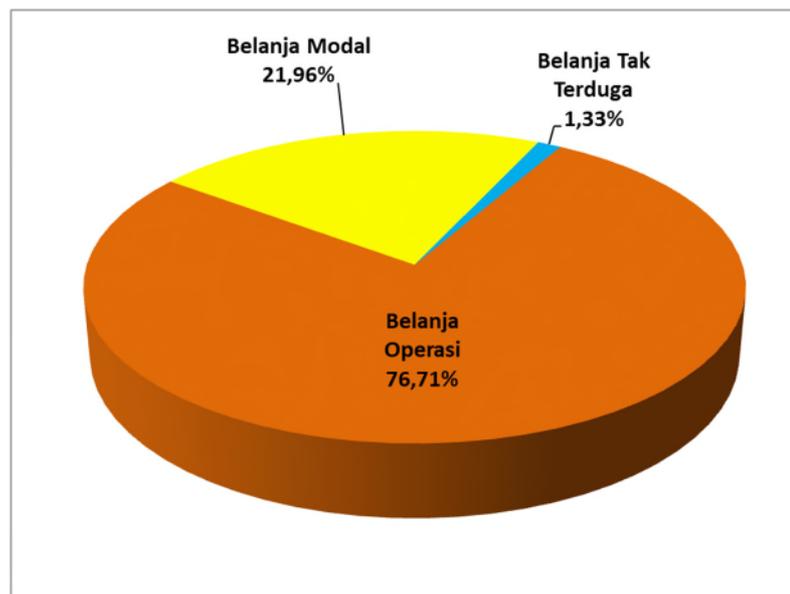
3.1.1.2 Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah.

Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Proporsi belanja operasi dan belanja modal selama tahun anggaran 2016-2020 tersaji pada Grafik berikut.

Grafik 3. 11 Persentase Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa alokasi belanja pada periode tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan alokasi belanja terbesar diarahkan untuk belanja operasi sebesar 76,71% kemudian diikuti oleh belanja modal sebesar 21,96% dan selanjutnya belanja tak terduga sebesar 1,33%.

Anggaran dan realisasi belanja daerah periode tahun anggaran 2016-2020 tersaji pada tabel berikut.



Tabel 3.3 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Rata-Rata Penyera pan	Rata-Rata Pertumbuhan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Belanja Daerah	1.094.855.699.420,34	965.672.763.816,50	1.013.151.190.569,50	852.497.592.848,25	1.090.480.564.282,00	1.006.982.119.065,27	1.289.373.988.000,25	1.171.968.401.444,27	1.205.969.322.235,11	1.111.807.878.697,66	89,55	5,99
2.1	Belanja Operasi	779.756.157.178,99	748.747.694.073,50	685.666.905.535,96	640.917.181.032,25	829.695.805.872,41	769.279.067.406,27	969.199.324.597,26	888.202.831.830,27	903.233.714.273,11	872.023.811.112,66	94,08	6,30
2.1.1	Belanja Pegawai	449.943.428.543,05	417.594.919.017,00	346.863.040.784,96	329.245.285.258,00	367.771.304.798,07	358.691.466.159,70	388.972.236.184,26	354.330.834.580,00	367.965.511.168,61	359.230.624.398,00	94,80	-2,52
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	6.573.929.450,00	3.624.938.925,00	-	-	-	-	2.804.227.336,00	2.804.227.336,00	31,03	15,43
2.1.3	Belanja Barang dan Jasa	248.286.683.452,94	249.626.804.151,50	291.851.899.301,00	270.101.456.849,25	400.969.267.924,34	355.279.391.246,57	507.893.608.413,00	469.055.437.250,27	392.550.226.600,50	377.373.905.122,66	94,04	13,20
2.1.4	Belanja Hibah	27.551.000.251,00	27.550.925.974,00	8.930.000.000,00	8.496.000.000,00	33.649.000.000,00	30.550.000.000,00	45.470.000.000,00	39.925.000.000,00	118.878.000.000,00	112.718.000.000,00	93,71	46,01
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	53.975.044.932,00	53.975.044.931,00	31.448.036.000,00	29.449.500.000,00	27.306.233.150,00	24.758.210.000,00	26.863.480.000,00	24.891.560.000,00	21.035.749.168,00	19.897.054.256,00	94,31	-23,77
2.1.6	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2.2	Belanja Modal	313.078.042.241,35	214.903.658.743,00	326.984.285.033,54	211.580.411.816,00	258.911.718.009,59	236.846.531.659,00	319.674.663.402,99	283.487.006.814,00	221.948.728.243,00	175.191.435.507,00	78,49	-0,34
2.2.1	Belanja Modal Tanah	10.054.820.920,00	10.018.730.920,00	40.085.926.000,00	10.003.628.000,00	40.634.472.196,00	32.979.977.220,00	25.401.000.000,00	24.642.103.869,00	35.939.763.439,00	754.183.651,00	60,97	-2,48
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.459.484.053,00	33.076.198.793,00	31.199.110.335,11	25.983.123.483,00	43.147.858.804,00	40.295.978.557,00	90.507.104.423,00	82.098.434.627,00	28.433.026.228,00	25.341.073.948,00	89,45	9,83
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.119.940.827,79	59.654.585.582,00	79.187.676.098,43	24.134.231.753,00	83.622.598.805,20	77.861.382.822,00	101.681.186.943,00	88.025.688.314,00	80.816.733.605,00	75.342.551.294,00	74,53	14,66
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	178.357.919.440,56	110.188.493.448,00	174.338.762.600,00	149.301.428.580,00	90.694.617.303,27	85.031.811.425,00	97.649.795.036,99	84.744.046.004,00	70.470.079.971,00	67.526.008.364,00	84,76	-15,09
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.085.877.000,00	1.965.650.000,00	2.172.810.000,00	2.158.000.000,00	812.170.901,12	677.381.635,00	4.435.577.000,00	3.976.734.000,00	6.289.125.000,00	6.227.618.250,00	93,13	34,46
2.3	Belanja Tak Terduga	2.021.500.000,00	2.021.411.000,00	500.000.000,00	-	1.873.040.400,00	856.520.000,00	500.000.000,00	278.562.800,00	80.786.879.719,00	64.592.632.078,00	56,28	92,56
2.3.1	Belanja tidak tersangka	2.021.500.000,00	2.021.411.000,00	500.000.000,00	-	1.873.040.400,00	856.520.000,00	500.000.000,00	278.562.800,00	80.786.879.719,00	64.592.632.078,00	56,28	92,56

Sumber : Dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 – 2020

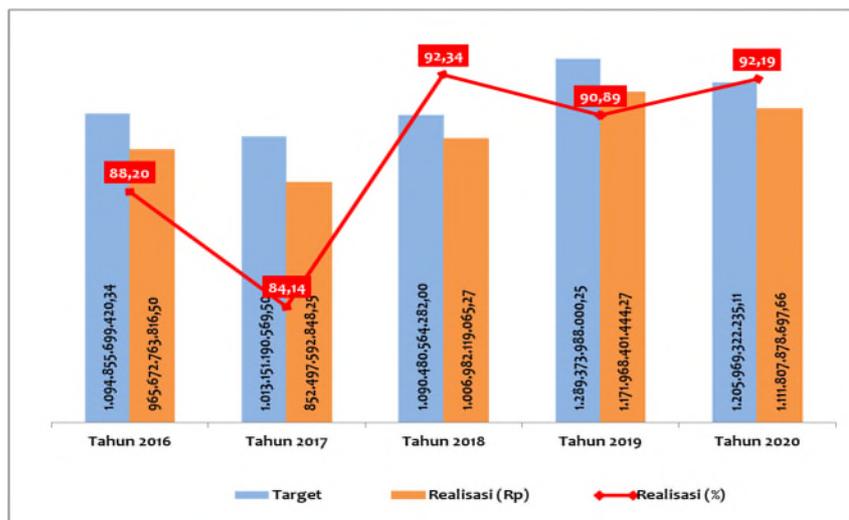
Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran periode Tahun 2016-2020 bahwa belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,99%, dimana belanja operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 6,30%, sedangkan belanja modal justru mengalami pertumbuhan menurun dengan rata-rata sebesar -0,34%, sementara belanja tak terduga mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 92,56.

Komponen Belanja Operasi terbesar pertumbuhannya adalah belanja hibah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 46,01%, sedangkan komponen belanja modal terbesar pertumbuhannya adalah belanja modal aset tetap dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 34,46%. Sementara pertumbuhan belanja tak terduga rata-rata pertumbuhan sebesar 92,59%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 akibat adanya bencana nasional covid-19.

Alokasi belanja pada Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah periode tahun 2016-2020 sebesar Rp.5.693.830.764.507,20,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi sebesar Rp.4.167.551.907.457,73,- belanja modal sebesar Rp.1.440.597.436.930,47,- dan belanja tak terduga sebesar Rp.85.681.420.119,00.

Perkembangan target dan realisasi belanja periode 2016-2020 digambarkan pada grafik berikut.

Grafik 3. 12 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2016-2020



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa realisasi Belanja Daerah pada umumnya dibawah angka yang dianggarkan. Hal ini tidak menjadi masalah, selama output kinerja Belanja terpenuhi. Karena untuk setiap Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran Belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Realisasi belanja selama 5 (lima) tahun hanya mencapai rata-rata 89,55%.

3.1.1.3 Transfer Bantuan Keuangan

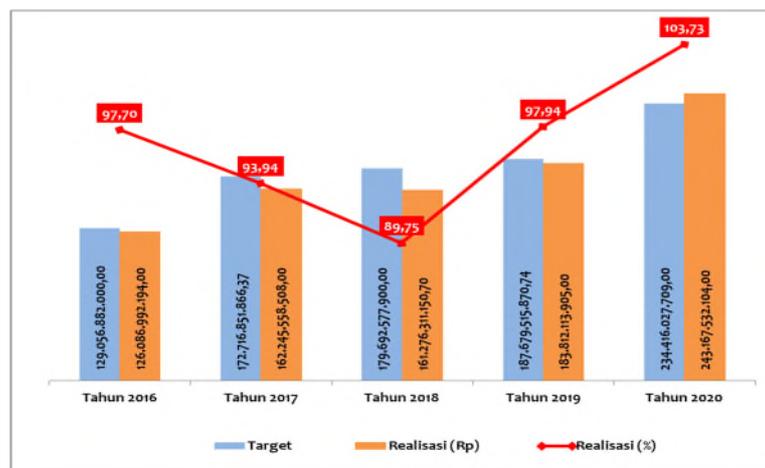
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang mencakup antara lain Bantuan Keuangan kepada Propinsi dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, serta transfer bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Desa.

Realisasi transfer dalam setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya pengeluaran melalui pemberian dana kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan pembangunan di desa sehingga pembangunan lebih merata.

Perkembangan target dan realisasi transfer daerah periode 2016-2020 digambarkan pada grafik berikut.

Grafik 3. 13 Target dan Realisasi Transfer Daerah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2016-2020





3.1.1.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Manokwari terdiri dari dua pos yaitu :

- 1) **Penerimaan pembiayaan daerah** yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman, dan obligasi;
- 2) **Pengeluaran pembiayaan daerah** yang didalamnya terdiri atas pembentukan penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel 3.4 menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Manokwari.



Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4	Pembiayaan Daerah	31.466.847.599,99	55.229.575.599,99	-42.882.736.491,13	-51.631.006.426,86	34.964.221.279,00	49.683.532.646,09	100.384.162.942,49	99.140.179.952,49	77.015.966.027,08	76.799.390.605,51
4.1	Penerimaan Daerah	60.729.575.599,99	60.729.575.599,99	16.880.258.508,87	8.131.988.573,14	35.464.221.279,00	49.730.652.646,09	101.884.162.942,49	100.140.179.952,49	112.265.966.027,08	112.049.390.605,51
4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	966.580.599,99	966.580.599,99	16.880.258.508,87	8.131.988.573,14	35.464.221.279,00	49.730.652.646,09	56.884.162.942,49	55.140.179.952,49	112.265.966.027,08	112.049.390.605,51
4.1.2	Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi	59.762.995.000,00	59.762.995.000,00	-	-	-	-	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	-	-
4.2	Pengeluaran Daerah	29.262.728.000,00	5.500.000.000,00	59.762.995.000,00	59.762.995.000,00	500.000.000,00	47.120.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	35.250.000.000,00	35.250.000.000,00
4.2.1	Penyertaan Modal	29.262.728.000,00	5.500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
4.2.2	Pembayaran Hutang Pokok Jatuh Tempo	-	-	59.762.995.000,00	59.762.995.000,00	-	-	-	-	33.750.000.000,00	33.750.000.000,00
4.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	47.120.000,00	-	-	-	-

Sumber : Dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pos Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 29,42%. Sumber penerimaan pembiayaan daerah terbesar berasal dari SilPA tahun sebelumnya yaitu mencapai 59,55%. Sementara Porsi terbesar untuk Pengeluaran Pembiayaan adalah untuk pembayaran hutang pokok jatuh tempo yaitu mencapai 4,14%.

3.1.2 Neraca Daerah

Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Substansi dari Neraca Daerah adalah memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan, memberikan informasi mengenai fleksibilitas keuangan dan menciptakan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Grafik 3. 14 Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2016-2020



Berikut disajikan data terkait dengan kondisi neraca daerah Kabupaten Manokwari berdasarkan pos-pos yang telah ditentukan pada tahun 2016 hingga 2020.



Tabel 3.5 Neraca Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020

KETERANGAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
ASET	2.264.963.858.766,39	2.412.277.183.433,99	2.540.947.779.169,24	2.676.478.005.344,76	2.639.981.947.350,57	8,95
Aset Lancar (Rp)	69.003.937.246,43	106.417.381.452,55	137.802.009.748,95	157.614.706.538,69	99.375.173.149,34	17,10
Investasi Jk. Panjang (Rp)	82.541.542.641,00	63.331.661.236,00	63.331.661.236,00	63.409.238.370,00	67.497.455.765,00	7,65
Aset Tetap (Rp)	1.723.727.587.943,96	1.852.504.720.760,44	1.948.929.231.199,29	2.064.223.562.503,07	2.081.943.430.478,55	9,38
Dana Cadangan (Rp)	0	0	0	0	0	0,00
Aset Lainnya (Rp)	389.690.790.935,00	390.023.419.985,00	390.884.876.985,00	391.230.497.933,00	391.165.887.957,68	6,51
KEWAJIBAN	95.207.503.200,26	19.780.654.529,26	8.471.025.000,26	55.455.791.123,16	44.381.875.607,26	109,35
Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	95.207.503.200,26	19.780.654.529,26	8.471.025.000,26	10.342.219.123,16	22.190.937.803,63	29,75
Kewajiban Jangka Panjang (Rp)	0	0	0	45.113.572.000,00	22.190.937.803,63	-10,16
EKUITAS	2.169.756.355.566,13	2.392.496.528.904,73	2.532.476.754.168,98	2.621.022.214.221,60	2.617.791.009.546,94	9,16
Ekuitas (Rp)	2.169.756.355.566,13	2.392.496.528.904,73	2.532.476.754.168,98	2.621.022.214.221,60	2.617.791.009.546,94	9,16

Sumber : Dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 – 2020



Melihat pada tabel diatas, perkembangan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Manokwari mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016-2020, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8,95%. Aset tersebut terdiri atas **aset lancar** (kas, piutang dan persediaan), **investasi jangka panjang** (investasi non permanen dan investasi permanen), **aset tetap** (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, serta **aset lainnya** (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya) semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 109,35% pertahun.

Sementara perkembangan ekuitas Kabupaten Manokwari selama Tahun 2016-20120 tumbuh rata-rata sebesar 9,16%, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 6 Analisa Rasio Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020

No.	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio Lancar	0,72	5,38	16,27	15,24	4,48
2	Rasio Quick	0,553	3,703	9,638	13,613	0,00
B	RASIO SOLVABILITAS					
1	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	4,20	0,82	0,33	2,07	1,68
2	Rasio Hutang terhadap Modal	4,39	0,83	0,33	2,12	1,70

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Manokwari 2016 - 2020 (diolah)

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan sebagai berikut:

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Manokwari yaitu:

1. Rasio lancar (*current ratio*)

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2016 adalah sebesar 0,72 dan tahun 2020 sebesar 4,48.

2. Rasio cepat (*quick ratio*)

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. *Quick ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, quick rasio pada tahun 2016 sebesar 0,55 serta periode tahun 2017 quick rasio sebesar 0,00. Hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Manokwari dalam membayar kewajiban jangka pendeknya masih sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari. Besar

rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2016 sebesar 4,20 dan pada tahun 2020 sebesar 1,68. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2016 rasio hutang terhadap modal pemerintah Kabupaten Manokwari sebesar 4,39 serta periode tahun 2020 sebesar 1,70. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Manokwari tidak tergantung pada hutang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/ lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- c. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pendapatan;
- e. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan publik kepada wajib pajak;
- f. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam peningkatan pengetahuan (*knowledge*) terhadap regulasi pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;



Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
- b. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten untuk obyek pendapatan sesuai wewenang kabupaten.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- b. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- c. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- d. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam.

3.2.2 Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota terutama merespon Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Manokwari yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja, yang diarahkan pada :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020;
- b. Memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan;



- c. Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah;
- d. Pemenuhan anggaran fungsi Kesehatan sekurang-kurangnya 15% dari Belanja Daerah;
- e. Pengalokasian Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi sebagai implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Mengalokasikan anggaran untuk kepentingan nasional serta kebutuhan penting dan mendesak lainnya.

3.2.3 Kebijakan Transfer

Kebijakan Transfer daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari berupa Transfer Bantuan Keuangan ke Desa untuk meningkatkan pembangunan di desa sehingga pembangunan lebih merata.

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan penyertaan modal.

3.2.5 Proporsi Penggunaan Anggaran

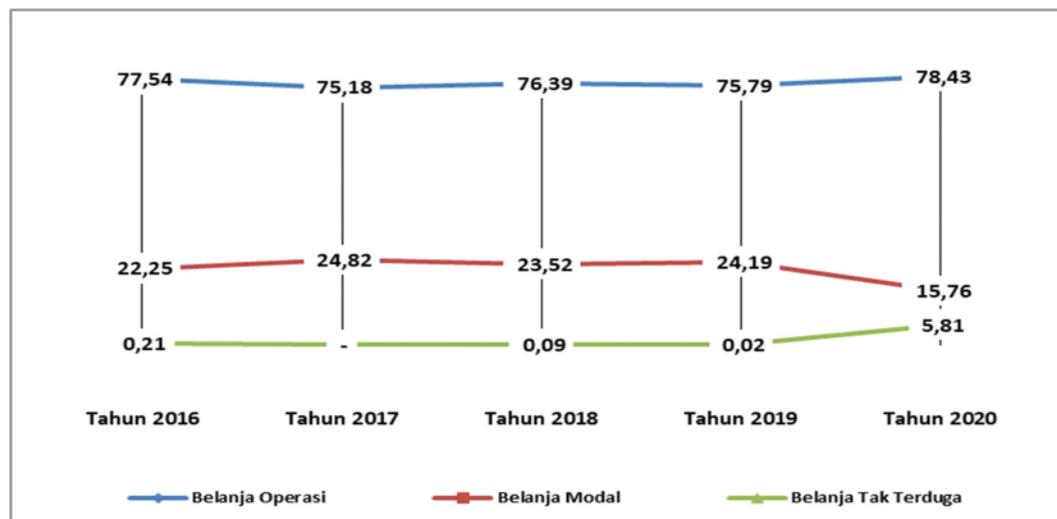
Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Manokwari pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

3.2.5.1 Proporsi Belanja Terhadap Total Anggaran Belanja

Analisis proporsi belanja daerah selama periode 2016–2020 menginformasikan mengenai tingkat proporsi komponen belanja daerah. Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan sebagaimana tabel 3.3 diperoleh gambaran bahwa, proporsi Belanja Operasi sebesar 76,71% atau lebih besar dibanding Belanja Modal yaitu sebesar 21,96%, dan Belanja Tak Terduga hanya sebesar 1,33.

Perkembangan proporsi belanja daerah kabupaten Manokwari secara series sejak tahun 2016–2020 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3. 15 proporsi belanja daerah kabupaten Manokwari tahun 2016-2020



3.2.5.2 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Perlu diperhatikan bahwa dalam pengalokasian anggaran belanja aparatur harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dalam satu tahun anggaran. Diperlukan antisipasi dan perencanaan kebutuhan untuk meningkatkan ketepatan target dan realisasi belanja.

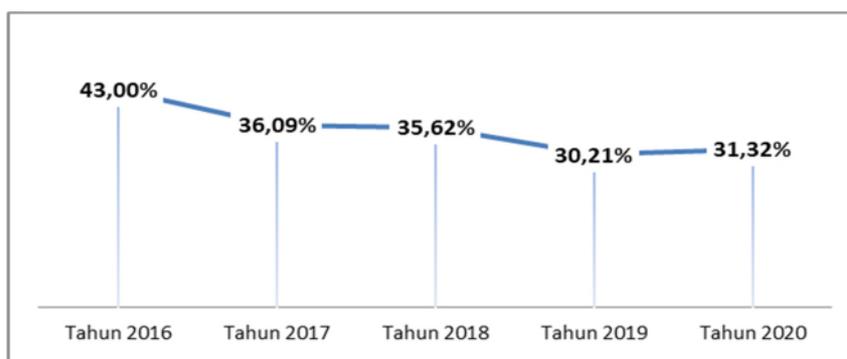
Gambaran tentang realisasi Belanja Aparatur termasuk belanja operasional dan Belanja Modal serta Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Manokwari selama periode Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Manokwari

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2016	417.594.919.017,00	971.172.763.816,50	43,00%
2	Tahun Anggaran 2017	329.245.285.258,00	912.260.587.848,25	36,09%
3	Tahun Anggaran 2018	358.691.466.159,70	1.007.029.239.065,27	35,62%
4	Tahun Anggaran 2019	354.330.834.580,00	1.172.968.401.444,27	30,21%
5	Tahun Anggaran 2020	359.230.624.398,00	1.147.057.878.697,66	31,32%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa besarnya prosentase untuk pemenuhan belanja aparatur selama periode 2016-2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Grafik 3.16 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020 Kabupaten Manokwari



3.2.5.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Rasio kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

Perkembangan rasio kemandirian keuangan pemerintah kabupaten Manokwari selama 5 tahun diuraikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

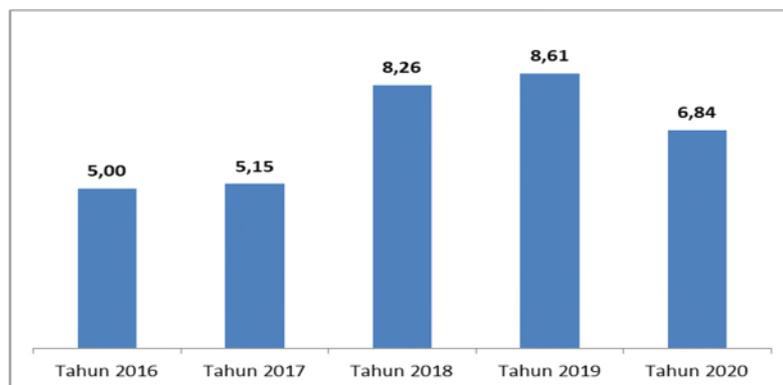
Tabel 3. 8 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer Dana	Lain2 Pendapatan yang sah	Rasio Kemandirian
2016	51.522.059.446,38	732.039.890.898,00	297.869.907.575	5,00
2017	56.422.377.432,54	742.128.145.104,00	353.287.856.536	5,15
2018	90.863.070.042,97	741.699.915.641,00	358.598.194.288	8,26
2019	108.554.356.172,86	858.054.499.178,00	402.297.446.073	8,61
2020	84.605.179.537,03	721.630.121.045,00	515.167.769.803	6,84

Sumber : Perda APBD Kabupaten Manokwari 2016 - 2020

Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari pada tahun 2016–2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2020. Kondisi kemandirian keuangan kabupaten Manokwari menggambarkan bahwa masih rendahnya kemampuan daerah dari sisi pendapatan asli daerah dalam menunjang pembangunan daerah.

Grafik 3. 17 Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 Kabupaten Manokwari



Berdasarkan grafik pada diatas maka terlihat bahwa tingkat kemampuan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah. Angka yang tercatat dalam skala 5–8,61 tergolong dalam kemampuan keuangan yang sangat rendah dan memiliki pola hubungan yang instrukif. Dengan pola hubungan Instruktif selama 5 tahun terakhir menunjukkan Kabupaten Manokwari masih memiliki ketergantungan tinggi pada transfer dana pemerintah pusat dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat.

3.2.5.4 *Pertumbuhan Pendapatan Daerah*

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Dengan mengetahui pertumbuhan masing – masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi – potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

Pertumbuhan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Manokwari tahun 2016 – 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena terjadinya bencana nasional pandemi covid-19.

Perkembangan pertumbuhan pendapatan daerah pemerintah kabupaten Manokwari selama 5 tahun diuraikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 9 Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020

Tahun	Realisasi Pendapatan	Rasio Pertumbuhan
2016	1.081.431.857.919,38	7,39
2017	1.151.838.379.072,54	6,51
2018	1.191.161.179.971,67	3,41
2019	1.368.906.301.423,86	14,92
2020	1.321.403.070.385,03	-3,47

Sumber : Perda APBD Kabupaten Manokwari 2016 – 2020

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Manokwari sebagaimana tabel diatas selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan pertumbuhan berfluktuatif, dimana pertumbuhan tertinggi mencapai 14,92% yang terjadi pada tahun 2019, dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dimana mencapai -3,47%.

3.2.5.5 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Perkembangan rasio efektivitas pendapatan daerah pemerintah kabupaten Manokwari selama 5 tahun diuraikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

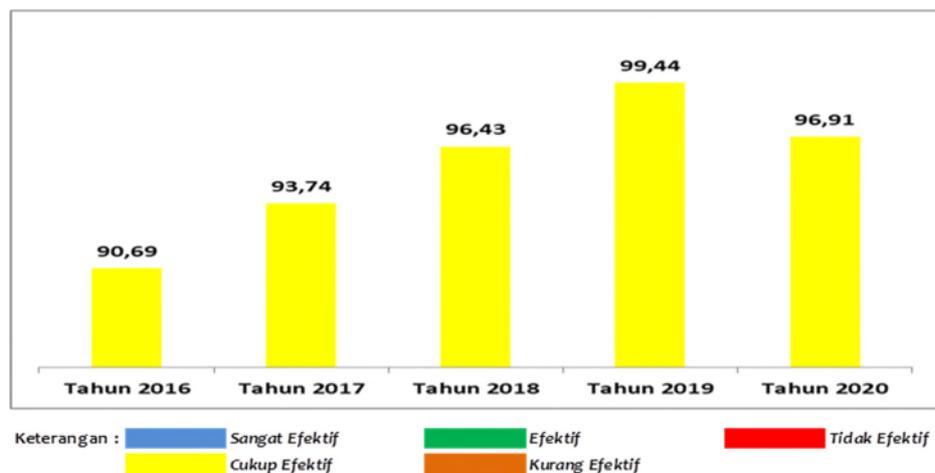
Tabel 3. 10 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi	Rasio Efektivitas
2016	1.192.445.733.820,35	1.081.431.857.919,38	90,69
2017	1.228.750.778.927,00	1.151.838.379.072,54	93,74
2018	1.235.208.920.903,00	1.191.161.179.971,67	96,43
2019	1.376.669.340.928,50	1.368.906.301.423,86	99,44
2020	1.363.602.264.497,03	1.321.403.070.385,03	96,91

Sumber : Perda APBD Kabupaten Manokwari 2016 – 2020

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio efektivitas Kabupaten Manokwari sebagaimana tabel diatas selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan perkembangan ke arah yang baik. Rasio efektifitas Kabupaten Manokwari pada tahun 2016 berada pada angka 90,69 dan terus berkebang hingga 96,91 pada tahun 2020. artinya Pendapatan Daerah direalisasikan dengan cukup efektif.

Grafik 3. 18 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari 2016-2020





3.2.6 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kurun waktu tahun 2016-2020 Realisasi Pendapatan Daerah terus menunjukkan peningkatan demikian juga dengan belanja daerah, konsekuensinya defisit juga mengalami peningkatan.

Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2016 sampai 2020.

Tabel 3. 11 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.081.431.857.919	1.151.838.379.073	1.191.161.179.972	1.368.906.301.424	1.321.403.070.385
2	Belanja Daerah	965.672.763.817	852.497.592.848	1.006.982.119.065	1.171.968.401.444	1.111.807.878.698
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.500.000.000	59.762.995.000	47.120.000	1.000.000.000	35.250.000.000
	Defisit riil	110.259.094.103	239.577.791.224	184.131.940.906	195.937.899.980	174.345.191.687

Dalam hal APBD diperkirakan defisit sebagaimana tabel diatas, ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Komponon penutup defisit riil APBD Kabupaten Manokwari tahun 2016-2020 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3. 12 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manokwari
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	966.580.600	8.131.988.573	49.730.652.646	55.140.179.952	112.049.390.606
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	59.762.995.000	-	-	45.000.000.000	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	47.120.000	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah		60.729.575.600	8.131.988.573	49.777.772.646	100.140.179.952	112.049.390.606

Sesuai tabel diatas dapat dijelaskan bahwa komponen penerimaan pembiayaan sebagian besar berasal dari SiLPA yang terdiri dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Terdapat kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) yang sebagian besar terdiri dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja. Pada pelampauan pendapatan banyak dipengaruhi adanya optimalisasi pendapatan daerah sedangkan penghematan belanja banyak dipengaruhi oleh sisa belanja atas pengadaan barang dan jasa.

**Tabel 3. 13 Proporsi Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	0,88	3,39	27,01	28,14	64,27
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	54,20	0,00	0,00	22,97	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Proporsi dari total defisit rill				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	55,08	3,39	27,03	51,11	64,27

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu :

- Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah;
- Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2021 berdasarkan angka APBD Tahun 2020. Sedangkan proyeksi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja periode sebelumnya dengan menggunakan angka dasar data realisasi APBD Tahun Anggaran 2020.

Pada proyeksi pendapatan asli daerah diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan sebesar 5% per tahun.

Proyeksi pendapatan asli daerah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar proyeksi tahun 2022–2026, diantaranya asumsi proyeksi :

- Pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan sebesar 9,61%,
- Retribusi daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan yang sama setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,76%,



- Komponen lainnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,27% yang diperoleh dari Hasil Penjualan Bangunan Gedung, Jasa Giro pada Kas di Bendahara serta Pendapatan BLUD.

Terkait proyeksi Dana Perimbangan diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,52% per tahun. Pada proyeksi Dana Perimbangan, terdapat beberapa asumsi dasar proyeksi yaitu :

- Dana bagi hasil pajak/bukan pajak periode 2022–2026 secara umum terdapat kenaikan sebesar 4,76% per tahun.
- Dana Alokasi Umum diproyeksikan mengalami kenaikan per tahun sebesar 4,76 persen dengan mempertimbangkan tren laju pertumbuhan penduduk tahun 2016-2020.
- Dana Alokasi Khusus tidak dilakukan proyeksi perhitungan alokasi sebagai perkiraan target.

Sementara pada proyeksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,29% per tahun. Terdapat beberapa asumsi dasar proyeksi yaitu :

- Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada 5 tahun yang akan datang karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah.
- Pada kelompok Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk 5 tahun kedepan diproyeksikan tetap atau tidak mengalami perubahan dari tahun 2021 sebagai dasar perhitungan. Perhitungan ini memperhitungkan estimasi Dana Insentif Daerah dari pemerintah.
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diproyeksikan meningkat setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,20%, yang diperoleh dari setimasi terhadap pendapatan dana otonomi khusus dan DBH Migas dalam rangka otsus.
- Sementara dana desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan naik setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,06%.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang



menjadi kewenangan Kabupaten Manokwari yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2021 berdasarkan angka APBD Tahun 200. Sedangkan proyeksi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja periode sebelumnya dengan menggunakan angka dasar data realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3. 14 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	Realisasi 2020	PROYEKSI					Rata-rata	Rata-Rata Pertumbuhan	
			2021	2022	2023	2024	2025			2026
1	PENDAPATAN	1.321.403.070.385,03	1.253.895.158.748,68	1.088.586.046.966,43	1.157.236.068.379,90	1.226.091.738.559,25	1.290.181.189.846,61	1.349.329.494.860,38	1.222.284.907.722,52	2,69
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.605.179.537,03	120.032.351.968,68	90.729.453.007,05	105.517.313.948,22	123.607.415.009,16	133.792.234.310,71	144.886.739.432,46	119.706.631.141,52	6,48
1.1.1	Pajak Daerah	41.005.553.163,27	71.012.371.563,00	51.256.941.454,09	64.071.176.817,61	80.088.971.022,01	88.097.868.124,21	96.907.654.936,63	76.084.522.470,91	9,61
1.1.2	Retribusi Daerah	2.737.466.436,00	2.737.466.436,00	2.874.339.757,80	3.018.056.745,69	3.168.959.582,97	3.327.407.562,12	3.493.777.940,23	3.176.508.317,76	4,76
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.308.719.172,00	3.500.000.000,00	3.675.000.000,00	3.858.750.000,00	4.051.687.500,00	4.254.271.875,00	4.466.985.468,75	4.061.338.968,75	4,76
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37.553.440.765,76	42.782.513.969,68	32.923.171.795,16	34.569.330.384,92	36.297.796.904,17	38.112.686.749,38	40.018.321.086,85	36.384.261.384,10	0,27
	- Hasil Penjualan Bangunan Gedung		50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00	57.881.250,00	60.775.312,50	63.814.078,13	58.019.128,13	4,76
	- Jasa Giro pada Kas di Bendahara		4.965.392.709,68	5.213.662.345,16	5.474.345.462,42	5.748.062.735,54	6.035.465.872,32	6.337.239.165,94	5.761.755.116,28	4,76
	- Pendapatan BLUD		26.340.009.000,00	27.657.009.450,00	29.039.859.922,50	30.491.852.918,63	32.016.445.564,56	33.617.267.842,78	30.564.487.139,69	4,76
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		11.427.112.260,00	-	-	-	-	-	-	0,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	721.630.121.045,00	686.720.347.000,00	570.835.174.350,00	599.376.933.067,50	629.345.779.720,88	660.813.068.706,92	693.853.722.142,27	630.844.935.597,51	1,52
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	721.630.121.045,00	686.720.347.000,00	570.835.174.350,00	599.376.933.067,50	629.345.779.720,88	660.813.068.706,92	693.853.722.142,27	630.844.935.597,51	1,52
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	92.164.746.736,00	52.083.620.000,00	54.687.801.000,00	57.422.191.050,00	60.293.300.602,50	63.307.965.632,63	66.473.363.914,26	60.436.924.439,88	4,76
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	499.695.314.000,00	491.568.927.000,00	516.147.373.350,00	541.954.742.017,50	569.052.479.118,38	597.505.103.074,29	627.380.358.228,01	570.408.011.157,64	4,76
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	129.770.060.309,00	143.067.800.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00
	- DanaAlokasiKhusus(Regular)	39.427.737.383,00	59.281.095.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00
	- DanaAlokasiKhusus(Penugasan)	27.165.862.631,00	22.736.881.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00
	- DanaAlokasiKhusus(NonFisik)	53.817.080.500,00	54.360.668.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00
	- DanaAlokasiKhusus(Afirmasi)	9.359.379.795,00	6.689.156.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	515.167.769.803,00	447.142.459.780,00	427.021.419.609,38	452.341.821.364,18	473.138.543.829,23	495.575.886.828,98	510.589.033.285,66	471.733.340.983,48	3,29
1.3.1	Pendapatan Hibah	35.185.576.238,00	6.100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.127.418.518,00	69.892.853.000,00	35.302.353.000,00	35.302.353.000,00	35.302.353.000,00	35.302.353.000,00	35.302.353.000,00	35.302.353.000,00	-14,00
	- DanaInsentifDaerah		35.302.353.000,00	35.302.353.000,00	35.302.353.000,00	35.302.353.000,00	35.302.353.000,00	35.302.353.000,00	35.302.353.000,00	0,00
	- DanaBOSDA		34.590.500.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00



NO	URAIAN	Realisasi 2020	PROYEKSI					Rata-rata	Rata-Rata Pertumbuhan	
			2021	2022	2023	2024	2025			2026
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	240.002.026.490,00	187.093.553.242,00	203.797.835.947,08	225.171.891.857,97	241.939.395.216,39	260.262.905.508,27	271.075.828.770,22	240.449.571.459,99	7,20
	- DanaOtonomiKhusus		89.600.853.000,00	132.513.964.000,00	152.391.058.600,00	167.630.164.460,00	184.393.180.906,00	193.612.839.951,30	166.108.241.583,46	11,88
	- DanaProspekOtsus		27.675.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00
	- DBHMigasdalamrangkaOtsus		69.817.700.242,00	71.283.871.947,08	72.780.833.257,97	74.309.230.756,39	75.869.724.602,27	77.462.988.818,92	74.341.329.876,53	2,06
1.3.5	Dana Desa		143.530.587.000,00	146.544.729.327,00	149.622.168.642,87	152.764.234.184,37	155.972.283.102,24	159.247.701.047,39	152.830.223.260,77	2,06
1.3.6	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	215.852.748.557,00	40.525.466.538,00	41.376.501.335,30	42.245.407.863,34	43.132.561.428,47	44.038.345.218,47	44.963.150.468,06	43.151.193.262,73	2,06
2	BELANJA DAERAH	1.111.807.878.697,66	739.244.749.107,55	775.757.634.442,93	810.230.297.975,01	846.318.714.228,94	884.100.973.829,44	923.659.004.507,20	848.013.324.996,70	4,32
2.1	BELANJA OPERASI	872.023.811.112,66	574.855.484.724,00	603.148.906.840,20	633.306.352.182,21	664.971.669.791,32	698.220.253.280,89	733.131.265.944,93	666.555.689.607,91	4,75
2.1.1	Belanja Pegawai	359.230.624.398,00	436.177.397.761,00	457.986.267.649,05	480.885.581.031,50	504.929.860.083,08	530.176.353.087,23	556.685.170.741,59	506.132.646.518,49	4,76
2.1.2	Belanja Bunga	2.804.227.336,00	237.900.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00
2.1.3	Belanja Barang dan Jasa	377.373.905.122,66	75.108.375.750,00	78.863.794.537,50	82.806.984.264,38	86.947.333.477,59	91.294.700.151,47	95.859.435.159,05	87.154.449.518,00	4,76
2.1.4	Belanja Hibah	112.718.000.000,00	38.266.756.813,00	40.180.094.653,65	42.189.099.386,33	44.298.554.355,65	46.513.482.073,43	48.839.156.177,10	44.404.077.329,23	4,76
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	19.897.054.256,00	24.875.000.000,00	26.118.750.000,00	27.424.687.500,00	28.795.921.875,00	30.235.717.968,75	31.747.503.867,19	28.864.516.242,19	4,76
2.1.6	Belanja Subsidi	-	190.054.400,00	199.557.120,00	209.534.976,00	220.011.724,80	231.012.311,04	242.562.926,59	220.535.811,69	4,76
2.2	BELANJA MODAL	175.191.435.507,00	164.389.264.383,55	172.608.727.602,73	176.923.945.792,80	181.347.044.437,62	185.880.720.548,56	190.527.738.562,27	181.457.635.388,79	2,75
2.2.1	Belanja Modal Tanah	754.183.651,00	791.892.833,55	831.487.475,23	852.274.662,11	873.581.528,66	895.421.066,88	917.806.593,55	874.114.265,28	2,75
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.341.073.948,00	28.882.442.961,00	30.326.565.109,05	31.084.729.236,78	31.861.847.467,70	32.658.393.654,39	33.474.853.495,75	31.881.277.792,73	2,75
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		46.800.495.809,00	49.140.520.599,45	50.369.033.614,44	51.628.259.454,80	52.918.965.941,17	54.241.940.089,70	51.659.743.939,91	2,75
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.342.551.294,00								
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	67.526.008.364,00	86.560.814.780,00	90.888.855.519,00	93.161.076.906,98	95.490.103.829,65	97.877.356.425,39	100.324.290.336,03	95.548.336.603,41	2,75
		6.227.618.250,00	1.353.618.000,00	1.421.298.900,00	1.456.831.372,50	1.493.252.156,81	1.530.583.460,73	1.568.848.047,25	1.494.162.787,46	2,75
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	64.592.632.078,00	-	0,00						
2.3.1	Belanja Tidak Tersangka	64.592.632.078,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00

3.3.2 Perhitungan kerangka Pendanaan

3.3.2.1 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Direncanakan proyeksi nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA tahun 2021-2026 sebesar 4,87%. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3. 15 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026

URAIAN	REALISASI	PROYEKSI					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	112.049.390.606	44.025.000.000	46.226.250.000	48.537.562.500	50.964.440.625	53.512.662.656	56.188.295.789

Sumber: Hasil proyeksi, 2021

Berdasarkan tabel diatas, kemudian dilakukan perhitungan SiLPA Riil dengan asumsi bahwa besaran SiLPA riil sebesar 10% dari hasil proyeksi, dimana nilai tersebut merupakan penghematan belanja atas pengadaan barang dan jasa.

Tabel 3. 16 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Riil Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026

URAIAN	REALISASI	PROYEKSI					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Riil	11.204.939.061	4.402.500.000	4.622.625.000	4.853.756.250	5.096.444.063	5.351.266.266	5.618.829.579

Sumber: Hasil proyeksi, 2021

3.3.2.2 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2021 sampai dengan 2026 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2016-2020. Berdasarkan hasil proyeksi, direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 mengalami kenaikan. Lebih rinci mengenai proyeksi tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.



Tabel 3. 17 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026

Uraian	Realisasi 2020	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Tidak Langsung	359.230.624.398,00	436.177.397.761,00	457.986.267.649,05	480.885.581.031,50	504.929.860.083,08	530.176.353.087,23	556.685.170.741,59
Pengeluaran Pembiayaan	35.250.000.000,00	15.350.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama	394.480.624.398,00	451.527.397.761,00	459.486.267.649,05	482.385.581.031,50	506.429.860.083,08	531.676.353.087,23	558.185.170.741,59



3.3.2.3 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta belanja tidak langsung dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2021-2026 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Manokwari.

Berdasarkan hasil analisis, total penerimaan sampai dengan tahun 2026 mengalami peningkatan dari Rp.1.253.895.158.748,68 pada realisasi Tahun 2021 diproyeksikan terus meningkat sampai dengan Rp.1.349.329.494.860,38 pada Tahun 2026. Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja tidak langsung, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manokwari pada Tahun 2026 sebesar Rp.544.192.339.640,57.

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manokwari sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3. 18 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020

Uraian	Realisasi		Proyeksi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	1.321.403.070.385,03	1.253.895.158.748,68	1.088.586.046.966,43	1.157.236.068.379,90	1.226.091.738.559,25	1.290.181.189.846,61	1.349.329.494.860,38
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	112.049.390.605,51	4.402.500.000,00	4.622.625.000,00	4.853.756.250,00	5.096.444.062,50	5.351.266.265,63	5.618.829.578,91
Total penerimaan	1.433.452.460.990,54	1.258.297.658.748,68	1.093.208.671.966,43	1.162.089.824.629,90	1.231.188.182.621,75	1.295.532.456.112,23	1.354.948.324.439,29
Dikurangi:							
Belanja Tidak Langsung	359.230.624.398,00	436.177.397.761,00	457.986.267.649,05	480.885.581.031,50	504.929.860.083,08	530.176.353.087,23	556.685.170.741,59
Pengeluaran Pembiayaan	35.250.000.000,00	15.350.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Dana Desa	-	143.530.587.000,00	207.790.633.785,00	218.180.165.474,25	229.089.173.747,96	240.543.632.435,36	252.570.814.057,13
Jumlah Pengeluaran	394.480.624.398,00	595.057.984.761,00	667.276.901.434,05	700.565.746.505,75	735.519.033.831,04	772.219.985.522,59	810.755.984.798,72
Kapasitas Real	1.038.971.836.592,54	663.239.673.987,68	425.931.770.532,38	461.524.078.124,15	495.669.148.790,71	523.312.470.589,64	544.192.339.640,57



Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari sebagaimana proyeksi kapasitas riil, ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program.

Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow programme*) dan kebutuhan.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari selama 5 tahun yang akan datang dipergunakan untuk membiayai kelompok program prioritas sebagai berikut :

- a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi - misi bupati dan wakil bupati serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar maupun membiayai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.



Tabel 3. 19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN		674.489.673.988	425.931.770.532	461.524.078.124	495.669.148.791	523.312.470.590	544.192.339.641
1	PRIORITAS I (PERTAMA)	140.266.575.750	144.021.994.538	147.965.184.264	152.105.533.478	156.452.900.151	161.017.635.159
	Belanja Barang Jasa Ops OPD, KDH, & DPRD	75.108.375.750	78.863.794.538	82.806.984.264	86.947.333.478	91.294.700.151	95.859.435.159
	Gaji Honorer .. 4.057 Orang	65.158.200.000	65.158.200.000	65.158.200.000	65.158.200.000	65.158.200.000	65.158.200.000
2	PRIORITAS II (KEDUA)	534.223.098.238	281.909.775.995	313.558.893.860	343.563.615.313	366.859.570.438	383.174.704.482
	Penganggaran Belanja Prioritas 1 (70% x E)	373.956.168.766	197.336.843.196	219.491.225.702	240.494.530.719	256.801.699.307	268.222.293.137
	Penganggaran Belanja Prioritas 2	120.941.415.311	43.281.142.930	50.711.288.797	57.544.886.264	62.257.462.886	64.761.982.686
	COVID-19	39.325.514.160	41.291.789.868	43.356.379.361	45.524.198.329	47.800.408.246	50.190.428.658

3.3.3 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manokwari membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada APBD. Oleh sebab itu, pemerintah daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Program kemitraan dan pinjaman daerah.

3.3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kabupaten Manokwari selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah.

3.3.3.2 Program Kemitraan

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Manokwari yang lainnya adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR).

Penyelenggaraan program kemitraan di kabupaten manokwari sejauh ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan.

Adapun program yang telah dilaksanakan dan selalu berjalan meliputi aspek :

- a. Pendidikan, yang diarahkan untuk membangun fasilitas cuci tangan dan kakus
- b. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor usaha mikro.

3.3.3.3 Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi



pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah;
2. Pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
4. Pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
5. Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
8. Proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah; dan
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya adalah bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
2. Pemerintah daerah lain;



3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil dari pinjaman daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;
2. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan;
3. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan social; dan
4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.



BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dapat menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, analisis isu strategis dapat memetakan tantangan dan peluang. Perencanaan pembangunan harus memerhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah agar dapat menghasilkan kebijakan dan prioritas pembangunan yang fokus pada masa depan masyarakat.

Permasalahan pembangunan pada dasarnya merupakan kesenjangan antara harapan dan kondisi riil di daerah. Analisis permasalahan pembangunan harus mampu mendefinisikan kondisi paling *urgent* yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan harkat dan kualitas kehidupannya. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan. Identifikasi permasalahan yang baik harus dapat memetakan dengan tepat berbagai akar masalah di setiap permasalahan pembangunan; agar solusinya mudah diidentifikasi dalam perumusan kebijakan.

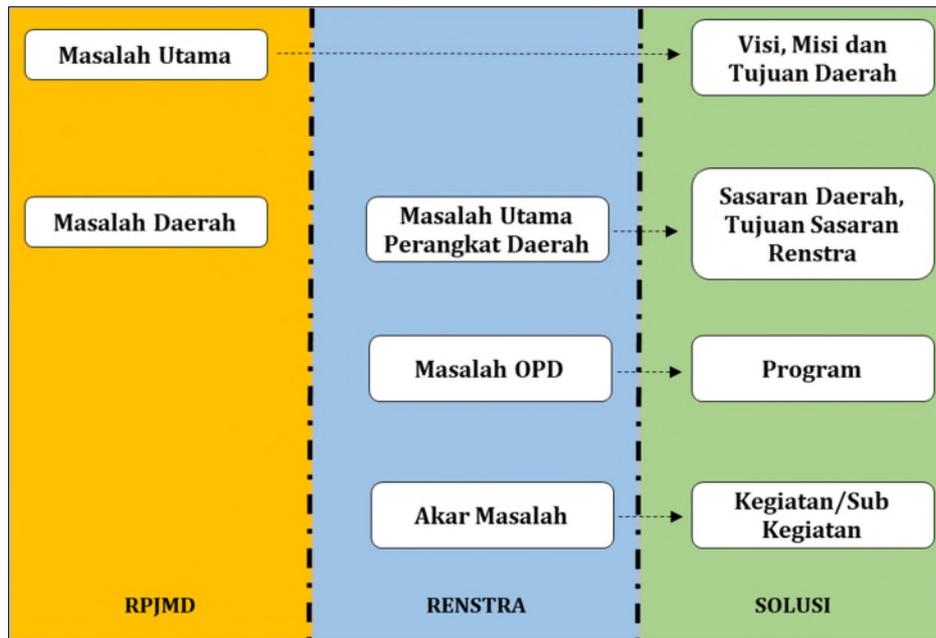
Dari hasil identifikasi dan analisis gambaran diatas maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan jangka menengah Kabupaten Manokwari yaitu **“Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur yang memadai dalam mendukung perkembangan penduduk Manokwari sebagai Pusat Peradaban dan Ibu Kota Provinsi Papua Barat.**

Pembangunan infratraktur merupakan hal yang penting dalam mendukung mobilitas ekonomi masyarakat dan pemerataan merupakan inti dari kesejahteraan itu sendiri, bagaimana mewujudkan dan mendistribusikannya. Yang artinya, membangun infrastruktur dalam mewujudkan kesejahteraan dan bagaimana pemerataanya adalah dua hal yang sama pokok masalahnya.

Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2020 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Manokwari Tahun 2006-2025 Tahap IV.

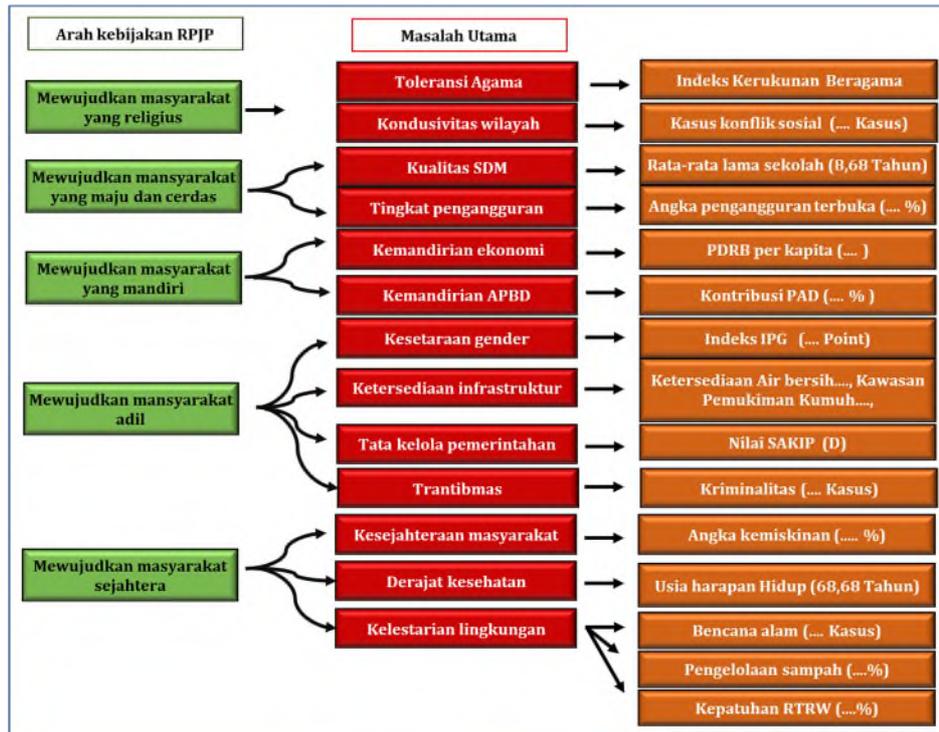
Kerangka logis permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 4.1 Kerangka Logis Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah



Sesuai dengan kerangka logis permasalahan daerah dan Perangkat Daerah yang dijelaskan dalam Gambar 4.1, maka masalah daerah akan dijabarkan dalam permasalahan OPD yang digambarkan dalam renstra OPD (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) yang akan diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan dirumuskan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Secara sistematis uraian masalah utama, masalah daerah dan permasalahan renstra (masalah utama OPD, masalah OPD dan akar masalah) sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Manokwari Tahun 2006-2025 tahap IV dan dokumen KLHS RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 4.2 Keterkaitan RPJPD dan Masalah Utama

4.1.1 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari Yang Religius

Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJP-D yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat agamis, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal. Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan pembangunan.

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Tahap IV, terdapat dua masalah utama yaitu terjaganya toleransi kehidupan beragama dan kondusivitas wilayah, sebagaimana penjelasan berikut.

Tabel 4. 1 Keterkaitan masalah toleransi umat beragama dan kondutivitas wilayah dengan permasalahan daerah dan permasalahan Renstra OPD

Masalah Utama	Masalah Daerah	Indikator	Masalah OPD	Urusan
Toleransi beragama	Belum optimalnya pembinaan dan pelayanan keagamaan	Indeks Kerukunan beragama	Belum optimalnya pembinaan keagamaan Belum optimalnya pelayanan Hamba Tuhan	Pemerintahan Umum
Kondusivitas Daerah	Belum optimalnya layanan pengelolaan konflik sosial	Kasus konflik sosial (... Kasus)	Belum optimalnya pemahaman masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Pemerintahan Umum

4.1.2 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari yang Maju dan Cerdas

Hasil pemetaan masalah utama kualitas SDM akan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa IPM adalah 72,01 (meliputi unsur Kesehatan dan Pendidikan serta pendapatan) dan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 6,92% lebih tinggi dari capaian tahun 2019 sebesar 4,68 % sebagai salah satu dampak COVID-19. Masalah utama ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Keterkaitan masalah utama mencerdaskan masyarakat dengan permasalahan daerah dan permasalahan Renstra OPD

Masalah Utama	Masalah Daerah	Indikator	Masalah OPD	Urusan
Kualitas SDM	Belum optimalnya layanan Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (8,68 Tahun)	Biaya pendaftaran PPDB mahal Belum ada regulasi daerah tentang SPM Urusan Pendidikan Belum optimalnya jumlah dan persebaran tenaga pendidik Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	Pendidikan
Tingkat Pengangguran	Tingginya angka pengangguran	Pengangguran Terbuka (6,65%)	Belum optimalnya serapan tenaga kerja Belum optimalnya upaya peningkatan ketrampilan tenaga kerja	Tenaga Kerja

4.1.3 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari yang Mandiri

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Manokwari Tahun 2006-2025 Tahap IV, terdapat 2 masalah utama yaitu aspek kemandirian ekonomi diukur

dengan indikator PDRB dan kemandirian APBD yang diukur melalui kontribusi PAD.

Masalah utama, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 4.3 Pemetaan masalah utama pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dengan permasalahan daerah dan permasalahan Renstra OPD

Masalah Utama	Masalah Daerah	Indikator	Masalah OPD	Urusan
Kemandirian ekonomi	Terjadi kontraksi pertumbuhan ekonom akibat Covid-19 dan belum optimalnya kontribusi sector Pertanian, UMKM dan Koperasi	PDRB per kapita (34,21 juta)	Belum optimalnya pertumbuhan investasi daerah	Penanaman modal
			Belum optimalnya pengembangan koperasi dan UMKM	Koperasi
			Belum optimal pengembangan sentra produksi pertanian	Pertanian
			Belum optimalnya pengembangan pariwisata	Pariwisata
Kemandirian APBD	Belum optimalnya kapasitas fiskal daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD (6,43%)	Belum optimalnya pengelolaan PAD Belum optimalnya pengelolaan retribusi daerah Belum optimalnya pemanfaatan kekayaan daerah untuk PAD	Keuangan

4.1.4 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari yang Adil

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Manokwari Tahun 2006-2025 Tahap IV, terdapat 3 masalah utama yaitu aspek kesetaraan gender dengan indikator indeks pemberdayaan gender, aspek ketersediaan infrastuktur dasar dengan indikator capaian ketersediaan air bersih, % Kawasan kumuh dan aspek tata kelola pemerintahan yang diukur dengan indikator SAKIP, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 4.4 Pemetaan masalah utama pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dengan permasalahan daerah dan permasalahan Renstra OPD

Masalah Utama	Masalah Daerah	Indikator	Masalah OPD	Urusan
Kesetaraan gender	Belum optimalnya pelaksanaan berbasis gender	IPG	Belum optimalnya pemberdayaan berbasis gender	Perempuan
Ketersediaan infrastuktur	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar	Cakupan Layanan air bersih (8,56%)	Belum optimalnya persediaan air baku	PUPR
		Kawasan Kumuh (98,23 Ha)	Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh kota	
		Rasio Panjang jalan dengan luas daerah (0,47 Rendah)	Belum optimalnya prasarana jalan dalam kota	



Masalah Utama	Masalah Daerah	Indikator	Masalah OPD	Urusan
Tata Kelola pemerintahan	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal	SAKIP (D)	Belum optimalnya domain tata kelola SPBE	Infokom
			Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral dan Satu Data	Statistik Data
	Belum optimalnya kualitas layanan publik		Pelayanan Publik belum seluruhnya berbasis elektronik	Semua urusan
	Belum optimalnya pelayanan publik administrasi kependudukan		Adminduk	
	Belum optimalnya penanganan Bencana alam dan non alam		Trantibun	
	Terbatasnya kapasitas SDM Layanan Publik		Semua urusan	
	Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan		Belum konsisten antara Perencanaan, Penganggaran	Semua urusan
	Akuntabilitas keuangan masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan		Belum optimalnya capaian kinerja pembangunan	Semua urusan
	Belum optimalnya manajemen pengelolaan asset		Beratnya mempertahankan opini WTP dari BPK	Semua urusan
	Rasio Silpa masih cukup tinggi			

4.1.5 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari yang Sejahtera

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Manokwari Tahun 2006-2025 Tahap IV, terdapat 3 masalah utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat dengan indikator angka kemiskinan, aspek derajat Kesehatan dengan indikator usia harapan hidup dan aspek kelestarian lingkungan yang diukur dengan indikator bencana alam, pengelolaan sampah dan kepatuhan terhadap RTRW, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 4.5 Pemetaan masalah utama pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan permasalahan daerah dan permasalahan Renstra OPD

Masalah Utama	Masalah Daerah	Indikator	Masalah OPD	Urusan
Kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya penanganan kemiskinan	% penduduk miskin	Belum optimalnya DTKS penduduk miskin Belum optimalnya perlindungan sosial penduduk miskin	Sosial
Derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya layanan kesehatan	Usia harapan hidup (68,68 Tahun)	Belum optimalnya persebaran prasarana Kesehatan Belum optimal persediaan obat dan alat kesehatan Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan	Kesehatan



Masalah Utama	Masalah Daerah	Indikator	Masalah OPD
			Belum optimalnya penanganan SPM kesehatan
Kelestarian lingkungan	Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan	Pengelolaan sampah (...%) Kepatuhan RTRW (... %)	Belum optimalnya pelayanan persampahan Belum optimalnya pengendalian tata ruang wilayah
			PUPR

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Internasional

a. Sustainable Development Goals (SDG's)

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui *platform* agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rumusan SDG's terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDG's tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;
- 2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;



- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- 11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
- 16) Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDG's membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDG's merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Rumusan SDG's dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2017.

b. Antisipasi Perubahan Iklim Global (Global Warming/Climate Change).

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan



kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

c. Revolusi Industri 4.0 G yang berkembang yang sangat cepat dengan menembus batas-batas Negara.

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Revolusi industry 4.0 yang terakhir dan sekaligus yang kita alami saat ini diprakarsai oleh Prof. Klaus Schwab, ekonom terkenal dari Jerman yang mengenalkan konsep Revolusi Industri 4.0 dalam bukunya “*The Fourth Industrial Revolution*”. Beliau menegaskan bahwa revolusi industry 4.0 telah mengubah kerja manusia secara fundamental. Pada saat ini industry telaah menyentuh virtual, konektivitas manusia, mesin, dan data. Berdasarkan analisis Mckinsey Global Institute, Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas, terutama pada sektor lapangan kerja, di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja di dunia. Untuk itu era revolusi industri ini harus disikapi oleh pelaku industri dengan bijak dan hati-hati.

Sebagai contoh berikut merupakan bidang-bidang yang memperoleh terobosan berkat kemajuan teknologi 1) Robot Kecerdasan Buatan; 2) Teknologi Nano, 3)



Bioteknologi; 4) Teknologi Kuantum, 5) Blokhain; 6) Teknologi Berbasis Internet; dan 7) Printer 3D.

d. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) yang melanda dunia telah berdampak signifikan terhadap sebagian besar dunia. Tak bisa dipungkiri virus corona mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah, menjaga jarak baik secara fisik (*physical distancing*) maupun sosial (*social distancing*) bahkan melakukan lockdown (karantina wilayah) untuk menghambat penyebaran virus corona. Virus corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia dan langkah-langkah preventif yang dilakukan tentu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dunia.

Berbagai pembatasan yang dilakukan terhadap masyarakat, mengakibatkan masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar rumah sehingga industri dan bisnis sangat terdampak oleh pandemi corona. Dampak yang paling dapat dirasakan adalah perekonomian dunia yang berkontraksi hebat dan pada tahun 2020 kemungkinan akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang minus. Amerika Serikat sebagai raksasa perekonomian dunia pun juga sangat terdampak dengan pandemi ini sehingga akan berdampak juga bagi sebagian besar perekonomian negara di berbagai belahan dunia. Diperkirakan dampak pandemi ini masih akan terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya.

Di samping dampak negatif yang terjadi, terdapat dampak lain pandemi, sebagai pembelajaran bersama. Masyarakat dunia pun belajar bahwa kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat meningkat signifikan. Di samping itu, dengan menurunnya proses produksi di masyarakat maka berdampak menurunnya polusi dan langit pun terlihat biru, kembali cerah sehingga seolah-olah memberikan kesempatan kepada alam untuk melakukan *recovery*.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, Covid-19 juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada delapan dampak utama merebaknya covid-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari Tenaga kerja hingga kinerja industri di Tanah Air. Dampak ini secara masif telah meluluh lantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia yang akhirnya juga



berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan jumlah penduduk miskin/persentase kemiskinan. Berikut adalah pengaruh merebaknya pandemi covid-19 bagi perekonomian Indonesia: 1) Meluasnya PHK; 2) Kontraksi PMI Manufacturing; 3) Menurunnya Kinerja Impor; 4) Dampak Inflasi; 5) Pembatalan Penerbangan Domestik dan Internasional; 6) Menurunnya Jumlah Wisman; 7) Kehilangan pendapatan Sektor Layanan Udara dan 8) Penurunan Okupansi Hotel.

Selain delapan aspek di atas, sektor pendidikan juga terkena dampak Covid-19. Sejak adanya Covid-19 Pemerintah Indonesia mengambil keputusan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif dan untuk menyelamatkan hidup. Ada dua dampak bagi keberlangsungan pendidikan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pertama adalah dampak jangka pendek, yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia baik di kota maupun di desa. Kedua adalah dampak jangka panjang. Banyak kelompok masyarakat di Indonesia yang akan terpapar dampak jangka panjang dari covid-19 ini. Dampak pendidikan dari sisi waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan peningkatan ketidakesetaraan antar kelompok masyarakat dan antardaerah di Indonesia.

Dengan hadirnya wabah Covid-19, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat. Sekolah perlu memaksakan diri menggunakan media daring. Namun penggunaan teknologi bukan tidak ada masalah, banyak varians masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring diantaranya adalah:

- 1) Keterbatasan Penguasaan Teknologi Informasi oleh Guru dan Siswa.

Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi, ini bisa dilihat dari guru-guru yang lahir tahun sebelum 1980-an. Kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam menggunakan media daring. Begitu juga dengan siswa yang kondisinya hampir sama terhadap pemahaman penggunaan teknologi.



2) Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai.

Perangkat pendukung teknologi jelas mahal. Banyak di daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi ekonominya yang mengawatirkan. Kesejahteraan guru maupun murid yang membatasi mereka dari serba terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dengan musibah Covid-19 ini.

3) Akses Internet yang terbatas.

Jaringan internet yang benar-benar masih belum merata di pelosok negeri. Tidak semua lembaga pendidikan baik Sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat menikmati internet. Jika ada pun jaringan internet kondisinya masih belum mampu mengcover media daring.

4) Kurangnya kesiapan sektor keuangan.

Biaya juga sesuatu yang menghambat karena, aspek kesejahteraan guru dan murid masih jauh dari harapan. Ketika mereka menggunakan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan media daring, maka jelas mereka tidak sanggup membayarnya. Ada dilema dalam pemanfaatan media daring, ketika menteri pendidikan memberikan semangat produktivitas harus melaju, namun disisi lain kecakapan dan kemampuan finansial guru dan siswa belum melaju ke arah yang sama. Negara pun belum hadir secara menyeluruh dalam memfasilitasi kebutuhan tersebut.

Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat mendapat tekanan ekonomi yang sangat besar dan massif, efek domino yang sangat berat, dimana kesehatan memukul sosial dan pendidikan, sosial memukul ekonomi dan ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keuangan dan penerimaan daerah.

4.2.2 Isu atau Kebijakan Nasional

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memiliki isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
2. Tenaga Kerja
3. Investasi
4. Perdagangan



5. Institusi
6. Pendidikan
7. Kesehatan
8. Karakter bangsa
9. Infrastruktur
10. Kewilayahan
11. Lingkungan Hidup dan Bencana
12. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Beberapa kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dengan lokus di Manokwari, antara lain:

1. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antar kampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN Manokwari;
2. Peningkatan IPM
3. Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi
4. Fasilitas penerapan budidaya kacang tanah
5. Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM
6. Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi
7. Pembangunan SPAM
8. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
9. Pengembangan Bandar Udara Rendani
10. Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat
11. Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manokwari
12. Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
13. Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
14. Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani

4.2.3 Isu atau Kebijakan Regional

a. Telaahan RPJMD Provinsi Papua Barat

Telaah dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat bertujuan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Manokwari terkait dengan sinergitas antar



kewilayahan regional dalam pembangunan dan sebagai upaya dalam meningkatkan sinergitas pada tiap tingkatan kewilayahan. Adapun dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat yang ditelaah adalah RPJMD dengan periode perencanaan 2017 – 2022, adapun dalam RPJMD Provinsi Papua Barat tertuang berbagai strategi dan arah kebijakan maupun arah pembangunan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan, adapun Visi dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat yaitu **“Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera, Dan Bermartabat”**

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut:

- 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*) serta otonomi khusus yang efektif;
- 2) Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
- 4) Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar;
- 5) Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata;
- 6) Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat;
- 7) Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial;
- 8) Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah.

Visi misi tersebut ditetapkan untuk menjawab isu strategis berikut ini :

- 1) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 2) Pengembangan Wilayah dan Kewilayahan (Pemekaran wilayah)
- 3) Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi
- 4) Tapal Batas Antar Wilayah Papua Barat



- 5) Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Papua Barat
- 6) Pengembangan Perumahan Layak Huni
- 7) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Papua Barat
- 8) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Papua Barat
- 9) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- 10) Pengelolaan Hutan
- 11) Pembangunan Sektor Maritim Papua Barat
- 12) Kawasan Ekonomi Khusus Sorong
- 13) Kawasan Industri (KI) Petrokimia Teluk Bintuni
- 14) Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan
- 15) Program Afiriasi Pendidikan

b. Telaahan RPJPD Kabupaten Manokwari

RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Dalam Dokumen RPJPD tersebut, visi yang akan diwujudkan adalah “**Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera yang Lestari**”. Adapun misi yang diemban untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari Yang Religius
2. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari Yang Maju Dan Cerdas
3. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari Yang Mandiri
4. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari Yang Adil
5. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Manokwari Yang Sejahtera

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan kabupaten Manokwari tersebut ditempuh 2 (dua) strategi pokok pembangunan, yaitu:

1. Strategi penataan kembali Kota Manokwari sebagai Kota Injil dengan tetap memelihara integrasi masyarakat yang berbhineka tunggal Ika dan bersatu, aman, tertib dan damai. Ini adalah sebagai suatu konsekwensi negara kesatuan yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.



2. Strategi Pembangunan Kabupaten Manokwari yang diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Hak-hak dasar rakyat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Pemenuhan hak dasar meliputi: (1) hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, (2) hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum, (3) hak rakyat untuk memperoleh rasa aman, (4) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, papan) yang terjangkau, (5) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan, (6) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan, (7) hak rakyat untuk memperoleh keadilan, (8) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan perubahan, (9) hak rakyat untuk berinovasi, serta (10) hak rakyat untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Tanpa pemenuhan hak dasar akan sulit diharapkan partisipasi pada kebebasan dan persamaan.

c. Telaahan RTRW Kabupaten Manokwari

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitannya, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Tahun 2013-2033, sebagai acuan maupun pedoman dalam mengarahkan peruntukan lokasi kegiatan serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang wilayah. sebagai acuan maupun pedoman dalam mengarahkan peruntukan lokasi kegiatan serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang wilayah, hal ini sesuai dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Manokwari yaitu : Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Manokwari yang produktif melalui pengembangan pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan,



pertambangan, pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan perlindungan terhadap bencana untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam mencapai tujuan tersebut selanjutnya di tetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. peningkatan pelayanan perkotaan dan perdesaan yang merata dan berhirarki;
2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana permukiman, transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat;
3. peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
4. pengembangan potensi perikanan;
5. pengembangan potensi peternakan;
6. pemanfaatan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan;
7. pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan;
8. peningkatan dan pengembangan pariwisata yang produktif dan ramah lingkungan;
9. pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam serta mitigasi bencana; dan
10. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Penelaahan rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Guna mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah maka ditetapkanlah kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang meliputi 4 kebijakan maupun strategi yaitu: 1) Kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah kabupaten; 2)



Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kabupaten; 3) Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 4) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kabupaten, yang kemudian secara telah di susun berdasarkan tingkat prioritasnya sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan peran Kabupaten Manokwari sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah);
- 2) Mendorong perkembangan pusat-pusat pelayanan yang meliputi PKW, PKL, pklp PPK (Pusat Pengembangan Kecamatan) dan PPL;
- 3) Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan; dan
- 4) Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat di perkampungan.
- 5) Mengembangkan sarana dan prasarana air minum, sanitasi, drainase dan persampahan;
- 6) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara;
- 7) Mengembangkan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi;
- 8) Mengembangkan sumber daya energi alternatif berupa pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro; dan
- 9) Meningkatkan jaringan irigasi dan sarana dan prasarana pendukung serta melindungi sumber-sumber air;
- 10) Mengembangkan agropolitan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian;
- 11) Meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;
- 12) Meningkatkan luas lahan sawah beririgasi teknis dan non teknis;
- 13) Mempertahankan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
- 14) Meningkatkan sarana produksi pertanian dan pembinaan petani;
- 15) Meningkatkan usaha pengembangan peternakan; dan
- 16) Pengembangan pembibitan dan penangkaran benih
- 17) Mengupayakan pelestarian Kawasan hortikultura dengan memperhatikan aspek konservasi lahan.
- 18) Memelihara kualitas danau dan sungai untuk pengembangan perikanan darat;
- 19) Mengembangkan fasilitas pembenihan ikan untuk mendukung ketersediaan bibit bagi petani ikan;
- 20) Mengembangkan budidaya perikanan melalui sistem keramba;



- 21) Mengembangkan produksi perikanan tangkap melalui dukungan sarana produksi perikanan tangkap; dan
- 22) Mendorong peningkatan investasi di bidang pengolahan perikanan yang berorientasi ekspor.
- 23) Memanfaatkan tanaman hutan produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
- 24) Meningkatkan reboisasi hutan dan mengembalikan fungsi lahan kritis menjadi fungsi aslinya;
- 25) Meningkatkan nilai tambah hasil hutan menjadi barang jadi; dan
- 26) Meningkatkan pemantapan dan perlindungan kawasan lindung; dan
- 27) Mengembangkan hutan rakyat berpola agroforestry;
- 28) Melakukan koordinasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung yang memiliki potensi tambang;
- 29) Meningkatkan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang yang ramah lingkungan;
- 30) Mewajibkan kajian kelayakan lingkungan, ekonomi dan sosial untuk setiap kegiatan pertambangan; dan
- 31) Mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan reklamasi area penambangan, baik selama maupun setelah kegiatan penambangan berakhir.
- 32) Mengembangkan obyek wisata untuk pariwisata alam, buatan, dan khusus;
- 33) Mengembangkan infrastruktur menuju objek wisata sehingga mudah dijangkau;
- 34) Mengamankan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah;
- 35) Mengembangkan fasilitas pendukung objek wisata untuk meningkatkan mutu tempat wisata; dan
- 36) Mendorong peran masyarakat untuk melestarikan benda cagar budaya
- 37) Meningkatkan perlindungan terhadap sumber-sumber air;
- 38) Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan rawan bencana;
- 39) Mengembalikan fungsi pada Kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;



- 40) Mempertahankan kawasan resapan air;
- 41) Mengamankan kawasan sempadan pantai dengan mempertahankan ekosistem pantai;
- 42) Mengendalikan pemanfaatan kawasan sempadan pantai, sungai, dan danau; dan
- 43) Mengembangkan hutan mangrove dan vegetasi yang dapat mencegah bencana banjir dan gelombang pasang.
- 44) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI; dan
- 45) Mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI;
- 46) Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI

d. Telaahan KLHS Kabupaten Manokwari

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan KRP dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD.

Dari pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2025, maka dapat diidentifikasi substansi terpenting KLHS meliputi:

- a. Status lingkungan hidup. Status lingkungan hidup, secara umum menggambarkan daya dukung dan daya tampung. Daya dukung dan daya tampung menggambarkan



kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan maupun seluruh kehidupan.

- b. Skenario TPB tanpa upaya tambahan. Skenario TPB tanpa upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB pada tahun 2025 (masa berakhirnya RPJMD) tanpa memerlukan upaya tambahan atau Business As Usual (BAU). Dengan melaksanakan pembangunan yang sudah kita laksanakan selama ini maka target TPB akan tercapai pada tahun 2025.
- c. Skenario TPB dengan upaya tambahan. Skenario TPB dengan upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB yang tidak akan tercapai pada tahun 2025 (masa berakhirnya RPJMD) dengan Business As Usual (BAU), sehingga memerlukan upaya tambahan untuk pencapaian target tersebut.
- d. Penentuan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah. Isu strategis pembangunan KLHS RPJMD Kabupaten Manokwari mempertimbangkan indikator TPB yang membutuhkan upaya tambahan. Hasil perumusan skenario menunjukkan indikator TPB belum tercapai sampai dengan tahun 2024 merupakan indikator yang perlu upaya tambahan setelah dipadankan dengan aspek lain, terutama aspek lingkungan. Indikator yang belum tercapai perlu menjadi prioritas dalam dokumen KLHS agar dapat memenuhi target pada masa yang akan datang.
- e. Rekomendasi program. Rekomendasi program dari KLHS untuk masukan penyusunan RPJMD Kabupaten Manokwari 2021-2025 berupa usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD.

Secara umum, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Manokwari sebagai berikut :

- a. Berdasarkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 220 indikator, maka kondisi pelaksanaan TPB di Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:
 - 1) Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebesar 24,54% atau sebanyak 54 indikator;
 - 2) Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebesar 24,10%, atau sebanyak 53 indikator;



- 3) Indikator yang belum tersedia data sebesar 37,27% atau sebanyak 82 Indikator;
- 4) Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebesar 14,09% atau sebanyak 31 indikator.

Sehingga dengan demikian indikator yang telah di laksanakan di Kabupaten Manokwari sebanyak 107 indikator yang terdapat pada 16 tujuan.

- b. Kabupaten Manokwari memiliki beberapa permasalahan terkait Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT), Lingkungan Hidup, dan Kerentanan, yaitu:
 - 1) Daya dukung air bersih di Kabupaten Manokwari belum memadai akibat keterbatasan jaringan distribusi;
 - 2) Pengelolaan sampah di Kabupaten Manokwari masih mengalami kendala dikarenakan kurangnya armada pengangkutan sampah dan kurangnya ketersediaan bak amrole yang digunakan sebagai TPS;
 - 3) Risiko gempa bumi di Kabupaten Manokwari tergolong tinggi, hal ini disebabkan karena Papua Barat terdapat sebanyak 150 sesar dan beberapa di antaranya cukup rawan seperti sesar Sorong dan Manokwari Selatan.
- c. Untuk mendapatkan isu strategis yang fokus dan substantif, maka dalam proses penyusunannya dilakukan pengkajian untuk merumuskan permasalahan dan isu utama yang selanjutnya disederhanakan untuk menjadi isu strategis yang lebih fokus.

Berdasarkan pengelompokan permasalahan tercatat memiliki sebanyak 61 permasalahan dari capaian indikator TPB, dengan isu strategis sebanyak 12 isu yang memerlukan upaya tambahan. Adapun susunan peringkat isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya Akselerasi Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin;
2. Pentingnya Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat secara Merata, Pengembangan Potensi Wisata, dan Peningkatan Ketahanan Pangan;
3. Perlunya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan, serta Pemerataan Jaminan Kesehatan;
4. Pentingnya Peningkatan Partisipasi Sekolah Masyarakat;
5. Perlunya Pemerataan Akses Sanitasi Layak bagi Masyarakat;



6. Perlunya Pemerataan Akses Layanan Air Minum Layak dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Keberpihakan terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Responsif Gender;
8. Perlunya Peningkatan Mitigasi Bencana dan Perbaikan Manajemen Bencana;
9. Tantangan Pemenuhan Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Aksesibilitas, serta Peningkatan Pelayanan Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Pentingnya Pengelolaan Sampah dan Limbah, serta Pengembangan Energi Terbarukan;
11. Tantangan Peningkatan PAD, Peningkatan Anggaran Layanan Pokok dan Penyediaan Pembiayaan Alternatif;
12. Pentingnya Kepemilikan Akta Kelahiran dan Registrasi Kependudukan (Vital Statistics Register).

Gambaran tabel berikut ini memberikan informasi tentang 12 isu strategis KLHS RPJMD Manokwari yang menjadi catatan dan perhatian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Manokwari 2021-2025.



Tabel 4. 6 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2025

No	Tujuan	Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Total Skor
1	Tujuan 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun;	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Sebanyak 35,25% penduduk umur 0-17 tahun belum memiliki akta kelahiran	Pentingnya Kepemilikan Akta Kelahiran dan Registrasi Kependudukan (Vital Statistics Register)	- Menjamin kepemilikan akta lahir bagi setiap penduduk;	46
	Tujuan 16 - Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan;	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Masih terdapat kekurangan sebesar 67,17% penduduk 40% berpendapatan bawah yang belum memiliki akta		- Kepengurusan akta lahir yang sederhana, mudah dan cepat;	
		16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Sebanyak 42,85% penduduk umur 0-17 tahun belum memiliki akta kelahiran			
	Tujuan 17 - Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Data registrasi kelahiran dan kematian belum tersedia		- Tersedianya data registrasi kependudukan (Vital Statistic Register).	



No	Tujuan	Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Total Skor
2	Tujuan 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan;	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Laju PDRB perkapita pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,1% dari tahun 2017	Pentingnya Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat secara Merata, Pengembangan Potensi Wisata, dan Peningkatan Ketahanan Pangan	- Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan;	67
	Tujuan 8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua;	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	PDRB Perkapita belum mencapai target nasional sebesar Rp. 50 Juta Rupiah perkapita (Masih kurang sebanyak Rp. 11.309.500,-)		- Ketersediaan Pangan dan peningkatan tenaga kerja informal sektor pertanian;	
		8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja/ tingkat pertumbuhan PDRB riil orang bekerja pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 10,15%			
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara masih sangat sedikit (pada tahun 2018 sebanyak 182 atau mengalami penurunan sebesar 9% dari tahun 2017)		- Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Luar Negeri	



No	Tujuan	Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Total Skor
		8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit mengalami penurunan sebesar 4,22% dari tahun 2018			
	Tujuan 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1*	Koefisien Gini.	Terdapat kekurangan sebesar 0,01 untuk mencapai target penurunan Gini Rasio sebesar 0,36			
		8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Tenaga Kerja Informal sektor pertanian menurun sebesar 3,7% dari 4,3% menjadi 0,6%			
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat mengalami peningkatan sebesar 5% dari tahun sebelumnya			
3	Tujuan 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun; Tujuan 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Sebanyak 9,8% penduduk masih belum menjadi peserta SJSN Bid. Kesehatan	Perlunya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan, serta Pemerataan Jaminan Kesehatan	Meningkatnya Indeks Kesehatan, dan peningkatan/ perbaikan pola pelayanan dasar, serta tercapainya 100% Universal Health Coverage masyarakat	65



No	Tujuan	Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Total Skor
		1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Masih terdapat kekurangan sebesar 14,78% anak umur 12-23 bulan yang belum menerima imunisasi dasar lengkap dari target sebesar 63%			
		3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Masih terdapat kekurangan sebesar 2% perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas kesehatan untuk mencapai target nasional sebesar 85%			
		3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Masih terdapat 19,07% bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap dari target yang mencapai 80%			
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Angka kejadian malaria meningkat sebanyak 0,2 per 1000 orang dari tahun 2018			
		3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Masih terdapat sebanyak 20,37% penduduk dengan usia di bawah 18 tahun yang merokok dari target nasional sebesar 5,4%			
		3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Masih terdapat kekurangan sebesar 0,28% penurunan kasus penyalahgunaan narkoba dari target nasional 0,02%			



No	Tujuan	Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Total Skor
		3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk masih stagnan			
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Sebanyak 9,8% penduduk masih belum menjadi peserta SJSN Bid. Kesehatan			
4	Tujuan 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun;	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Alokasi dana untuk program pemberantasan kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,33% dari tahun 2018	Tantangan Peningkatan Pajak Daerah, Peningkatan Anggaran Layanan Pokok dan Penyediaan Pembiayaan Alternatif	- Meningkatnya Anggaran Pengeluaran Layanan Pokok dan Penanggulangan Kemiskinan;	53
	Tujuan 17 - Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Persentase pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial) terhadap total belanja pemerintah mengalami penurunan sebesar 0,99% dari tahun 2018			
		17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Rasio pajak terhadap PDRB masih mencapai 7,24%		- Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah;	



No	Tujuan	Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Total Skor
		17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik mengalami penurunan sebesar 3,30% dari tahun 2018		- Tersedianya Pembiayaan Alternatif Pembangunan Daerah	
		17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tidak adanya proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU			
		17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tidak ada alokasi penyiapan proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU			
5	Tujuan 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan; Tujuan 7 - Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Masih terdapat 26% sampah perkotaan yang belum tertangani dari target nasional sebesar 80%	Pentingnya Pengelolaan Sampah dan Limbah, serta Pengembangan Energi Terbarukan	- Terciptanya Wilayah Perkotaan bebas Sampah dan bebas pencemaran	55
		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah memiliki kekurangan sebesar 12,5% dari target nasional		- Mewujudkan Energi Baru Terbarukan dan murah	



No	Tujuan	Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Total Skor
	Tujuan 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan;	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Belum terdapat rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.			
	Tujuan 12 - Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Energi terbarukan masih rendah (masih kurang sebanyak 4,75%)			
		DDDT	-	Pengelolaan sampah di Kabupaten Manokwari masih mengalami kendala dikarenakan kurangnya armada pengangkutan sampah dan kurangnya ketersediaan bak amrole yang digunakan sebagai TPS			
6	Tujuan 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun;	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	Tidak terdapat insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri	Perlunya Pemerataan Akses Layanan Air Minum Layak dan Pengelolaan Sumber Daya Air	- Tersusunnya insentif penghematan air pertanian/ perkebunan/ dan industri;	61
		6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Belum terdapat jaringan informasi sumber daya air yang terbentuk			
	Tujuan 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Belum terdapat penataan kelembagaan air		- Terbentuknya jaringan informasi sumber daya air;	
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Sebanyak 25,05% rumah tangga belum memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan		- Terbentuknya kelembagaan sumber daya air;	



No	Tujuan	Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Total Skor
		6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Masih terdapat 25,07% rumah tangga yang belum memiliki akses pada air minum layak		- Pemerataan akses terhadap sumber air minum layak.	
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Sebanyak 25,07% populasi belum memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan			
		DDDT	-	Daya dukung air bersih di Kabupaten Manokwari belum memadai akibat keterbatasan jaringan distribusi. Masyarakat Kabupaten Manokwari memanfaatkan sumber air bersih lainnya.			
7	Tujuan 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Masih terdapat kekurangan sebanyak 5 desa maju untuk mencapai target minimal 5 desa/kabupaten	Tantangan Pemenuhan Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Aksesibilitas, serta Peningkatan Pelayanan Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Mengentaskan Desa Tertinggal; - Menjamin Aksesibilitas pelayanan dasar yang merata; - Meningkatkan Pembangunan yang merata.	57
8	Tujuan 5 - Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Keberpihakan terhadap Perlindungan	- Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;	60



No	Tujuan	Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Total Skor
	Perempuan; Tujuan 16 - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	5.2.2*	pemberdayaan perempuan. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	memiliki kekurangan sebesar 13 dari target nasional Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan masih stagnan sebesar 0,6% sehingga belum mengalami penurunan	Perempuan dan Anak, serta Responsif Gender	- Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan.	
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Eselon II) mengalami kondisi stagnan dari tahun 2018			
		16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Proporsi perempuan sebagai pengambil keputusan (Eselon I dan II) mengalami kondisi stagnan dari tahun 2018			
9	Tujuan 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun;	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah masih mengalami kekurangan sebanyak 39 daerah dari target nasional	Perlunya Peningkatan Mitigasi Bencana dan Perbaikan Manajemen Bencana	- Meningkatnya lokasi tangguh bencana daerah;	58
	Tujuan 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi masih memiliki kekurangan sebesar 28,35 dari target nasional		- - Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi;	



No	Tujuan	Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Total Skor
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana belum dilakukan penghitungan		Terdatanya kerugian ekonomi langsung akibat bencana;	
		11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Penurunan Indeks Resiko Bencana belum mencapai target nasional (30%)		- Menurunnya indeks risiko bencana Kabupaten Manokwari	
		11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana belum dilakukan penghitungan			
		DDDT	-	Risiko gempa bumi di Kab. Manokwari tergolong tinggi, hal ini disebabkan karena Papua Barat terdapat sebanyak 150 sesar dan beberapa di antaranya cukup rawan seperti sesar Sorong dan Manokwari Selatan			
10	Tujuan 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun;	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/ MI/ sederajat masih kurang sebesar 1,95% dari target nasional	Pentingnya Peningkatan Partisipasi Sekolah Masyarakat	- Meningkatnya kualitas pendidikan;	64
	Tujuan 4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP/ MTs/ sederajat masih kurang sebesar 6,43% dari target nasional		- Tercapainya pemerataan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan.	
	Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI memiliki selisih 3,83% dari target nasional			



No	Tujuan	Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Total Skor
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI memiliki selisih 18,57% dari target nasional			
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun pada tahun 2019 masih mencapai 8,16 tahun (masih memiliki kekurangan sebanyak 0,64 tahun dari target nasional yang ditetapkan selama 88 tahun)			
11	Tujuan 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun; Tujuan 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan;	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Sebanyak 42,18% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Perlunya Pemerataan Akses Sanitasi	- Pemerataan akses terhadap layanan sanitasi layak bagi masyarakat Kabupaten Manokwari; - Seluruh desa/kelurahan telah melaksanakan sanitasi Total Berbasis Masyarakat;	63
		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Sebanyak 42,19% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Layak dan Hunian Layak bagi Masyarakat		
	Tujuan 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Terdapat 81 desa/ kelurahan yang belum melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB)			



No	Tujuan	Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Total Skor
		6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Terdapat penurunan rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja sebesar 42,33%		- Peningkatan rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja;	
		11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Masih terdapat 1,62% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dari target nasional		- Meratanya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	
12	Tujuan 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun; Tujuan 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Masih terdapat 13,06% penduduk miskin yang belum terentaskan untuk mencapai target 7% - 8%.	Pentingnya Akselerasi Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin	- Menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat miskin; - Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin.	75
		1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Sebanyak 15,22% penyandang disabilitas belum terpenuhi hak dasar dan inklusivitas			



4.2.4 Isu-Isu Strategis Kabupaten Manokwari

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu internasional, isu nasional, isu regional dan amanat dalam RPJPD, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Toleransi kehidupan beragama dan kondusivitas wilayah

Kabupaten Manokwari merupakan salah satu kabupaten khas di antara kabupaten/kota Tanah Papua. Di kabupaten ini, 166 tahun lalu Agama Kristen Protestan pertama kali masuk di Tanah Papua. Agama ini dibawa oleh 2 orang Pekabar Injil yakni Ottow dan Geissler yang memasuki Kabupaten Manokwari melalui Pulau Mansinam pada tanggal 5 Februari 1855. Masuknya Agama Kristen Protestan menempatkan Kabupaten Manokwari sebagai pintu masuk dan dimulainya peradaban baru bagi Orang Papua. Suatu peradaban yang dipandu oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif, yakni tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh setiap individu manusia. Ketentuan-ketentuan ini tidak saja bersifat normatif, tetapi juga universal.

Penduduk Manokwari sangat heterogen berasal dari berbagai suku dan agama, sehingga tantangan ke depan adalah bagaimana menerapkan ajaran agama secara baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara baik, untuk membuka tali ikatan budaya/adat-istiadat yang bertentangan dengan ajaran agama. Dengan demikian tercipta masyarakat berbudaya Indonesia yang saling bekerjasama dan bertoleransi, yang tinggi iman dan ilmu untuk menghadapi era globalisasi yang sedang bergulir dengan rangkaian kebijakan pemerintah dibidang keagamaan yang mendukung kehidupan toleransi beragama sehingga tercipta kondusivitas wilayah yang aman.

2. Kualitas SDM dan tingkat pengangguran

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pembangunan, dapat menjadi beban pembangunan maupun sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 adalah 71,67 point dan tahun 2020



meningkat menjadi 72,01 point. Meskipun IPM menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, tetapi IPM tersebut menunjukkan angka terendah dibandingkan dengan Kota Sorong. Kualitas sumberdaya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan :

- a. Belum optimalnya harapan lama sekolah, pada tahun 2020, angka harapan lama sekolah sebesar 13,64 tahun;
- b. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, pada tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,16 tahun.

Tantang ke depan adalah bagaimana pemerintah dapat hadir memenuhi sarana sarana dan prasarana pendidikan secara optimal, menjamin anak dari keluarga tidak mampu dalam mengakses pendidikan, menjamin dan menyelenggarakan Pendidikan berkarakter dan bagaimana pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendidikan sebagai kebutuhan untuk lebih menjamin masa depannya.

Terkait dengan belum optimalnya kualitas sumber daya manusia, salah satunya berimplikasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih cukup tinggi. TPT masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2018 sebesar 4,88% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 6,92%. Upaya sistemik harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pada gilirannya dapat menurunkan angka penagngguran.

Angka Pengangguran dan Kualitas Sumber Daya Manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu; menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

3. Kemandirian ekonomi

Kemandirian dalam bidang ekonomi merupakan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun sistem perekonomian daerah dan masyarakat/keluarga untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi (sejahtera lahir dan batin). Kemampuan di bidang ekonomi tercermin dari kemampuan meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat/keluarga, mampu mengolah dan mendistribusikan hasil produksi dan pendapatannya kepada masyarakat secara proporsional sesuai pengorbanannya masing- masing dalam



bekerja/berusaha, mampu mengelola pendapatan secara baik untuk kebutuhan hari ini dan hari esok. Dan mampu mengelola SDA secara lestari.

Kemandirian ekonomi dapat dimulai dengan melakukan upaya penguatan kemandirian ekonomi kampung, sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui dana desa dan anggaran dana kampung, dengan harapan terbentuk kampung mandiri dengan pengembangan ekonomi lokal.

Pengembangan yang dimaksud tersebut merupakan proses yang ada di masyarakat, pemerintah, para pelaku usaha, dan sektor non-pemerintah lainnya bekerja bersama-sama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik pada pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data BPS tahun 2020, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari mengalami penurunan saat terjadi pandemic Covid-19, -4,86% dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,32%, dan hal ini juga berpengaruh terhadap pendapatan perkapita yang mengalami penurunan di tahun 2020, yaitu Rp34,21 juta dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp.39,07 juta.

Kemandirian ekonomi mempunyai relasi dengan aspek daya saing daerah yang menjadi focus dalam kebijakan nasional dan provinsi, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Kemandirian APBD

Ekonomi yang mandiri dapat meningkatkan nilai tambah sector atau komponen perhitungan PDRB, yang akhirnya dapat memicu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian pemerintah dapat memperoleh sumber dana dalam melaksanakan pembangunan.

Hal yang sama terjadi pada penerimaan daerah saat terjadinya pandemic Covid-19, yang mengalami penurunan. Berdasarkan pengolahan data LKD audited tahun 2020, penerimaan PAD memberikan kontribusi sebesar 6,43% dari pendapatan daerah, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang memberikan sumbangan 7,93% terhadap pendapatan daerah.

Walaupun terjadi pandemic Covid-19, pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB pada tahun 2020 bisa mencapai 0,66%, akan tetapi angka ini

lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 0,81%. Pencapaian ini melampaui rata-rata nasional sebesar 0,49% di tahun 2019. Secara nasional tahun 2019, kabupaten yang memiliki rasio pajak dan retribusi daerah tertinggi adalah Kabupaten Badung yang mencapai nilai 6,96%.

Jika hanya membandingkan pajak daerah, maka rasio terhadap PDRB di tahun 2020 mencapai 0,62% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 0,74%, sedangkan retribusi daerah memiliki rasio terhadap PDRB sangat kecil, yaitu 0,04% di tahun 2020 dan 0,07% di tahun 2019.

5. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Upaya-upaya dinamis telah dan akan terus dilaksanakan dan melibatkan berbagai pihak instansi pemerintah, swasta, masyarakat, adat, dan agama. Partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah sudah mulai nampak dengan hadirnya berbagai organisasi perempuan, namun perubahan yang signifikan dalam kesetaraan dan keadilan gender belum nampak, karena masalah gender adalah masalah indologi dan konstruksi sosial budaya yang telah dibangun budaya patriakal berabad-abad yang lalu, sehingga memerlukan suatu proses sosial yang panjang.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

6. Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Pedesaan

Dalam dokumen RTRW Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang menjadi simpul pelayanan



yang bersifat lokal sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani kebutuhan kawasan andalan terkait yaitu Kab Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak.

Dengan status sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta secara fisik, ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya Kawasan terbangun, terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan perdagangan jasa. Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Infrastruktur dasar perkotaan dan pedesaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah:

- a. Kualitas dan kuantitas jalan, kemacetan jalan arteri primer kawasan perkotaan perlu Kondisi jalan kota pun juga harus terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian kota. Hingga tahun 2020, jalan kota kondisi mantap sebesar 80,16%. Di samping itu, pengembangan perekonomian harus didukung kondisi lalu lintas yang lancar dan aman. Kabupaten Manokwari merupakan salah satu simpul PKW sehingga masih bercampurnya lalu lintas regional dari Kabupaten Manokwari Selatan, Bintuni, Pegunungan Arfak dan Teluk dan lalu lintas lokal. Ratio luas daerah dengan jalan terbangun masih rendah, baru mencapai 0,47, sehingga harus terus dioptimumkan
- b. Layanan air bersih yang belum dinikmati oleh seluruh penduduk kawasan perkotaan, baru mencapai 8,56% yang terlayani air perpipaan dan masyarakat lainnya menggunakan sumur terlindung sebesar 21,42%; sumur bor/pompa 20,44%; mata air terlindung 12,27%; sumur tak terlindung 12,27%; air sungai 11,42%; mata air tak terlindung 4,71%; air hujan 3,89%; leding eceran 2,67%; dan lainnya sebesar 0,41%.
- c. Cakupan pelayanan sampah yang belum optimal, dari sampah domestik yang dihasilkan sebanyak 150,22 ton per hari, baru bisa diangkut sebanyak 60,04 ton



per hari, yang berasal dari distrik kawasan perkotaan, sedangkan untuk distrik Warpramasi, Tanah Rubuh dan Pantura belum ada layanan.

Tantangan pengelolaan persampahan terutama disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama jumlah kendaraan sampah dan kapasitas TPA Arfai yang semakin terbatas dan membutuhkan segera penggantian. Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan, misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah dan proses pemilahan sampah yang belum berjalan secara optimal.

- d. Kualitas infrastruktur lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan seluas 166,81 ha sebagaimana SK Bupati Manokwari Nomor 653.2/135/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, yang tersebar di pesisir kawasan pesisir. Kondisi infrastruktur lingkungan permukiman yang kumuh sangat mempengaruhi terhadap kondisi sosial ekonomi, kesehatan maupun kenyamanan warganya. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan adalah peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman.

7. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani kepentingan masyarakat dan pembangunan yang memenuhi syarat transparan, partisipasif, akuntabel dan koordinatif.

Perkembangan teknologi 4.0, menuntut adanya perubahan dalam sikap dan cara kerja dalam pelayanan pemerintahan, untuk sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan pelayanan pemerintah berbasis elektronik atau SPBE, maka pemahaman dan ketrampilan ASN terhadap penggunaan dan pemanfaatan teknologi sudah harus beralih ke era digitalisasi yang menggunakan sarana computer.

Pemanfaatan teknologi sangat memungkinkan untuk pemanfaatan data secara bersama antara OPD, sehingga kemudahan dalam memanfaatkan data untuk kepentingan pembangunan dapat lebih efisien dan efektif, pembangunan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan tepat waktu, pelaksanaan monitoring kinerja pembangunan dapat terukur dengan jelas. Untuk itu tantangan ke depan adalah peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM ASN dalam memanfaatkan teknologi



untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dalam perencanaan, dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah, sehingga nilai capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dapat mencapai nilai yang memuaskan.

8. Kesejahteraan Masyarakat

Tata kelola pemerintahan merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani kepentingan masyarakat dan pembangunan yang memenuhi syarat transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinatif.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS Tahun 2021 Angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang menurun dan pada tahun 2019 sebesar 21,06% menurun pada tahun 2020 sebesar 20,14%. Namun demikian, akibat dampak pandemi covid-19, angka kemiskinan kemungkinan akan bertambah, hal ini berarti dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut sehingga angka kemiskinan semakin menurun dengan upaya upaya yang harus semakin konsisten dan konvergen.

9. Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan menjadi syarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Apalagi, pada saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19 sehingga tantangan untuk meningkatkan derajat kesehatan semakin berat. Pada saat pandemi ini, seluruh sumberdaya kesehatan sedang berfokus ke pandemi, ada kekuatiran bahwa pelayanan untuk penyakit lainnya menjadi terabaikan mengingat semua tempat tidur di rumah sakit digunakan sepenuhnya untuk pelayanan pancemi Covid-19.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif, yang berbasis pada penguatan pelayanan di tingkat Puskesmas dan kesadaran masyarakat akan Kesehatan.

Sering kali kita melihat bahwa di tengah pandemic Covid-19, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol Kesehatan dengan menggunakan masker,



menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan semakin menurunnya angka usia harapan hidup yang telah mencapai 68,68 tahun pada tahun 2019 menurun pada tahun 2020 yang mencapai 60 tahun.

10. Kelestarian Lingkungan

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.



Tabel 4. 7 Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Manokwari, Isu Internasional, Isu Nasional dan KLHS RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2025

No	Isu Strategis	Masalah Daerah	Isu SDGs	Isu RPJMN	Isu RPJMD Prov PB	Isu KLHS
1	Toleransi beragama	Belum optimalnya pembinaan dan pelayanan keagamaan	15. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	8. Karakter bangsa 10. Kewilayahan 12. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan		
2	Kondusivitas Daerah	Belum optimalnya layanan pengelolaan konflik sosial				
3	Kualitas SDM	Belum optimalnya layanan Pendidikan	4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	2. Tenaga Kerja 6. Pendidikan	15. Program Afiriasi Pendidikan	4. Pentingnya Peningkatan Partisipasi Sekolah Masyarakat
4	Tingkat Pengangguran	Tingginya angka pengangguran				
5	Kemandirian ekonomi	Terjadi kontraksi pertumbuhan ekonom akibat Covid-19 dan belum optimalnya kontribusi sector Pertanian, UMKM dan Koperasi	7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi 3. Investasi 4. Perdagangan	11. Pembangunan sector maritim Papua Barat 12. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong 13. Kawasan Industri (KI) Petrokimia Teluk Bintuni 14. Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	2. Pentingnya Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat secara Merata, Pengembangan Potensi Wisata, dan Peningkatan Ketahanan Pangan
6	Kemandirian APBD	Belum optimalnya kapasitas fiskal daerah	17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	5. Institusi	11. Pembangunan sector maritim Papua Barat 12. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong 13. Kawasan Industri (KI) Petrokimia Teluk Bintuni	11. Tantangan Peningkatan PAD, Peningkatan Anggaran Layanan Pokok dan Penyediaan Pembiayaan Alternatif



No	Isu Strategis	Masalah Daerah	Isu SDGs	Isu RPJMN	Isu RPJMD Prov PB	Isu KLHS
					14. Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	
7	Kesetaraan gender	Belum optimalnya pelaksanaan berbasis gender	5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	6. Pendidikan 7. Kesehatan 8. Karakter Bangsa		7.Keberpihakan terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Responsif Gender
8	Ketersediaan infratsruktur	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar	6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	9. Infrastruktur	5. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Papua Barat 7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Papua Barat	5. Perlunya Pemerataan Akses Sanitasi Layak bagi Masyarakat; 6. Perlunya Pemerataan Akses Layanan Air Minum Layak dan Pengelolaan Sumber Daya Air 9. Tantangan Pemenuhan Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Aksesibilitas, serta Peningkatan Pelayanan Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 10. Pentingnya Pengelolaan Sampah dan Limbah, serta Pengembangan EBT
9	Tata Kelola pemerintahan	a. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal b. Belum optimalnya kualitas layanan publik c. Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan d. Akuntabilitas keuangan masih perlu	17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	5. Institusi	2. Pengembangan Wilayah dan Kewilayahan (Pemekaran wilayah) 4. Tapal Batas Antar Wilayah Papua Barat	9. Tantangan Pemenuhan Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Aksesibilitas, serta Peningkatan Pelayanan Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 11. Tantangan Peningkatan PAD, Peningkatan Anggaran Layanan Pokok dan Penyediaan Pembiayaan Alternatif



No	Isu Strategis	Masalah Daerah	Isu SDGs	Isu RPJMN	Isu RPJMD Prov PB	Isu KLHS
		dipertahankan dan ditingkatkan				
10	Kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya penanganan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pendidikan 7. Kesehatan 8. Karakter Bangsa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya Akselerasi Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin
11	Derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya layanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Perlunya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan, serta Pemerataan Jaminan Kesehatan
12	Kelestarian lingkungan	Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Prov Papua Barat sebagai provinsi konservasi 8. Pengendalian pemanfaatan ruang Papua Barat 9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 10. Pengelolaan hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Perlunya Peningkatan Mitigasi Bencana dan Perbaikan Manajemen Bencana



BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 didasarkan pada hasil telaahan RPJP Kabupaten Manokwari 2006-2026, Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2021-2024 serta isu-isu strategis baik faktor internal maupun eksternal. Adapun rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Manokwari kurun waktu 2021-2024, yaitu :

5.1 Visi

Visi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Terpilih Tahun 2021-2024 yang menjadi acuan dalam Penyusunan RPJMD ini adalah “**Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, Berdaya Saing, Maju, Mandiri Dan Sejahtera**”.

Rumusan visi tersebut terdiri dari 5 unsur frasa (pembentuk kalimat), dengan arti masing-masing sebagai berikut :

1. **Religius**, merefleksikan kondisi masyarakat dan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam setiap tutur kata dan perbuatan serta saling menghargai dalam perbedaan dalam prinsip pluralisme, sehingga nuansa religius terasa dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat sehingga terwujud toleransi antar umat beragama di daerah ini.
2. **Berdaya Saing**, mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Manokwari wajib menggali dan memanfaatkan setiap potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga memiliki daya saing terutama dalam menghadapi era milenial saat ini.
3. **Maju**, mengandung makna masyarakat Kabupaten Manokwari telah mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan disesuaikan dengan kondisi kekinian (milenial).
4. **Mandiri**, mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Manokwari telah siap untuk menuju kemandirian baik dalam bidang sosial budaya maupun perekonomian melalui prakarsa, kemampuan, dan kekuatan sendiri, tanpa menggantungkan diri pada orang lain.



5. **Sejahtera**, mengandung makna masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup yang dapat dilihat dan dirasakan melalui upaya pengurangan jumlah masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi menuju kemandirian.

Visi tersebut sejalan dengan Visi Jangka Panjang Kabupaten Manokwari Tahun 2006-2025, yaitu **Terwujudnya Masyarakat Yang Religius, Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera Yang Lestari**, yang mengandung nilai :

- a. **Masyarakat yang religius** adalah masyarakat yang memiliki iman dan menerapkannya sesuai ajaran agama masing- masing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan memiliki toleransi beragama.
- b. **Masyarakat maju** adalah masyarakat yang berwawasan luas, berpendidikan tinggi, menguasai/menerapkan IPTEKS serta mampu mengikuti perkembangan peradaban dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. **Masyarakat yang mandiri** adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan kehidupan masyarakat di daerah/ provinsi lain dengan mengandalkan pada prakarsa, kemampuan dan kekuatan sendiri untuk membangun dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungan hidupnya dengan tetap membina hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat di daerah lain/provinsi lain serta pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lain dalam wadah NKRI. Kemandirian di sini meliputi kemandirian pemerintah daerah dan kemandirian masyarakat dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik.
- d. **Masyarakat yang adil** adalah masyarakat yang menyadari adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, memanfaatkan dan menikmati hasil- hasil pembangunan secara seimbang serta menghargai satu sama lain dalam hukum dan pemerintahan. Keseimbangan ini diatur oleh aparat pemerintah daerah yang memberikan pelayanan secara adil dan jujur sesuai dengan nilai pengorbanan masing- masing ataupun berdasarkan pada kebijakan yang adil dan jujur pula.
- e. **Masyarakat yang sejahtera** adalah suatu wujud kehidupan masyarakat dan individu yang tercermin dari terpenuhinya seluruh kebutuhan fisik minimal



disamping non fisiknya secara lahir dan bathin, aman, tentram dan damai, serta lestari.

Unsur- unsur ini merupakan satu- kesatuan yang setara, penting dan saling menentukan serta mampu memenuhi kebutuhan sosial-budaya dan politik yang layak setara dengan masyarakat Kabupaten lain di luar Tanah Papua. Kabupaten Manokwari sebagai tempat dimulainya peradaban baru dan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat adalah kabupaten yang menunjukkan hasil-hasil nyata pembangunan di segala bidang, mulai dari religi sampai dengan pembentukan Kotamadya Manokwari. Kesejahteraan masyarakat dan kabupaten seperti ini dapat diwujudkan melalui kemajuan pada berbagai bidang pembangunan yang mencakup bidang sosial, bidang budaya, bidang ekonomi, bidang politik, bidang pemerintahan, dan bidang fisik. Kesejahteraan dapat terwujud apabila kebutuhan pokoknya terpenuhi, dalam jiwa yang aman, tentram, tertib dan damai dan dalam lingkungan hidup yang lestari dan bersahabat

5.2 Misi

Pencapaian Visi Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 dilakukan melalui misi pembangunan, sebagai berikut :

1. Membangun Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua yang Beradab, Religius dan Toleran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Penjelasan:

Misi ini merupakan perwujudan cita-cita masyarakat dan pemerintah Kabupaten Manokwari untuk menjadikan Manokwari sebagai mercusuar peradaban di Tanah Papua dengan berlandaskan kepada nilai-nilai kearifan lokal yang beradab, religius serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Mengembangkan Sumberdaya Putra-Putri Papua yang Berkualitas, Menguasai Iptek, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif dan Berdaya Saing Global sebagai Investasi Masa Depan Daerah;

Penjelasan:

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menyediakan pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya putra-putri Papua sehingga tercipta Generasi



Milenial yang bukan saja mampu menguasai teknologi kekinian namun juga berintegritas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing terhadap persaingan global.

3. Membangun dan Menata Infrastruktur Kawasan Perkotaan Ibu Kota Provinsi Papua Barat Secara Modern;

Penjelasan:

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari dalam membangun dan menata infrastruktur Kota Manokwari sehingga dapat berfungsi sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat yang representatif, modern dan berwibawa sehingga menjadi kebanggaan masyarakat di daerah ini.

4. Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Produktif Berbasis Potensi Lokal Dan Sumberdaya Alam;

Penjelasan:

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara mandiri dan produktif secara berkesinambungan dengan tetap mengutamakan kearifan lokal dan pengelolaan lingkungan yang lestari.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat secara Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan Sosial;

Penjelasan:

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil antar kawasan perkotaan maupun perkampungan sehingga kesenjangan sosial antaar wilayah dapat diminimalisir.

6. Membangun Hidup Masyarakat Yang Berkepribadian, Berbudaya, Dan Ber-Bhineka Tunggal Ika sebagai Kekayaan dan Identitas Daerah;

Penjelasan:

Misi ini merupakan perwujudan pemerintah Kabupaten Manokwari dalam pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan sehingga memiliki kepribadian luhur dan berbudaya tanpa memandang latar belakang, suku, agama dan ras sehingga tercipta toleransi dan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat.



7. Mengelola Lingkungan Hidup Secara Lestari, Berkelanjutan, dan Berorientasi Masa Depan dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna dan Ramah Lingkungan;

Penjelasan:

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, berkelanjutan dan berorientasi masa depan, oleh karena itu semua aktivitas pembangunan wajib berwawasan lingkungan sehingga pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan menjadi hal yang mutlak.

8. Membina Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Aman dan Damai, serta Tertib Hukum dan Berintegritas dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penjelasan:

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari untuk menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan damai serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis sehingga tercipta masyarakat yang tertib hukum dan berintegritas serta mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

9. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Kuat, Professional, dan Partisipatif.

Penjelasan:

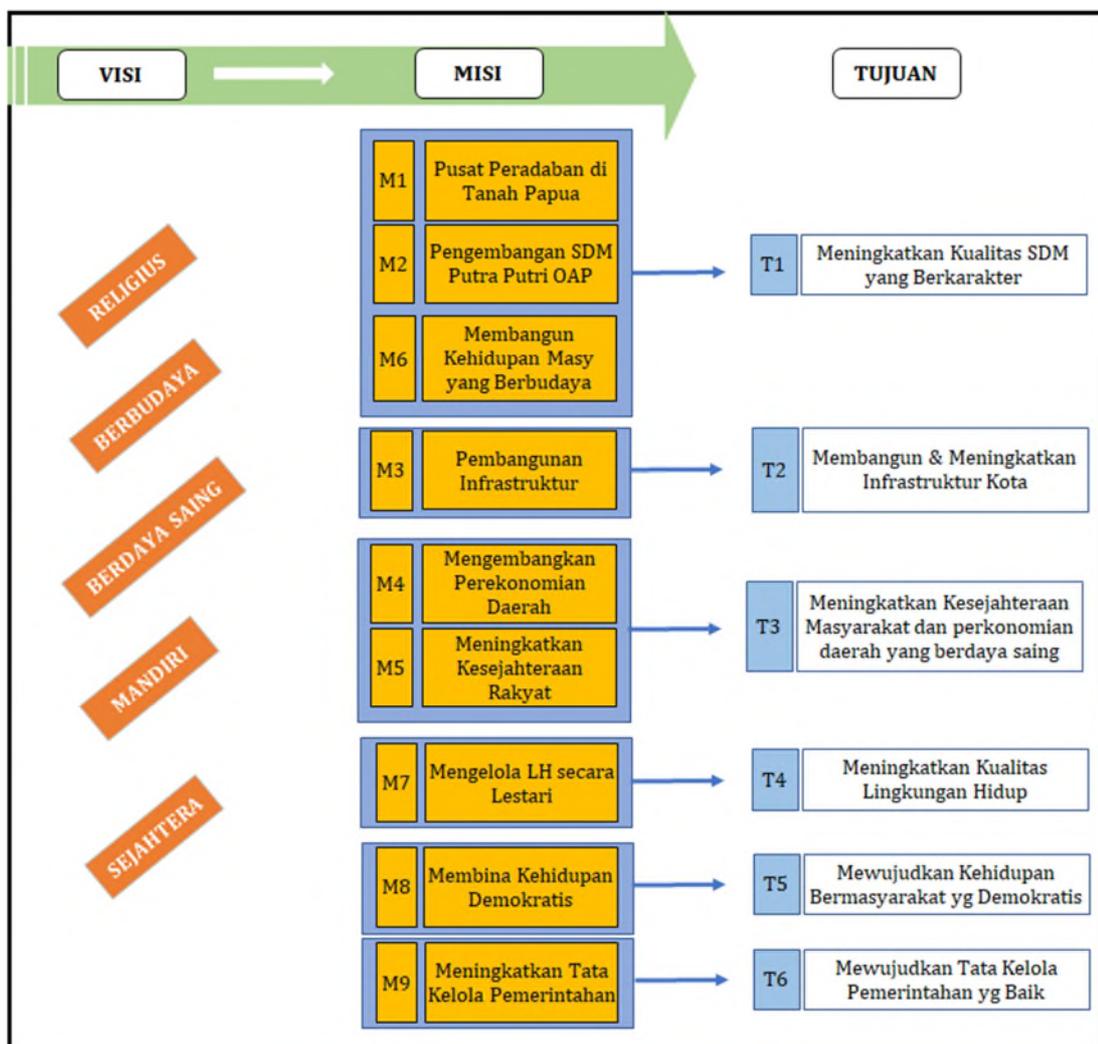
Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari untuk terus menjaga marwah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, partisipatif, transparan, responsif, akuntabel serta berorientasi pada keberpihakan pada masyarakat, dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan sehingga terwujud pemerintahan bersih, kuat, professional, dan berwibawa.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Kalimat tujuan tersebut dirumuskan dengan menjabarkan lebih operasional dari misi. Satu kalimat misi dapat dirumuskan dalam beberapa tujuan, penyusunannya memperhatikan isu-isu strategis daerah. Tujuan dapat pula

diartikan sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu enam tahun (2021-2026). Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu lima tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja pembangunan daerah.

Gambar 5.1 Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan RPJMD Kabupaten Manokwari 2021-2026





Tabel 5. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026

VISI: Terwujudnya Kabupaten Manokwari menjadi Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, Berbudaya, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Pusat Peradaban di Tanah Papua yang beradab, religius dan toleran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	Meningkatnya kualitas iman dan taqwa
Misi 2: Mengembangkan SDM Putra-Putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif dan Berdaya Saing Global sebagai Investasi Masa Depan Daerah		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Misi 6: Membangun hidup masyarakat yang berkepribadian, berbudaya, dan ber-Bhineka Tunggal Ika sebagai kekayaan dan identitas daerah		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Menjaga dan melestarikan budaya lokal
Misi 3 : Membangun dan Menata Infrastruktur Kawasan Perkotaan Ibu Kota Provinsi Papua Barat secara Modern	Meningkatkan Infrastruktur kota sebagai Pusat Peradaban dan Ibu Kota Provinsi Papua Barat	Infrastruktur modern dalam mendukung mobilitas masyarakat
Misi 4 : Mengembangkan perekonomian daerah yang mandiri dan produktif berbasis potensi lokal dan sumber daya alam	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan perkonomian daerah yang berdaya saing	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian
Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan pengurangan kesenjangan sosial		Menurunnya kemiskinan masyarakat Meningkatnya daya beli masyarakat
Misi 7 : Mengelola lingkungan hidup secara lestari, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terjaganya Kelestarian Alam Pembangunan sesuai arahan tata ruang wilayah
Misi 8 : Membina kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan damai, serta tertib hukum dan berintegritas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yg Demokratis dan Aman	Mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang taat hukum dan demokratis dalam bingkai NKRI
Misi 9 : Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang bersih, kuat, professional, dan partisipatif.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan
		Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public



Tabel 5.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2025

VISI: Terwujudnya Kabupaten Manokwari menjadi Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, Berbudaya, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MISI 1: Pusat Peradaban di Tanah Papua yang beradab, religius dan toleran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa									
MISI 2: Mengembangkan SDM Putra-Putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif dan Berdaya Saing Global sebagai Investasi Masa Depan Daerah									
MISI 6: Membangun hidup masyarakat yang berkepribadian, berbudaya, dan ber-Bhineka Tunggal Ika sebagai kekayaan dan identitas daerah									
TUJUAN : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia									
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,25	8,3	8,4	8,6	8,7	8,8	9,0
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Usia	68,68	68,71	68,73	68,75	68,77	68,79	68,82
3. Meningkatkan kualitas iman dan takwa	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Point	na	>75	>78	>80	>83	>85	>87
4. Menjaga dan melestarikan budaya lokal	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	even	n/a	2	2	2	2	2	2
	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Objek	9	9	9	9	9	9	9
MISI 3: Membangun dan Menata Infrastruktur Kawasan Perkotaan Ibu Kota Provinsi Papua Barat secara Modern									
TUJUAN : Meningkatkan Infrastruktur kota sebagai Pusat Peradaban dan Ibu Kota Provinsi Papua Barat									
1. Meningkatnya infrastruktur dasar bagi masyarakat	Permukiman layak huni	%	5,65	15,43	20,93	26,43	28,93	30,93	35,00
	Cakupan air bersih	%	56,00	58,00	61,00	64,00	68,00	71,00	73,0
2. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kota yang Modern	Persentase Kemantapan Jalan	%	29,787	30	34	38	42	46	50
	Luas permukiman kumuh	Ha	100,08	88,23	70,23	60,20	50,23	40,23	30,20
	Jumlah timbulan sampah terangkut	%	68,76	68,76	70	70	71	71	72
MISI 4: : Mengembangkan perekonomian daerah yang mandiri dan produktif berbasis potensi lokal dan sumber daya alam									
MISI 5: Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan pengurangan kesenjangan social									
TUJUAN : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan perekonomian daerah yang berdaya saing									
1. Menurunnya kemiskinan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	20,14	18,14	16,14	14,14	12,14	10,14	<10,00
2. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pendapatan per kapita	Rp/Jiwa	33,25	34,08	35,21	35,76	36,21	36,21	36,50



TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Terbentuknya BUMD	Lembaga	0	1	1	2	2	2	2
3. Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-4,86	-1,23	2,48	4,8	5,9	6,3	6,5
	LPE sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Rp	-1,41	0,02	0,13	1,5	2,3	2,8	3,0
	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur ekonomi daerah	%	4,28	4,39	4,68	4,96	5,24	5,52	5,75
MISI 7: Mengelola lingkungan hidup secara lestari, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan									
Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
1. Terjaganya Kelestarian Alam	Ketersediaan RTH publik	%	5,66	10,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,0
	Cakupan layanan persampahan	%	68,76	68,76	70	70	71	71	72
2. Pembangunan sesuai arahan tata ruang wilayah	Jumlah pelanggaran yang tidak sesuai RTRW dan RDTR	Temuan	121	121	80	50	30	20	10
MISI 8: Membina kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan damai, serta tertib hukum dan berintegritas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia									
Tujuan : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan aman									
Mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang taat hukum dan demokratis dalam bingkai NKRI	Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah	Kasus	Na	<10	<10	<5%	<5%	<2,5	<2,5
	Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pembangunan	%	>85	>85	>85	>85	>85	>85	>85
MISI 9: Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang bersih, kuat, profesional, dan partisipatif									
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik									
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal SPBE	Indeks	na	1,20	1,60	1,8	2,60	2,60	3,50
	Keterbukaan pemerintah atas informasi pelayanan publik SPBE	Informasi	6	7	8	9	10	11	11
	Nilai SAKIP	Huruf	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
	Kontribusi Pajak Daerah terhadap APBD	%	3,10	4,71	5,44	5,66	6,53	6,83	7,18
	Kontribusi Retribusi Daerah terhadap APBD	%	0,21	0,22	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WIT
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	na	<50	52	60	68	76	84
Optimalnya upaya pengarusutamaan gender	Optimalnya upaya pengarusutamaan gender	IPG	71,35	71,45	71,55	71,65	71,75	71,75	71,85



Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode pada tahun 2026.



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan berbagai program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD. Strategi dan arah kebijakan menjadi instrumen untuk menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah dengan rencana kerja tahunan.

6.1 Strategi

Strategi merupakan rVangkaian tahapan atau langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi berisi skenario pembangunan melalui serangkaian arah kebijakan. Strategi dimaksud harus menjadi perhatian seluruh *stakeholder* dan dijadikan sebagai prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. Sebagai prioritas maka strategi pembangunan Kabupaten Manokwari telah diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Nasional, RPJMD Provinsi Papua Barat serta RPJPD Kabupaten Manokwari.

Pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Manokwari ditujukan untuk mencapai 14 (empat belas) sasaran pembangunan, dimana untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui 23 (dua puluh tiga) strategi pembangunan. Strategi tersebut digunakan sebagai prioritas pembangunan yang harus diterjemahkan setiap tahun ke dalam RKPD. Hubungan antara masing-masing sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Manokwari dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 6.1 Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026

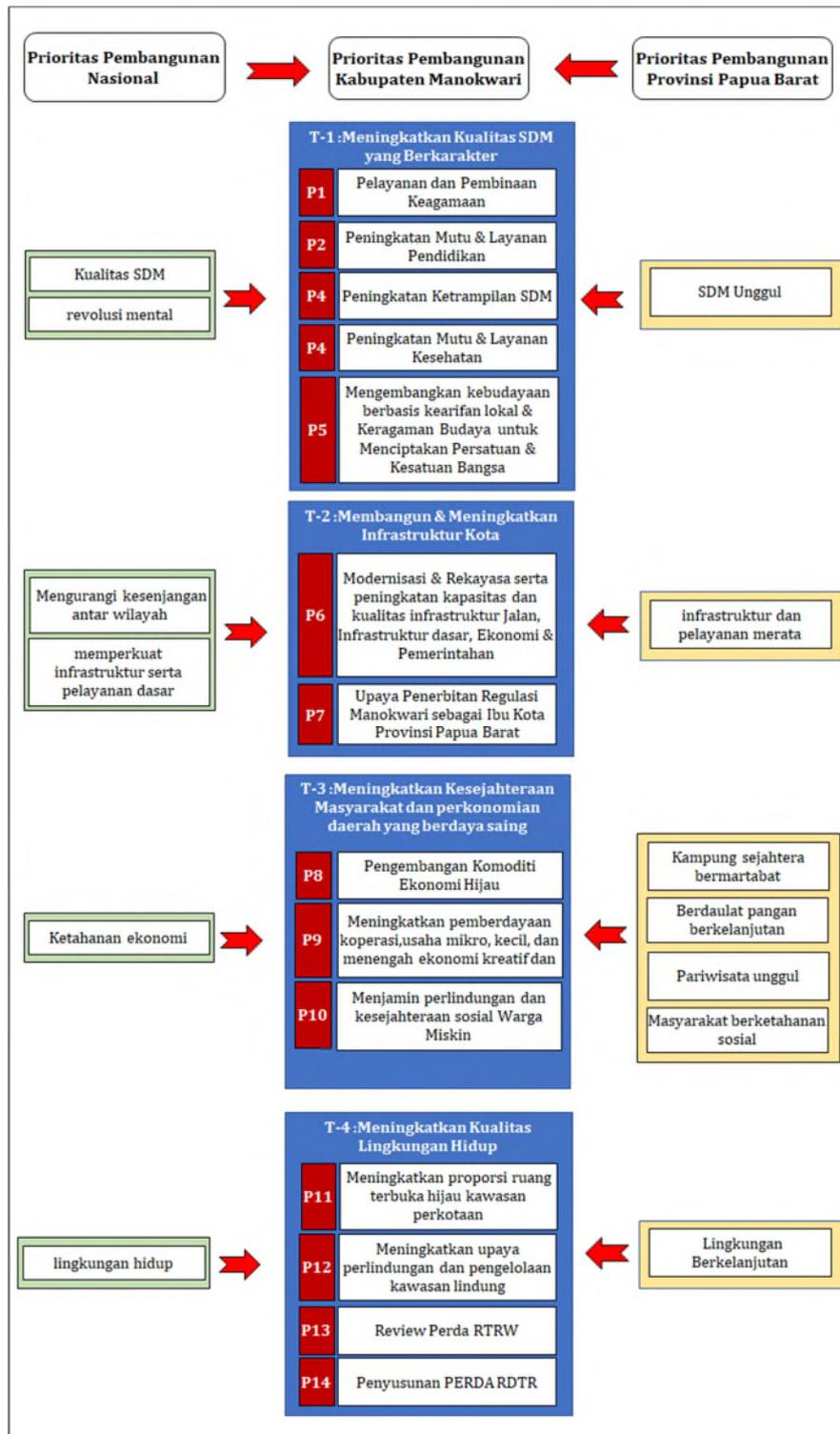
		SASARAN		STRATEGI/PRIORITAS		
M1	TUJUAN 1	S1	Meningkatnya kualitas iman dan takwa	P1	Pelayanan dan Pembinaan Keagamaan	
M2		S2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	P2	Peningkatan Mutu & Layanan Pendidikan	
M6		S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	P3	Peningkatan Ketrampilan SDM	
M3	TUJUAN 2	S4	Menjaga dan melestarikan budaya lokal	P4	Peningkatan Mutu & Layanan Kesehatan	
M4		S5	Infrastruktur modern dalam mendukung mobilitas dan kehidupan masyarakat	P5	Mengembangkan kebudayaan berbasis kearifan lokal & Keragaman Budaya untuk Menciptakan Persatuan & Kesatuan Bangsa	
M5	TUJUAN 3	S6	Meningkatnya daya beli masyarakat	P6	Modernisasi & Rekrayasa serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur Jalan, Infrastruktur dasar, Ekonomi & Pemerintahan	
M2		S7	Menurunnya kemiskinan masyarakat	P7	Upaya Penerbitan Regulasi Manokwari sebagai Pusat Peradaban dan Ibu Kota	
M1					P8	Pengembangan Komoditi Ekonomi Hijau
					P9	Meningkatkan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah ekonomi kreatif dan
					P10	Menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial Warga Miskin

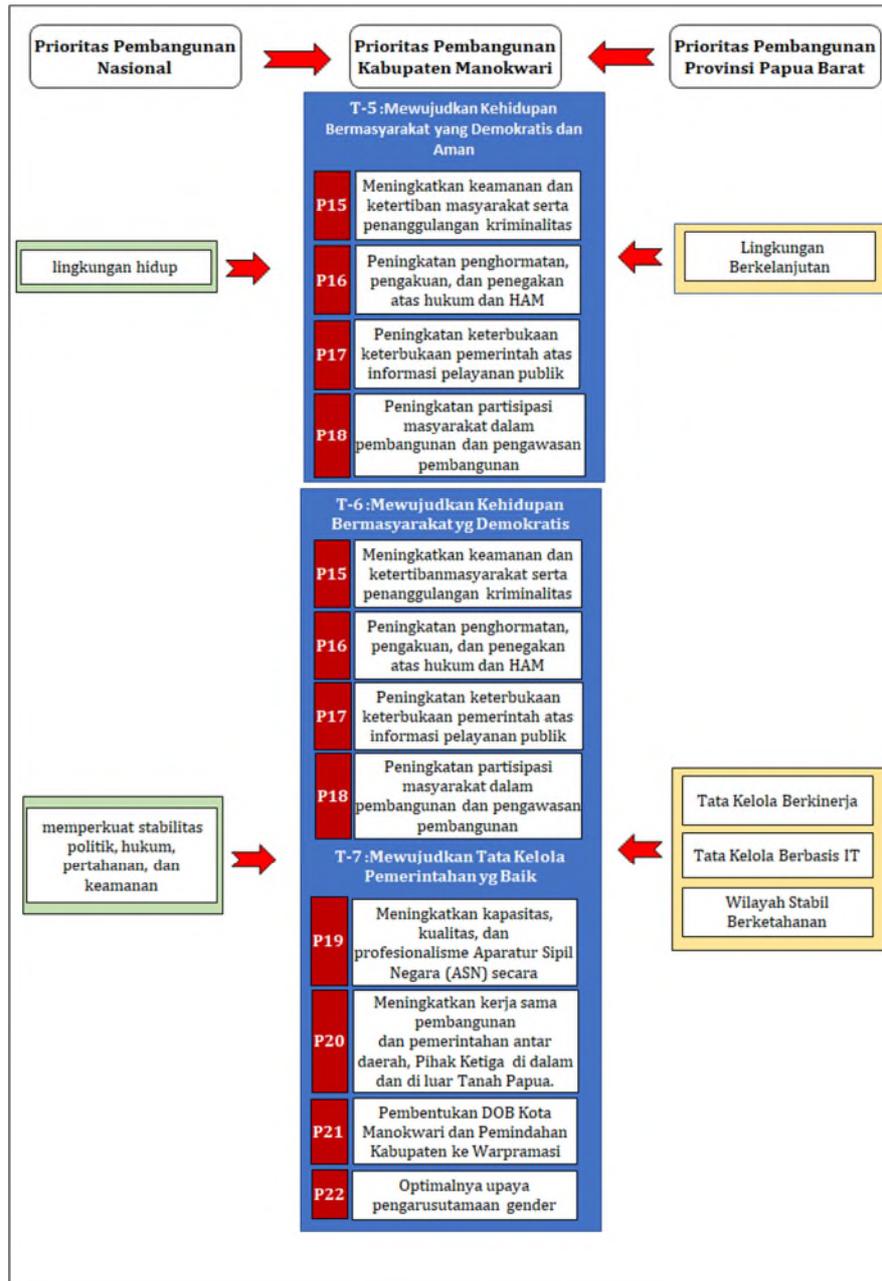


		SASARAN		STRATEGI/PRIORITAS	
M7	TUJUAN 4	S8	Terjaganya Kelestarian Alam	P11	Meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan
		S9	Pembangunan sesuai arahan tata ruang wilayah	P12	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan lindung
M8	TUJUAN 5	S10	Mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang taat hukum dan demokratis dalam bingkai NKRI	P13	Review RTRW sebagai PKN
				P14	Penyusunan PERDA RDTR
				P15	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan kriminalitas
M9	TUJUAN 6	S11	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan Terwujudnya pemerintah yang bersih dan	P16	Peningkatan penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM
				P17	Peningkatan keterbukaan keterbukaan pemerintah atas informasi pelayanan publik
		S12	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public	P18	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan pembangunan
				P19	Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) secara
				P20	Meningkatkan kerja sama pembangunan dan pemerintahan antar daerah, Pihak Ketiga di dalam dan di luar Tanah Papua.
P21	Pembentukan DOB Kota Manokwari dan Pemindahan Kabupaten ke Warpramasi				
P22	Optimalnya upaya pengarusutamaan gender				

Dua puluh dua strategi atau prioritas di atas selanjutnya dijadikan prioritas pembangunan selama lima tahun. Sinergitas prioritas tersebut dalam kertas kerja perumusan kebijakan telah disinkronkan dengan prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN Tahun 2019-2024) dan Provinsi Papua Barat (Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022) sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 6.2 Sinkronisasi Kebijakan RPJMD Kabupaten Manokwari dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Papua Barat





Berikut penjelasan strategi di atas yang dijadikan prioritas pembangunan selama lima tahun.

1. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan keagamaan

Sebagaimana diketahui bahwa sejarah Pekabaran Injil di Tanah Papua dimulai di Pulau Mansinam, pada tanggal 5 Februari 1855 oleh Ottow dan Geisler. Pekabaran Injil ini merupakan titik sejarah dimulainya peradaban Orang Papua. Injil merupakan Nilai-nilai agama dan budaya yang berkembang di masyarakat pada dasarnya adalah



modal dasar yang sangat besar sebagai kekuatan untuk mendorong atau mengakselerasi pembangunan daerah.

Dengan pengamalan agama yang dipeluk oleh penduduk Manokwari (Agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu dan Budha) dapat membantu mewujudkan perilaku positif masyarakat untuk mengisi aktivitas sehari-hari dengan pembangunan dan lebih spesifik dalam bentuk pembangunan karakter dan akhlak. Untuk itu, peningkatan pelayanan dan pembinaan keagamaan diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang berkembang di masyarakat antara lain melalui penyediaan fasilitas sarana peribadatan dengan pelayanan unit terkecil lingkup permukiman dan penyediaan fasilitas peribadatan dengan skala wilayah.

Nilai-nilai budaya yang terdapat di Manokwari dan Provinsi Papua Barat pada umumnya adalah ketaatan masyarakat kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus dilestarikan dan didorong agar memberi daya dukung pada kondusifitas pembangunan dan kondisi sosial budaya masyarakat sehari-hari. Hal yang demikian juga diharapkan dapat mereduksi perilaku buruk yang masih berkembang di masyarakat.

2. Meningkatnya mutu layanan dan kualitas pendidikan

Pendidikan yang merupakan kunci penting dalam meningkatkan daya saing masyarakat serta salah satu komponen sederhana untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan di Manokwari. Perbaikan layanan pendidikan menjadi kata kunci untuk meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat secara lebih luas dalam menghadapi berbagai perubahan dan dinamika lingkungan internal dan eksternal.

Strategi untuk memperbaiki mutu lebih lanjut diarahkan pada peningkatan akses layanan pendidikan yang lebih terjangkau hingga di distrik/kampung secara umum membutuhkan dukungan sektor lain, khususnya infrastuktur dasar dan penunjang serta perhubungan agar sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan dapat diakses dengan mudah dan murah. Tetapi, lebih penting dari itu, hal krusial yang dibutuhkan adalah kehadiran guru di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah di distrik/kampung dengan aksesibilitas dan/atau kehadiran guru terendah harus menjadi prioritas. Untuk itu, penambahan kuantitas dan kualitas guru serta sistem



penempatan yang disiplin pada daerah atau sekolah yang sangat membutuhkan menjadi kata kunci untuk kebijakan berikutnya yang tidak dapat diabaikan dengan menggunakan skala prioritas namun terukur. Agar kebijakan-kebijakan dimaksud dapat konsisten dilakukan, maka manajemen pendidikan yang dikelola oleh perangkat daerah terkait mutlak harus dibenahi juga. Pembenahan dilakukan terhadap pengelolaan sistem pendidikan secara umum, termasuk dari segi regulasi, perbaikan mekanisme pemberian tunjangan mengajar, sistem pengawasan kehadiran guru di sekolah-sekolah, dan lain-lain, termasuk kebijakan Pendidikan di tengah Pandemi Covid-19.

Ditengah Pandemi Covid 19, diperlukan dukungan yang baik dalam pelaksanaan pendidikan kepada penduduk usia sekolah, khususnya penduduk usia 7-15 tahun. Dengan adanya kebijakan pelaksanaan sekolah tanpa tatap muka, maka diperlukan kebijakan pemerintah kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu.

3. Optimalnya pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dalam pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

4. Peningkatan keterampilan SDM

Penyediaan pekerjaan atau lapangan usaha yang akan digeluti oleh masyarakat dalam lima tahun kedepan menjadi instrumen awal terpenting untuk mendapatkan profil tentang keterampilan apa yang dibutuhkan dan dijamin akan dapat diserap oleh pasar. Semakin tinggi kapabilitas tenaga kerja baik dari segi keterampilan, pemikiran, hingga keuletan menjadi nilai tambah bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih layak. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya skill bagi sumber daya manusia dalam memasuki pasar kerja untuk bersaing dan berkompetisi



agar mampu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Peningkatan keterampilan diarahkan pada kebutuhan tenaga kerja per distrik sesuai komoditi unggulan daerah termasuk pembekalan keterampilan kerja dan usaha dalam menciptakan pertumbuhan usaha menengah, kecil, dan mikro.

Peningkatan keterampilan kerja juga diharapkan berasal dari perbaikan sistem pendidikan menengah yang bisa menghasilkan lulusan didik yang memiliki keterampilan dasar untuk bisa bekerja di sektor formal maupun informal, khususnya untuk memperkuat produktivitas pertanian di Manokwari.

5. Meningkatkan mutu dan kualitas layanan kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas SDM. Lebih lanjut lagi, dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (*mindset*) dari paradigma sakit ke paradigma sehat serta pandangan dalam mengupayakan pencegahan penyakit dibandingkan mengobati penyakit.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan tersebut diarahkan pada :

- a. perbaikan kapasitas dan kualitas puskesmas di masing-masing distrik
- b. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit umum daerah Manokwari
- c. peningkatan kualitas SDM kesehatan yang sekaligus diarahkan untuk upaya promosi kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- d. perbaikan gizi masyarakat;
- e. upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya kehidupan sehat, khususnya dalam menerapkan protocol Kesehatan saat pandemic Covid19.

6. Mengembangkan kebudayaan berbasis kearifan lokal dan keragaman budaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa

Budaya bangsa yang dilandasi nilai luhur berdasarkan Pancasila dan bercirikan Bhinneka Tunggal Ika diupayakan agar senantiasa menjiwai setiap aspek pembangunan. Kebudayaan nasional dikembangkan dengan mengangkat nilai budaya daerah yang luhur, serta menyaring dan menyerap nilai budaya dari luar yang positif. Pengembangan kebudayaan diarahkan menuju kemajuan adab dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.



Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

7. Modernisasi dan rekayasa serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan, infrastruktur dasar, ekonomi dan pemerintahan

Pengembangan infrastruktur di Manokwari dalam lima tahun ke depan diarahkan pada modernisasi dan rekayasa infrastruktur di Kota Manokwari, yang mencerminkan wajah ibu kota Provinsi Papua Barat dan pembangunan infrastruktur sebagai prasarana konektivitas sentra-sentra ekonomi dan aktivitas masyarakat terpenting dan aksesibilitas pada distrik/kampung secara bertahap melalui pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang. Infrastruktur dasar menjadi hal yang krusial untuk direalisasikan seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan. Selain itu, dibangun juga infrastruktur penunjang, meliputi: jaringan listrik, pemukiman layak huni, hingga jaringan air bersih bagi masyarakat.

Upaya pembangunan keseluruhan infrastruktur terutama jaringan listrik, air, maupun pemukiman layak di Kabupaten Manokwari pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong produktivitas penduduk, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Mengingat pentingnya fungsi infrastruktur bagi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Manowari bertanggung jawab membangun infrastruktur yang memadai dan bersama masyarakat menjaga keberlanjutan infrastruktur tersebut.



8. Upaya penerbitan regulasi Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang undang nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propvinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, telah menetapkan Ibu Kota Provinsi di Manokwari.

Perkembangan dan pertumbuhan Kota Manokwari sebagai Ibu Kota provinsi sangat cepat, arus migrasi penduduk sangat tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 2,5 % per tahun, akan tetapi kondisi infrastruktur kota masih belum mengimbangi pertumbuhan penduduk, karena belum ada keberpihakan, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam sinergi pembangunan Kota Manokwari. Untuk itu dalam dokumen RPJMD ini prioritas pembangunan infrastruktur Kota Manokwari menjadi harapan Pemerintah Kabupaten, karena pembangunan yang infsratruktur yang baik menjadi barometer atau wajah perkembangan pembangunan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Kabupaten Manokwari mengharapkan adanya regulasi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yang menegaskan Ibu Kota Provinsi adalah Kota Manokwari sesuai dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999, sehingga sumber daya yang teralokasi di Provinsi Papua Barat dapat dicurahkan untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur di Kota Manokwari.

9. Pengembangan Komoditi Kerakyatan dengan konsep Ekonomi Hijau

Ekonomi kerakyatan adalah watak atau tatanan ekonomi dimana kepemilikan aset ekonomi harus didistribusikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Pemerataan akses sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan mengembangkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan kondisi geografi masing-masing wilayah dan pengembangan keterampilan masyarakat tiap-tiap distrik atau kampung. Sebagai daerah yang ditopang sebagian besar dari sektor pertanian maka pengembangan ekonomi kerakyatan lebih banyak diwarnai oleh ekonomi agraris sesuai dengan kondisi alam masing-masing distrik/kampung di Manokwari.



Kebijakan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi makro, namun juga pemerataan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Untuk itu, pendekatan kewilayahan berbasis pembangunan distrik/kampung menjadi alternatif kebijakan penting. Komitmen untuk terus melakukan pembangunan dari distrik/kampung, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghasilkan komoditi unggulan setiap distrik/kampung, khususnya Distrik Tanah Rubuh dengan komoditas Pisang, Distrik Manokwari Utara dengan komoditas Kakao, Distrik Warmare, khususnya Daerah Mokwam dengan Komoditas Kopi serta replanting tanaman sawit di Distrik Warmare, Prafi, Masni dan Sidey. Tujuannya adalah agar tumbuh secara bertahap sentra-sentra usaha mikro di setiap distrik/kampung sebagai tambahan penghasilan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di pelosok.

10. Meningkatkan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta ekonomi kreatif serta pariwisata

Pembangunan dan perkembangan Kabupaten Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat telah tumbuh dengan sangat pesat, hal ini dapat dilihat dengan adanya urbanisasi dan migrasi karena daya tarik Manokwari. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,5% per tahun diyakini bahwa pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan, dan pelayanan dasar lainnya.

Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran dan setengah menganggur yang besar dan semakin meningkat pada penduduk usia kerja dan proporsi tenaga kerja yang bekerja hanya bergantung kepada penerimaan pegawai negeri, karena kurangnya kesempatan kerja pada sector lainnya.

Pemberdayaan UMKM dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar masyarakat di Manokwari, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro, dengan membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam suatu wilayah atau daerah, berdasarkan produk unggulan lokal dapat menjawab permasalahan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.



Memperhatikan struktur penduduk Kabupaten Manokwari, yang didominasi oleh penduduk usia muda, usia 15 - 45 tahun sebanyak 112.399 jiwa atau 58,34%, merupakan potensi besar dalam mengembangkan alternatif usaha ekonomi masyarakat. Dengan perkembangan teknologi 4.0G, diyakini bahwa Sebagian besar dari penduduk usia tersebut telah memahami tentang konsep internet dan hal ini menjadi peluang dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif.

Menurut Valentine Siagian, dkk, dalam buku Ekonomi dan Bisnis Indonesia (2020), ekonomi kreatif merupakan proses penciptaan, kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa, yang dalam prosesnya membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual. Dalam hal ini, kreativitas memang sangat dibutuhkan dalam konsep ekonomi kreatif. Kreativitas tidak terbatas dalam hal penciptaan produk saja, tetapi termasuk penggunaan bahan baku dan inovasi teknologi. Dilansir dari UNCTAD (unctad.org), ekonomi kreatif atau *creative economy* adalah konsep ekonomi yang sangat mengutamakan kreativitas, penggunaan ide, pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi khususnya pada bidang industri kreatif.

Untuk itu pemerintah daerah memiliki perhatian dengan kebijakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan ekonomi hijau harus memiliki proses pasar dengan output besar dan konsisten, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam sistem ekonomi dengan berbagai nilai tambah sesuai kondisi dan kemampuan daerah. Nilai tambah dilakukan dalam bentuk pengembangan industri yang terintegrasi dengan konsep pemasaran.

Pemanfaatan dan pengembangan potensi tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas hasil pertanian maupun upaya meningkatkan nilai tambah melalui industrialisasi seperti pengembangan agribisnis dalam skala terbatas.

Berdasarkan hasil analisis dan kondisi di lapangan, diketahui beberapa distrik yang memiliki potensi dan unggulan pada berbagai sektor khususnya sektor pertanian, yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta sektor perkebunan.



11. Menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial Warga Miskin

Berbagai permasalahan yang menjadi beban sosial masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Manokwari, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan. Dalam hal ini, yang dimaksud kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, dan interaksi sosial, serta mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Masalah lainnya adalah rawan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan aneka masalah sosial yang dihadapi saat ini, khususnya Pandemi Covid-19 maka akan dilaksanakan kegiatan dan terobosan antara lain dengan menata kemampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mengakses berbagai pelayanan sosial dasar, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan secara mandiri dan bertahap mampu mengatasi masalah yang dihadapinya.

12. Meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan

Ruang tidak terpisahkan dari aktifitas manusia baik secara psikologis, emosional dan dimensi. Dalam perencanaan kota, ruang dibedakan atas karakteristik yang menonjol, yaitu kualitas detail dan aktifitas yang berlangsung didalamnya.

Ruang terbuka hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia pada wilayah perkotaan. Pembentukan sistem ruang terbuka hijau merupakan respon terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau pada suatu wilayah perkotaan. Kebutuhan ini secara ideal harus mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi dari wilayah tersebut.

Peningkatan populasi secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim. Hal ini tidak diimbangi oleh pengendalian guna lahan yang berfungsi membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan alam perkotaan. Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikannya area terbangun. Proporsi lahan yang tertutup perkerasan semakin besar dan secara ekologis mengakibatkan



berbagai gangguan terhadap proses alam dalam lingkungan perkotaan. Di antara gangguan tersebut adalah meningkatnya temperatur, frekuensi banjir dan polusi udara, serta berkurangnya keragaman hayati. Selain itu, dari aspek sosial, warga semakin kekurangan ruang-ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas dan berinteraksi.

Penataan ruang terbuka hijau kota merupakan bagian strategi perencanaan kota untuk membatasi pembangunan serta mengatasi dampak ekologis berbagai aktivitas manusia terkait gangguan proses alam pada lingkungan perkotaan. Di antara strategi tersebut adalah ruang terbuka hijau sebagai area resapan, ruang terbuka hijau sebagai pereduksi polusi, serta ruang terbuka hijau sebagai penurun temperatur udara

13. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan lindung

Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek kualitas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting. Secara sederhana, kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Sedangkan, konsep pembangunan berkelanjutan menggambarkan keterkaitan antara tiga pilar pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan.

Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian. Namun, bersamaan dengan eksploitasi sumber daya alam tersebut, kerusakan lingkungan juga merupakan sesuatu hal yang sudah sering kita dengar dan kita jumpai. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan pembangunan yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata serta akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia yang tidak ramah lingkungan.

Sumber daya lingkungan yang seharusnya berperan menopang kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya tidak lagi mampu mendukung kelangsungan kehidupan manusia, maka yang terjadi adalah sebuah bencana baik alam maupun kemanusiaan. Jika hal itu terjadi, sebesar apapun keuntungan ekonomi dari suatu pembangunan, namun jika disertai dengan bencana, maka hasil pembangunan tersebut akan tidak ada artinya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Manokwari dalam setiap proses pembangunan harus dilakukan pengawasan melekat terhadap



setiap pergerakan pembangunan utamanya yang memanfaatkan potensi sumber daya alam.

14. Review RTRW

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam pola alokasi investasi yang bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menurut Rustiadi et al. (2011), penataan ruang memiliki tiga urgensi, yaitu (a) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (prinsip produktifitas dan efisiensi); (b) alat dan wujud distribusi sumberdaya (prinsip pemerataan, keberimbangan, dan keadilan), dan (c) keberlanjutan (*prinsip sustainability*).

Memperhatikan perkembangan wilayah Kabupaten Manokwari yang sudah semakin berkembang sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat, dengan mempertimbangkan telah dilakukan pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak dan sesuai arahan ruang pada Perda RTRW Provinsi Papua Barat yang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah, maka pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan kembali rencana tata ruang 2013 – 2033 dengan melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ketentuan dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah, disebabkan adanya perubahan kondisi lingkungan strategis perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Review RTRW dilakukan dengan mengukur kualitas RTRW, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap indikasi program lima tahunan dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap struktur ruang dan pola ruang serta dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

15. Penyusunan PERDA RDTR

Sampai saat ini, Pemerintah Daerah belum memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) yang merupakan turunan dari dokumen RTRW yang merupakan dokumen operasional.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan fungsi bagian wilayah yang pada hakekatnya menjadi arahan lokasi berbagai kegiatan yang memiliki kesamaan fungsi maupun lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu. Pada prinsipnya, RDTR juga merupakan rencana tiga dimensi yang mengandung pengertian upaya penetapan intensitas penggunaan ruang untuk setiap bagian-bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur tata ruang secara keseluruhan.

Tujuan lain dari RDTR ini adalah sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan, serta sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian perijinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan. Mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Dengan kata lain RDTR diharapkan dapat mengefisienkan pembangunan dan meminimalisir terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukan lahan.

16. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan kriminalitas

Hidup berdampingan dan harmonis dalam masyarakat merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa, karena sudah tertuang jelas dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Tidak selamanya hubungan hidup dalam masyarakat berjalan lancar dan harmonis karena kehidupan manusia saling memerlukan bantuan orang lain dan saling membutuhkan. Ketika terjadi ketidakharmonisan antar warga dalam masyarakat, maka akan terjadi gesekan yang kerap menimbulkan tindakan yang disebut sebagai tindakan kriminal yang mengganggu tramtibmas. Gesekan tersebut dapat dipengaruhi oleh diri sendiri maupun dipengaruhi oleh orang lain.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar



aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan.

17. Peningkatan penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM

Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948. Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

18. Peningkatan keterbukaan pemerintah atas informasi public

Transparansi informasi publik mengenai kinerja pemerintah memberikan dampak positif, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Bagi pemerintah daerah, penerapan keterbukaan informasi ini dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalankan pemerintah.



Sementara bagi masyarakat, selain memenuhi hak untuk mengetahui informasi publik (*right to know*), keterbukaan informasi diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengontrol setiap kebijakan dan langkah yang ditempuh oleh pemerintah, juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Keterbukaan informasi public akan dilakukan melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap OPD. Penguatan dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi digital serta media baru dan dengan melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat membedakan mana berita yang akurat dan mana yang tidak, dan dengan keterbukaan informasi akan membuka saluran partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan suaranya, terutama memasuki adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). Untuk itu, pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sangat ditentukan keberhasilannya oleh komitmen yang kuat dan kerja sama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

19. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam prosesnya terdiri dari 4 bagian, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari keseluruhan proses tersebut PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan supaya pemerintah daerah mampu mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan sehingga ke depannya terwujud pembangunan yang ko-kreasi, yaitu pembangunan yang diselenggarakan dengan ide, sumber daya, tujuan dan kegiatan bersama.

Ada berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada setiap proses pembangunan daerah tersebut. Pada saat perencanaan pembangunan masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk penyampaian aspirasi konsultasi publik, diskusi dan musyawarah pada tahapan penyusunan rancangan awal maupun pada musrenbang. Dalam penganggaran, penyampaian aspirasi juga dilakukan dengan konsultasi publik diskusi, dan musyawarah untuk mengawasi kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS). Selanjutnya, pada pelaksanaan, masyarakat dapat melibatkan diri sebagai mitra dalam bentuk



pemberian hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. Terakhir, pada pengawasan dan evaluasi masyarakat dapat memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan

20. Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) secara kompetitif

Profesionalisme birokrasi merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan *good governance*. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh aparatur pemerintah adalah usaha menampilkan profesionalitas, etos kerja tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang bebas dari nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agar birokrasi dapat memberikan pelayanan yang baik, maka diantara sepuluh prinsip *good governance* ada 3 (tiga) nilai administratif – manajerial mendasar yakni efektifitas, efisiensi dan profesionalisme. Namun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menjadi kenyataan, apabila didukung oleh aparatur yang memiliki profesionalitas tinggi yang mengedepankan terpenuhinya transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab publik, yakni dengan menekan sekecil mungkin pemborosan penggunaan sumber-sumber keuangan pemerintah (negara) dan juga sekaligus memperkuat peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pondasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.



Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh aparatur pemerintah adalah usaha menampilkan profesionalitas, etos kerja tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas SDM pelayanan, mengingat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelayanan memiliki peran strategis sebagai pendorong (*key leverage*) dari reformasi birokrasi. Adapun arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur negara adalah “meningkatkan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur. Peningkatan kualitas SDM aparatur diarahkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera melalui layanan elektronik” Hal tersebut mengindikasikan sangat pentingnya profesionalitas aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

21. Peningkatan Layanan Publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan good governance yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan sistem berbasis elektronik diarahkan pada pembenahan pengelolaan keuangan daerah, termasuk perbaikan pengelolaan aset daerah dan pendapatan daerah.

Sedangkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan diawali dengan perbaikan perumusan kebijakan pada tahap perencanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan (akuntabilitas) kinerja. Keberhasilan kebijakan dimaksud digunakan untuk memperbaiki kinerja layanan birokrasi kepada masyarakat sampai ke tingkat distrik/kampung bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.

22. Meningkatkan kerja sama pembangunan dan pemerintahan antar daerah, Pihak Ketiga di dalam dan di luar Tanah Papua

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan hal ini sebagaimana tertuang didalam pasal 363



sampai pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut peraturan pelaksanaan atas undang-undang tersebut bahwa telah terbit Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, tentunya ini menjadi pedoman dan acuan yang baru bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerjasama daerah. Kerja sama daerah merupakan salah satu jalan untuk membuka dan menarik investasi, kerjasama daerah yang dimaksud ialah baik itu Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) dengan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) maupun tidak menutup kemungkinan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) maupun Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL).

23. Pembentukan DOB Kota Manokwari dan pemindahan kabupaten ke Warpramasi

Sampai saat ini, Provinsi Papua Barat belum memiliki ibu kota, secara tertulis dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999, ibu kota provinsi adalah Manokwari, akan tetapi secara administrasi pemerintahan hal ini belum terbentuk. Sesuai dengan Amanat Presiden (Ampres) Nomor : R65/Pres/12/2013, tanggal 27 Desember 2013, terdapat 2 (dua) daerah yang diusulkan yaitu calon DOB Kota Manokwari dan DOB Kabupaten Manokwari Barat dengan Kabupaten Induk Kabupaten Manokwari. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan mempertimbangkan aspek keuangan, geografis, situasi dan kondisi di Kabupaten Manokwari maka Daerah Induk perlu menyiapkan kelengkapan administrasi calon DOB Kota Manokwari dan DOB Kabupaten Manokwari dan hal ini menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan daerah melalui pemekaran wilayah.

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan operasionalisasi strategi untuk mencapai sasaran yang dijabarkan dalam suatu skenario kebijakan. Oleh karena itu, arah kebijakan harus jelas waktu pelaksanaannya dan dijadikan pedoman untuk menentukan tahapan

pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan memerhatikan kesesuaiannya dengan akar-akar masalah pembangunan terkait.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi, maka berikut ini arah kebijakan pembangunan Kabupaten Manokwari tahun 2021 – 2026.

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021 – 2026.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, Berdaya Saing, Maju, Mandiri Dan Sejahtera			
Misi 1: Membangun Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua yang Beradab, Religius dan Toleran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa			
Meningkatkan Kualitas SDM yang Berkarakter	Meningkatnya kualitas iman dan takwa	Meningkatnya pelayanan dan pembinaan keagamaan	<ol style="list-style-type: none">1. Terbangun dan terpeliharanya sarana-prasarana pusat peradaban Tanah Papua2. Bantuan pembangunan rumah ibadah3. Pemberdayaan Hamba-hamba Tuhan4. Fasilitasi kegiatan umat beragama5. Pembinaan organisasi keagamaan
Misi 2 : Mengembangkan SDM Putra-Putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif dan Berdaya Saing Global sebagai Investasi Masa Depan Daerah			
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Meningkatnya mutu layanan dan kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dengan meningkatkan penyediaan bantuan operasional pendidikan, dan bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan;2. Peningkatan rehabilitasi ruang kelas rusak, penambahan kelas baru beserta sarana pendidikan;3. Pembangunan Sekolah Berpola Asrama SMP.4. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik agar mampu mendorong inovasi, kreatifitas dan pendidikan berkarakter;



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan budaya membaca masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman baca, dan dukungan pengelolaan yang berkualitas; 6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu dan pemerataan SDM Kesehatan 2. Meningkatkan mutu dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standart; 3. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; 4. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Balita dan Bumil dan Pencegahan Stunting 5. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 6. Penyediaan asuransi Kesehatan bagi Hamba-hamba Tuhan dan penduduk miskin; 7. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
Misi 3 : Membangun dan Menata Infrastruktur Kawasan Perkotaan Ibu Kota Provinsi Papua Barat secara Modern			
Membangun dan meningkatkan infrastruktur Kota yang modern	Infrastruktur modern dalam mendukung mobilitas dan kehidupan masyarakat	Modernisasi dan rekayasa serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur Jalan, Infrastruktur dasar, Ekonomi dan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya modernisasi dan rekayasa serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar, ekonomi dan pemerintahan di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat; 2. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh khususnya di Kawasan pesisir; 3. Pengurangan genangan air di Kawasan perkotaan.
		Upaya Penerbitan Regulasi Manokwari sebagai Pusat Peradaban	Percepatan regulasi tentang Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat;



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		dan Ibu Kota Provinsi Papua Barat	
Misi 4 : Mengembangkan perekonomian daerah yang mandiri dan produktif berbasis potensi lokal dan sumber daya alam			
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan perkonomian daerah yang berdaya saing	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengembangan Komoditi Kerakyatan dengan konsep Ekonomi Hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya regulasi kebijakan investasi daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah melalui pembentukan BUMD; 2. Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan berbasis komoditi lokal dan potensi Sumber Daya Alam;
		Meningkatkan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah ekonomi kreatif dan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif; 2. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan pengurangan kesenjangan sosial			
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan perkonomian daerah yang berdaya saing	Menurunnya kemiskinan masyarakat	Menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial Warga Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan; 2. Meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalka peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan; 3. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			kemudahan akses pembiayaan; 4. Peningkatan cakupan layanan penduduk miskin terhadap pembiayaan jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pencari nafkah utama keluarga
Misi 6: Membangun hidup masyarakat yang berkepribadian, berbudaya, dan ber-Bhineka Tunggal Ika sebagai kekayaan dan identitas daerah			
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	Menjaga dan melestarikan budaya lokal	Mengembangkan kebudayaan berbasis kearifan lokal dan keragaman budaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa	1. Pengembangan nilai-nilai adat dan kebudayaan berbasis kearifan lokal; 2. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya; 3. Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat;
Misi 7: Memelihara Kelestarian Dan Kualitas Lingkungan Hidup			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terjaganya Kelestarian Alam	Meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan Kawasan lindung	Peningkatan ruang terbuka publik bagi masyarakat 1. Pengendalian alih fungsi hutan 2. Peningkatan penegakan hukum lingkungan 3. Pengelolaan Gunung Meja
	Pembangunan sesuai tata ruang	Review RTRW Penyusunan Perda RDTR	Evaluasi Perda RTRW 1. Penyusunan Perda RDTR 2. Pengendalian dan pemanfaatan ruang
Misi 8: Membina kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan damai, serta tertib hukum dan berintegritas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan aman	Mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang taat hukum dan demokratis dalam bingkai NKRI	Peningkatan penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM Peningkatan keterbukaan keterbukaan pemerintah atas informasi pelayanan publik Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan pembangunan	Upaya peningkatan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan sadar hukum dan menjunjung HAM Peningkatan sistem pendukung keterbukaan akses informasi Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 9 :Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan sistim peemrintahan daerah yang bersih, kuat, professional dan partisisipatif			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) secara kompetitif	Peningkatan kemampuan Aparatur dalam memberikan pelayanan profesional, disiplin, jujur, dan memiliki kompetensi sesuai pendidikan
		Meningkatkan kerja sama pembangunan dan pemerintahan antar daerah, Pihak Ketiga di dalam dan di luar Tanah Papua.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan alternatif dalam kerangka kerjasama antara daerah atau pihak III
		Pembentukan DOB Kota Manokwari dan Pemindahan Kabupaten ke Warpramasi	Upaya percepatan pembentukan Kota Manokwari dan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Manokwari
		Meningkatnya layanan Publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, keuangan, pengelolaan aset serta keterbukaan informasi melalui layanan elektronik
	Optimalnya upaya pengarusutamaan gender	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak atas anak	Peningkatan penyelenggaraan kegiatan anggaran responsif gender di masing-masing SKPD

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan kepentingan penanganan permasalahan dan kesinambungan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, sebagaimana uraian berikut ini :

1. Arah kebijakan pembangunan tahun 2021

Tahun 2021 merupakan kesinambungan dari pelaksanaan periode pembangunan RPJMD tahun 2016-2020, sehingga pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk **“Konsolidasi pemerintahan dan Identifikasi isu-isu strategis dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan periode transisi RPJMD 2016-2020”**. Untuk itu arah kebijakan diarahkan pada :

- a. Bantuan pembangunan rumah ibadah.
- b. Pemberdayaan Hamba-hamba Tuhan.
- c. Melanjutkan upaya peningkatan layanan dan mutu kualitas SDM;
- d. Melanjutkan upaya peningkatan layanan dan mutu pembangunan kesehatan;



- e. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- f. Melanjutkan upaya penurunan angka kemiskinan;
- g. Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan berbasis komoditi lokal dan potensi Sumber Daya Alam.
- h. Penyusunan rencana penanganan infrastruktur perkotaan yang meliputi jaringan, perekonomian, pemerintah serta infrastruktur dasar bagi masyarakat;
- i. Pengendalian alih fungsi hutan
- j. Upaya peningkatan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan sadar hukum dan menjunjung HAM
- k. Melakukan review RTRW dan penyusunan RDTR;
- l. Validasi data kondisi dan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan

2. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022

Tema pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk **“Sinergi program dalam implementasi program percepatan pembangunan antara OPD dan antara Pemerintah dalam rangka mencapai lingkungan yang nyaman dalam aktifitas sosial dan ekonomi Masyarakat Manokwari yang religius, berbudaya dan maju”**, dengan arah kebijakan sebagaimana berikut :

- a. Fasilitasi Kegiatan Umat Beragama.
- b. Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dengan meningkatkan penyediaan bantuan operasional pendidikan, dan bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan.
- c. Pembangunan Sekolah Berpola Asrama SMP.
- d. Meningkatnya mutu dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standart
- e. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Balita dan Bumil dan Pencegahan Stunting
- f. Penyediaan asuransi Kesehatan bagi Hamba-hamba Tuhan dan penduduk miskin



- g. Terwujudnya modernisasi dan rekayasa serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar, ekonomi dan pemerintahan di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.
- h. Percepatan regulasi tentang Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat.
- i. Peningkatan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif.
- j. Tersedianya regulasi kebijakan investasi daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah melalui pembentukan BUMD.
- k. Terwujudnya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
- l. Pembangunan agroindustri yang handal dan pemasaran yang efisien pada komoditas agrobisnis perkebunan dan peternakan.
- m. Mendorong sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan.
- n. Peningkatan cakupan layanan penduduk miskin terhadap pembiayaan jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pencari nafkah utama keluarga.
- o. Pengembangan nilai-nilai adat dan kebudayaan berbasis kearifan lokal.
- p. Evaluasi Perda RTRW
- q. Peningkatan kemampuan Aparatur dalam memberikan pelayanan profesional, disiplin, jujur, dan memiliki kompetensi sesuai pendidikan.
- r. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, keuangan, pengelolaan aset serta keterbukaan informasi melalui layanan elektronik.
- s. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan anggaran responsif gender di masing-masing SKPD



3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Tema Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk **“Penguatan SDM yang berkualitas untuk menunjang optimalisasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan yang berdaya saing”**, dengan arah kebijakan meliputi:

- a. Pembangunan Gereja Central di Mansinam
- b. Peningkatan rehabilitasi ruang kelas rusak, penambahan kelas baru beserta sarana pendidikan
- c. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik agar mampu mendorong inovasi, kreatifitas dan pendidikan berkarakter
- d. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- e. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh khususnya di kawasan pesisir
- f. Tersedianya regulasi Tentang Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat.
- g. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- h. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses pembiayaan
- i. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
- j. Peningkatan ruang terbuka publik bagi masyarakat
- k. Penyusunan Perda RDTR
- l. Peningkatan sistem pendukung keterbukaan akses informasi
- m. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan alternatif dalam kerangka kerjasama antara daerah atau pihak III
- n. Upaya percepatan pembentukan Kota Manokwari, DOB Manokwari Barat dan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Manokwari



4. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tema Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk “**Evaluasi dan percepatan pencapaian target-target pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian**”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Pembinaan organisasi keagamaan
- b. Peningkatan budaya membaca masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman baca, dan dukungan pengelolaan yang berkualitas.
- c. Meningkatkan mutu dan pemerataan SDM
- d. Pengurangan genangan air di Kawasan
- e. Penguatan pondasi keberlanjutan penanganan kemiskinan
- f. Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.
- g. Pengendalian dan pemanfaatan ruang
- h. Peningkatan partisipasi, masyarakat, lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan

5. Arah Kebijakan Tahun 2025

Tema Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk “**Optimalisasi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian berdasarkan kehidupan yang berbudaya dan religius**”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Penanganan berkelanjutan kehidupan toleransi beragama
- b. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan
- c. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

6. Arah Kebijakan Tahun 2026

Tema Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk “**Penyempurnaan pencapaian target Visi dan Misi pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan**”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Penanganan berkelanjutan kehidupan toleransi beragama
- b. Penanganan pondasi berkelanjutan upaya peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan
- c. Penataan pondasi keberlanjutan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat

- d. Penanganan pondasi berkelanjutan peningkatan kemampuan SDM Aparatur
- e. Penanganan berkelanjutan layanan publik melalui SPBE.

Adapun pelaksanaan RKPD Tahunan sebagai penjabaran RPJMD terlihat dalam gambar tema pembangunan berikut :

Gambar 6.3 Tema Pembangunan dalam Periodesiasi RPJMD Kabupaten Manokwari





Tabel 6.2 Keterkaitan Misi dengan Strategi dan Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021 - 2026

MISI/STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1: Membangun Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua yang Beradab, Religius dan Toleran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa							
Meningkatnya pelayanan dan pembinaan keagamaan	1 Bantuan pembangunan rumah ibadah						
	2 Pembangunan Gereja Central di Mansinam						
	3 Pemberdayaan Hamba-hamba Tuhan						
	4 Fasilitasi kegiatan umat beragama						
	5 Pembinaan organisasi keagamaan						
	6 Penanganan berkelanjutan kehidupan toleransi beragama						
Misi 2 : Mengembangkan SDM Putra-Putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif dan Berdaya Saing Global sebagai Investasi Masa Depan Daerah							
Meningkatnya mutu layanan dan kualitas pendidikan	1 Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dengan meningkatkan penyediaan bantuan operasional pendidikan, dan bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan.						
	2 Pembangunan Sekolah Berpola Asrama SMP (unggulan daerah).						
	3 Peningkatan rehabilitasi ruang kelas rusak, penambahan kelas baru beserta sarana pendidikan.						
	4 Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik agar mampu mendorong inovasi, kreatifitas dan pendidikan berkarakter.						
	5 Peningkatan budaya membaca masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman baca, dan dukungan pengelolaan yang berkualitas.						
	6 Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan						
	7 Penanganan pondasi berkelanjutan upaya peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan						
Meningkatnya mutu dan kualitas layanan Kesehatan	1 Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.						



MISI/STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2 Meningkatkan mutu dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standart						
	3 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Balita dan Bumil dan Pencegahan Stunting						
	4 Penyediaan asuransi Kesehatan bagi Hamba-hamba Tuhan dan penduduk miskin						
	5 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						
	6 Meningkatkan mutu dan pemerataan SDM Kesehatan						
	7 Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat						
	8 Penataan pondasi keberlanjutan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat						
Misi 3 : Membangun dan Menata Infrastruktur Kawasan Perkotaan Ibu Kota Provinsi Papua Barat secara Modern							
Modernisasi dan rekayasa serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur Jalan, Infrastruktur dasar, Ekonomi dan Pemerintahan	1 Terwujudnya modernisasi dan rekayasa serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar, ekonomi dan pemerintahan di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.						
	2 Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh khususnya di kawasan pesisir.						
	3 Pengurangan genangan air di Kawasan perkotaan.						
Upaya Penerbitan Regulasi Manokwari sebagai Pusat Peradaban dan Ibu Kota Provinsi Papua Barat	- Tersedianya regulasi Tentang Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat.						
Misi 4 : Mengembangkan perekonomian daerah yang mandiri dan produktif berbasis potensi lokal dan sumber daya alam							
Pengembangan Komoditi Kerakyatan dengan konsep Ekonomi Hijau	1 Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan berbasis komoditi lokal dan potensi Sumber Daya Alam.						
	2 Tersedianya regulasi kebijakan investasi daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah melalui pembentukan BUMD dan kerjasama investasi						



MISI/STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah ekonomi kreatif dan pariwisata	1 Terwujudnya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.						
	2 Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan						
Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan pengurangan kesenjangan sosial							
Menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial Warga Miskin	1 Mendorong sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan.						
	2 Meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan.						
	3 Peningkatan cakupan layanan penduduk miskin terhadap pembiayaan jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pencari nafkah utama keluarga						
	4 Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses pembiayaan.						
	5 Penguatan pondasi keberlanjutan penanganan kemiskinan						
Misi 6: Membangun hidup masyarakat yang berkepribadian, berbudaya, dan ber-Bhineka Tunggal Ika sebagai kekayaan dan identitas daerah							
Mengembangkan kebudayaan berbasis kearifan lokal dan keragaman budaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa	1 Pengembangan nilai-nilai adat dan kebudayaan berbasis kearifan lokal.						
	2 Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.						
	3 Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.						
Misi 7: Memelihara Kelestarian Dan Kualitas Lingkungan Hidup							
Meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	- Peningkatan ruang terbuka publik bagi masyarakat						
Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan Kawasan lindung	1 Pengendalian alih fungsi hutan						
	2 Peningkatan Potensi Wisata Alam						



MISI/STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Review RTRW	1 Evaluasi Perda RTRW						
	2 Penyusunan Perda RDTR						
	3 Pengendalian dan pemanfaatan ruang						
Misi 8: Membina kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan damai, serta tertib hukum dan berintegritas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia							
Peningkatan penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM	- Upaya peningkatan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan sadar hukum dan menjunjung HAM						
Peningkatan keterbukaan keterbukaan pemerintah atas informasi pelayanan publik	- Peningkatan sistem pendukung keterbukaan akses informasi						
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan pembangunan	- Peningkatan partisipasi, masyarakat, lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan						
Misi 9: Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan sistim pemerintahan daerah yang bersih, kuat, professional dan partisipatif							
Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) secara kompetitif	- Peningkatan kemampuan Aparatur dalam memberikan pelayanan profesional, disiplin, jujur, dan memiliki kompetensi sesuai pendidikan						
Meningkatnya layanan Publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, keuangan, pengelolaan aset serta keterbukaan informasi melalui layanan elektronik						
Meningkatkan kerja sama pembangunan dan pemerintahan antar daerah, Pihak Ketiga di dalam dan di luar Tanah Papua.	- Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan alternatif dalam kerangka kerjasama antara daerah atau pihak III						
Pembentukan DOB Kota Manokwari dan Pindahan Kabupaten ke Warpramasi	- Upaya percepatan pembentukan Kota Manokwari dan pindahan Ibu Kota Kabupaten Manokwari						
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak atas anak	- Peningkatan penyelenggaraan kegiatan anggaran responsif gender di masing-masing SKPD						



Tabel 6.3 Keterkaitan Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Tahunan RPJMD berdasarkan OPD Pelaksana Tahun 2021 - 2026

MISI/TUJUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD
Misi 1: Membangun Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua yang Beradab, Religius dan Toleran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa			
Meningkatkan Kualitas SDM yang Berkarakter	Meningkatnya pelayanan dan pembinaan keagamaan	1 Bantuan pembangunan rumah ibadah	Bagian Kesra
		2 Pemberdayaan Hamba-hamba Tuhan	
		3 Fasilitasi kegiatan umat beragama	
		4 Pembangunan Gereja Central di Mansinam	
		5 Pembinaan organisasi keagamaan	
		6 Penanganan berkelanjutan kehidupan toleransi beragama	Bakesbang
Misi 2 : Mengembangkan SDM Putra-Putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif dan Berdaya Saing Global sebagai Investasi Masa Depan Daerah			
Meningkatkan Kualitas SDM yang Berkarakter	Meningkatnya mutu layanan dan kualitas pendidikan	1 Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dengan meningkatkan penyediaan bantuan operasional pendidikan, dan bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan.	Dinas Pendidikan
		2 Pembangunan Sekolah Berpola Asrama SMP (unggulan daerah).	
		3 Peningkatan rehabilitasi ruang kelas rusak, penambahan kelas baru beserta sarana pendidikan.	
		4 Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik agar mampu mendorong inovasi, kreatifitas dan pendidikan berkarakter.	
		5 Peningkatan budaya membaca masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman baca, dan dukungan pengelolaan yang berkualitas.	Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan
		6 Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan	1) Dinas Pendidikan, 2) Dinas Infokom
		7 Penanganan pondasi berkelanjutan upaya peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan	1) Bappeda, 2) Dinas Pendidikan, 3) Kantor Arsip Daerah & Perpustakaan, 4) Dinas Infokom



MISI/TUJUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD
	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan kesehatan	1 Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.	1) Dinas Kesehatan, 2) RSUD
		2 Meningkatnya mutu dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standart	
		3 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Balita dan Bumil dan Pencegahan Stunting	Dinas Kesehatan
		4 Penyediaan asuransi Kesehatan bagi Hamba-hamba Tuhan dan penduduk miskin	1) Dinas Kesehatan, 2) RSUD, 3) Dinas Kependudukan
		5 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Dinas Kesehatan
		6 Meningkatnya mutu dan pemerataan SDM Kesehatan	1) Dinas Kesehatan, 2) RSUD
		7 Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Dinas Kesehatan
		8 Penataan pondasi keberlanjutan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1) Bappeda, 2) Dinas Kesehatan, 3) RSUD, 4) Dinas Kependudukan
Misi 3 : Membangun dan Menata Infrastruktur Kawasan Perkotaan Ibu Kota Provinsi Papua Barat secara Modern			
Membangun dan meningkatkan infrastruktur Kota yang modern	Modernisasi dan rekayasa serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur Jalan, Infrastruktur dasar, Ekonomi dan Pemerintahan	1 Terwujudnya modernisasi dan rekayasa serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar, ekonomi dan pemerintahan di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.	1) Dinas PUPR, 2) Dinas Perumahan, 3) Dinas Perhubungan, 4) Dinas Perindagkop, 5) Dinas LH
		2 Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh khususnya di kawasan pesisir.	
		3 Pengurangan genangan air di Kawasan perkotaan.	Dinas PUPR
	Upaya Penerbitan Regulasi Manokwari sebagai/ Pusat Peradaban dan Ibu Kota Provinsi Papua Barat	- Tersedianya regulasi Tentang Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat.	1) Dinas PUPR, 2) Bagian Hukum, 3) Bappeda
Misi 4 : Mengembangkan perekonomian daerah yang mandiri dan produktif berbasis potensi lokal dan sumber daya alam			
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan perkonomian daerah yang berdaya saing	Pengembangan Komoditi Kerakyatan dengan konsep Ekonomi Hijau	1 Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan berbasis komoditi lokal dan potensi Sumber Daya Alam.	1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Dinas Pertanian, 3) Dinas Perhubungan, 4) Dinas PUPR
		2 Tersedianya regulasi kebijakan investasi daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian	1) Bagian Perekda, 2) Bagian Hukum



MISI/TUJUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD
		keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah melalui pembentukan BUMD.	
	Meningkatkan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah ekonomi kreatif dan pariwisata	1 Terwujudnya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.	Dinas Perindagkop
		2 Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1) Dinas Pariwisata; 2) Dinas PUPR
Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan pengurangan kesenjangan sosial			
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan perkonomian daerah yang berdaya saing	Menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial Warga Miskin	1 Mendorong sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan.	1) Bappeda, 2) Dinas Sosial, 3) Dinas Kependudukan, 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat, 5) Dinas Pertanian, 6) Dinas Tenaga Kerja, 7) Dinas Perindagkop
		2 Meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalka peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan.	1) Dinas Sosial, 2) Dinas Kependudukan, 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, 4) Distrik, 5) Kelurahan
		3 Peningkatan cakupan layanan penduduk miskin terhadap pembiayaan jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pencari nafkah utama keluarga	Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Distrik dan Kelurahan
		4 Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses pembiayaan.	1) Dinas Sosial, 2) Dinas Pertanian, 3) Dinas Kependudukan, 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat, 5) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB



MISI/TUJUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD
		5 Penguatan pondasi keberlanjutan penanganan kemiskinan	1) Bappeda, 2) Dinas Sosial, 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, 4) Dinas Pertanian, 5) Dinas Tenaga Kerja, 6) Dinas Perindagkop, 7) Dinas Kependudukan
Misi 6: Membangun hidup masyarakat yang berkepribadian, berbudaya, dan ber-Bhineka Tunggal Ika sebagai kekayaan dan identitas daerah			
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter	Mengembangkan kebudayaan berbasis kearifan lokal dan keragaman budaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa	1 Pengembangan nilai-nilai adat dan kebudayaan berbasis kearifan lokal.	Dinas Pendidikan
		2 Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Dinas Pendidikan
		3 Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.	Bakesbang
Misi 7: Memelihara Kelestarian Dan Kualitas Lingkungan Hidup			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	- Peningkatan ruang terbuka publik bagi masyarakat	Dinas PUPR
	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan Kawasan lindung	1 Pengendalian alih fungsi hutan	Dinas LH
		2 Peningkatan Potensi Wisata Alam	1) Dinas Pariwisata, 2) Dinas PUPR
	Review RTRW	1 Evaluasi Perda RTRW	1) Dinas PUPR, 2) Bagian Hukum
		2 Penyusunan Perda RDTR	1) Dinas PUPR, 2) Bagian Hukum
		3 Pengendalian dan pemanfaatan ruang	1) Dinas PUPR, 2) Kantorl Satpol PP
Misi 8: Membina kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan damai, serta tertib hukum dan berintegritas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan aman	Peningkatan penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM	- Upaya peningkatan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan sadar hukum dan menjunjung HAM	1) Bakesbang; Bagian Hukum, 3) Kantor Satpol PP
	Peningkatan keterbukaan pemerintah atas informasi pelayanan publik	- Peningkatan sistem pendukung keterbukaan akses informasi	1) Dinas Infokom, 2) Bagian Humas



MISI/TUJUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan pembangunan	- Peningkatan partisipasi, masyarakat, lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan	1) Inspektorat, 2) Bakesbang
Misi 9: Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan sistim pemerintahan daerah yang bersih, kuat, professional dan partispipatif			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) secara kompetitif	1 Peningkatan kemampuan Aparatur dalam memberikan pelayanan profesional, disiplin, jujur, dan memiliki kopetensi sesuai pendidikan	1) Badan Kepegawaian dan 2) Semua OPD
	Meningkatnya layanan Publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1 Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, keuangan, pengelolaan aset serta keterbukaan informasi melalui layanan elektronik	1) Inspektorat; 2) Dinas Infokom dan 3) Semua OPD
	Meningkatkan kerja sama pembangunan dan pemerintahan antar daerah, Pihak Ketiga di dalam dan di luar Tanah Papua.	- Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan alternatif dalam kerangka kerjasama antara daerah atau pihak III	1) Bappeda dan 2) Semua OPD
	Pembentukan DOB Kota Manokwari, DOB Manokwari Barat dan Pemindahan Kabupaten ke Warpramasi	- Upaya percepatan pembentukan Kota Manokwari, Manokwari Barat dan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Manokwari	Bagian Pemerintahan
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak atas anak	- Peningkatan penyelenggaraan kegiatan anggaran responsif gender di masing-masing SKPD	1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan 2) Semua OPD



Adapun program prioritas sesuai arahan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana terlihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6. 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Tahunan RPJMD berdasarkan OPD Pelaksana Tahun 2021 – 2026 (dalam juta rupiah)

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Misi : Membangun Manokwari sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua yang beradab, religius dan toleran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa															
1.1	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter															
1.1.1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Iman dan Takwa															
4.01	Sekretariat Daerah : Bagian Kesra															
4.1.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	% Berfungsinya layanan keagamaan dari kebijakan pemerintah daerah	na	100	45.959	100	45.959	100	42.959	100	42.959	100	44.387	100	50.887	100
2	Misi : Mengembangkan SDM Putra-putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif dan Berdaya Saing Global sebagai Investasi Masa Depan Daerah															
2.1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter															
2.1.2	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan															
1.01	Dinas Pendidikan															
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	1.576	100	1.576	100	1.607	100	1.640	100	1.672	100	2.007	100
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	471	100	471	100	471	100	471	100	471	100	471	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100	100	1.041	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
1.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen profil Pendidikan	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan Prasarana Pelayanan OPD	0	100	4.000											-
1.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen kepegawaian	100	100	1.758	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	100
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	92,71		40.256	93,0	10.000	93,5	10.000	94,0	10.000	95	10.000		10.000	-
		APM SMP	76,8	na		77		78		79		80		96,0		96
		APM PAUD														
1.01.02.xx	Program Pengelolaan Pendidikan	% ketersediaan Seragam bagi siswa baru dari keluarga tidak mampu	na	na		100	7.500	100	7.500	100	7.500	100	7.500	100	7.500	100
1.01.02.xx	Program Pengelolaan Pendidikan	% Bantuan Pendidikan Siswa SD dan SMP dari keluarga miskin	na	na		100	5.000	100	7.000	100	7.000	100	7.000	100	7.000	100
1.01.02.xx	Program Pengelolaan Pendidikan	% Pembangunan Sekolah Pola Asrama	na	na		100	1.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100
1.01.02.xx	Program Pengelolaan Pendidikan	% Mahasiswa melanjutkan pendidikan perguruan tinggi	na	na		100	5.000	100	5.250	100	5.513	100	5.788	100	5.788	100
1.01.02.xx	Honor Guru PAUD ... D3 5 Org, S1 55 Org, 28 SMA		na	100	1.365	100	1.365	100	1.365	100	1.365	100	1.365	100	1.365	100
1.01.02.xx	Guru Honda SD ... 226 Org		na	100	3.941	100	3.941	100	3.941	100	3.941	100	3.941	100	3.941	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.01.02.xx	Guru Kontrak SD... 100 Org		na	100	1.740	100	1.740	100	1.740	100	1.740	100	1.740	100	1.740	100
1.01.02.xx	Guru Honda SMP ... 73 Org		na	100	960	100	960	100	960	100	960	100	960	100	960	100
1.01.02.xx	Guru Kontrak SMP... 50 Org		na	100	870	100	870	100	870	100	870	100	870	100	870	100
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	% Sekolah yang menerapkan Kurikulum berbasis lokal	na	na	404	10	404	20	404	30	750	40	750	50	1.000	50
2.24	Dinas Arsip Daerah				2.112		1.848		2.613		2.628		2.644		3.503	
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	253	100	750	100	765	100	780	100	796	100	955	100
2.24.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	118	100	118	100	118	100	118	100	118	100	118	100
2.24.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	na	0,61	1.421	0,92	750	1,23	1.500	1,54	1.500	2	1.500	2	2.000	2
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	% nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	na	na	321	10	200	10	200	10	200	10	200	20	400	20



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.1.2	Sasaran : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				103.744		55.599		58.333		59.442		62.027		43.563	
1.02	Dinas Kesehatan				75.627		30.560		32.831		33.453		35.527		15.200	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	1.824	100	1.824	100	1.861	100	1.898	100	1.936	100	2.323	100
1.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	10.782	100	10.782	100	10.782	100	10.782	100	10.782		10.782	-
1.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na		100	40	100	40	100	40	100	40	100	40	100
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	na		60.981											-
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Prevalensi/ Persentasi Balita gizi buruk	36,8		1.714		1.714		1.748		1.783		1.818		1.855	-
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup	33,0		326		200		200		200		200		200	-
1.02.05.xx	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Warga Miskin yang dijamin BPJS kesehatan	67,0			73,9	10.000	73,9	10.200	75,2	10.750	75	12.750	75	12.750	75
1.02.05.xx	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar					6.000		8.000		8.000		8.000		8.000	-



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.02.02	BLUD RSUD				27.739		24.739		25.188		25.658		26.153		27.998	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota BLUD	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	7.637	100	7.637	100	8.019	100	8.420	100	8.841	100	10.609	100
1.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota BLUD	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	15.770	100	15.770	100	15.770	100	15.770	100	15.770		15.770	-
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ... BLUD	Persentase ketersediaan layanan BLUD	na	100	4.332	100	1.332	100	1.399	100	1.469	100	1.542		1.619	-
5.01	Bappeda				377		300		315		331		347		365	
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen perencanaan Sosbud	100	100	377	100	300	100	315	100	331	100	347		365	-
3	Misi :Membangun dan Menata Infrastruktur Kawasan Perkotaan Ibu Kota Provinsi Papua Barat secara Modern															
3.1	Tujuan: Meningkatkan Infrastruktur kota sebagai Pusat Peradaban dan Ibu Kota Provinsi Papua Barat				136.214		58.694		52.449		49.268		87.479		103.278	
3.1.1	Sasaran : Infrastruktur modern dalam mendukung mobilitas dan kehidupan masyarakat				136.214		58.694		52.449		49.268		87.479		103.278	
1.03	Dinas PUPR				76.169		41.233		16.258		4.283		30.305		46.590	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	832	100	1.250	100	1.275	100	1.301	100	1.327	100	1.592	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	413	100	413	100	413	100	413	100	413	100	413	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na		100	40	100	40	100	40	100	40	100	40	100
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Rawan Banjir di Wilayah Sungai	na	na	1.997											-
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	% RT yang terlayani Air Minum	80	82	1.710	85	1.500	87,75	1.500	90	1.500	92,5	1.500	94,75	1.500	95
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	% Drainase Kondisi baik	90,9	91,5	1.649	97,6	1.000	98,9	1.000	99	1.000	99,35	1.000	99,35	1.000	99
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	% Kesesuaian Tata Bangunan dan Lingkungan	na	57	6.300	59,8	20.000	61,55	5.000	61,55		65	10.000	70	26.019	70
1.03.08.xx	Program Penataan Bangunan Gedung	% Kesesuaian Tata Bangunan dan Lingkungan									-		-			-
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	% jalan dengan kondisi baik	43,45	47,15	63.238	50,58	7.000	54,55	7.000	58,25	-	61,95	15.000	62	15.000	62
1.03.10.xx	Program Penyelenggaraan Jalan	% Ketersediaan dokumen rencana pengembangan infrastruktur jalan dalam Kota	na			100	10.000					100	996	100	996	100
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi	na	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.04	Dinas Perumahan				42.351		10.033		10.879		9.282		11.431		10.698	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1.143	100	1.257	100	1.283	100	1.308	100	1.334	100	1.601	100
1.04.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	567	100	567	100	567	100	567	100	567	100	567	100
1.04.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100	100	246	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	na	65	2.466	70	1.000	80	1.000	85	500	87	2.000		2.000	-
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Penanganan Permukiman Kumuh dalam kota	na	90	17.605	90	5.000	98	5.000	98,7	5.877	99	5.000	99,7	4.000	100
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	% Kawasan Permukiman yang terlayani PSU	na	100	20.325	100	2.179	100	3.000	100	1.000	100	2.500	100	2.500	100
2.15	Dinas Perhubungan				14.364		4.478		5.169		5.372		5.395		5.625	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	906	100	1.087	100	1.109	100	1.131	100	1.154	100	1.384	100
2.15.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	711	100	711	100	711	100	711	100	711	100	711	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.15.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100			100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% Sarana dan prasarana Perhubungan darat yang terbangun	na	80	12.434	80	2.500	80	2.319	85	2.500	88	2.500	88	2.500	88
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	% Sarana dan prasarana pelayaran	na	100	313	100	150	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100
2.07	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				530		400		4.228		5.000		5.000		5.000	
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah RKT Daerah		100	384	100	400									-
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	% Pembangunan Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal	86,67	93,33	96			100	4.228	100	5.000	100	5.000		5.000	-
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	% Pengembangan Satuan Kawasan Transmigrasi Lokal Daerah														-
4.01	Sekretariat Daerah : Bagian Hukum				-		500		600		-		-		-	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	% produk hukum daerah yang telah ditetapkan	na	na		100	500	100	600							-
2.17	Dinas Perindag				2.499		1.750		15.000		25.000		35.000		35.000	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	% Peningkatan sarana distribusi perdagangan	na	na	2.499	10	1.750	30	15.000	60	25.000	100	35.000		35.000	-
5.01	Bappeda				300		300		315		331		348		365	
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen perencanaan Ekonomi	65	70	300	100	300	100	315	100	331	100	348		365	-



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
4	Misi : Mengembangkan perekonomian daerah yang mandiri dan produktif berbasis potensi lokal dan sumber daya alam															
4.1	Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing				37.723		16.896		19.443		23.957		24.372		25.038	
4.1.1	Sasaran : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat				37.723		16.896		19.443		23.957		24.372		25.038	
2.15	Dinas Perhubungan				5.955		1.700		1.500		2.000		2.000		2.000	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap		100	3.830		-								-	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya		100	1.975	100	1.575	100	1.375	100	1.875	100	1.875	100	1.875	100
3.25.05	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan jumlah industri UKM di bidang perikanan	na	100	150	100	125	100	125	100	125	100	125	100	125	100
2.17	Dinas Perindag				10.275		2.856		3.224		3.242		3.261		3.452	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	496	100	900	100	918	100	936	100	955	100	1.146	100
2.17.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	426	100	426	100	426	100	426	100	426	100	426	100
2.17.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na	-	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	% Peningkatan UMKM Kabupaten	12325	na	600	0,50	1.000	0,60	1.500	0,70	1.500	0,80	1.500		1.500	-



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	% Obyek sasaran pengawasan ba rang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	na	na	192	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	% Jumlah UMKM yang menjadi ekportir	na	na	170	na	150									-
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	% Alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	na	na	250	100	200	100	200	100	200	100	200		200	-
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Daerah	na	na	8.141		-									-
4.01	Sekretariat Daerah : Bagian Perekda				923		400		450		450		450		450	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	% Presentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan koperasi-UKM, pertanian, perikanan, ketahanan pangan yang dikoordinasikan	na	na	923	50	400	50	450	50	450	50	450	50	450	50
3.26	Dinas Pariwisata				2.496		2.693		4.111		4.130		4.148		4.339	
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	590	100	900	100	918	100	936	100	955	100	1.146	100
3.26.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	163	100	163	100	163	100	163	100	163	100	163	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
3.26.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na	-	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	% Pertumbuhan Destinasi pariwisata	11	11	923	13	600	13	1.500	13	1.500	14	1.500		1.500	-
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	% pertumbuhan jumlah wisatawan	na	na	210											-
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Inovasi Ekonomi Lokal			324	-		-	250	-		-	250	-		-
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	% Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Lokal	na	na	286	5	1.000	10	1.250	15	1.500	20	1.250	25	1.500	25
3.27	Dinas Pertanian				18.073		9.247		10.157		14.135		14.513		14.797	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1.340		1.340		1.367		1.394		1.422	100	1.707	100
3.27.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100
3.27.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na	-	100	30		30		30		30		30	-



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	% Ketersediaan Ternak di Manokwari	na	na	5.234	100	5.000	100	3.000	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	% Pelaksanaan kegiatan pembangunan Komoditas unggulan Ekonomi Hijau	na	na	0	85	500	100	1.500	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100
3.27.03.xx	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	% Ketersediaan prasarana pertanian			7.924				1.500		2.000		2.000		2.000	-
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	% Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	na	na	611	5	611	5	611	5	611	5	611		611	-
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	% Peningkatan kelas kelompok tani per tahun	na	5	666	5	666	5	750	5	750	5	750	5	750	5
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan	na	na	249	45	150	50	150	55	150	60	150	65	150	65
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks capaian pola pangan harapan ketersediaan	15,52	14,66	1.175	15,38	400	15,38	700	15,38	650	15,38	1.000	15,38	1.000	15,38
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	% Ketersediaan dokumen ketahanan dan kerentanan	na	na	226											-
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	% Pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/ Kota	35	45	298	55	200	60	200	65	200	70	200	75	200	75



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
5	Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan pengurangan kesenjangan sosial															
5.1	Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan perkonomian daerah yang berdaya saing				37.186		26.691		38.246		70.831		36.417		32.227	
5.1.1	Sasaran : Menurunnya kemiskinan masyarakat				37.186		26.691		38.246		70.831		36.417		32.227	
1.06	Dinas Sosial				5.941		10.365		10.383		11.902		11.920		12.111	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	653	100	900	100	918	100	936	100	955	100	1.146	100
1.06.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	1.114	100	1.114	100	1.114	100	1.114	100	1.114	100	1.114	100
1.06.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na			100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	% Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	100	100	2.822	100	2.822	100	2.822	100	2.822	100	2.822	100	2.822	100
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	% penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar dan tuna sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	na	na	226	100	2.000	100	2.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	% Pekerja inti dari keluarga miskin yang tercover BPJS Tenaga Kerja	na	na	1.126	85	3.500	85	3.500	85	4.000	85	4.000	85	4.000	85



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.07	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				6.924		3.188		3.717		4.246		4.277		4.585	
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1.211	100	1.454	100	1.483	100	1.512	100	1.543	100	1.851	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	354	100	354	100	354	100	354	100	354	100	354	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100	100	59	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	% Ketersediaan dokumen perencanaan tenaga kerja	na	100	135	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	% Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		22,7	4.345	30	1.000	44,55	1.500	59,09	2.000	73,64	2.000	88,18	2.000	88
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	% Tenaga kerja yang ditempatkan	na	9,46	150	13,19	100	18,08	100	25,28	100	33,19	100	42,30	100	42
2.07.05	Program Hubungan Industrial	% Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	na	9,27	420	18,26	200	26,96	200	37,39	200	55,65	200	63,48	200	63



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
2.08	Dinas Pemberdayaan Keluarga, Perlindungan Anak dan KB				3.508		500		1.000		1.500		1.500		1.500		
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	% Pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/M CPR)			186												-
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	na	na	1.575												-
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Unmeet need KB	na	na	1.746	100	500	100	1.000	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	100
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa				2.009		2.030		2.048		2.067		2.085		2.276		
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	652	100	900	100	918	100	936	100	955	100	1.146	100	100
2.13.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.13.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100			100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	100
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	% Kinerja kelembagaan masyarakat	23,17	23,17	1.256	24,39	1.000	26,83	1.000	29,88	1.000	31,71	1.000	32,93	1.000	32,9	32,9



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.13	BPKAD				15.022		6.800		16.800		46.800		11.800		6.900	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	% Berfungsinya kebijakan Pemerintah Daerah	na	na	-	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	5.100	100
5.02.02.xx	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	% Keberhasilan proses Pilkada	na						10.000		40.000					-
5.02.02.xx	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	% Tenaga Kerja Honorer yang tercover dalam BPJS Kesehatan	na	100	15.022	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100
1.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				2.638		3.057		3.548		3.566		4.085		4.104	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	467	100	900	100	918	100	936	100	955	100	974	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100	100	44	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	% Korban bencana alam yang ditangani	na	80	2.028	80	2.028	80	2.500	80	2.500	80	3.000	80	3.000	80
5.01	Bappeda				1.145		750		750		750		750		750	
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen perencanaan kemiskinan	100	100	1.145	100	750	100	750	100	750	100	750	100	750	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
6	Misi : Membangun hidup masyarakat yang berkepribadian, berbudaya, dan ber-Bhineka Tunggal Ika sebagai kekayaan dan identitas daerah Tujuan: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter			Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter												
6.1	Tujuan : Menjaga dan Melestarikan Budaya Lokal				5.955		2.864		4.000		4.000		8.000		8.000	
6.1.1	Sasaran : Menjaga dan Melestarikan Budaya Lokal				5.955		2.864		4.000		4.000		8.000		8.000	
1.01	Dinas Pendidikan				1.114		1.114		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	% Komunitas/ sanggar kesenian yang difasilitasi	na	na	502	10	502	20	1.000	20	1.000	20	1.000	20	1.000	10Even
2.22.05	Program Pengembangan Kebudayaan	% kegiatan seni budaya yang difasilitasi	na	na	612	10	612	20	1.000	20	1.000	20	1.000	20	1.000	10Even
3.26	Dinas Pariwisata				4.841		1.750		2.000		2.000		6.000		6.000	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	% Organisasi Kepemudaan yang dibina	41,67	41,67	939	41,67	750	45,00	1.000	50,00	1.000	60,00	1.000	66,67	1.000	66,67
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	% Fasilitas Pembinaan olah raga sesuai yang difasilitasi	0,12	0,12	3.759	0,12	1.000	0,12	1.000	0,12	1.000	0,20	5.000	0,20	5.000	0,20
7	Misi : Mengelola lingkungan hidup secara lestari, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup												
7.1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup				29.536		21.461		24.444		24.473		39.002		49.978	
7.1.1	Sasaran : Terjaganya Kelestarian Alam				23.642		20.761		23.944		23.973		24.002		34.978	
2.11	Dinas Lingkungan Hidup				18.033		15.152		18.336		18.365		18.394		28.696	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1.421	100	1.421	100	1.450	100	1.479	100	1.508	100	1.810	100
2.11.01.xx	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100	100	34	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	% Dokumen Lingkungan Hidup	n/a	100	58	100	55	100	55	100	55	100	55	100	55	100
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	% Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	100	1.572	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	100
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	% luas RTH Publik	5,66	10	266	10		15	2.500	20	2.500	25	2.500	30	2.500	30
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	% Izin usaha yang memiliki izin Lingkungan Hidup	n/a	0	166	25	150	33,33	150	41,67	150	50	150	58,33	150	58
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (HIBAH)	% Masyarakat Adat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	n/a	100	760		-									-
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	% Penyuluhan Lingkungan Hidup	n/a	100	99	100	75	100	75	100	75	100	75	100	75	100
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	% Penghargaan Lingkungan Hidup	n/a	100	156		-									-
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	% Pengaduan Lingkungan Hidup	n/a	78	118	100	75	100	75	100	75	100	75	100	75	100
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani	73,95	73,95	13.381	78	13.096	78	13.751	83	13.751	83	13.751	90	23.751	90



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
	Kelurahan Amban				712		712		712		712		712		862	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		100	712	100	712	100	712	100	712	100	712	100	862	100
	Kelurahan Anday				406		406		406		406		406		556	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		100	406	100	406	100	406	100	406	100	406	100	556	100
	Kelurahan Manokwari Barat				802		802		802		802		802		952	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		95	802	95	802	95	802	95	802	95	802	95	952	95
	Kelurahan Manokwari Timur				539		539		539		539		539		689	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		100	539	100	539	100	539	100	539	100	539	100	689	100
	Kelurahan Padarni				560		560		560		560		560		710	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		100	560	100	560	100	560	100	560	100	560	100	710	100
	Kelurahan Pasir Putih				342		342		342		342		342		492	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		100	342	100	342	100	342	100	342	100	342	100	492	100
	Kelurahan Sanggeng				771		771		771		771		771		245	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		95	771	95	771	95	771	95	771	95	771	95	245	95
	Kelurahan Sowi				446		446		446		446		446		596	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		100	446	100	446	100	446	100	446	100	446	100	596	100
	Kelurahan Wosi				1.031		1.031		1.031		1.031		1.031		1.181	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		95	1.031	95	1.031	95	1.031	95	1.031	95	1.031	95	1.181	95



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
	Sasaran 2 : Pembangunan Sesuai Arahana Tata Ruang Wilayah				5.895		700		500		500		15.000		15.000	
1.03	Dinas PUPR				5.895		700		500		500		15.000		15.000	
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Pelanggaran pemanfaatan ruang	96	80	2.178	50	700	30	500	20	500	15	2.500	10	2.500	10
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	% Sarana dan Prasarana Permukiman		100	3.717		-					100,0	12.500	100	12.500	100
8	Misi : Membina kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan damai, serta tertib hukum dan berintegritas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia															
8.1	Tujuan : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan aman				60.067		34.495		31.814		29.458		29.854		29.567	
8.1.1	Sasaran 1 :Mewujudkan Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat yang Taat Hukum dan Demokratis Dalam Bingkai NKRI				60.067		34.495		31.814		29.458		29.854		29.567	
1.05	Satuan Polisi Pamong Praja				6.041		6.963		6.983		7.003		7.374		6.836	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	908	100	1.000	100	1.020	100	1.040	100	1.061	100	1.273	100
1.05.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	5.133	100	5.133	100	5.133	100	5.133	100	5.133		5.133	-
1.05.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na		100	30	100	30	100	30	100	30		30	-
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	% Pelanggaran Perda	na	na		100	400	100	400	100	400	100	400		400	-



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	% Penanganan bencana kebakaran	na	na		100	400	100	400	100	400	100	750		750	-
2.16	Dinas Informasi dan Komunikasi				1.443		1.500									
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% Titik akses Layanan Informasi Publik	na	100	1.443	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100
2.11	Dinas Lingkungan Hidup				43.146		18.000		15.000		12.000		12.000		12.000	
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	% penyelesaian hak penduduk akibat dampak pembangunan	na	100	43.146	100	18.000	100	15.000	100	12.000	100	12.000	100	12.000	100
4.01	Sekretariat Daerah : Bagian Hukum				1.595		500		525		1.125		1.125		1.125	
4.01.03	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	% produk hukum daerah yang telah ditetapkan	na	100	1.595	100	500	100	525	100	1.125	100	1.125	100	1.125	100
4.01	Sekretariat Daerah : Bagian Humas dan Protokol				861		1.000		1.050		1.050		1.050		1.050	
4.01.03	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	% Pelayanan keprotokoleran dan kehumasan	na	100	861	100	1.000	100	1.050	100	1.050	100	1.050	100	1.050	100
8.01	Badan Kesatuan Bangsa				6.980		6.532		6.756		6.780		6.805		7.056	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1.184	100	1.184	100	1.208	100	1.232	100	1.256	100	1.508	100
8.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	89	100	89	100	89	100	89	100	89	100	89	100
8.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	% peningkatan pemahaman ideologi dan karakter kebangsaan	na	100	445	100	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	% pengembangan etika partai politik dan lembaga pendidikan	na	100	2.179	100	2.179	100	2.179	100	2.179	100	2.179	100	2.179	100
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% ormas yang telah memenuhi syarat operasional	na	100	102	100	300	100	500	100	500	100	500	100	500	100
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	% peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya	na	100	267	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	% peningkatan kewaspadaan daerah dalam penanganan konflik sosial	na	100	2.714	100	2.250	100	2.250	100	2.250	100	2.250	100	2.250	100
9	Misi 9 : Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang bersih, kuat, professional, dan partisipatif.															
9.1	Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			139.278	120.779	130.295	131.084	131.254	140.110							
9.1.1	Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas KKN			136.126	115.551	125.067	125.857	126.026	134.882							
1.02	BLUD RSUD			1.054	-	1.054	1.054	1.054	1.054							
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	% SDM yang memiliki kompetensi keahlian	na	100	1.054			100	1.054	100	1.054	100	1.054	100	1.054	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				2.571		1.926		2.196		2.216		2.237		2.449	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	211	100	1.000	100	1.020	100	1.040	100	1.061	100	1.273	100
2.12.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	208		208		208		208		208		208	-
2.12.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na			100	30	100	30	100	30	100	30		30	-
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	% Penduduk usia KTP yang memiliki KTP dan anak yang memiliki Akta	na		1.965		500		750		750		750		750	-
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	% penduduk yang memiliki akta nikah	na		88		88		88		88		88		88	-
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	na		100		100		100		100		100		100	-
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa				5.499		1.750		1.750		1.750		1.750		1.250	
2.13.02	Program Penataan Desa	% prasarana kantor desa yang terbangun	24,39	1550	1.550	24	500	27	500	30	500	32	500	33		33
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	% kinerja pendamping kampung dan distrik			1.287		500		500		500		500		500	-
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	% Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan			2.662		750		750		750		750		750	-



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.16	Dinas Informasi dan Komunikasi				4.397		3.678		4.194		4.210		4.227		4.397	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	515	100	800	100	816	100	832	100	849	100	1.019	100
2.16.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	248	100	248	100	248	100	248	100	248	100	248	100
2.16.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD				100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	na	na	3.076	1,2	2.500	1,6	3.000	<1,8	3.000	<2,6	3.000	3,5	3.000	3,50
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	% Pengamanan Informasi Komunikasi	na	100	557	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				3.589		2.870		2.900		2.931		2.962		3.280	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	2.390	100	1.500	100	1.530	100	1.561	100	1.592	100	1.910	100
2.18.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	523	100	523	100	523	100	523	100	523	100	523	100
2.18.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na		100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	na		417		417		417		417		417		417	-
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	na		259		400		400		400		400		400	-
4.01	Sekretariat Daerah				36.259		35.959		35.959		35.959		35.959		35.979	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	36.259	100	35.959	100	35.959	100	35.959	100	35.959	100	35.979	100
4.01	Sekretariat Daerah : Bagian Organisasi				921		750		750		750		750		2.250	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketercapaian penataan organisasi	na	100	921	100	750	100	750	100	750	100	750	100	2.250	100
4.01	Sekretariat Daerah : Bagian Pemerintahan				3.026		3.504		3.246		3.249		2.304		2.324	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dukungan layanan operasional RT	na	100	2.304	100	2.304	100	2.304	100	2.304	100	2.304	100	2.324	100
4.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan prasarana kantor	na	100	627											-
4.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan pembentukan DOB	na	na		100	1.000	100	742	100	745	100	745	100	765	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
4.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah	na	50	94	100	200	100	200	100	200		250	100	270	100
4.01	Sekretariat Daerah : Bagian Umum				313		500		500		525		525		545	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	na	100	313	100	500	100	500	100	525	100	525	100	545	100
4.01	Sekretariat Daerah : Bagian PBJ				554		554		554		550		550		570	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	% Keberhasilan Pengadaan Barang/ Jasa	na	100	554	100	554	100	554	100	550	100	550	100	570	100
4.01	Sekretariat Daerah : Bagian Administrasi Pembangunan						500		500		500		500		520	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	% Koordinasi program pembangunan lingkup Sekretariat Daerah	na		na	100	500	100	500	100	500		500	100	520	100
4.02	Sekretariat DPRD				17.351		16.727		16.847		16.969		17.094		18.388	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	6.623	100	6.000	100	6.120	100	6.242	100	6.367	100	7.640	100
4.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	1.362	100	1.362	100	1.362	100	1.362	100	1.362	100	1.362	100
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	% Perda yang ditetapkan	na	100	9.365	100	9.365	100	9.365	100	9.365	100	9.365	100	9.385	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
5.01	Bappeda				3.729		3.880		3.130		3.130		3.130		4.890	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	1.180	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.560	100
5.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	515	100	515	100	515	100	515	100	515	100	515	100
5.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na		100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP	55,24	72,82	966	90	1.084	90	1.084	90	1.084	90	1.084	90	1.084	90
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	% Hasil Kajian / Studi yang ditindaklanjuti dan menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	100	100	829	100	750							100	1.500	100
2.20.02.xx	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% Perangkat Daerah yang dapat menyediakan data statistik	100	100	238	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
5.02	BPKAD				35.481		17.765		18.085		18.417		18.763		22.268	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	9.177	100	6.000	100	6.120	100	6.242	100	6.367	100	7.641	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
5.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	3.953	100	3.953	100	3.953	100	3.953	100	3.953	100	3.953	100
5.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan sarana operasional	100	100	11.692	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	5.000	100
5.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	75	365	100	60	100	60	100	60	100	60		60	-
5.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Tenaga ASN yang memenuhi standar kompetensi	100	100	752	100	752	100	752	100	752	100	752		752	-
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	% Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,27	3,27	6.062	3,00	3.000	3	3.150	3	3.308	3	3.473		3.647	-
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	% Pengelolaan Aset Baik (% ketersediaan daftar aset tetap, manual, penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)	na	100	3.270	100	1.000	100	1.050	100	1.103	100	1.158	100	1.216	100
5.02	Bapenda				4.940		5.455		6.099		6.324		6.856		7.348	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1.243	100	1.243	100	1.268	100	1.294	100	1.319		1.346	-



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
5.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	100	100	848	100	848	100	848	100	848	100	848	100	848	100
5.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100	100		100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Kontribusi Pajak Daerah terhadap APBD	3,1	4,16	2.848	4,25	3.333	4,87	3.952	5,75	4.152	6	4.658	6,33	5.124	6
5.03	Badan Kepegawaian Daerah				2.130		3.693		6.870		6.889		6.907		6.927	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	371	100	900	100	918	100	936	100	955	100	974	100
5.03.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	241	100	241	100	241	100	241	100	241	100	241	100
5.03.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na		100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	% PNS berkembang kompetensinya	na	na	1.518	100	2.522	100	5.682	100	5.682	100	5.682	100	5.682	100
6.01	Inspektorat				3.724		3.955		3.979		4.004		4.029		4.054	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1.003	100	1.204	100	1.228	100	1.253	100	1.278	100	1.303	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
6.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	258	100	258	100	258	100	258	100	258	100	258	100
6.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	30	100	30	100	30	100	30		30	-
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	% Capaian Target Pengawasan	na	100	1.444	100	1.444	100	1.444	100	1.444	100	1.444		1.444	-
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Maturitas SPIP	na	na	1.019	2	1.019	3	1.019	3	1.019	3	1.019	3	1.019	3
7.01	Distrik Manokwari Barat				1.091		1.179									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	227	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	357	100	357	100	357	100	357	100	357		357	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15		15	-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Barat	na	100	117	100	117	100	117	100	117	100	117		117	-



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kampung/ Kelurahan	na	100	239	100	239	100	239	100	239	100	239		239	-
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung	na	100	151	100	151	100	151	100	151	100	151		151	-
7.01	Distrik Manokwari Selatan				950		946									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	319	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	351	100	351	100	351	100	351	100	351		351	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15		15	-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Selatan	na	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80		80	-
7.01.03	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	% Kinerja trantibum Masyarakat Kampung/ Kelurahan	na	100	120	100	120	100	120	100	120	100	120		120	-
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung	na	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80		80	-



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01	Distrik Manokwari Timur				486		730		1.393		1.393		1.393		1.393	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	71	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	18	100	18	100	18	100	18	100	18		18	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		10	15	10	15		15	100	15		15	-
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kampung/ Kelurahan	na	100	317	100	317	100	317	100	317	100	317		317	-
7.01.03	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	% Kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung	na	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80		80	-
7.01	Distrik Manokwari Utara				427		663		663		663		663		663	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	79	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	95	100	95	100	95	100	95	100	95		95	-



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15		15	-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Utara	na	100	56	100	56	100	56	100	56	100	56		56	-
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kampung/ Kelurahan	na	100	197	100	197	100	197	100	197	100	197		197	-
7.01	Distrik Masni				1.104		1.183									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	200	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	683	100	683	100	683	100	683	100	683		683	-
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15		15	-
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Selatan	na	100	111	100	75	100	75	100	75	100	75		75	-



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.03	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	% Kinerja trantibum Masyarakat Kampung/ Kelurahan	na	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60		60	-
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung	na	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50		50	-
7.01	Distrik Prafi				1.502		1.424									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	393	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	879	100	879	100	879	100	879	100	879		879	-
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15		15	-
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Selatan	na	100	98	100	98	100	98	100	98	100	98		98	-
7.01.03	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Prafi	na	100	96	100	96	100	96	100	96	100	96		96	-
7.01.04	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung	na	100	36	100	36	100	36	100	36	100	36		36	-



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01	Distrik Sidey				948		1.110									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	153	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	587	100	587	100	587	100	587	100	587	100	587	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15	100	15	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Selatan	na	100	77	100	77	100	77	100	77	100	77	100	77	100
7.01.03	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% Kinerja trantibum Masyarakat Kampung/ Kelurahan	na	100	132	100	132	100	132	100	132	100	132	100	132	100
7.01	Distrik Tanah Rubuh				612		797									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	130	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	209	100	209	100	209	100	209	100	209		209	-



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15		15	-
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Selatan	na	100	193	100	193	100	193	100	193	100	193		193	-
7.01.03	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Prati	na	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80		80	-
7.01	Distrik Warmare				1.252		1.373									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	194	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	829	100	829	100	829	100	829	100	829	100	829	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15	100	15	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Selatan	na	100	148	100	148	100	148	100	148	100	148	100	148	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.03	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Warmare	na	100	55	100	55	100	55	100	55	100	55	100	55	100
7.01.04	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	26	100	26	100	26	100	26	100	26	100	26	100
7.01	Kelurahan Amban				266		329		5.034		5.034		5.034		5.034	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	88	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	149	100	149	100	149	100	149	100	149	100	149	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
7.01	Kelurahan Andai				200		241		241		241		241		241	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	109	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	76	100	76	100	76	100	76	100	76	100	76	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	15	100	15	100	15	100	15	100	15	100	15	100
7.01	Kelurahan Manokwari Barat				182		266									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	66	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	96	100	96	100	96	100	96	100	96	100	96	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100
7.01	Kelurahan Manokwari Timur				350		347									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	153	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	131	100	131	100	131	100	131	100	131	100	131	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	66	100	66	100	66	100	66	100	66	100	66	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01	Kelurahan Padarni				318		382									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	86	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	132	100	132	100	132	100	132	100	132	100	132	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01	Kelurahan Pasir Putih				102		193									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	59	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	24	100	24	100	24	100	24	100	24	100	24	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	19	100	19	100	19	100	19	100	19	100	19	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01	Kelurahan Sanggeng				194		252									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	92	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	68	100	68	100	68	100	68	100	68	100	68	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	35	100	35	100	35	100	35	100	35	100	35	100
7.01	Kelurahan Sowi				256		269									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	162	100	162	100	162	100	162	100	162	100	162	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	77	100	77	100	77	100	77	100	77	100	77	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	17	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01	Kelurahan Wosi				348		402									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	96	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	212	100	212	100	212	100	212	100	212	100	212	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	40	100	40	100	40	100	40	100	40	100	40	100
9.1.3	Sasaran : Optimalnya upaya pengarusutamaan gender				3.152		5.228									
2.08	Dinas Pemberdayaan Keluarga, Perlindungan Anak dan KB				3.152		5.228									
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	760		1.000		1.000		1.000		1.000	100	1.000	100
2.08.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	48	100	48	100	48	100	48	100	48	100	48	100
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	% Kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	na	100	1.294	100	1.294	100	1.294	100	1.294	100	1.294	100	1.294	100
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	na	100	645	100	645	100	645	100	645	100	645	100	645	100



Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ OPD/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.08.04	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi/ Persentasi Balita gizi buruk	36,8			35	2.000	34	2.000	32	2.000	31	2.000	30	2.000	30
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	% Anak korban kekerasan yang ditangani	na	100	241	100	241	100	241	100	241	100	241	100	241	100
					659.201		425.932		461.524		495.669		523.312		544.192	



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) pada rumusan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Manokwari berisikan program dan kegiatan PD untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan PD tahunan dimana program dan kegiatan PD yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis-Perangkat Daerah (Renstra PD), termasuk penjabaran kegiatan PD beserta kebutuhan pendanaannya.

Program dan kegiatan PD merupakan bentuk instrumen penjabaran langkah-langkah realisasi pembangunan dari arah kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan pembangunan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.

Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program PD yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan PD. Perencanaan program PD dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program PD bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Manokwari.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja dan atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD Manokwari. Pagu indikatif akan dialokasikan ke setiap program PD masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan PD selama periode pembangunan 2021-2026.



Untuk lebih lengkapnya, program PD selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Manokwari beserta kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini.



Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan OPD pada RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 (Dalam juta rupiah)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				304,882		168,097		168,147		157,613		185,726		204,133	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				61,427		40,647		56,928		57,569		57,877		58,042	
	Dinas Pendidikan				61,427		40,647		56,928		57,569		57,877		58,042	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	1,576	100	1,576	100	1,607	100	1,640	100	1,672	100	2,007	100
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	471	100	471	100	471	100	471	100	471	100	471	100
1.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100	100	1,041	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
1.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen profil pendidikan	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan Prasarana Pelayanan OPD	0	100	4,000	100	4,000	100	4,000	100	4,000	100	4,000	100	4,000	100
1.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen kepegawaian	100	100	1,758	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	100
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Capaian layanan PAUD	92.71		40,256	93.0	10,000	93.5	10,000	94.0	10,000	95	10,000		10,000	-
		APM SD	76.8	na		77		78		79		80		96.0		96
		APM SMP														
1.01.02.xx	Program Pengelolaan Pendidikan	% ketersediaan Seragam bagi siswa baru dari keluarga tidak mampu	na	na		100	7,500	100	7,500	100	7,500	100	7,500	100	7,500	100
1.01.02.xx	Program Pengelolaan Pendidikan	% Bantuan Pendidikan Siswa SD dan SMP dari keluarga miskin	na	na		100	5,000	100	7,000	100	7,000	100	7,000	100	7,000	100
1.01.02.xx	Program Pengelolaan Pendidikan	% Pembangunan Sekolah Pola Asrama	na	na		100	1,000	100	15,000	100	15,000	100	15,000	100	15,000	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.01.02.xx	Program Pengelolaan Pendidikan	% Mahasiswa melanjutkan pendidikan perguruan tinggi	na	na		100	5,000	100	5,250	100	5,513	100	5,788	100	5,788	100
1.01.02.xx	Honor Guru PAUD ... D3 5 Org, S1 55 Org, 28 SMA		na	100	1,365	100	1,365	100	1,365	100	1,365	100	1,365	100	1,365	100
1.01.02.xx	Guru Honda SD ... 226 Org		na	100	3,941	100	3,941	100	3,941	100	3,941	100	3,941	100	3,941	100
1.01.02.xx	Guru Kontrak SD... 100 Org		na	100	1,740	100	1,740	100	1,740	100	1,740	100	1,740	100	1,740	100
1.01.02.xx	Guru Honda SMP ... 73 Org		na	100	960	100	960	100	960	100	960	100	960	100	960	100
1.01.02.xx	Guru Kontrak SMP... 50 Org		na	100	870	100	870	100	870	100	870	100	870	100	870	100
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	% Sekolah yang menerapkan Kurikulum berbasis lokal	na	na	404	10	404	20	404	30	750	40	750	50	1,000	50
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		19.8		104,420		55,299		59,072		60,165		62,733		65,002	
	Dinas Kesehatan				75,627		30,560		32,831		33,453		35,527		35,950	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	1,824	100	1,824	100	1,861	100	1,898	100	1,936	100	2,323	100
1.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	10,782	100	10,782	100	10,782	100	10,782	100	10,782		10,782	-
1.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	ba	na		100	40	100	40	100	40	100	40	100	40	100
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	na		60,981											-
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Prevalensi/ Persentasi Balita gizi buruk	36.8		1,714		1,714		1,748		1,783		1,818		1,855	-
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup	33.0		326		200		200		200		200		200	-
1.02.05.xx	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Warga Miskin yang dijamin BPJS kesehatan	67.0			73.9	10,000	73.9	10,200	75.2	10,750	75	12,750	75	12,750	75



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.02.05.xx	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar				6,000		8,000		8,000		8,000		8,000		-
	BLUD RSUD			28,793	24,739	26,241	26,712	27,206	29,052							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota BLUD	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	7,637	100	7,637	100	8,019	100	8,420	100	8,841	100	10,609	100
1.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota BLUD	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	15,770	100	15,770	100	15,770	100	15,770	100	15,770	100	15,770	100
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ... BLUD	Persentase ketersediaan layanan BLUD	na	100	4,332	100	1,332	100	1,399	100	1,469	100	1,542	100	1,619	100
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	% SDM yang memiliki kompetensi keahlian	na	100	1,054			100	1,054	100	1,054	100	1,054	100	1,054	100
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				82,064	41,233	16,258	4,283	30,305	46,590						
	Dinas PUPR				82,064	41,233	16,258	4,283	30,305	46,590						
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	832	100	1,250	100	1,275	100	1,301	100	1,327	100	1,592	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	413	100	413	100	413	100	413	100	413	100	413	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na		100	40	100	40	100	40	100	40	100	40	100
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Rawan Banjir di Wilayah Sungai	na	na	1,997											-
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	% RT yang terlayani Air Minum	80	82	1,710	85	1,500	87.75	1,500	90	1,500	92.5	1,500	94.75	1,500	95



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	% Drainase Kondisi baik	90.9	91.5	1,649	97.6	1,000	98.9	1,000	99	1,000	99.35	1,000	99.35	1,000	99
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	% Kesesuaian Tata Bangunan dan Lingkungan	na	57	6,300	59.8	20,000	61.55	5,000	61.55		65	10,000	70	26,019	70
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	% jalan dengan kondisi baik	43.45	47.15	63,238	50.58	7,000	54.55	7,000	58.25	-	61.95	15,000	62	15,000	62
1.03.10.xx	Program Penyelenggaraan Jalan	% Ketersediaan dokumen rencana pengembangan infrastruktur jalan dalam Kota	na			100	10,000					100	996	100	996	100
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi	na	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Pelanggaran pemanfaatan ruang	121	80	2,178	50	700	30	500	20	500	15	2,500	10	2,500	10
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	% Sarana dan Prasarana Permukiman		100	3,717		-					100.0	12,500	100	12,500	100
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				42,351		10,033		10,879		9,282		11,431		10,698	
	Dinas Perumahan				42,351		10,033		10,879		9,282		11,431		10,698	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1,143	100	1,257	100	1,283	100	1,308	100	1,334	100	1,601	100
1.04.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	567	100	567	100	567	100	567	100	567	100	567	100
1.04.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100	100	246	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	na	65	2,466	70	1,000	80	1,000	85	500	87	2,000		2,000	-
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Penanganan Permukiman Kumuh dalam kota	na	90	17,605	90	5,000	98	5,000	98.7	5,877	99	5,000	99.7	4,000	100
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	% Kawasan Permukiman yang terlayani PSU	na	100	20,325	100	2,179	100	3,000	100	1,000	100	2,500	100	2,500	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6,041		6,963		6,983		7,003		7,374		7,586	
	Satuan Polisi Pamong Praja				6,041		6,963		6,983		7,003		7,374		7,586	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	100	908	100	1,000	100	1,020	100	1,040	100	1,061	100	1,273	100
1.05.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	5,133	100	5,133	100	5,133	100	5,133	100	5,133	100	5,133	100
1.05.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na		100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	% Pelanggaran Perda	na	na		100	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	% Penanganan bencana kebakaran	na	na		100	400	100	400	100	400	100	750	100	750	100
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				2,638		3,057		3,548		3,566		4,085		4,104	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				2,638		3,057		3,548		3,566		4,085		4,104	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	467	100	900	100	918	100	936	100	955	100	974	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100	100	44	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	% Korban bencana alam yang ditangani	na	80	2,028	80	2,028	80	2,500	80	2,500	80	3,000	80	3,000	80



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5,941		10,865		11,883		11,902		11,920		12,111	
	Dinas Sosial				5,941		10,865		11,883		11,902		11,920		12,111	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	653	100	900	100	918	100	936	100	955	100	1,146	100
1.06.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	1,114	100	1,114	100	1,114	100	1,114	100	1,114	100	1,114	100
1.06.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na			100	30	100	30	100	30	100	30		30	-
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	% Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	100	100	2,822	100	2,822	100	2,822	100	2,822	100	2,822	100	2,822	100
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	% penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar dan tuna sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	na	na	226	100	2,500	100	3,000	100	3,000	100	3,000	100	3,000	100
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	% Pekerja inti dari keluarga miskin yang tercover BPJS Tenaga Kerja	na	na	1,126	85	3,500	85	4,000	85	4,000	85	4,000	85	4,000	85
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				127,329		75,446		80,928		80,287		84,869		98,610	
2.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6,924		3,188		3,717		5,246		5,277		5,585	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				6,924		3,188		3,717		5,246		5,277		5,585	
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1,211	100	1,454	100	1,483	100	1,512	100	1,543	100	1,851	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	354	100	354	100	354	100	354	100	354	100	354	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100	100	59	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	% Ketersediaan dokumen perencanaan tenaga kerja	na	100	135	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	% Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	na	na	4,345	100	1,000	100	1,500	100	3,000	100	3,000	100	3,000	100
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	% Tenaga kerja yang ditempatkan	na	9.46	150	13.19	100	18.08	100	25.28	100	33.19	100	42.30	100	42.30
2.07.05	Program Hubungan Industrial	% Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	na	9.27	420	18.26	200	26.96	200	37.39	200	55.65	200	63.48	200	63.48
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3,152		5,228									
	Dinas Pemberdayaan Keluarga, Perlindungan Anak dan KB				3,152		5,228									
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	760		1,000		1,000		1,000		1,000	100	1,000	100
2.08.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	48	100	48	100	48	100	48	100	48	100	48	100
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	% Kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	na	100	1,294	100	1,294	100	1,294	100	1,294	100	1,294	100	1,294	100
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	na	100	645	100	645	100	645	100	645	100	645	100	645	100
2.08.04	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi/ Persentasi Balita gizi buruk	36.8			35	2,000	34	2,000	32	2,000	31	2,000	30	2,000	30
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	% Anak korban kekerasan yang ditangani	na	100	241	100	241	100	241	100	241	100	241	100	241	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3,638		2,470		2,797		2,774		3,152		3,436	
	Dinas Pertanian				3,638		2,470		2,797		2,774		3,152		3,436	
2.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1,340		1,340		1,367		1,394		1,422	100	1,707	100
2.27.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100
2.27.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100	100	-	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan	na	na	249	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks capaian pola pangan harapan ketersediaan	15.52	14.66	1,175	15	400	15	700	15	650	15	1,000	15	1,000	15
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	% Ketersediaan dokumen ketahanan dan kerentanan	na	na	226											-
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	% Pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/ Kota	35	45	298	55	200	60	200	65	200	70	200	75	200	75
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				43,146		18,000		15,000		12,000		12,000		12,000	
	Dinas Lingkungan Hidup				43,146		18,000		15,000		12,000		12,000		12,000	
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	% penyelesaian hak penduduk akibat dampak pembangunan	na	100	43,146	100	18,000	100	15,000	100	12,000	100	12,000	100	12,000	100
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				23,642		20,761		23,944		23,973		24,002		34,978	
	Dinas Lingkungan Hidup				18,033		15,152		18,336		18,365		18,394		28,696	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	100	100	1,421	100	1,421	100	1,450	100	1,479	100	1,508	100	1,810	100
2.11.01.xx	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Rasio kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100	100	34	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	% Dokumen Lingkungan Hidup	n/a	100	58	100	55	100	55	100	55	100	55	100	55	100
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	% Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	100	1,572	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	100
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	% luas RTH Publik	5.66	10	266	10		15	2,500	20	2,500	25	2,500	30	2,500	30
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	% Izin usaha yang memiliki izin Lingkungan Hidup	n/a	0	166	25	150	33.33	150	41.67	150	50	150	58.33	150	58
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (HIBAH)	% Masyarakat Adat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	n/a	100	760		-									-
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	% Penyuluhan Lingkungan Hidup	n/a	100	99	100	75	100	75	100	75	100	75	100	75	100
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	% Penghargaan Lingkungan Hidup	n/a	100	156		-									-
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	% Pengaduan Lingkungan Hidup	n/a	78	118	100	75	100	75	100	75	100	75	100	75	100
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani	73.95	73.95	13,381	78	13,096	78	13,751	83	13,751	83	13,751	90	23,751	90
	Kelurahan Amban				712		712		712		712		712		862	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		100	712	100	712	100	712	100	712	100	712	100	862	100
	Kelurahan Anday				406		406		406		406		406		556	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		100	406	100	406	100	406	100	406	100	406	100	556	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
	Kelurahan Manokwari Barat				802		802		802		802		802		952	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		95	802	95	802	95	802	95	802	95	802	95	952	95
	Kelurahan Manokwari Timur				539		539		539		539		539		689	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		100	539	100	539	100	539	100	539	100	539	100	689	100
	Kelurahan Padarni				560		560		560		560		560		710	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		100	560	100	560	100	560	100	560	100	560	100	710	100
	Kelurahan Pasir Putih				342		342		342		342		342		492	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		100	342	100	342	100	342	100	342	100	342	100	492	100
	Kelurahan Sanggeng				771		771		771		771		771		245	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		95	771	95	771	95	771	95	771	95	771	95	245	95
	Kelurahan Sowi				446		446		446		446		446		596	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		100	446	100	446	100	446	100	446	100	446	100	596	100
	Kelurahan Wosi				1,031		1,031		1,031		1,031		1,031		1,181	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Penanganan Sampah yang Terlayani		95	1,031	95	1,031	95	1,031	95	1,031	95	1,031	95	1,181	95
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2,571		1,926		2,196		2,216		2,237		2,449	
2.12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				2,571		1,926		2,196		2,216		2,237		2,449	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	211	100	1,000	100	1,020	100	1,040	100	1,061	100	1,273	100
2.12.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	208	100	208	100	208	100	208	100	208	100	208	100
2.12.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na	-	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	% Penduduk usia KTP yang memiliki KTP dan anak yang memiliki Akta	na	na	1,965	100	500	100	750	100	750	100	750	100	750	100
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	% penduduk yang memiliki akta nikah	na	na	88	100	88	100	88	100	88	100	88	100	88	100
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	na	na	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				7,508		3,780		3,798		3,817		3,835		4,026	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa				7,508		3,780		3,798		3,817		3,835		4,026	
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	652	100	900	100	918	100	936	100	955	100	1,146	100
2.13.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.13.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100			100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	% Kinerja kelembagaan masyarakat	23.78	23.78	1,256	26.83	1,000	29.88	1,000	32.93	1,000	32.98	1,000	40.24	1,000	40.2
2.13.02	Program Penataan Desa	% prasarana kantor desa yang terbangun	23.17	24.39	1,550	24.39	500	26.83	500	29.88	500	31.71	500	32.93	500	33
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	% kinerja pendamping kampung dan distrik	na	na	1,287	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500	100
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	% Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	na	na	2,662	100	750	100	750	100	750	100	750	100	750	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3,508		500		1,000		1,500		1,500		1,500	
	Dinas Pemberdayaan Keluarga, Perlindungan Anak dan KB				3,508		500		1,000		1,500		1,500		1,500	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	% Pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)			186											-
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	na	na	1,575											-
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Unmeet need KB	na	na	1,746	100	500	100	1,000	100	1,500	100	1,500	100	1,500	100
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				14,364		4,478		5,169		5,372		5,395		5,625	
	Dinas Perhubungan				14,364		4,478		5,169		5,372		5,395		5,625	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	906	100	1,087	100	1,109	100	1,131	100	1,154	100	1,384	100
2.15.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	711	100	711	100	711	100	711	100	711	100	711	100
2.15.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100			100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% Sarana dan prasarana Perhubungan darat yang terbangun	na	80	12,434	80	2,500	80	2,319	85	2,500	88	2,500	88	2,500	88
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	% Sarana dan prasarana pelayaran	na	100	313	100	150	100	1,000	100	1,000	100	1,000	100	1,000	100
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5,840		5,178		5,694		5,710		5,727		5,897	
2.16	Dinas Informasi dan Komunikasi				5,840		5,178		5,694		5,710		5,727		5,897	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	515	100	800	100	816	100	832	100	849	100	1,019	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.16.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	248	100	248	100	248	100	248	100	248	100	248	100
2.16.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD				100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	na	na	3,076	1.20	2,500	1.60	3,000	<1,8	3,000	<2,6	3,000	3.50	3,000	3.50
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	% Pengamanan Informasi Komunikasi	na	100	557	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% Titik akses Layanan Informasi Publik	na	100	1,443	100	1,500	100	1,500	100	1,500	100	1,500	100	1,500	100
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1,522		2,356		2,874		2,892		2,911		3,102	
	Dinas Perindag				1,522		2,356		2,874		2,892		2,911		3,102	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	496	100	900	100	918	100	936	100	955	100	1,146	100
2.17.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	426	100	426	100	426	100	426	100	426	100	426	100
2.17.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD				100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	% Peningkatan UMKM Kabupaten	12325	na	600	0,50	1,000	0,60	1,500	0,70	1,500	0,80	1,500		1,500	-
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3,589		2,870		2,900		2,931		2,962		3,280	
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				3,589		2,870		2,900		2,931		2,962		3,280	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	2,390	100	1,500	100	1,530	100	1,561	100	1,592	100	1,910	100
2.18.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	523	100	523	100	523	100	523	100	523	100	523	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.18.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na		100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	na		417		417		417		417		417		417	-
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	na		259		400		400		400		400		400	-
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4,698		1,750		2,000		2,000		6,000		6,000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga				4,698		1,750		2,000		2,000		6,000		6,000	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	% Organisasi Kepemudaan yang dibina	41.67	41.67	939	41.67	750	45.00	1,000	50.00	1,000	60.00	1,000	66.67	1,000	66.67
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	% Fasilitas Pembinaan olah raga sesuai yang difasilitasi	0.12	0.12	3,759	0.12	1,000	0.12	1,000	0.12	1,000	0.20	5,000	0.20	5,000	0.20
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				238		200									
	Bappeda				238		200									
2.22.03	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	% Perangkat Daerah yang dapat menyediakan data statistik	100	100	238	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1,114		1,114		2,000		2,000		2,000		2,000	
	Dinas Pendidikan				1,114		1,114		2,000		2,000		2,000		2,000	
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	% Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	na	na	502	10	502	20	1,000	20	1,000	20	1,000	20	1,000	10 Even
2.22.05	Program Pengembangan Kebudayaan	% kegiatan seni budaya yang difasilitasi	na	na	612	10	612	20	1,000	20	1,000	20	1,000	20	1,000	10 Even
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1,792		1,648		2,413		2,428		2,444		3,103	
	Dinas Arsip Daerah				1,792		1,648		2,413		2,428		2,444		3,103	
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	253	100	750	100	765	100	780	100	796	100	955	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2.24.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	118	100	118	100	118	100	118	100	118	100	118	100
2.24.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na	-	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	na	0.61	1,421	0.92	750	1.23	1,500	1.54	1,500	2	1,500	2	2,000	2
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				321		200		200		200		200		400	
	Dinas Arsip Daerah				321		200		200		200		200		400	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	% nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	na	na	321	10	200	10	200	10	200	10	200	20	400	20
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				34,618		13,820		33,322		47,840		57,859		58,050	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5,955		1,700		1,500		2,000		2,000		2,000	
	Dinas Perhubungan				5,955		1,700		1,500		2,000		2,000		2,000	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap		100	3,830		-									-
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya		100	1,975	100	1,575	100	1,375	100	1,875	100	1,875	100	1,875	100
3.25.05	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan jumlah industri UKM di bidang perikanan	na	100	150	100	125	100	125	100	125	100	125	100	125	100
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2,496		2,693		4,111		4,130		4,148		4,339	
	Dinas Pariwisata				2,496		2,693		4,111		4,130		4,148		4,339	
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	590	100	900	100	918	100	936	100	955	100	1,146	100
3.26.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	163	100	163	100	163	100	163	100	163	100	163	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
3.26.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na	-	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	% Pertumbuhan Destinasi pariwisata	11	11	923	13	600	13	1,500	13	1,500	14	1,500		1,500	-
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	% pertumbuhan jumlah wisatawan	na	na	210											-
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Inovasi Ekonomi Lokal	na	na	324	-		-	250	-		-	250	-		-
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	% Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Lokal	na	na	286	5	1,000	10	1,250	15	1,500	20	1,250	25	1,500	25
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				14,435		6,777		7,361		11,361		11,361		11,361	
	Dinas Pertanian				14,435		6,777		7,361		11,361		11,361		11,361	
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	% Ketersediaan Ternak di Manokwari	na	na	5,234	100	5,000	100	3,000	100	5,000	100	5,000	100	5,000	100
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	% Pelaksanaan kegiatan pembangunan Komoditas unggulan Ekonomi Hijau	na	na	0	85	500	100	1,500	100	3,000	100	3,000	100	3,000	100
3.27.03.xx	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	% Ketersediaan prasarana pertanian			7,924				1,500		2,000		2,000		2,000	-
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	% Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	na	na	611	5	611	5	611	5	611	5	611		611	-
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	% Peningkatan kelas kelompok tani per tahun	na	5	666	5	666	5	750	5	750	5	750	5	750	5
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3,111		2,250		15,350		25,350		35,350		35,350	
	Dinas Perindag				3,111		2,250		15,350		25,350		35,350		35,350	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	% Peningkatan sarana distribusi perdagangan	na	na	2,499	10	1,750	30	15,000	60	25,000	100	35,000		35,000	-



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	% Obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	na	na	192	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	% Alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	na	na	250	100	200	100	200	100	200	100	200		200	-
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				8,141											
	Dinas Perindag				8,141				-		-		-		-	
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Daerah	na	na	8,141											-
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				480		400		5,000		5,000		5,000		5,000	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				480		400		5,000		5,000		5,000		5,000	
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah RKT Daerah		100	384	100	400									-
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	% Pembangunan Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal	86,67	93,33	96			100	5,000	100	5,000	100	5,000		5,000	-
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	% Pengembangan Satuan Kawasan Transmigrasi Lokal Daerah														-
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				192,372		168,569		179,126		209,929		172,510		201,632	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				90,411		90,126		87,094		87,118		88,596		110,236	
	Sekretariat Daerah				36,259		35,959		35,959		35,959		35,959		35,979	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	36,259	100	35,959	100	35,959	100	35,959	100	35,959	100	35,979	100
	Sekretariat Daerah : Bagian Organisasi				921		750		750		750		750		2,250	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketercapaian penataan organisasi	na	100	921	100	750	100	750	100	750	100	750	100	2,250	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
Sekretariat Daerah : Bagian Pemerintahan					3,026		3,504		3,246		3,249		3,299		3,359	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dukungan layanan operasional RT	na	100	2,304	100	2,304	100	2,304	100	2,304	100	2,304	100	2,324	100
4.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan prasarana kantor	na	100	627											-
4.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan pembentukan DOB	na	na		100	1,000	100	742	100	745	100	745	100	765	100
4.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah	na	50	94	100	200	100	200	100	200		250	100	270	100
Sekretariat Daerah : Bagian Umum					313		500		500		525		525		545	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	na	100	313	100	500	100	500	100	525	100	525	100	545	100
Sekretariat Daerah : Bagian PBJ					554		554		554		550		550		570	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	% Keberhasilan Pengadaan Barang/ Jasa	na	100	554	100	554	100	554	100	550	100	550	100	570	100
Sekretariat Daerah : Bagian Administrasi Pembangunan							500		500		500		500		520	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	% Koordinasi program pembangunan lingkup Sekretariat Daerah	na		na	100	500	100	500	100	500		500	100	520	100
Sekretariat Daerah : Bagian Kesra					45,959		45,959		42,959		42,959		44,387		64,387	
4.1.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	% Berfungsinya layanan keagamaan dari kebijakan pemerintah daerah	na	100	45,959	100	45,959	100	42,959	100	42,959	100	44,387	100	64,387	100
Sekretariat Daerah : Bagian Perekda					923		400		450		450		450		450	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	% Presentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan koperasi-UKM, pertanian, perikanan, ketahanan pangan yang dikoordinasikan	na	na	923	50	400	50	450	50	450	50	450	50	450	50



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
Sekretariat Daerah : Bagian Hukum					1,595		1,000		1,125		1,125		1,125		1,125	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	% produk hukum daerah yang telah ditetapkan	na	na	1,595	100	1,000	100	1,125		1,125		1,125		1,125	-
Sekretariat Daerah : Bagian Humas dan Protokol					861		1,000		1,050		1,050		1,050		1,050	
4.01.03	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	% Pelayanan keprotokoleran dan kehumasan	na	100	861	100	1,000	100	1,050	100	1,050	100	1,050	100	1,050	100
4.02	SEKRETARIAT DPRD				17,351		16,727		16,847		16,969		17,094		18,388	
Sekretariat DPRD					17,351		16,727		16,847		16,969		17,094		18,388	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	6,623	100	6,000	100	6,120	100	6,242	100	6,367	100	7,640	100
4.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	1,362	100	1,362	100	1,362	100	1,362	100	1,362	100	1,362	100
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	% Perda yang ditetapkan	na	100	9,365	100	9,365	100	9,365	100	9,365	100	9,365	100	9,385	100
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5,314		5,030		4,310		4,342		4,375		6,169	
5.01	Perencanaan				5,314		5,030		4,310		4,342		4,375		6,169	
Bappeda					5,314		5,030		4,310		4,342		4,375		6,169	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	1,180	100	1,300	100	1,300	100	1,300	100	1,300	100	1,560	100
5.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	515	100	515	100	515	100	515	100	515	100	515	100
5.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na		100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	55.24	72.82	1,204	90	1,284	90	1,284	90	1,284	90	1,284	90	1,284	90



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Ekososbud dan Pemerintahan	100	100	829	100	750							100	1,500	100
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen perencanaan Sosbud	100	100	377	100	300	100	315	100	331	100	347		365	-
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen perencanaan Ekonomi	65	70	300	100	300	100	315	100	331	100	348		365	-
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen perencanaan kemiskinan	100	100	1,145	100	750	100	750	100	750	100	750	100	750	100
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				55,442		30,020		40,983		71,541		32,418		36,516	
5.02	KEUANGAN				55,442		30,020		40,983		71,541		32,418		36,516	
	BPKAD				50,503		24,565		34,885		65,217		25,563		29,168	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	9,177	100	6,000	100	6,120	100	6,242	100	6,367	100	7,641	100
5.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	3,953	100	3,953	100	3,953	100	3,953	100	3,953	100	3,953	100
5.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan sarana operasional	100	100	11,692	100	3,000	100	3,000	100	3,000	100	3,000	100	5,000	100
5.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	75	365	100	60	100	60	100	60	100	60		60	-
5.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Tenaga ASN yang memenuhi standar kompetensi	100	100	752	100	752	100	752	100	752	100	752		752	-
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	% Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3.27	3.27	6,062	3.00	3,000	3	3,150	3	3,308	3	3,473		3,647	-



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	% Pengelolaan Aset Baik (% ketersediaan daftar aset tetap, manual, penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)	na	100	3,270	100	1,000	100	1,050	100	1,103	100	1,158	100	1,216	100
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	% Berfungsinya kebijakan Pemerintah Daerah	na	100	5,000	100	5,000	100	5,000	100	5,000	100	5,000	100	5,100	100
5.02.02.xx	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	% Keberhasilan proses Pilkada	na					10,000		40,000						-
5.02.02.xx	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	% Tenaga Kerja Honorer yang tercover dalam BPJS Kesehatan	na	100	15,022	100	1,800	100	1,800	100	1,800	100	1,800	100	1,800	100
	Bapenda				4,940		5,455		6,099		6,324		6,856		7,348	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1,243	100	1,243	100	1,268	100	1,294	100	1,319		1,346	-
5.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	100	100	848	100	848	100	848	100	848	100	848	100	848	100
5.02.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	100	100		100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Kontribusi Pajak Daerah terhadap APBD	3.1	4.16	2,848	4.25	3,333	4.87	3,952	5.75	4,152	6	4,658	6.33	5,124	6
5.03	KEPEGAWAIAN				2,130		3,693		6,870		6,889		6,907		6,927	
	BPSDM				2,130		3,693		6,870		6,889		6,907		6,927	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	371	100	900	100	918	100	936	100	955	100	974	100
5.03.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	241	100	241	100	241	100	241	100	241	100	241	100
5.03.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	na		100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	% PNS berkembang kompetensinya	na	na	1,518	100	2,522	100	5,682	100	5,682	100	5,682	100	5,682	100
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				3,724		3,955		3,979		4,004		4,029		4,054	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				3,724		3,955		3,979		4,004		4,029		4,054	
	Inspektorat				3,724		3,955		3,979		4,004		4,029		4,054	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1,003	100	1,204	100	1,228	100	1,253	100	1,278	100	1,303	100
6.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	258	100	258	100	258	100	258	100	258	100	258	100
6.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	30	100	30	100	30	100	30		30	-
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	% Capaian Target Pengawasan		100	1,444	100	1,444	100	1,444	100	1,444	100	1,444		1,444	-
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Maturitas SPIP		na	1,019	2	1,019	3	1,019	3	1,019	3	1,019	3	1,019	3
7	UNSUR KEWILAYAHAN				10,589		12,087									
7.01	KECAMATAN				10,589		12,087									
7.01	Distrik Manokwari Barat				1,091		1,179									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	227	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	357	100	357	100	357	100	357	100	357		357	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15		15	-



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Barat	na	100	117	100	117	100	117	100	117	100	117		117	-
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kampung/ Kelurahan	na	100	239	100	239	100	239	100	239	100	239		239	-
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung	na	100	151	100	151	100	151	100	151	100	151		151	-
7.01	Distrik Manokwari Selatan				950		946									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	319	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorer	na	100	351	100	351	100	351	100	351	100	351		351	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15		15	-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Selatan	na	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80		80	-
7.01.03	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	% Kinerja trantibum Masyarakat Kampung/ Kelurahan	na	100	120	100	120	100	120	100	120	100	120		120	-
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung	na	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80		80	-
7.01	Distrik Manokwari Timur				486		730									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	71	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	18	100	18	100	18	100	18	100	18		18	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		10	15	10	15		15	100	15		15	-
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kampung/ Kelurahan	na	100	317	100	317	100	317	100	317	100	317		317	-
7.01.03	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	% Kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung	na	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80		80	-
7.01	Distrik Manokwari Utara				427		663									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	79	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	95	100	95	100	95	100	95	100	95		95	-
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15		15	-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Utara	na	100	56	100	56	100	56	100	56	100	56		56	-
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kampung/ Kelurahan	na	100	197	100	197	100	197	100	197	100	197		197	-
7.01	Distrik Masni				1,104		1,183									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	200	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	683	100	683	100	683	100	683	100	683		683	-
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15		15	-
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Selatan	na	100	111	100	75	100	75	100	75	100	75		75	-
7.01.03	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	% Kinerja trantibum Masyarakat Kampung/ Kelurahan	na	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60		60	-
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung	na	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50		50	-
7.01	Distrik Prafi				1,502		1,424									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	393	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	879	100	879	100	879	100	879	100	879		879	-
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15		15	-
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Selatan	na	100	98	100	98	100	98	100	98	100	98		98	-
7.01.03	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Prafi	na	100	96	100	96	100	96	100	96	100	96		96	-
7.01.04	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung	na	100	36	100	36	100	36	100	36	100	36		36	-



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01	Distrik Sidey				948		1,110									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	153	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	587	100	587	100	587	100	587	100	587	100	587	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15	100	15	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Selatan	na	100	77	100	77	100	77	100	77	100	77	100	77	100
7.01.03	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% Kinerja trantibum Masyarakat Kampung/ Kelurahan	na	100	132	100	132	100	132	100	132	100	132	100	132	100
7.01	Distrik Tanah Rubuh				612		797									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	130	100	300	100	300	100	300	100	300		300	-
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	209	100	209	100	209	100	209	100	209		209	-
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15		15	-
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Selatan	na	100	193	100	193	100	193	100	193	100	193		193	-
7.01.03	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Prafi	na	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80		80	-



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01	Distrik Warmare				1,252		1,373									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	194	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	829	100	829	100	829	100	829	100	829	100	829	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	15	100	15	100	15	100	15	100	15	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Manokwari Selatan	na	100	148	100	148	100	148	100	148	100	148	100	148	100
7.01.03	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Distrik Warmare	na	100	55	100	55	100	55	100	55	100	55	100	55	100
7.01.04	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	26	100	26	100	26	100	26	100	26	100	26	100
7.01	Kelurahan Amban				266		329									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	88	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	149	100	149	100	149	100	149	100	149	100	149	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01	Kelurahan Andai				200		241									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	109	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	76	100	76	100	76	100	76	100	76	100	76	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	15	100	15	100	15	100	15	100	15	100	15	100
7.01	Kelurahan Manokwari Barat				182		266									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	66	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	96	100	96	100	96	100	96	100	96	100	96	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100
7.01	Kelurahan Manokwari Timur				350		347									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	153	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honoror	na	100	131	100	131	100	131	100	131	100	131	100	131	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	66	100	66	100	66	100	66	100	66	100	66	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01	Kelurahan Padarni				318		382									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	86	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	132	100	132	100	132	100	132	100	132	100	132	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01	Kelurahan Pasir Putih				102		193									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	59	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	24	100	24	100	24	100	24	100	24	100	24	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	19	100	19	100	19	100	19	100	19	100	19	100
7.01	Kelurahan Sanggeng				194		252									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	92	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	68	100	68	100	68	100	68	100	68	100	68	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	35	100	35	100	35	100	35	100	35	100	35	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
7.01	Kelurahan Sowi				256		269									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	162	100	162	100	162	100	162	100	162	100	162	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	77	100	77	100	77	100	77	100	77	100	77	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	17	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
7.01	Kelurahan Wosi				348		402									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	na	100	96	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100
7.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	212	100	212	100	212	100	212	100	212	100	212	100
7.01.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	% Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	na	100	40	100	40	100	40	100	40	100	40	100	40	100
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				6,980		6,532		6,756		6,780		6,805		7,056	
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				6,980		6,532		6,756		6,780		6,805		7,056	
8.01	Badan Kesatuan Bangsa				6,980		6,532		6,756		6,780		6,805		7,056	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1,184	100	1,184	100	1,208	100	1,232	100	1,256	100	1,508	100
8.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Kinerja Pegawai Honorar	na	100	89	100	89	100	89	100	89	100	89	100	89	100
8.01.01.xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	na	100		100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	% peningkatan pemahaman ideologi dan karakter kebangsaan	na	100	445	100	400	100	400	100	400	100	400	100	400	100
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	% pengembangan etika partai politik dan lembaga pendidikan	na	100	2,179	100	2,179	100	2,179	100	2,179	100	2,179	100	2,179	100
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% ormas yang telah memenuhi syarat operasional	na	100	102	100	300	100	500	100	500	100	500	100	500	100
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	% peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya	na	100	267	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	% peningkatan kewaspadaan daerah dalam penanganan konflik sosial	na	100	2,714	100	2,250	100	2,250	100	2,250	100	2,250	100	2,250	100



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama, namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial, seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi



dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan, secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Manokwari tahun 2021- 2026 dapat diuraikan dalam tabel 8.1 sebagai berikut.



Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manokwari

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.	PDRB ADHK (Rupiah)	6.591.506,50	6.648.329,27	6.770.145,47	6.965.020,24	7.159.895,01	7.402.043,86	7.717.414,42	6.591.506,50
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-4,86	0,86	1,83	2,88	2,80	3,38	4,26	4,26
3.	PDRB per Kapita (juta rupiah)	34,21	34,71	35,21	35,76	36,21	36,21	36,50	36,50
4.	Persentase penduduk miskin	20,14	20,14	18,14	16,14	14,14	12,14	10,14	10,14
5.	IPM	72,01	72,02	72,04	72,04	72,05	72,06	72,06	72,06
Fokus Kesejahteraan Masyarakat									
1	Pendidikan								
1.1	Rata-rata Lama Sekolah	8,68	8,68	8,69	8,70	8,80	8,90	9,00	9,00
1.2	APM SD/MI/SDLB	92,71	93	93,5	94	94,5	95	96	96,00
1.3	APM SMP/MTS	76,8	76,8	77	78	79	80	81	81,00
2	Kesehatan								
2.1	Usia Harapan Hidup	68,68	68,80	68,90	68,92	68,95	68,99	69,00	69,00
2.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	33							
2.3	Persentase balita gizi buruk	35,8	35	34	33	32	31	30	30
Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
1	Jumlah pagelaran seni budaya	n.a	na	10	20	20	20	20	20
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	9	9	9	9	9	9	9	9
3	% Berfungsinya layanan keagamaan dari kebijakan pemerintah daerah	Na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Layanan Urusan Wajib									
1	Pendidikan								
1.1	Pendidikan dasar								
1.1.1	Rasio Murid-Sekolah	40	29,84	29,84	29,84	29,84	29,84	29,84	29,84
1.1.2	Rasio Murid-Guru	23	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
1.2	Pendidikan Menengah								
1.2.1	Rasio Murid-Sekolah	213	24,95	24,95	24,95	24,95	24,95	24,95	24,95
1.2.2	Rasio Murid-Guru	13							
1.5	Jumlah guru bersertifikasi	542	596	656	721	793	872	872	872
1.7	Jumlah sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum lokal								



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
2	Kesehatan							
2.1	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu	85	85	86	87	88	88	89
2.2	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
2.3	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,47	0,45	0,46	0,48	0,50	0,51	0,51
2.4	Jumlah Posyandu	213	235	235	235	235	235	235
2.5	Jumlah Dokter Umum	40	47	54	61	68	75	83
2.6	Jumlah Paramedis	524	534	544	554	564	574	584
2.7	Cakupan pelayanan asuransi kesehatan masyarakat tidak mampu	36,13	40	60	75	80	85	90
3	Pekerjaan Umum							
3.1	Cakupan layanan air bersih/Minum	56%	58%	60%	61%	62%	63%	64%
3.2	Jumlah Ketidaksiharian Arah Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	96	80	50	30	20	15	10
3.3	Jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	550 Km	552.28 Km	552.78 Km	553 Km	554 Km	554.5 Km	555 Km
3.4	Persentase Jalan yang baik	43,45	47,15	50,58	54,55	58,25	61,95	62
3.5	Panjang Jalan	1,081.53		1,091	1,101	1,111	1,131	1,151
4	Perumahan							
4.1	Persentase permukiman layak huni	96,00	96,30	96,60	96,90	97,20	97,50	97,70
4.2	Persentase RT berakses air bersih	80	82	85	87,75	90	92,5	92,5
4.3	Jumlah rumah yang diperbaiki	na	30	50	50	75	100	100
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Rasio layanan sampah	74	75	75	83	83	83	90
5.2	Jumlah kasus pencemaran dan perusakan lingkungan	n.a	1	1	1	1	1	5
5.3	Persentase penegakan hukum lingkungan	n.a	100	100	10	100	100	100
6	Penataan Ruang							
6.1	Persentase Luasan RTH publik	5,66	10	10	15	20	25	30
7	Pertanahan							
7.1	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	na	100	100	100	100	100	100
8	Kependudukan dan Catatan Sipil							
8.1	% Penduduk usia KTP yang memiliki KTP	80	82	85	90	95	100	100
8.2	% Penduduk yang memiliki akta kelahiran	n.a	50	55	60	65	70	70
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
9.1	Indeks Pemberdayaan Gender	83,69	83,69	85	85	90	90	95
10	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
10.1	Jumlah peserta KB	7.563	7.613	7.663	7.713	7.763	7.813	7.863
10.2	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	20,14	20,14	18,14	16,14	14,14	12,14	10,14
11	Ketengakerjaan							



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11.1	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	42,60	9,46	13,19	18,08	25,28	33,19	42,30	42,30
11.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,47	7,3	7	6,8	6,5	6,2	6	6
12	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
12.1	Jumlah UMKM	1.500	1.650	1800	1950	2100	2250	2400	2400
13	Kepemudaan dan Olahraga								
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	41,67	100	100	100	100	100	100	100
14	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
14.1	Persentase organisasi yang sudah melakukan kemitraan dalam mengembangkan wawasan kebangsaan	Na							
15	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
15.1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	51,21	52	60	70	72	75	75	75
15.2	Predikat kinerja pemerintah daerah	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	BB
15.3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.4	Indeks Kepuasan Masyarakat		na	<50	52	60	68	76	76
15.5	Jumlah laporan keuangan OPD yang memenuhi standar	Na	10	20	30	36	36	36	36
15.6	Persentase Penegakan perda	70	75	75	80	80	85	85	85
15.7	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan berbasis akrual tepat waktu	na	10	20	30	36	36	36	36
15.8	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	55,34	72,82	80	80	85	90	95	95
15.9	Tindak lanjut temuan	70,68%	71,04%	72,04%	74,03%	76,02%	78,01%	80,00%	80,00%
15.10	Persentase kasus pelanggaran PNS yang tertangani	0,06%	0,23%	0,17%	0,12%	0,09%	0,06%	0,00%	0,00%
15.11	Jumlah peraturan daerah yang dibatalkan	Na	0	0	0	0	0	0	0
15.12	Jumlah peserta pendidikan kedinasan yang lulus	na	na	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.14	Jumlah auditor yang bersertifikat	9	9	12	12	12	12	12	12
15.15	Jumlah PD yang menyampaikan laporan evaluasi triwulanan	37	37	37	37	37	37	37	37
15.17	Jumlah PD yang mampu menyusun Renstra dengan Baik dan benar	37	37	37	37	37	37	37	37
15.18	Jumlah PD dan menyampaikan updating data	37	37	37	37	37	37	37	37
16	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
16.1	Persentase PKK aktif	55,98	55,98	60,87	80,43	82,61	94,67	100,00	100,00
16.2	Persentase Desa yang mandiri	0	1	2	3	4	4	4	4
16.3	Persentase Lembaga ekonomi masyarakat pedesaan yang aktif	n.a	1,0%	1,0%	2,5%	2,5%	3,0%	3,0%	3,0%
16.4	Jumlah Lembaga desa berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa	n.a	100	120	130	140	150	150	150
16.5	Persentase desa yang telah menyampaikan laporan pemerintahan kampung yang baik	n.a	5	10	15	20	25	30	30



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
17	Lingkungan Hidup								
17.1	Persentase Penanganan Sampah	73.95	73.95	78	78	83	83	90	90
18	Sosial								
18.1	% Warga Miskin yang tercover asuransi	15	15	20	20	25	25	30	30
19	Penanaman modal								
19.1	Jumlah investor berskala nasional/internasional	3	3	3	3	4	4	4	4
20	Kebudayaan								
20.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	na	2	4	6	8	10	12	0
21	Kepemudaan dan Olahraga								
21.1	Jumlah organisasi pemuda	60	12	12	12	12	12	12	12
21.2	Jumlah organisasi olahraga	31	31	31	31	31	31	31	31
21.3	Jumlah kegiatan pemuda	n.a	4	4	4	4	4	4	16
21.4	Jumlah kegiatan olahraga	n.a	4	4	4	4	4	4	16
22	Komunikasi dan Informatika								
22.1	Indeks SPBE	na	1,20	1,60	>1,8	<2,60	>2,60	3,50	3,5
Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1	Pertanian								
1.1	Kontribusi sektor pertanian	14,42	14,28	14,30	14,32	14,33	14,25	14,36	
1.2	Produktivitas tanaman padi (Ton/Ha)								
1.3	Nilai Tukar Petani	101,08	101,58	102,08	102,58	103,08	103,58	104,08	104,08
1.4	Produksi sektor pertanian (ton)	20.350	20.938	21.508	22.100	22.693	23.268	23.865	23.865
1.5	Jumlah penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	59	60	65	70	75	80	85	85
1.6	LPE Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	-1,13	0,02	0,13	1,5	2,3	2,8		
2	Pariwisata								
2.1	Persen peningkatan kunjungan wisata	78,715	5	10	10	15	15	15	15
3	Kelautan dan Perikanan								
3.1	Persentase kawasan budidaya laut dikembangkan								
3.2	Jumlah produksi perikanan (ton)	20.203	22.223	24.445	26.890	29.579	32.538	32.538	32.538
5	Perdagangan								
5.1	Jumlah perizinan bidang perdagangan dalam negeri	n.a							
5.2	Jumlah pedagang kaki lima yang dibina	n.a	n.a	50	55	60	65	100	100
6	Perindustrian								
6.1	Jumlah investasi industri perdagangan umum (Rp)	n.a	2	3	4	5	6	6	6
6.2	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur ekonomi daerah	315.726,80	335.857,90	355.492,06	378.816,97	402.141,87	472.740,86	458.764,83	458.764,83



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6.3	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	2,4	2,40	2,41	2,43	2,45	2,46	2,46	2,46
6.4	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur ekonomi daerah (%)	1,15	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,19	1,19
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1	Penataan Ruang								
1.1	Persentase penggunaan lahan (%)	16.35	16.355	16.358	16.36	16.365	16.368	16.37	16.37
1.2	Jumlah titik banjir	10	8	6	6	4	4	3	3
Fokus Sumber Daya Manusia									
1	Ketenagakerjaan								
1.1	Angka Ketergantungan	45,29	45	40	40	38	38	35	35



BAB IX P E N U T U P

Penyusunan RPJMD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD juga menjadi acuan bagi penyusunan RKPD sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peranan strategis dalam pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang menjabarkan visi, misi Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Manokwari, RPJPD Provinsi dan RPJM Nasional.

RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Dokumen RPJMD 2021-2026 merupakan pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang fase keempat yang berujung pada **“Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, Berdaya Saing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera”**.

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari merupakan dokumen perencanaan periode tahun 2021-2026. Untuk itu, diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada tahun 2026. Program-program pada tahun 2026 diarahkan guna menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap



Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026 tetap mengacu pada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan ditujukan agar terciptanya koordinasi, sinergi, konsistensi serta keberlanjutan program, sehingga efektif dan efisien baik dalam pembiayaan maupun waktu. Dokumen RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021-2026.

Berkenaan dengan hal tersebut maka ditetapkanlah kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari berkewajiban melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2021-2026, melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta melakukan kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha;
2. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026;
3. RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manokwari guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Manokwari;
4. Penyusunan RKPD harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan secara berjenjang;
5. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Manokwari menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
6. RKPD Kabupaten Manokwari merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
7. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2025 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026;



8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari merupakan dasar evaluasi dalam laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

Manokwari, 4 Oktober 2021

BUPATI MANOKWARI,

HERMUS INDOU, S.IP, MH